

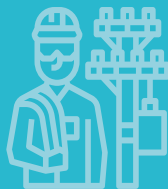
Transformasi

# ***Haleyora Power 2.0***

dalam Menyongsong

# **Era Revolusi Industri 4.0**

**Haleyora Power Transformation 2.0 in Embracing Industrial Revolution 4.0**



# **2019**

Laporan Tahunan  
Annual Report

# Transformasi Haleyora Power 2.0 dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0

## Haleyora Power Transformation 2.0 in Embracing Industrial Revolution 4.0

Tahun 2019 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan usaha Haleyora Power. Berbagai tantangan di masa transisi secara bertahap telah teratasi. Keunggulan operasi didukung oleh upaya efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki menghasilkan pertumbuhan pangsa pasar dan pencapaian performa keuangan yang melampaui ekspektasi.

Di awal tahun, kami mencanangkan transformasi Haleyora Power 2.0 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh Insan Haleyora untuk siap menghadapi perubahan yang cepat dari lingkungan bisnis serta kebutuhan pelanggan di era revolusi industri 4.0. Kami meluncurkan produk baru aplikasi ListriQu sebagai inovasi layanan digital untuk mengantisipasi disrupsi teknologi sekaligus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan. Kami bekerja cepat untuk melengkapi fitur-fitur layanan ListriQu dengan berbagai kemudahan serta memperluas cakupan wilayah pemasarannya.

Untuk meningkatkan dan menyempurnakan model operasi dan kualitas layanan, Perusahaan menerapkan *best practice O&M end-to-end process* distribusi dan perbaikan proses bisnis. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meneguhkan posisi kami sebagai pemimpin di dalam industri operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang mampu menciptakan diferensiasi kualitas layanan dan memberikan nilai tambah layanan kepada PLN. Selain itu, kami juga telah berkomitmen untuk mencapai kinerja keselamatan nihil kecelakaan (*zero accident*) melalui penerapan budaya *safety, integrity, quality* yang konsisten.

Setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari dinamika usaha yang memotivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjaga nilai-nilai integritas dan profesionalisme serta senantiasa beroperasi dengan praktik tata kelola korporasi terbaik. Dengan fundamental yang kuat, Haleyora Power siap mengembangkan peran dari *service provider* menjadi *asset operator* untuk meraih pertumbuhan di masa depan.



The year 2019 was a crucial milestone in Haleyora Power's business journey. Challenges in the transition period were gradually resolved. Operational excellence supported by efficiency and optimization of available resources resulted in market share growth and achievement of exceptional financial performance.

At the beginning of the year, we announced Haleyora Power transformation 2.0 as a shared commitment of all Haleyora personnel to face the rapid changes in the business environment and customer needs in industrial revolution 4.0. We launched a new application, ListriQu, as a digital service innovation to anticipate technology disruption while improving customer service and convenience. We are working swiftly to complete ListriQu service features with various conveniences and to expand the scope of its marketing area.

To improve and refine our operating model and service quality, the Company implements best practices of end-to-end O&M distribution process and business process re-engineering. This initiative aims to strengthen our position as a leader in the operation and maintenance of transmission and distribution networks that is able to differentiate service quality and to provide added value to PLN. In addition, we are also committed to achieving zero accident safety performance by implementing consistent culture of safety, integrity, quality.

Every challenge that we encounter is part of the business dynamics that motivates us to perform better in maintaining the values of integrity and professionalism and to continue operating with the best corporate governance practices. With strong fundamentals, Haleyora Power is ready to develop the role of a service provider to become an asset operator in order to achieve future growth.

# Daftar Isi

## Contents

### 01 Pendahuluan

#### Introduction

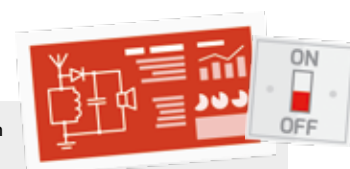
- 4 Ikhtisar Kinerja Utama  
Key Performance Highlights
- 6 Ikhtisar Keuangan  
Financial Highlights
- 9 Ikhtisar Pencatatan Saham  
Share Listing Highlights
- 9 Ikhtisar Efek Lainnya  
Other Shares Highlights
- 10 Peristiwa Penting Tahun 2019  
Event Highlights in 2019



### 14 Laporan Manajemen

#### Management Report

- 16 Laporan Dewan Komisaris  
Report from the Board of Commissioners
- 26 Laporan Direksi  
Report from the Board of Directors
- 41 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019  
Statement Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors Relating to the Responsibility on the 2019 Annual Report



### 42 Profil Perusahaan

#### Company Profile

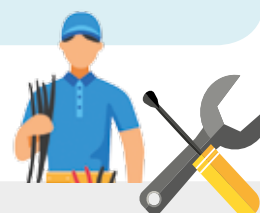
- 44 Identitas Perusahaan  
Company Identity
- 46 Sekilas Perusahaan  
Company in Brief
- 50 Jejak Langkah  
Milestones
- 52 Bidang Usaha  
Business Sectors
- 54 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan  
Objective, Target, and Strategy of the Company
- 58 Struktur Organisasi  
Organizational Structure
- 60 Visi dan Misi Perusahaan  
Vision and Mission of the Company
- 62 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan  
Corporate Values and Culture
- 64 Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris  
Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners
- 67 Identitas dan Riwayat Singkat Direksi  
Identity and Brief Profile of the Board of Directors
- 70 Profil Sumber Daya Manusia  
Profile of Human Resources
- 74 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham  
Shareholders Structure and Composition
- 74 Struktur Grup Perusahaan  
Structure of the Company Group
- 75 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan  
The Company Supporting Institutions and Professions
- 76 Daftar Entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Patungan  
List of Subsidiaries, Associated, and Joint Ventures Company
- 78 Wilayah Operasi  
Operational Map
- 80 Situs Perusahaan  
The Company Website
- 81 Penghargaan dan Sertifikasi  
Award and Certification



### 82 Pembahasan dan Analisis Manajemen

#### Management Discussion and Analysis

- 84 Pembahasan dan Analisis Manajemen  
Management Discussion and Analysis
- 102 Tinjauan Kinerja Keuangan  
Financial Performance Review
- 130 Pengelolaan *Human Capital*  
Human Capital Management
- 142 Teknologi Informasi  
Information Technology



## 146 Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance



- |            |  |            |   |
|------------|--|------------|---|
| <b>149</b> | Pedoman dan Kebijakan GCG<br>GCG Guidelines and Policies   | <b>195</b> | Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi<br>Diversity Policy in Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors |
| <b>150</b> | Tujuan Penerapan GCG<br>Objectives of GCG Implementation   | <b>196</b> | Komite Audit<br>Audit Committee   |
| <b>161</b> | Struktur Tata Kelola<br>Governance Structure   | <b>200</b> | Komite GCG & Manajemen Risiko<br>GCG & Risk Management Committee  |
| <b>164</b> | Dewan Komisaris<br>Board of Commissioners  | <b>206</b> | Sekretaris Dewan Komisaris<br>Secretary of the Board of Commissioners   |
| <b>174</b> | Direksi<br>Board of Directors  | <b>208</b> | Corporate Secretary<br>Corporate Secretary  |
| <b>177</b> | Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi<br>Board Manual   | <b>211</b> | Fungsi Audit Internal (Satuan Pengawas Internal)<br>Internal Audit Function   |
| <b>178</b> | Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi<br>Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors   | <b>215</b> | Akuntan Publik<br>Public Accountant   |
| <b>186</b> | Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi<br>Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors  | <b>216</b> | Manajemen Risiko<br>Risk Management   |
| <b>187</b> | Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi<br>Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings  | <b>226</b> | Sistem Pengendalian Internal<br>Internal Control System   |
| <b>194</b> | Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali<br>Information on Major and Controlling Shareholder  | <b>227</b> | Perkara Penting<br>Legal Issues   |
| <b>195</b> | Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali<br>Affiliated Relationship among the Board of Directors, the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholder | <b>227</b> | Akses Informasi dan Data Perusahaan<br>Access to Corporate Information and Data   |
|            |  | <b>228</b> | Pedoman Perilaku<br>Code of Conduct   |
|            |  | <b>229</b> | Sistem Pelaporan Pelanggaran<br>Whistleblowing System   |

## 232 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### Corporate Social Responsibility



- |            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| <b>234</b> | Komitmen<br>Commitment   | <b>242</b> | Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)<br>Corporate Social Responsibility Program Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3) |
| <b>239</b> | Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)<br>Corporate Social Responsibility Program Related to Human Rights | <b>258</b> | Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Tanggung Jawab kepada Konsumen<br>Corporate Social Responsibility Program Related to Consumer Protection  |
| <b>241</b> | Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Lingkungan Hidup<br>Corporate Social Responsibility Program Related to Environment        | <b>260</b> | Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan<br>Corporate Social Responsibility Program Related to Social and Community Development                               |
| <b>241</b> | Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Aspek Operasi yang Adil<br>Corporate Social Responsibility Program Related to Fair Operations    |            |  |

## 263 Laporan Keuangan Audit

### Audited Financial Statements



# Ikhtisar Kinerja Utama

## Key Performance Highlights



# 21.3%

**Pertumbuhan Pendapatan**  
Revenues Growth

**Pertumbuhan pendapatan dari Rp2.073,32 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.513,91 miliar.**

Revenues growth from Rp2,073.32 billion in 2018 to Rp2,513.91 billion.



# 29.3%

**Laba Tahun Berjalan**  
Profit for the Year

**Laba tahun berjalan naik dari Rp138,68 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp179,32 miliar.**

Profit for the year increased from Rp138.68 billion in 2018 to Rp179.32 billion.



# 38%

**Pangsa Pasar Penugasan pada tahun 2019**  
Market Share of Assignment in 2019

**Melaksanakan 122 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi dengan dukungan 31.372 tenaga kerja (HP Group)**

Carried out 122 assignment contracts of securing service of distribution and transmission operation and maintenance supported with 31,372 workers (HP Group)



**Rp69.34**  
miliar/billion

**Dividen dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2018 yang dibagikan kepada Pemegang Saham.**

Dividend from retained earnings as of December 31, 2018 distributed to the Company's shareholders.



**86.18%**

**Hasil penilaian GCG periode tahun 2019, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 80,359%.**

2019 GCG assessment result, an increase compared to 2018 of 80.359%.



**97.96%**

**Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) tahun 2019.**

Achievement of Service Level Agreement (SLA) in 2019.



# Ikhtisar Keuangan

## Financial Highlights

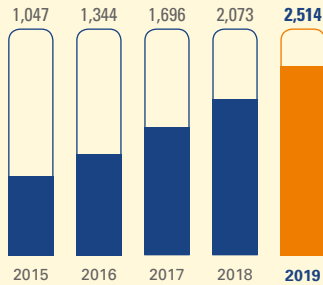
(dalam jutaan Rupiah kecuali disebutkan lain)

(in million Rupiah unless stated otherwise)

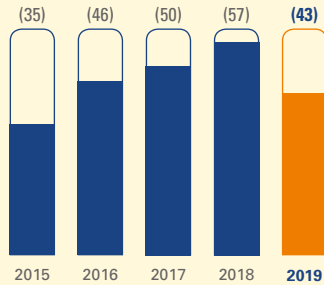
	2019	2018	2017	2016	2015	
<b>LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						<b>PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pendapatan	2,513,910	2,073,318	1,696,226	1,343,560	1,047,093	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(2,225,980)	(1,821,999)	(1,487,314)	1,171,780)	(907,881)	Cost of Revenues
Beban Usaha	(43,010)	(56,618)	(49,566)	(46,180)	(34,718)	Operating Expenses
Laba sebelum Pajak	244,920	194,701	159,346	125,600	104,494	Income before Tax
Beban Pajak	(65,598)	(56,020)	(36,875)	(23,946)	(27,573)	Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	179,322	138,681	122,471	101,654	76,921	Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						Profit for the Year Attributable to:
– Pemilik Entitas Induk	177,350	135,254	117,145	93,683	N/A	– Owners of the Parent
– Kepentingan Non-Pengendali	1,972	3,427	5,326	7,971	N/A	– Non-Controlling Interest
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
– Pemilik Entitas Induk	171,273	129,827	126,183	152,186	N/A	– Owners of the Parent
– Kepentingan Non-Pengendali	1,972	3,427	5,326	7,971	N/A	– Non-Controlling Interest
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	173,245	133,254	131,509	160,157	N/A	Total Comprehensive Income for the Year
<b>POSISI KEUANGAN</b>						<b>FINANCIAL POSITION</b>
Aset Lancar	831,622	715,865	637,767	484,557	383,322	Current Assets
Aset Tidak Lancar	135,361	109,041	80,726	64,121	75,035	Non-Current Assets
Total Aset	966,983	824,906	718,493	548,678	458,357	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	97,663	93,214	89,129	62,655	63,639	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	161,925	118,382	90,735	78,479	147,646	Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	259,588	211,596	179,864	141,134	211,285	Total Liabilities
Total Ekuitas	707,395	613,310	538,629	407,544	247,072	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	966,983	824,906	718,493	548,678	458,357	Total Liabilities and Equity
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	48,888	47,476	42,698	38,093	N/A	Investment Associates and Joint Ventures
<b>RASIO KEUANGAN</b>						<b>FINANCE RATIO</b>
Rasio Beban Pokok Pendapatan (%)	88.55	87.88	87.68	87.21	86.70	Cost of Revenues Ratio (%)
Rasio Operasi (%)	90.26	90.61	90.61	87.68	90.02	Operating Ratio (%)
Rasio Kas (Kali)	3.13	4.11	3.44	4.25	3.07	Cash Ratio (Times)
Rasio Lancar (Kali)	8.23	7.68	7.16	7.73	6.02	Current Ratio (Times)
Rasio Utang terhadap Aset (%)	26.85	25.65	25.03	25.72	46.10	Debt to Asset Ratio (DAR) (%)
Rasio Utang terhadap Modal (%)	36.70	34.50	33.39	34.63	85.52	Debt to Equity Ratio (DER) (%)
Margin EBITDA (%)	9.86	9.42	9.19	8.92	9.54	EBITDA Margin (%)
Margin Operasi (%)	9.74	9.36	9.41	9.61	9.70	Operation Margin (%)
Margin Bersih (%)	7.13	6.69	7.22	7.57	7.35	Net Margin (%)
Tingkat Pengembalian Aset (%)	18.54	16.81	17.05	18.53	16.78	Return on Assets (ROA) (%)
Tingkat Pengembalian Modal (%)	22.74	24.94	22.74	24.94	31.13	Return to Equity (ROE) (%)
Umur Piutang (Hari)	45	40	38	32	36	Collection Period (Day)



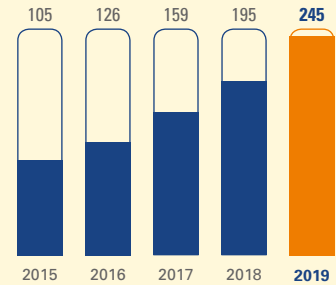
**Pendapatan (Rp miliar)**  
Revenues (Rp billion)



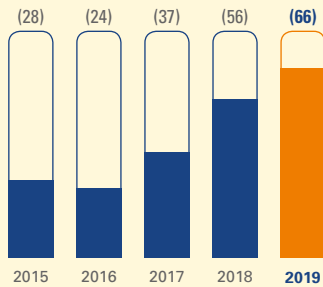
**Beban Usaha (Rp miliar)**  
Operating Expenses (Rp billion)



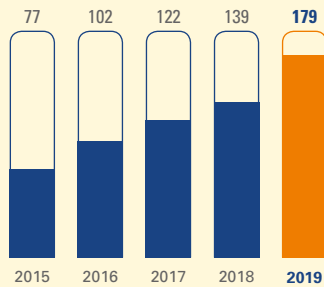
**Labanya sebelum Pajak (Rp miliar)**  
Income before Tax (Rp billion)



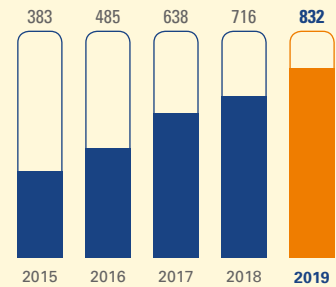
**Beban Pajak (Rp miliar)**  
Tax Expenses (Rp billion)



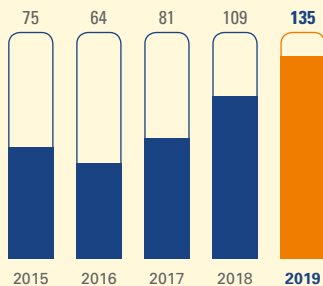
**Labanya Tahun Berjalan (Rp miliar)**  
Income for the Year (Rp billion)



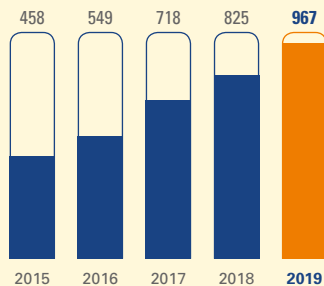
**Aset Lancar (Rp miliar)**  
Current Assets (Rp billion)



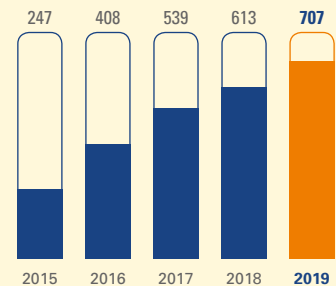
**Aset Tidak Lancar (Rp miliar)**  
Non-Current Assets (Rp billion)



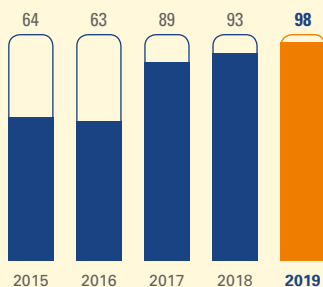
**Total Aset (Rp miliar)**  
Total Assets (Rp billion)



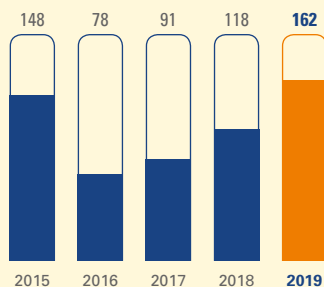
**Total Ekuitas (Rp miliar)**  
Total Equity (Rp billion)



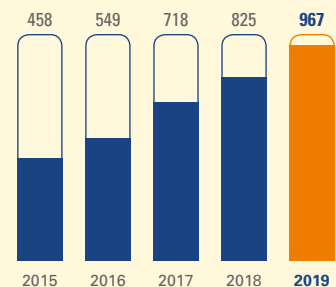
**Liabilitas Jangka Pendek (Rp miliar)**  
Current Liabilities (Rp billion)



**Liabilitas Jangka Panjang (Rp miliar)**  
Non-Current Liabilities (Rp billion)

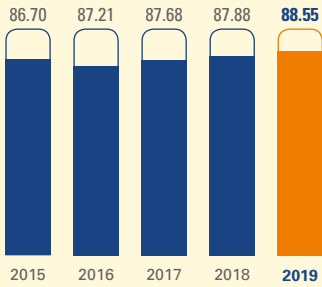


**Total Liabilitas dan Ekuitas (Rp miliar)**  
Total Liabilities and Equity (Rp billion)

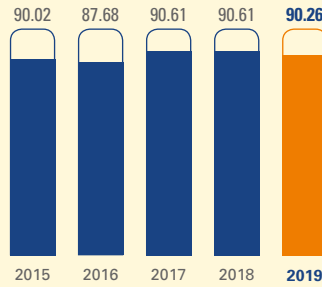




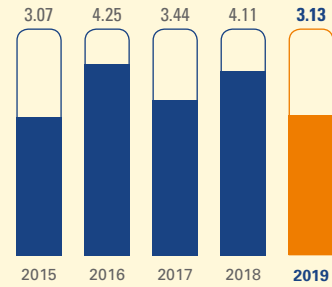
**Rasio Beban Pokok Pendapatan (%)**  
Cost of Revenues (%)



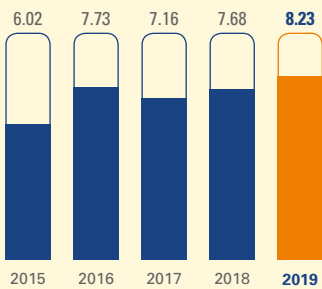
**Rasio Operasi (%)**  
Operating Ratio (%)



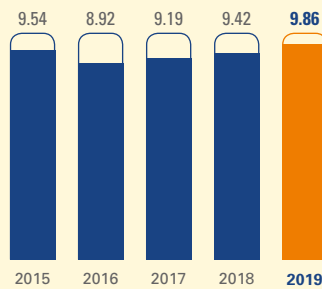
**Rasio Kas (kali)**  
Cash Ratio (times)



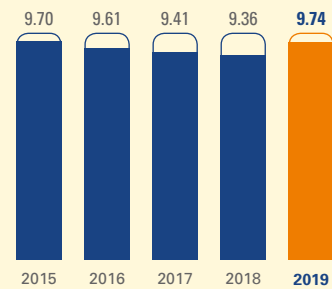
**Rasio Lancar (kali)**  
Current Ratio (times)



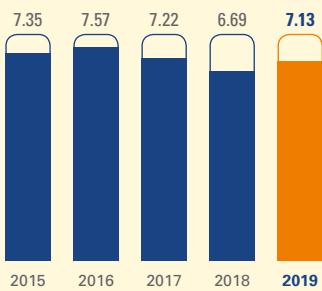
**Marjin EBITDA (Rp miliar)**  
EBITDA Margin (Rp billion)



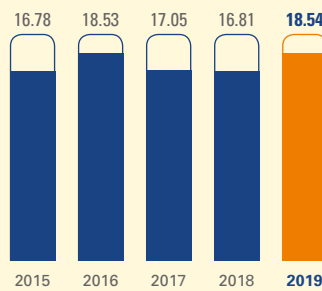
**Marjin Operasi (%)**  
Operating Margin (%)



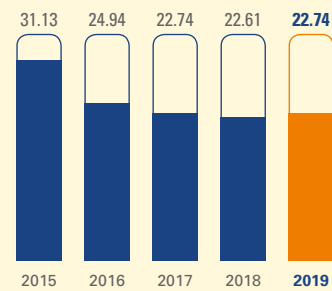
**Marjin Laba Bersih (%)**  
Net Profit Margin (%)



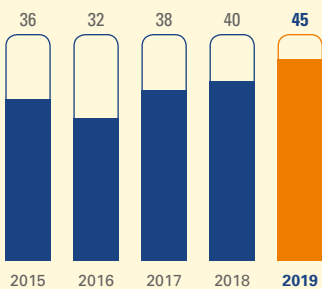
**Tingkat Pengembalian Aset (%)**  
Return on Assets (ROA) (%)



**Tingkat Pengembalian Modal (%)**  
Return on Equity (ROE) (%)



**Umur Piutang (hari)**  
Collection Period (days)



# Ikhtisar Pencatatan Saham

## Share Listing Highlights

Hingga tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik dan tidak terdaftar di bursa efek.

Up to 2019, the Company did not issued or publicly trade its shares and is not listed on the stock exchange.

# Ikhtisar Efek Lainnya

## Other Shares Highlights

Hingga tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan dan/atau mencatatkan efek lainnya di bursa manapun.

Up to 2019, the Company did not issued or listed other securities on any stock exchange.

# Peristiwa Penting Tahun 2019

## Event Highlights in 2019



### 9 Januari January

Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dengan keputusan menyetujui dan mengesahkan RKAP 2019 dan Kontrak Manajemen/KPI 2019.

The Company held General Meeting of Shareholders (GMS) for 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) that approved and ratified 2019 RKAP and 2019 Management Contract/KPI.

### 11 Januari January



Kunjungan PT GMF AeroAsia Tbk ke Kantor Pusat Haleyora Power dalam rangka *benchmarking/sharing session* untuk mengetahui sistem pengelolaan alih daya di Perusahaan.

PT GMF AeroAsia Tbk visited Head Office of Haleyora Power for benchmarking/sharing session on outsourcing management system in the Company/2019 KPI.

### 30 Januari January



PT Haleyora Powerindo menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dengan keputusan menyetujui dan mengesahkan RKAP 2019 dan Kontrak Manajemen/KPI 2019.

PT Haleyora Powerindo held General Meeting of Shareholders (GMS) for 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) that approved and ratified 2019 RKAP and 2019 Management Contract/KPI.

### 4 Februari February



Opening meeting BPKP dalam rangka memulai pelaksanaan penilaian penerapan GGC anak perusahaan PLN.

Opening of BPKP meeting to commence GGC assessment on PLN's subsidiaries.

### 17 Februari February



Peluncuran aplikasi ListriQu dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Direktur Regional Sulawesi PT PLN (Persero), EVP ORJBB PT PLN (Persero), GM PLN UID DKI Jakarta, GM PLN UID Banten, Direktur anak perusahaan, Yayasan Lembaga Konsimen (YLKI), asosiasi dan mitra kerja Perusahaan.

The launch of ListriQu application attended by the Company's the Board of Commissioners and the Board of Directors, Sulawesi Regional Director of PT PLN (Persero), EVP ORJBB of PT PLN (Persero), GM PLN UID DKI Jakarta, GM PLN UID Banten, Directors of subsidiaries, Consumer Institute Foundation (YLKI), as well as associations and partners of the Company.

### 5-6 Maret March



Perusahaan menyelenggarakan *Workshop* AMC bertempat di ICE BSD yang dihadiri oleh 54 peserta (5 Maret) dan 40 peserta (6 Maret) antara lain Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero), Direktur anak perusahaan, Direksi dan EVP Haleyora Power serta para undangan dari PT PLN (Persero). *Workshop* diisi dengan pembicara Aznan Ezrazie Ariffin, PhD dan Mohd. Faris bin Ariffin, MSc. (TNB Malaysia, Umar Khayam, PhD (Institut Teknologi Bandung), Muhamad Reza, PhD (Solovina International) dan Yohan Suryanto, PhD (Universitas Indonesia).

The Company held AMC Workshop at ICE BSD attended by 54 participants (March 5) and 40 participants (March 6) including West Java Regional Director of PT PLN (Persero), Directors of subsidiaries, Directors and EVP of Haleyora Power and invited guests from PT PLN (Persero). The workshop presented prominent speakers, including Aznan Ezrazie Ariffin, PhD and Mohd. Faris bin Ariffin, MSc. (TNB Malaysia), Umar Khayam, PhD (Bandung Institute of Technology), Muhamad Reza, PhD (Solovina International) and Yohan Suryanto, PhD (University of Indonesia).



### 12 Maret March

Perusahaan melakukan kunjungan kerja ke PT Chevron Pasific Indonesia di Duri, Riau, dalam rangka *benchmarking* implementasi dan pengelolaan serta budaya kerja. Kunjungan tersebut diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, dan EVP Haleyora Power.

The Company visited PT Chevron Pacific Indonesia in Duri, Riau, for benchmark of implementation and management of work culture. The visit involved the Board of Commissioners, the Board of Directors, Corporate Secretary, and EVP of Haleyora Power.



### 13 Juni June

Perusahaan menyelenggarakan RUPS Laporan Perhitungan Tahunan (LPT) Tahun 2018 dengan keputusan menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.

The Company held GMS for 2018 Annual Calculation Report (LPT) that approved and ratified the Company's 2018 Annual Calculation Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2018 Financial Year and granted full release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for Management and Supervision that were carried out during 2018 financial year.

### 19 Maret March



Pemegang Saham PT Haleyora Power mengeluarkan Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan Pengambilalihan Saham Minoritas Perorangan PT Haleyora Powerindo.

Shareholders of PT Haleyora Power issued Circular GMS Decision Approving Acquisition of Individual Minority Shares of PT Haleyora Powerindo.

### 21-22 Maret March



Rapat *Assessment* GCG PLN Group bersama BPKP untuk sinkronisasi dan penyesuaian persepsi aspek penilaian antara Tim Asesor BPKP dan PLN Pusat.

GCG Assessment Meeting attended by PLN Group and BPKP to synchronize and align the perceptions of assessment aspects between BPKP assessor team and PLN Head Office.

### 16 Juli July



Direktur Operasi dan manajemen Perusahaan menindaklanjuti nota kesepahaman tentang PV *Rooftop* dengan melakukan kunjungan ke PT LEN Industri (Persero) dan PT Surya Energi Infotama (SEI) di Bandung.

The Company's Director of Operations and management followed up on memorandum of understanding on PV Rooftop by visiting PT LEN Industri (Persero) and PT Surya Energi Infotama (SEI) in Bandung.

### 30 Agustus August



Penandatanganan Deklarasi Komunitas Peduli Kelistrikan sebagai bagian dari kegiatan CSR Inspeksi Instalasi Listrik Pelanggan yang dilaksanakan oleh PLN Group.

Signing of Declaration of Electricity Care Community as part of CSR activity for Customer Electrical Installation Inspection carried out by PLN Group.



**Peristiwa Penting Tahun 2019**  
Event Highlights in 2019

**16-17 September**  
September



Perusahaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester II PT Haleyora Power di Jakarta dengan tema "Menuju Kinerja Terbaik 2019".

The Company held Coordination Meeting for Semester II of PT Haleyora Power in Jakarta with the theme "Towards the Best Performance in 2019".

**18 Oktober** October



Syukuran dalam rangka peringatan ulang tahun Haleyora Power ke-8 berlangsung serentak di Kantor pusat dan seluruh kantor wilayah kerja Perusahaan.

Commemorating the 8<sup>th</sup> anniversary of Haleyora Power concurrently at Head Office and all area offices of the Company.



**19-20 Oktober** October

Penyelenggaraan *Employee Gathering* sekaligus perayaan ulang tahun Haleyora Power di Bandung yang diikuti oleh seluruh pegawai sebagai upaya meningkatkan keakraban serta membangun kekompakan dan kerja sama tim insan Haleyora Power.

Employee Gathering to commemorate Haleyora Power's anniversary in Bandung participated by all employees to strengthen intimacy as well as to build cohesiveness and teamwork of Haleyora Power's personnel.

**31 Oktober** October



Perusahaan bekerja sama dengan PLN UP3 Cikupa dan Lavon Swancity meresmikan Posko Pelayanan Teknik Premium untuk menangani kawasan layanan premium *cluster* Lavon Swancity. Acara dihadiri oleh EVP Operasi M. Firmansyah dan jajaran manajemen UID Banten.

The Company in collaboration with PLN UP3 Cikupa and Lavon Swancity launched Premium Engineering Service Post to manage the premium service area of Lavon Swancity cluster. The event was attended by EVP of Operations M. Firmansyah and the management of UID Banten.

**15 November** November



Perusahaan menerima penghargaan sebagai Marketing The Inovation Terbaik dalam acara Annual BUMN Branding and Marketing Award 2019 dalam kategori Corporate Marketing Anak Perusahaan BUMN bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata.

The Company received the award for The Best Marketing Innovation at 2019 Annual BUMN Branding and Marketing Award in the category of Corporate Marketing for BUMN Subsidiaries in the fields of Energy, Logistics, Regions and Tourism.

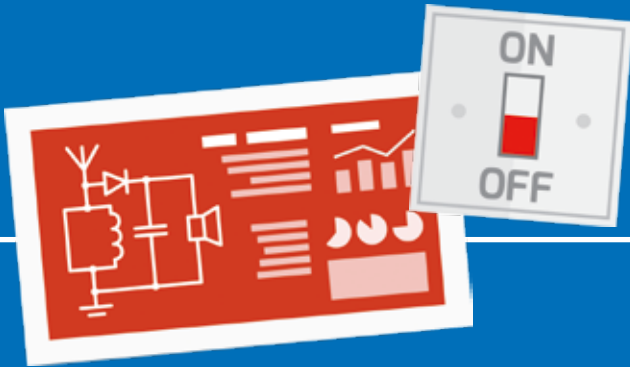
**14 Desember** December



Lazis dan SBO (Spiritual, Budaya dan Olah Raga) Haleyora Power mengadakan acara berbagi kebahagiaan bersama anak yatim Yayasan Pelopor Kepedulian Rumah Cerdas Indonesia. Acara bertajuk "*Geness Care Charity: Brightening Children Lives*" diadakan di Taman Mini Indonesia Indah. Selain membagikan santunan dan peralatan sekolah, anak-anak yatim diajak bermain dan belajar bersama di Museum Listrik dan IPTEK.

Haleyora Power's Lazis and SBO (Spiritual, Culture and Sports) shared happiness with the orphans of Indonesian Smart Home Care Pioneer Foundation. The event entitled "*Geness Care Charity: Brightening Children Lives*" was held at Taman Mini Indonesia Indah. In addition to distribution of donations and school equipment, the orphans were invited to play and learn at Museum of Electricity and Science and Technology.

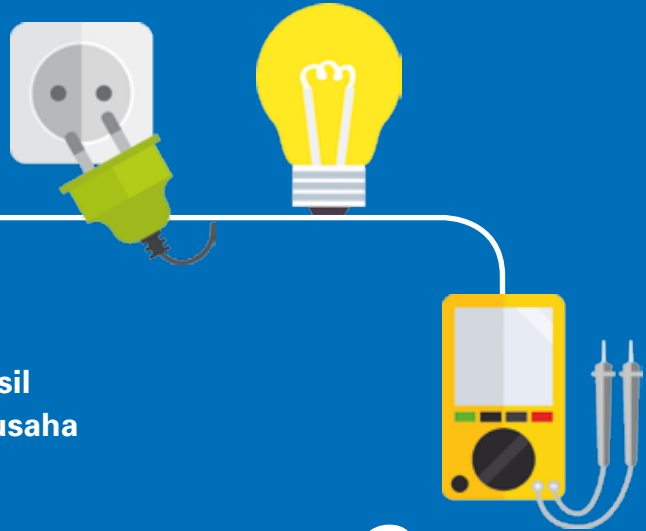




# memastikan pencapaian







Di tahun 2019 Haleyora Power berhasil membukukan pendapatan dan laba usaha yang melampaui target.

# *kinerja*

## ENSURING PERFORMANCE ACCOMPLISHMENT

In 2019 Haleyora Power managed to record revenue and operating profit that exceeded the target.





# Laporan Dewan Komisaris

## Report from the Board of Commissioners



**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner



**Secara keseluruhan, pencapaian kinerja di tahun 2019 menumbuhkan optimisme terhadap kemampuan Perusahaan untuk memenuhi rencana pengembangan usaha jangka panjang.**

Overall, the performance achievements in 2019 created optimism in the Company's ability to execute its long-term business development plans.

#### **Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,**

Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, PT Haleyora Power ("HP" atau "Perusahaan") dapat mencapai kinerja positif yang terus meningkat. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan dan pengelolaan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

#### **Penilaian Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan**

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Direksi terutama berdasarkan pencapaian target kinerja yang telah disepakati yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dan pencapaian indikator kinerja utama (KPI) Manajemen. Selain itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan konsistensi dan kepatuhan Direksi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

#### **Dear Valued Shareholders and Stakeholders,**

First of all, we would like to praise God the Almighty for His blessings, so that PT Haleyora Power ("HP" or the "Company") could achieve an increasingly positive performance. On this occasion, please allow us to deliver this supervisory report of the Board of Commissioners on development and management of the Company for the year ended December 31, 2019.

#### **Performance Assessment of the Board of Directors and Management of the Company**

The Board of Commissioners assessed performance of the Board of Directors primarily based on achievement of agreed performance targets set out in 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Management's key performance indicators (KPI). In addition, the Board of Commissioners also paid attention to consistency and compliance of the Board of Directors in good corporate governance (GCG) implementation.



## Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

Pada tahun 2019, Perusahaan melaksanakan 122 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi. Jumlah Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang dilayani Perusahaan hingga akhir tahun 2019 mencapai 315 ULP, naik 79% dari 176 ULP pada tahun 2018 dengan pangsa pasar sebesar 38%.

Perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.513,91 miliar, tumbuh 21,3% dari Rp2.073,32 miliar pada tahun 2018 dan tercapai 109,5% dari RKAP sebesar Rp2.295,19 miliar. Laba kotor meningkat 14,6% dari Rp251,32 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp287,93 miliar dan tercapai 118,6% dari RKAP sebesar Rp242,78 miliar. Sedangkan laba bersih naik 29,3% dari Rp138,68 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp179,32 miliar dan tercapai 94,6% dari RKAP sebesar Rp189,60 miliar.

Hasil penilaian KPI Manajemen tahun 2019 mencapai skor 91,57 di mana mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AA" atau kondisi "SEHAT".

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil menjaga konsistensi pertumbuhan Perusahaan dengan kinerja keuangan yang sehat. Hal ini menumbuhkan optimisme terhadap kemampuan Perusahaan untuk memenuhi rencana pengembangan usaha jangka panjang.

### Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris telah mempelajari rencana pengembangan usaha Perusahaan yang dijabarkan dalam rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) 2019-2023 sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Terhadap rancangan RJP tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan dan saran, antara lain:

1. Direksi agar menelaraskan perumusan RJP dengan kerangka penyusunan (*framework*) yang sistematis sehingga menghasilkan visi, misi, arah dan program kerja strategis untuk mencapai tujuan sebagai asset manager. Visi dan misi Perusahaan harus selaras dengan lingkup penugasan Perusahaan sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017.

In 2019, the Company signed 122 assignment contracts for security of distribution and transmission operations and maintenance services. The number of Customer Service Units (ULP) served by the Company at end of 2019 reached 315 ULP, up 79% from 176 ULP at end of 2018 with a market share of 38%.

The Company recorded operating revenues of Rp2,513.91 billion, grew by 21.3% from Rp2,073.32 billion in 2018 and reached 109.5% of RKAP of Rp2,295.19 billion. Gross profit increased by 14.6% from Rp251.32 billion in 2018 to Rp287.93 billion and reached 118.6% of RKAP of Rp.242.78 billion. Meanwhile, net income rose by 29.3% from Rp138.68 billion in 2018 to Rp179.32 billion and reached 94.6% of RKAP of Rp.189.60 billion.

Management's KPI assessment in 2019 reached a score of 91.57. Based on Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Assessment of Corporate Soundness Level, such score is under "AA" or "SOUND" category.

In general, the Board of Commissioners considered that the Board of Directors has managed to maintain the Company's consistent growth with sound financial performance. This creates optimism about the Company's ability to execute its future business development plans.

### View on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners reviewed the Company's business development plans outlined in draft 2019-2023 Long-Term Corporate Plan (RJPP) prior to submission to GMS for approval and ratification. With regard to draft RJPP, the Board of Commissioners provided the following responses and advices:

1. The Board of Directors to align RJP formulation with a systematic framework so as to create strategic vision, missions, direction and work programs to achieve its goals as an asset manager. The Company's vision and missions must be in line with the scope of the Company's assignments in accordance with Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017.

## Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

2. Direksi agar menyusun standar layanan operasi dan pemeliharaan (O&M) distribusi dan transmisi berupa indikator-indikator dan tingkat mutu pelayanan yang mengacu pada praktik terbaik untuk mewujudkan nilai-nilai yang berorientasi pada pelayanan pelanggan.
  3. Direksi agar mengevaluasi struktur organisasi agar mampu mendukung fase pengembangan yang membutuhkan tingkat kematangan organisasi dan proses bisnis yang tinggi.
  4. Dalam menyusun proyeksi keuangan RJP 2019-2023, Direksi agar membuat proyeksi tahapan pencapaian pangsa pasar O&M transmisi dan distribusi PLN per tahun agar dibuat lebih detail per regional hingga mencapai target 50% pada tahun 2021 dan proyeksi pertumbuhan pendapatan selain berbasis data historis juga memperhatikan peluang *real/actual market* dan *data market intelligence*.
  5. Direksi agar membuat rencana pemasaran yang agresif kepada pelanggan potensial non-PLN antara lain untuk memasarkan produk ListriQu.
  6. Direksi agar melakukan analisis dan profil risiko yang mencerminkan analisis/profil risiko 5 tahun ke depan.
2. The Board of Directors to formulate a standard of distribution and transmission operation and maintenance (O&M) services in the form of indicators and service quality levels that refer to the best practices in order to realize customer service-oriented values.
  3. The Board of Directors to evaluate organizational structure in order to be able to support development phase which requires a high level of organizational maturity and business processes.
  4. In preparing 2019-2023 RJP financial projections, the Board of Directors to prepare projections of stages to achieve O&M market share of PLN transmission and distribution per year in details per region to reach 50% target by 2021 and to prepare projections of revenues growth based on historical data, real/actual market opportunities and market intelligence data.
  5. The Board of Directors to prepare an aggressive marketing plan to potential non-PLN customers, among others, to market ListriQu products.
  6. The Board of Directors to prepare risk analysis and profile that reflect risk analysis/profile for the next 5 years.

Pada dasarnya, Dewan Komisaris mendukung setiap upaya Direksi untuk mengembangkan peluang-peluang pengembangan usaha agar dapat meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Sesuai fungsinya, Dewan Komisaris telah mengkaji dengan seksama semua potensi risiko dari rencana bisnis yang diajukan, dan memberikan nasihat agar Direksi melakukan perencanaan yang matang dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

### Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris dibantu komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja Pengawasan tahun 2019 yang disusun dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 antara lain adalah:

- Memberi nasihat kepada Direksi terkait kepengurusan Perusahaan yang disampaikan dalam setiap rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi.

Principally, the Board of Commissioners supports the Board of Directors in every effort to develop business opportunities in order to increase values for Shareholders and all stakeholders. In accordance with its functions, the Board of Commissioners carefully reviewed all potential risks in the proposed business plan and advised the Board of Directors to conduct thorough planning while continuously prioritizing the principle of prudence.

### Implementation of Supervisory Duties

The Board of Commissioners, assisted by committees of the Board of Commissioners, carried out supervisory duties in accordance with 2019 Supervisory Work Plan which was prepared based on the Articles of Association, Board Manual and the applicable laws and regulations. Implementation of duties of the Board of Commissioners throughout 2019 included:

- Provided advices to the Board of Directors regarding the management of the Company which were conveyed in every joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors.



## Laporan Dewan Komisaris

### Report from the Board of Commissioners

- Meneliti, menelaah, membahas, menyetujui, dan memberi tanggapan baik tertulis maupun lisan di dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi berkenaan dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan 2019-2023, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, Laporan Realisasi KPI Direktorat 2018, Laporan Manajemen (LM) Triwulanan Tahun 2019, LM Audited 2018, Laporan Hasil Audit dalam LM Audited 2018, dan rencana perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Mengusulkan tantiem 2018 dan tantiem/insentif kinerja Direksi, remunerasi 2019 Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus karyawan 2018, calon auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan termasuk alasan pengusulan dan proses pencalonannya serta usulan penetapan besaran jasa audit.
- Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan dan memberikan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan di dalam LM 2018 dan memberikan saran perbaikan kinerja dalam tanggapan LM Audited 2018.
- Memberikan persetujuan tertulis mengenai pembentukan organisasi region yang diusulkan Direksi.
- Melakukan pengawasan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta kepatuhan dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP 2019 dan RJP 2019-2023.
- Membahas tindak lanjut hasil penilaian GCG tahun 2018, tindak lanjut keputusan RUPS, temuan audit internal dan eksternal, serta mengevaluasi efektivitas audit internal dan eksternal dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi.
- Conducted examination, review and discussion, as well as provided approval and responses both in written and verbally in joint meetings of the Board of Commissioners-the Board of Directors regarding 2019-2023 Long-Term Corporate Plan (RJP), 2019-2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), 2018 Directorate's KPI Realization Reports, 2019 Quarterly Management Report (LM), 2018 Audited LM, Audit Report in 2018 Audited LM, and plan to amend the Company's Articles of Association.
- Proposed 2018 tantiem and performance bonuses/incentives for the Board of Directors, 2019 remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as 2018 employee bonuses, nominated external auditor to audit financial reports including rationale and process of nominating the external auditor, as well as the proposed audit fee.
- Monitored development of the Company's activities and provided insights on issues deemed crucial for the management of the Company in 2018 LM and provided recommendations for performance improvements in response to 2018 Audited LM.
- Provided written approval for formation of regional organizations proposed by the Board of Directors.
- Supervised implementation of the Company's plans and policies related to compliance with the laws and regulations, agreements with third parties, as well as compliance in running the Company in accordance with 2019 RKAP and 2019-2023 RJP.
- Discussed follow-up on 2018 GCG assessment, GMS resolutions, internal and external audit findings and evaluated effectiveness of internal and external audits in joint meetings of the Board of Commissioners-the Board of Directors.

Secara berkala, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris menyelenggarakan 14 kali rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari 4 rapat internal dan 10 rapat bersama Direksi. Melalui mekanisme rapat, Dewan Komisaris telah memberikan arahan, pendapat, nasihat, tanggapan maupun meminta perhatian Direksi agar kepengurusan Perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga KPI Manajemen dapat tercapai.

Periodically, the Board of Commissioners holds meetings to evaluate management measures of the Company. In 2019, the Board of Commissioners held 14 (sixteen) meetings, including 4 internal meetings and 10 joint meetings with the Board of Directors. Through meeting mechanism, the Board of Commissioners provided guidance, insights, advices and responses for the Board of Directors to manage the Company properly so that Management's KPI could be achieved.



## Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

Sebagai pertanggungjawaban tugas Dewan Komisaris kepada RUPS, Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulanan tahun 2019 dan tahunan 2018, serta usulan dan pendapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang membutuhkan persetujuan dan pengesahan RUPS.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris melakukan 4 kunjungan kerja yaitu ke Region 1 Jawa Barat, Region 6 Riau dan Kepulauan Riau, Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, dan Region 5 DKI Jakarta. Kunjungan kerja Dewan Komisaris bertujuan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi efektivitas pelaksanaan pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan, dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tindakan koreksi dengan baik. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti Direksi.

Kinerja Dewan Komisaris secara kuantitatif diukur melalui pencapaian KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh pemegang saham dan menjadi bagian dari Kontrak Kinerja Manajemen tahun 2019 disepakati dan disahkan pada RUPS Pengesahan RKAP pada tanggal 10 Januari 2019. KPI Dewan Komisaris pada tahun 2019 mencapai skor 100.

### Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan dan praktik tata kelola yang baik (GCG). Dewan Komisaris memantau dan memastikan penerapan GCG dan pengendalian internal di Perusahaan telah terlaksana dengan efektif dan berkelanjutan. Dewan Komisaris dibantu oleh komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite GCG & Manajemen Risiko (GCG & MR) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris untuk menelaah rencana kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik

As an accountability of the Board of Commissioners to GMS, the Board of Commissioners submitted Supervisory Report of the Board of Commissioners and realization of the Board of Commissioners' KPI in 2019 (quarterly) and 2018 (annually), as well as proposals and opinions of the Board of Commissioners on matters that required GMS' approval and ratification.

In 2019, the Board of Commissioners conducted 4 working visits to Region 1 West Java, Region 6 Riau and Riau Islands, Region 2 Central Java and DI Yogyakarta and Region 5 DKI Jakarta. The working visits of the Board of Commissioners aimed to monitor and evaluate effectiveness of work implementation, to identify problems in the fields and to ensure that management took appropriate corrective actions. Based on results of the working visits, the Board of Commissioners provided a number of recommendations to be followed up by the Board of Directors.

Performance of the Board of Commissioners is assessed quantitatively through achievement of the Board of Commissioners' KPI that were approved by Shareholders and were part of 2019 Management Performance Contract agreed and ratified in GMS on RKAP Approval on January 10, 2019. The Board of Commissioners' KPI in 2019 reached a score of 100.

### Governance Implementation and Performance of Committees of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners continues to improve quality and effectiveness of its supervisory function and good governance practices, including monitoring of internal control system. The Board of Commissioners is assisted by committees of the Board of Commissioners, namely Audit Committee and GCG & Risk Management (GCG & MR) Committee to optimize its supervisory function and to formulate policies of the Board of Commissioners.

During 2019, Audit Committee assisted the Board of Commissioners to review the Board of Directors' draft policies that require approval of the Board of Commissioners and submitted its review results to the Board of Commissioners as input in preparing guidance, recommendations, advices and responses to the Board of Directors both in writing and verbally conveyed in joint



## Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar kajian Komite Audit, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS. Komite Audit antara lain telah menelaah dokumen RKAP 2019, RJP 2019-2023, LM dan pencapaian KPI Manajemen triwulanan 2019 serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Berkenaan dengan pengendalian internal, Komite Audit telah menyelesaikan tugasnya untuk mengawasi tindak lanjut temuan hasil audit internal (Satuan Pengawas Internal/SPI) dan eksternal (kantor Akuntan Publik/KAP) yang hasilnya telah didiskusikan dengan SPI dan KAP dan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris.

Komite GCG & Manajemen Risiko (Komite GCG & MR) telah membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi, menguji, dan mengevaluasi strategi, sistem dan kebijakan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, pengembangan *human capital*, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite GCG & MR telah menelaah dokumen RKAP 2019, RJPP 2019-2023, LM dan pencapaian KPI Manajemen Triwulanan dan Tahunan 2019, Laporan Manajemen Risiko (LMR) Triwulanan dan Tahunan 2019, isu-isu strategis HP Group, profil risiko Perusahaan dan RKAP berbasis risiko 2019 serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugas Komite GCG & MR. Komite telah menyampaikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Komite GCG & MR telah menyelesaikan kajian atas besaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018 dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

meetings of the Board of Commissioners-the Board of Directors. Based on review results of Audit Committee, the Board of Commissioners also submitted reports/responses of the Board of Commissioners to GMS. Audit Committee reviewed, among others, 2019 RKAP, 2019-2023 RJP, 2019 quarterly LM and Management's KPI achievements, as well as other tasks assigned by the Board of Commissioners.

With regard to internal control, Audit Committee monitored follow-up on findings reported by internal auditors (Satuan Pengawas Internal/SPI) and external auditors (Public Accounting Firm/KAP) that had been discussed with SPI and KAP and presented in the Board of Commissioners meeting.

GCG & MR Committee performed its duties to monitor, test and evaluate the Company's strategies, systems and policies in the areas of risk management, GCG, nomination and remuneration, human capital development and other tasks assigned by the Board of Commissioners.

GCG & MR Committee reviewed 2019 RKAP, 2019-2023 RJPP, LM and 2019 Quarterly and Annual KPI achievements, 2019 Quarterly and Annual Risk Management Reports (LMR), strategic issues of HP Group, the Company's risk profile and 2019 risk-based RKAP and other duties in accordance with scope of duties of GCG & MR Committee. The Committee submitted its review results to the Board of Commissioners as input in preparing guidance, recommendations, advices and responses to the Board of Directors both in writing and verbally conveyed in joint meetings of the Board of Commissioners-the Board of Directors

In carrying out its nomination and remuneration functions, GCG & MR Committee reviewed the amount of tantiem for the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2018 financial year and remuneration for



## Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners

tahun buku 2019. Usulan dan rekomendasi terkait tantiem dan remunerasi tersebut telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Realisasi kinerja komite Dewan Komisaris secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk pencapaian KPI komite. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit dan Komite GCG & MR pada tahun 2019 sangat memuaskan berdasarkan capaian KPI Komite Audit dan Komite GCG & MR di mana seluruh program kerja telah terpenuhi seluruhnya dengan skor 100.

### Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah mendeklarasikan pembentukan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mendukung implementasi GCG dan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. WBS berperan untuk mengelola setiap laporan yang masuk berkaitan dengan kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, penerapan WBS yang dikelola oleh Komite Pelaporan Pelanggaran belum menunjukkan peran yang signifikan dalam melakukan upaya preventif (pencegahan) dan kuratif (penindakan) dalam rangka mengamankan aset Perusahaan. Hal ini perlu menjadi perhatian Direksi untuk memperkuat fungsi dan peran WBS di Perusahaan. Ke depan, sesuai tugas dan tanggung jawab Komite Audit di dalam sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris dapat menugaskan Komite Audit untuk memberikan konsultasi bagi Komite Pelaporan Pelanggaran dalam menjalankan tugasnya menangani pengaduan.

### Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan pada tahun 2019.

the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2019 financial year. Proposal and recommendation regarding tantiem and remuneration were submitted by the Board of Commissioners to GMS for approval.

Realized performance of committees of the Board of Commissioners was quantitatively reflected in achievement of the committees' KPI. The Board of Commissioners considers that performance of Audit Committee and GCG & MR Committee in 2019 was highly satisfactory based on KPI achievements of Audit Committee and GCG & MR Committee showing that all work programs were completed with a score of 100.

### View on *Whistleblowing System* (WBS) Implementation

In 2014, the Company declared establishment of *whistleblowing system* (WBS) to support GCG implementation as well as clean and responsible business practices. WBS manages every incoming report related to alleged fraud, criminal act and violation of the Company's policies and Code of Conduct.

In the view of the Board of Commissioners, WBS implementation managed by *Whistleblowing Committee* has not shown a significant impact on preventative and curative efforts in order to safeguard the Company's assets. This should be a concern of the Board of Directors to strengthen the function and role of WBS in the Company. Going forward, in accordance with duties and responsibilities of Audit Committee within internal control system, the Board of Commissioners shall assign Audit Committee to provide consultation to *Whistleblowing Committee* in carrying out its duties in handling complaints.

### Changes in Composition of the Board of Commissioners

There were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners in 2019.



## Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

### Apresiasi

Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan PT Haleyora Power. Kami sampaikan penghargaan kepada Direksi, tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah menunjukkan kerja keras, loyalitas dan dedikasinya sehingga Perusahaan dapat melewati tahun 2019 dengan pencapaian kinerja yang baik. Semoga Perusahaan dapat terus memberikan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

### Appreciations

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, I express my gratitude for the support and trust given by Shareholders and all stakeholders of PT Haleyora Power. We extend our appreciation to the Board of Directors, management team and all employees who have shown their hard work, loyalty and dedication so that the Company could go through the year 2019 with a solid performance. Hopefully, the Company will continue to provide the best results to all stakeholders in the future.

**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

## Dewan Komisaris

### Board of Commissioners



**Purnama T. Sianturi**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

**Karyawan Aji**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

# Laporan Direksi

## Report from the Board of Directors



**Perusahaan telah bertransformasi menjadi asset operator dengan melakukan *business process re-engineering* di mana HP lebih proaktif dalam pemeliharaan aset dengan menekankan pada *condition based* dan *predictive maintenance*.**

The Company has transformed into an asset operator by performing a business process re-engineering where HP is more proactive in maintaining assets by emphasizing condition-based and predictive maintenance.

### **Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, PT Haleyora Power (“HP” atau “Perusahaan”) dapat melalui tahun 2019 dengan sejumlah pencapaian penting. Dengan dukungan seluruh pegawai dan tenaga kerja Perusahaan dan entitas anak, HP berhasil membukukan pendapatan dan laba usaha yang melampaui target serta memperkuat *positioning* sebagai pelaksana pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi PT PLN (Persero) (PLN). Mewakili Direksi, perkenankanlah saya melaporkan ringkasan kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

### **Dear Valued Shareholders and Stakeholders,**

We would like to praise God the Almighty for His blessings, so that PT Haleyora Power (“HP” or the “Company”) could go through the year 2019 with a number of meaningful achievements. With the support of all employees of the Company and subsidiaries, HP managed to record revenues and operating profits that exceeded targets and strengthened its positioning as a provider of operation and maintenance services for transmissions and distributions of PT PLN (Persero) (PLN). On behalf of the Board of Directors, please allow me to report a summary of the Company’s performance for the financial year ended December 31, 2019.



**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director



## Laporan Direksi Report from the Board of Directors

### STRATEGI DAN INISIATIF

Sesuai arahan korporasi agar anak perusahaan melaksanakan harmonisasi dan optimalisasi PLN Group, maka HP telah merumuskan perannya di dalam kebijakan portofolio (SOLID) yaitu untuk:

1. *Securing bussines sustainability* PLN Group di mana HP sebagai mitra strategis PLN dalam memberikan jaminan ketersediaan layanan operasi dan pemeliharaan (O&M) transmisi dan distribusi (T&D) serta mengelola pangsa pasar hingga 50% di Jawa, Sumatera, dan Bali pada tahun 2021;
2. *Optimizing cost efficiency* PLN Group di mana HP sebagai *asset operator* yang mampu mengoperasikan dan memelihara sistem transmisi dan distribusi melalui *Asset Management Contract* (AMC) dan *Business Process Re-engineering* (BPR);
3. *Leading industry capabilities* PLN Group di mana HP sebagai *trend setter* dan model bisnis bagi *service provider* lainnya di bisnis O&M T&D;
4. *Developing new edge* di mana HP terus berinovasi mengembangkan layanan alternatif berbasis digital untuk mengantisipasi disrupsi teknologi.

Menginjak tahun kedelapan penugasan HP dari PLN, pada tahun 2019 Perusahaan fokus pada penguatan kompetensi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan kualitas layanan di bidang operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik dari kontrak-kontrak pekerjaan yang sudah diperoleh Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2019, baik oleh induk maupun anak perusahaan PT Haleyora Powerindo (HPI).

Perusahaan telah menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 dengan prioritas program kerja untuk mewujudkan kinerja operasi yang prima dan melayani pertumbuhan pelanggan dengan mengoptimalkan sumber daya Perusahaan yang tersedia, yang difokuskan pada: 1) Peningkatan kapabilitas finansial, 2) Perbaikan tingkat kolektabilitas piutang/*collection of period* (COP), 3) Perbaikan sistem *Supply Chain Management* (SCM), 4) Perbaikan *Service Level Agreement* (SLA), 5) Optimalisasi tenaga kerja, 6) Pengembangan produk ListriQu, 7) Peningkatan kompetensi di *asset management* dan *Condition Based Maintenance* (CBM), serta 8) Transformasi bisnis dan budaya.

Program kerja tersebut bertujuan untuk menempatkan posisi HP sebagai pemimpin di dalam industri O&M jaringan transmisi dan distribusi yang mampu memberikan

### STRATEGIES AND INITIATIVES

In accordance with corporate direction for the subsidiaries to carry out harmonization and optimization of PLN Group, HP determined its roles in portfolio policy (SOLID), as follows:

1. *Securing business sustainability* of PLN Group: HP as a strategic partner of PLN in ensuring availability of transmission and distribution (T&D) operation and maintenance services and managing a market share of up to 50% in Java, Sumatra and Bali by 2021;
2. *Optimizing cost efficiency* of PLN Group: HP as an asset operator is capable of operating and maintaining the transmission and distribution systems with *Asset Management Contract* (AMC) and *Business Process Re-engineering* (BPR);
3. *Leading industry capabilities* of PLN Group: HP is a trend setter and business model for other service providers in the O&M T&D business;
4. *Developing new edge*: HP continues to innovate and develop alternative digital-based services to anticipate technology disruption.

Entering the eighth year of PLN's assignment to HP, in 2019, the Company focused on strengthening competence, developing human resources (HR) and improving service quality in the field of operation and maintenance of electricity distribution based on work contracts that the Company has obtained until the end of 2019, both by the parent and the subsidiary, namely PT Haleyora Powerindo (HPI).

The Company prepared 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) with a priority work program to achieve operational excellence and to serve customer growth by optimizing the Company's available resources, which are focused on: 1) Increasing financial capability, 2) Improving accounts receivable collectability/collection period (COP), 3) Improving Supply Chain Management (SCM) system, 4) Improving Service Level Agreement (SLA), 5) Optimizing workforce, 6) Developing ListriQu products, 7) Enhancing competence in asset management and Condition-Based Maintenance (CBM), and 8) Business and cultural transformation.

Those work programs aim to position HP as a leader in the transmission and distribution network O&M industry capable of providing differentiation and improving service



diferensiasi dan peningkatan kualitas layanan, mencapai *Service Level Agreement* (SLA) dan menghasilkan nilai tambah layanan bagi PLN. Selain itu, Perusahaan juga telah berkomitmen untuk mencapai kinerja keselamatan nihil kecelakaan melalui penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang konsisten, penerapan budaya *Safety, Integrity, Quality* serta implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3).

### KENDALA YANG DIHADAPI

Tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan SDM dalam menghadapi tuntutan perubahan dan pertumbuhan usaha. Per 31 Desember 2019, Perusahaan mengelola 31.141 pegawai dan tenaga kerja dengan rentang usia, kompetensi dan karakter kerja yang sangat beragam. Perusahaan harus mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi tersertifikasi di bidang O&M distribusi dalam waktu cepat.

Sertifikasi kompetensi bersifat *mandatory* sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) di mana pekerja di bidang ketenagalistrikan harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Pada tahun 2019, Perusahaan merencanakan sertifikasi untuk 1.987 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region. Sampai akhir tahun 2019 sertifikasi telah terealisasi untuk 2.164 orang atau tercapai 109% dari target.

Kompetensi tenaga kerja yang belum setara menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan Perusahaan mencapai target SLA. Pada tahun 2019, Direksi menargetkan SLA pekerjaan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen dengan target 100%. Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi pencapaian SLA di 6 region rata-rata mencapai 97,96%. Pencapaian SLA tertinggi (100%) terjadi di Region 5 DKI Jakarta & Banten dan terendah (94,62%) terjadi di Region 4 Sumatera Barat.

Tidak tercapainya target SLA menyebabkan Perusahaan dikenakan denda/penalti. Akumulasi denda pada tahun 2019 mencapai Rp41,79 miliar, naik 83,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp22,79 miliar. Penyebab denda SLA di *project* Pelayanan Teknik didominasi oleh kinerja *response time*, gangguan penyulang dan gangguan *recloser*. Sedangkan untuk Manbill, penyebab denda SLA adalah saldo piutang dan operator Gardu Induk (OGI) di mana prosedur pelaporan pergantian *shift* tidak bisa dijalankan di beberapa Gardu Induk yang tidak bisa melakukan pergantian *shift* per 8 jam karena faktor keamanan lokasi yang tidak memungkinkan.

quality, achieving Service Level Agreements (SLA) and generating value added services for PLN. In addition, the Company is also committed to achieving zero accident safety performance through consistent implementation of Occupational Health and Safety (K3) and Electricity Safety (K2) procedures, Safety, Integrity, Quality culture, as well as K3 Management System (SMK3).

### CHALLENGES

The main challenge faced by the Company is HR management to meet the demands of change and business growth. As of December 31, 2019, the Company managed 31,141 employees and workforce with a very diverse range of ages, competencies and job characteristics. It is a challenge to prepare the existing HR with certified competencies in O&M distribution within a short period.

Competency certification is mandatory in accordance with Law No. 30 of 2009 concerning Electricity (Law 30/2009) which requires employees in electricity sector to obtain competency certificate issued by a professional certification agency. In 2019, the Company planned to certify 1,987 technical workers in all regions. At end of 2019, certification had been realized for 2,164 technical workers or 109% of the target.

Workforce competence inequality is one of the factors that hinder the Company's success in achieving SLA target. In 2019, the Board of Directors targeted SLA for distribution operation and maintenance services as outlined in the Management Contract with a target of 100%. At end of 2019, average SLA realization in 6 regions was 97.96%. The highest SLA was 100% in Region 5 of DKI Jakarta & Banten and the lowest was 94.62% in Region 4 of West Sumatra.

The unachieved SLA target caused the Company to be subject to fines/penalties. Accumulated fines in 2019 reached Rp41.79 billion, up 83.4% compared to 2018 which amounted to Rp22.79 billion. The causes of SLA fines in Technical Services projects were dominated by response time performance, feeder interruption and re-closer interruption. As for Billing Management, the causes of SLA fines were accounts receivable balance and Substation Operators (OGI) where the shift change reporting procedure could not be carried out in several Substations that could not make 8-hour shift due to unfeasible location security.



## Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

## PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN TARGET

### Kinerja Operasional

Pada tahun 2019, Perusahaan melaksanakan 122 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi. Kontrak-kontrak tersebut berasal dari 6 Unit Induk Distribusi (UID), 5 Unit Induk Wilayah (UIW), 1 Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), 3 Unit Induk Transmisi (UIT), dan 1 Unit Induk Pusat Pengatur Beban yang meliputi 57 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan 315 Unit Layanan Pelanggan (ULP).

Hingga akhir tahun 2019, jumlah pelanggan bidang distribusi bertambah 40 ULP dari target 36 ULP. ULP tersebut berasal dari 10 UP3. Sedangkan Jumlah pelanggan bidang transmisi bertambah 12 Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) dari target 12 ULTG. ULTG tersebut berasal dari 4 Unit Pelaksana Transmisi (UPT).

*Project Asset Management Contract (AMC)*, yaitu kontrak yang meliputi peran HP sebagai *asset operator* sekaligus *asset manager*, mendapat tambahan 12 kontrak dengan UP3 yang terdiri dari 15 ULP. Pertumbuhan kontrak AMC tersebut memenuhi target RKAP yaitu 12 UP3. Proyek AMC Distribusi meliputi bidang operasi dan pemeliharaan distribusi yang diukur dari penambahan unit PLN setingkat UP3 yang sudah menandatangani kontrak kerja sama AMC Distribusi pada suatu periode tertentu.

### Kinerja Keuangan

Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp2.513,91 miliar, meningkat 21,3% dari Rp2.073,32 miliar pada tahun 2018 dan tercapai 109,5% dari RKAP sebesar Rp2.295,19 miliar. Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan operasi dan pemeliharaan (O&M) dan pendapatan lainnya. Pendapatan O&M mencakup pekerjaan Pelayanan Jasa Teknik dan Pelayanan Jasa Non Teknik. Pelayanan Jasa Teknik menjadi kontributor terbesar dari struktur pendapatan Perusahaan.

Pertumbuhan pendapatan terutama disebabkan oleh penambahan jumlah pelanggan baru bidang distribusi, transmisi dan AMC. Penambahan proyek baru terjadi di wilayah Jawa Timur (Manbill Gresik, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Malang) dan wilayah DKI Jakarta dan Banten

## COMPARISON OF REALIZATION AND TARGET

### Operational Performance

In 2019, the Company entered into 122 assignment contracts to secure distribution and transmission operation and maintenance services. These contracts came from 6 Parent Units of Distribution (UID), 5 Parent Units of Region (UIW), 1 Parent Unit of Load Distribution and Arrangement (UIP3B), 3 Parent Units of Transmission (UIT) and 1 Parent Unit of Load Arrangement (UIP3B) including 57 Customer Service Implementing Units (UP3) and 315 Customer Service Units (ULP).

In 2019, the number of distribution customers increased by 40 Customer Service Units (ULP) from the target of 36 ULP. ULP came from 10 Customer Service Implementing Units (UP3). Meanwhile, the number of transmission customers increased by 12 Transmission Service and Substation Units (ULTG) from the target of 12 ULTG. ULTG came from 4 Transmission Implementing Units (UPT).

Asset Management Contract (AMC) projects, which cover the roles of HP as an asset operator as well as an asset manager, received additional 12 contracts with UP3 consisting of 15 ULP. The AMC contract growth met RKAP target of 12 UP3. Distribution AMC Project includes distribution operations and maintenance as measured by the addition of UP3-level PLN units that signed Distribution AMC in a certain period.

### Financial Performance

In 2019, the Company recorded revenues of Rp2,513.91 billion, an increase of 21.3% from Rp2,073.32 billion in 2018 and reached 109.5% of RKAP of Rp2,295.19 billion. The Company's revenues consist of Operation and Maintenance (O&M) and other revenues. O&M revenues include technical services and non-technical services. Technical Services are the largest contributor to the Company's revenues structure.

The growth in revenue was mainly due to additional new customers in distribution, transmission and AMC. The addition of new projects occurred in East Java region (Billing Management Gresik, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, North Surabaya, South Surabaya, West Surabaya and Malang) as well as in DKI Jakarta and Banten regions (UITJBB, Scada



(UITJBB, Scada Banten, Bulungan, Cikokol, Cikupa, Jatinegara, Kepulauan Seribu, Kramat Jati, Lenteng Agung, Pondok Gede, dan Teluk Naga).

Beban Pokok Pendapatan (BPP) mencapai Rp2.225,98 miliar, naik 22,2% dibandingkan Rp1.822,00 miliar pada tahun 2018 dan tercapai 108,5% dari RKAP sebesar Rp2.052,41 miliar. Peningkatan BPP terutama disebabkan adanya penambahan proyek-proyek baru yang berdampak kenaikan signifikan pada akun-akun terkait seperti jasa tenaga kerja langsung naik, kendaraan operasional, pemakaian alat kerja dan material, serta imbalan kerja.

Pertumbuhan pendapatan Perusahaan pada tahun 2019 menghasilkan laba kotor sebesar Rp287,93 miliar, naik 14,6% dibandingkan 251,32 miliar pada tahun 2018 dan tercapai 118,6% dari RKAP sebesar Rp2.052,41 miliar. Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp179,32 miliar, meningkat 29,3% dari Rp138,68 miliar pada tahun 2018 dan tercapai 94,6% dari RKAP sebesar Rp189,60 miliar. Perusahaan mencatat rugi komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp6,08 miliar sehingga jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp173,24 miliar, naik 30,0% dari Rp133,25 miliar pada tahun sebelumnya.

### **Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu**

Perusahaan menerapkan standar operasi yang mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 sebagai jaminan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sejak tahun 2014, HP telah memperoleh Sertifikat ISO 9001 dari LMK-Certification/PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi. Saat ini Perusahaan telah mengadopsi ISO 9001 versi terbaru yaitu ISO 9001:2015 yang lebih menekankan pemikiran berbasis risiko dengan keluaran yang diharapkan adalah peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2019, Perusahaan menargetkan sertifikasi proses bisnis yang belum tersertifikasi ISO 9001:2015. Hingga akhir tahun, seluruh proses bisnis di Perusahaan yang mencakup 12 proses bisnis telah dinilai oleh LMK-Certification dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 berdasarkan sertifikat No. 0542-M tanggal 9 Desember 2019.

### **Pembagian Dividen**

Berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagaimana dicatat di dalam akta No. 2 tanggal 12 Juni 2019 dihadapan Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, dan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 1 Juli 2019, Pemegang

Banten, Bulungan, Cikokol, Cikupa, Jatinegara, Kepulauan Seribu, Kramat Jati, Lenteng Agung, Pondok Gede and Teluk Naga).

The Company's Cost of Revenues (BPP) reached Rp2,225.98 billion, up 22.2% compared to Rp1,822.00 billion in 2018 and reached 108.5% of RKAP of Rp2,052.41 billion. The increase in BPP was mainly due to the addition of new projects that had a significant impact on the related accounts, such as: direct labor, operational vehicle, tools and materials and employee benefits.

The Company's revenues growth in 2019 resulted in a gross profit of Rp287.93 billion, up 14.6% compared to 251.32 billion in 2018 and reached 118.6% of RKAP of Rp2,052.41 billion. Net income for the year amounted to Rp179.32 billion, rose by 29.3% from Rp138.68 billion in 2018 and reached 94.6% of RKAP of Rp189.60 billion. The Company recorded other comprehensive loss of Rp6.08 billion so that the total comprehensive income for the year amounted to Rp173.24 billion, rose by 30.0% from Rp133.25 billion in the previous year.

### **Quality Management System Certification**

The Company implements an operating standard that refers to ISO 9001 Quality Management System to assure the quality of services provided to customers. Since 2014, HP has obtained ISO 9001 Certificate from LMK-Certification/PT PLN (Persero) Certification Center. Currently, the Company adopts the latest version of ISO 9001, namely ISO 9001:2015 which emphasizes more on risk-based thinking with the expected outputs of increased performance and customer satisfaction.

In 2019, the Company targeted to certify business processes that were not yet ISO 9001: 2015 certified. At end of the year, all business processes in the Company which included 12 business processes had been assessed by LMK-Certification and met SNI requirements of ISO 9001:2015 based on certificate No. 0542-M dated December 9, 2019.

### **Dividend Distribution**

Based on Annual General Meeting of Shareholders (GMS) resolution as stated in deed No. 2 dated June 12, 2019 of Muhammad Hanafi, S.H., a notary in Jakarta, and Letter of President Director of PT PLN (Persero) No. 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019, Shareholders approved



## Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2018 sebesar 50% dari saldo laba atau sebesar Rp69,34 miliar. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas kepada PLN dan YPK PLN masing-masing sebesar Rp69,33 miliar dan Rp7 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

### Inovasi Layanan

Pada tanggal 17 Februari 2019, secara resmi Perusahaan meluncurkan aplikasi Layanan Instalasi Listrik Pelanggan Berbasis Digital (ListriQu) untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh konsumen. Cakupan layanan ListriQu telah meliputi wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Surabaya. Ke depan, cakupan ListriQu akan diperluas untuk melayani UID Jawa Tengah dan DIY, UIW S2JB, UIW Sulselrabar, UIW MMU, UIW NTT, dan UID Bali.

Kehadiran aplikasi ListriQu akan sangat membantu pelanggan saat terjadi gangguan instalasi di rumah. Penggunaannya sangat mudah. Pelanggan hanya perlu membuka aplikasi ListriQu dan menginput data yang diperlukan. Selanjutnya, petugas ListriQu akan datang untuk menangani gangguan pada instalasi pelanggan. Layanan ListriQu bergaransi mulai dari jasa hingga material yang digunakan.

ListriQu berkolaborasi dengan lembaga perbankan atau perusahaan pengelola sistem pembayaran digital untuk memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan. Perusahaan telah bekerja sama dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan melakukan integrasi *e-payment* untuk meningkatkan kemudahan metode pembayaran ListriQu. Proses pembangunan dan uji integrasi telah dilakukan pada akhir tahun 2019 dan ditargetkan pada bulan Februari 2020 pelanggan sudah dapat melakukan pembayaran jasa layanan ListriQu menggunakan LinkAja.

Selain memiliki pelayanan yang cepat, ListriQu juga memiliki kru bersertifikat, transparansi harga, kualitas terbaik, dan garansi pelayanan. Aplikasi ListriQu akan terus disempurnakan dengan fitur-fitur seperti Home appliance, Q-meter, serta Q-premium.

### Tingkat Kesehatan Perusahaan

Di awal tahun, Direksi bersama Dewan Komisaris telah menandatangani Kontrak Manajemen sebagai besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP 2019. KPI Manajemen menjadi indikator tingkat kesehatan perusahaan penyusunannya mengacu Edaran Direksi PT PLN (Persero)

dividend distribution for 2018 financial year amounting to 50% of retained earnings or Rp69.34 billion. The Company paid cash dividends to PLN and YPK PLN amounting to Rp69.33 billion and Rp7 million, respectively, on December 31, 2019.

### Service Innovation

On February 17, 2019, the Company officially launched Digital-Based Customer Electrical Installation Services (ListriQu) application to improve services to all consumers. ListriQu services have covered the areas of DKI Jakarta, Banten and Surabaya. Going forward, ListriQu will be developed to serve UID Central Java and DIY, UIW S2JB, UIW Sulselrabar, UIW MMU, UIW NTT and UID Bali.

ListriQu application will help customers that experience installation interruption at home. Using ListriQu application is very easy, customers only need to open ListriQu application and input the required data. After that, ListriQu technicians will come to handle interruption in customer installations. ListriQu offers warranty for services and materials used.

ListriQu collaborates with banking institutions or digital payment system management companies to make payments easier for customers. The Company has collaborated with PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) by integrating *e-payment* to improve the ease of ListriQu payment method. Development and integration testing were carried out at end of 2019 and it is targeted that by February 2020 customers will be able to make payments for ListriQu services using LinkAja.

Besides fast response, ListriQu also has certified crews and offers price transparency, best quality and service warranty. ListriQu application will continue to be refined with features such as Home appliance, Q-meter and Q-premium.

### Corporate Soundness Level

At the beginning of the year, the Board of Directors and the Board of Commissioners signed Management Contract as a qualitative and quantitative measure of 2019 RKAP. Management's KPI becomes an indicator of corporate soundness level according to Circular of the Board of

No. 0001.E/DIR/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan dan Surat Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Penyampaian Kontrak Manajemen Tahun 2018.

Hasil penilaian KPI Manajemen tahun 2019 mencapai skor 91,57 di mana berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AA" atau kondisi "SEHAT".

### Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, Perusahaan secara berkala mengadakan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan dan memperoleh umpan balik. Tujuan akhir dari pelaksanaan survei adalah evaluasi dan perbaikan kualitas layanan dan kinerja.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan survei yang dilaksanakan oleh tim asesor eksternal. Aspek yang diukur meliputi mutu layanan dan layanan secara umum, tingkat harga (*billing rate*), administrasi keuangan, ketepatan waktu layanan, dan penanganan keluhan yang diberikan oleh Perusahaan. Melalui analisis data yang terkumpul dari 77 responden kategori konsumen, indeks kepuasan pelanggan mencapai 73,51 atau tercapai 83,06% dari target sebesar 88,50. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menjadi bahan evaluasi manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan.

### Kinerja Anak Perusahaan

Jumlah kontrak yang dikelola HPI pada tahun 2019 adalah 138 kontrak yang terdiri dari 32 kontrak pekerjaan teknik, 7 kontrak pekerjaan manajemen billing, 94 kontrak pekerjaan non teknik, dan 5 kontrak pekerjaan *industrial cleaning*.

Realisasi pendapatan usaha mencapai Rp875,34 miliar, turun 7,3% dibandingkan Rp944,1 miliar pada tahun 2018. Realisasi BPP sebesar Rp802,53 miliar, turun 7,1% dari Rp864,3 miliar pada tahun 2018. Realisasi laba usaha pada tahun 2019 sebesar Rp48,64 miliar, turun 13,8% dari Rp56,45 miliar pada tahun sebelumnya.

Directors of PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 concerning Implementation Guidelines for Calculation of Organizational Performance Score for Units and Subsidiaries and Letter of Head of Corporate Performance Control Unit of PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 dated January 26, 2018 concerning Submission of 2018 Management Contracts.

Management's KPI assessment result in 2019 reached a score of 91.557 which, based on Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Assessment of Corporate Soundness Level, such score falls under "AA" or "SOUND" category.

### Customer Satisfaction Survey

To improve service quality for customers, the Company regularly holds customer satisfaction survey to measure services provided to customers and to obtain feedback from customers. The final objective of the survey is to evaluate and to improve service quality and performance.

In 2019, the Company performed a survey conducted by a team of external assessors. The aspects measured included quality of services and services in general, billing rate, financial administration, timeliness of services and complaint handling by the Company. Through data analysis of 77 respondents in the customer category, the customer satisfaction index reached 73.51 or 83.06% of the target of 88.50. Factors that influence customer satisfaction became management evaluation material to improve service quality.

### Subsidiary Performance

In 2019, HPI managed 138 contracts consisting of 32 technical work contracts, 7 billing management work contracts, 94 non-technical work contracts and 5 industrial cleaning work contracts.

Realized operating revenues reached Rp875.34 billion, down 7.3% compared to Rp944.1 billion in 2018. Realized BPP was Rp802.53 billion, decreased by 7.1% from Rp864.3 billion in 2018. Realized operating income in 2019 amounted to Rp48.64 billion, fell by 13.8% from Rp56.45 billion in the previous year.



## Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

### Aksi Korporasi

Pada bulan April 2019, Perusahaan mengakuisisi 5% kepemilikan saham minoritas HPI senilai Rp8,83 miliar. Dengan demikian, terjadi perubahan komposisi pemegang saham HPI yaitu 95% saham dipegang oleh HP sebagai pemegang saham mayoritas dan 5% saham dipegang oleh YPK PLN sebagai pemegang saham minoritas.

### PROSPEK DAN RENCANA KE DEPAN

Prospek usaha Perusahaan sangat berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan PLN dalam rangka meningkatkan kualitas dan keandalan sistem serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan laju pembangunan infrastruktur yang masif, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sosial-politik selama beberapa tahun terakhir, maka kebutuhan tenaga listrik Indonesia akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2019-2028, PLN memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional sebesar 6,42% per tahun. Dengan angka proyeksi tersebut, pada tahun 2028 kebutuhan listrik nasional akan mencapai 432.713 GWh dengan proyeksi jumlah pelanggan mencapai 88,1 juta pelanggan.

Kebutuhan tenaga listrik tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, hingga jaringan distribusi, agar listrik dapat disalurkan hingga ke konsumen dengan mutu dan keandalan yang terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 432.713 GWh pada tahun 2028, dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkuit (kms) serta gardu induk dengan kapasitas total 124.341 MVA.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah menjalani tahun kesembilan penugasan. Perusahaan akan memasuki periode *excellence performance* di mana kualitas kinerja operasional maupun keuangan harus semakin baik. Perusahaan berkomitmen melaksanakan penugasan PLN dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi penting di dalam meningkatkan kualitas keandalan dan intensitas layanan bagi pelanggan PLN.

Perusahaan menargetkan pertumbuhan pangsa pasar sebesar 9% dari 38% pada tahun 2019 menjadi 44% pada tahun 2020. Pangsa pasar 44% dihitung dari jumlah ULP PLN seluruh Sumatera, Jawa dan Bali atau setara dengan 250 ULP. Selain itu, Perusahaan tetap menargetkan pencapaian

### Corporate Action

In April 2019, the Company acquired 5% ownership of minority shares of HPI at Rp8.83 billion. Thus, there was a change in the shareholder composition of HPI to become 95% of the shares were held by HP as the majority shareholder and 5% of the shares were held by YPK PLN as the minority shareholder.

### FUTURE PROSPECTS AND PLANS

The Company's business prospects are closely related to PLN's power infrastructure development plan in order to improve the quality and reliability of the system and to meet customer needs. With the massive pace of infrastructure development, economic growth and socio-political stability over the last few years, Indonesia's demand for electricity will continue to increase in the coming years. Based on 2019-2028 General Plan for Electricity Supply (RUPTL), PLN projects the national electricity demand growth of 6.42% per year. With this projection, in 2028, the national electricity demand will reach 432,713 GWh with a projected number of customers to reach 88.1 million customers.

The need for electricity requires development of electricity infrastructure, starting from power plants, transmission networks to distribution networks, so that electricity can be distributed to consumers with the best quality and reliability. To meet the electricity demand of 432,713 GWh in 2028, it is necessary to build power plants with a total capacity of 56,395 MW, transmission network of 57,293 circuit kilometers (kms) and substations with a total capacity of 124,341 MVA.

In 2020, the Company has served its 9th year of assignment. The Company is entering a period of performance excellence where the quality of operational and financial performances must improve. The Company is committed to carrying out PLN assignments excellently to make a meaningful contribution in improving the quality of reliability and intensity of services to PLN customers.

The Company targets a market share growth of 9% from 38% in 2019 to 44% in 2020. The 44% market share is calculated from the total ULP PLN in Sumatera, Java and Bali, or the equivalent of 250 ULP. In addition, the Company targets 100% SLA achievement through quality improvement in

SLA sebesar 100% melalui perbaikan kualitas proses bisnis internal dan sumber daya manusia, serta terus berkomitmen untuk mencapai nihil kecelakaan melalui implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3).

Pada tahun 2018, Perusahaan telah menginisiasi proses transformasi jangka panjang untuk mengoptimalkan peran HP dalam mendukung keberlanjutan bisnis PLN. Sasaran utama dari transformasi ini adalah kualitas, reliabilitas, efektivitas biaya dan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan analisis atas tantangan dan peluang, Perusahaan menetapkan *Roadmap* Transformasi HP dalam 5 tahun ke depan untuk menjadi *asset manager* melalui penyeragaman portofolio usaha. Saat ini Perusahaan telah mengklasifikasi portofolio usaha menjadi 10 paket, di antaranya adalah paket layanan O&M distribusi *end-to-end*, dan 2 paket O&M distribusi *asset management contract* (AMC) yaitu AMC sebagai *asset operator* dan AMC sebagai *asset manager*.

Sebagai *asset operator*, Perusahaan harus menjadi mitra pelanggan yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara *end-to-end* demi mengamankan keberlanjutan usaha pelanggan. Oleh karena itu, strategi Perusahaan untuk bertransformasi menjadi *leading asset operator* adalah dengan melakukan *business process re-engineering*, di mana HP akan lebih proaktif dalam memelihara aset tanpa menunggu terjadinya gangguan atau keluhan dari pelanggan. Pemeliharaan yang dilakukan lebih menekankan kepada *condition based* dan *predictive maintenance*.

Untuk mencapai target pangsa pasar 44% pada tahun 2020, Perusahaan akan melakukan penambahan proyek baik pada pasar *captive* maupun *non-captive*. Pasar *captive* bidang O&M T&D berasal dari unit-unit PLN di Sumatera, Jawa dan Bali sesuai Keputusan Direksi PLN No. 0734.P/DIR/2014 dan No. 030.P/DIR/2017. Sedangkan pengembangan pasar *non-captive* di antaranya adalah pengembangan produk ListriQu dengan *marketplace* ListriQu Residential di DKI, Banten, Jawa Timur Metropolitan, Bojonegoro, ListriQu Premium (CBM, PDKB) di UID Jawa Timur dan UID DKI Jakarta, dan ListriQu PV *Rooftop* di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Pekanbaru. Selain itu, pasar *non-captive* juga mencakup pekerjaan industrial *cleaning* dan *building management* oleh HPI.

internal business processes and human resources, and keeps its commitment to achieving zero accidents through K3 Management System (SMK3) implementation.

In 2018, the Company initiated a long-term oriented transformation process to optimize HP's role in supporting PLN's business sustainability. The main targets of this transformation are quality, reliability, cost effectiveness and customer satisfaction.

Based on an analysis of threats and opportunities, the Company established HP Transformation Roadmap for the next 5 years to become an asset manager by aligning its business portfolios. Currently, the Company classifies its business portfolios into 10 packages, including end-to-end distribution O&M service package and 2 distribution O&M asset management contract (AMC) packages, consisting of AMC as an asset operator and AMC as an asset manager.

As an asset operator, the Company must serve as customers' partner that initiates end-to-end maintenance and repairs to ensure the customers' business sustainability. Therefore, the Company's strategy to transform into a leading asset operator is to conduct business process re-engineering, where HP will be more proactive in assets maintenance without preceding interruption or complaint from customers. The maintenance carried out emphasizes condition-based and predictive maintenance.

To achieve the targeted market share of 44% in 2020, the Company will undertake additional projects in both captive and non-captive markets. The captive phase of Transmission and Distribution O&M comes from PLN units in Sumatra, Java and Bali in accordance with Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0734.P/DIR/2014 and No. 030.P/DIR/2017. Meanwhile, expansion of non-captive markets includes ListriQu product development with ListriQu Residential marketplace in DKI, Banten, East Java Metropolitan, Bojonegoro, ListriQu Premium (CBM, PDKB) in UID East Java and UID DKI Jakarta, as well as ListriQu PV *Rooftop* in Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Pekanbaru. In addition, non-captive market also covers industrial cleaning and building management works performed by HPI.





## Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

### PERKEMBANGAN TATA KELOLA

HP telah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) untuk membangun citra korporasi yang berintegritas dan terpercaya. Integritas sudah menjadi bagian dari tata nilai Perusahaan "Believe" di mana setiap insan Perusahaan wajib mengedepankan integritas perilaku serta integritas penyampaian data dan proses bisnis dalam melaksanakan tugasnya.

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman bagi seluruh insan HP dalam menjalankan setiap aktivitas sesuai etika bisnis dan etika kerja yang berlaku. Secara berkala, Perusahaan mengevaluasi dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman terkait GCG dan proses bisnis, termasuk prosedur operasi standar yang mengacu pada kaidah-kaidah K3.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepatuhan penerapan GCG, setiap tahun Perusahaan melakukan penilaian GCG. Penilaian implementasi GCG periode tahun 2019 dilaksanakan pada awal tahun 2020. Penilaian ini dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh tim yang ditunjuk Direktur Utama.

Penilaian mandiri dititikberatkan pada evaluasi pemenuhan rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement/Aol*) terhadap hasil penilaian GCG tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil Penilaian GCG mandiri periode tahun 2019 mencapai skor 86,186, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 80,359.

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mengelola setiap laporan mengindikasikan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku. Berdasarkan rekomendasi tim penilai GCG, Perusahaan akan memperkuat peran dan wewenang tim pengelola WBS serta menyempurnakan mekanisme penanganan pengaduan. Penguatan WBS diyakini dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan meminimalkan potensi pelanggaran.

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menjawab tantangan bisnis dan mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan, HP terus melakukan pembenahan dan penguatan elemen-elemen dasar organisasi dan *human capital* melalui kebijakan yang berbasis kompetensi untuk menciptakan keunggulan operasi.

### CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT

HP is committed to implementing good corporate governance (GCG) to build a corporate image with integrity and trust. Integrity is a part of the "Believe" corporate values in which every personnel of the Company is required to prioritize the integrity of conduct and the integrity of data delivery and business processes in carrying out their duties.

The Company has Code of Conduct as a guide for all HP personnel in carrying out their activities in accordance with business and work ethics. The Company periodically evaluates and updates policies and guidelines related to GCG and business processes, including standard operating procedures that refer to K3 principles.

To obtain an overview of the level of compliance with GCG implementation, every year the Company conducts GCG assessment. Internal GCG assessment (*self-assessment*) for 2019 period was carried out in early 2020 by a team appointed by President Director.

The self-assessment was focused on evaluating fulfillment of Area of Improvement (Aol) on the results of 2018 GCG assessment conducted by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The results of the GCG self-assessment for 2019 reached a score of 86.186, an increase compared to the previous year of 80.359.

In 2014, the Company established whistleblowing system (WBS) to manage every report of alleged fraud, crime, or violations of the Company's policies and Code of Conduct. Based on recommendations of GCG assessment team, the Company will strengthen role and authority of WBS management team and refine the complaint handling mechanism. An enhanced WBS is believed to be able to improve effectiveness of internal control system and to minimize potential violations.

### HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

To address business challenges and to support the Company's business sustainability, HP continues to reform and strengthen the basic elements of the organization and human capital through competency-based policies in order to achieve operational excellence. In the previous year, the

Pada tahun sebelumnya, Perusahaan telah menyelesaikan pembenahan pada aspek-aspek: 1) pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja, 2) rekrutmen, dan 3) hubungan industrial. Sedangkan di tahun 2019, pembenahan pengelolaan *human capital* difokuskan pada aspek pembelajaran/pengembangan *human capital*, manajemen kinerja dan penghargaan.

Setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan standar kompetensi diri secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Perusahaan melaksanakan program pengembangan kompetensi yang berkesinambungan berupa pelatihan, *workshop* atau *upscalling* kapabilitas pegawai sesuai bidang kerjanya masing-masing. Perusahaan memberikan pelatihan secara bertahap hingga para tenaga kerja memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi setelah menempuh uji kompetensi keahliannya.

Program pelatihan dan pengembangan disusun berdasarkan *Learning Needs Analysis* (LNA) yang dilakukan oleh Pusdiklat PLN dan mengacu pada *Roadmap* Transformasi HP yang membutuhkan standardisasi kompetensi. LNA merupakan program dari PLN untuk membantu keberhasilan anak perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diberikan secara berjenjang, mulai dari tingkatan tenaga kerja (*workforce*), supervisor dan para manajer.

Pada tahun 2019 Perusahaan melaksanakan 17 program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan secara *in-house* di setiap region terutama untuk memastikan bahwa setiap personel dapat memahami dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, aman, dan sesuai prosedur operasi standar (SOP). Biaya pelatihan dan pengembangan pada tahun 2019 sebesar Rp944,75 juta, meningkat 25% dibandingkan Rp752,71 juta pada tahun 2018.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai anak perusahaan PLN dengan bisnis inti melaksanakan pengamanan layanan O&M jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, aktivitas operasional HP tersebar di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera. Kegiatan usaha Perusahaan tentu berpotensi memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jika dampak tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap aktivitas operasional Perusahaan. Sebaliknya, penerimaan dan dukungan

Company completed improvements in the following aspects: 1) organizational development and workforce planning, 2) recruitment and 3) industrial relations. Meanwhile, in 2019, improvement of human capital management will focus on the aspects of human capital learning/development, performance management and rewards.

Every employee is required to enhance their self-competence standards on an ongoing basis in order to be able to face changes in the dynamic business environment. The Company holds continuous competency development programs in the form of training, workshops or upscaling the capabilities of employees according to their respective fields of work. The Company provides training in stages until workers obtain competency/professional certification after taking skill competency test.

Training and development programs are prepared based on Learning Needs Analysis (LNA) conducted by Pusdiklat PLN and refers to HP's Transformation Roadmap which requires competency standardization. LNA is a PLN's program to help its subsidiaries carry out their business processes and overcome their challenges. Training and competency development programs are given in stages, for workforce, supervisor and manager levels.

In 2019, the Company held 17 in-house training and development programs in each region to ensure that each personnel understands and is able to carry out their duties properly, safely and according to standard operating procedures (SOP). Training and development costs in 2019 amounted to Rp944.75 million, an increase of 25% compared to Rp752.71 million in 2018.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a PLN's subsidiary with a core business of securing O&M services for electricity transmission and distribution networks, HP's operations spread across various regions in Java and Sumatera. The Company's business activities inevitably have potential impact on the surrounding community and environment. If the impact is not managed properly, it can create a bigger risk to the Company's operations. On the other hand, public acceptance and support for the Company's existence in its environment



## Laporan Direksi

### Report from the Board of Directors

masyarakat atas keberadaan Perusahaan di lingkungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan dalam mencapai target kinerja dan keberlanjutan usaha.

Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa membina hubungan yang baik dan saling memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui penerapan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkualitas dan berkelanjutan, Perusahaan berupaya berbagi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program CSR HP diatur dalam Peraturan Direksi No. 0004.P/DPR-HP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perdir 0004.P/2017). Lingkup kegiatan CSR Perusahaan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Saat ini, sebagian besar kegiatan CSR Perusahaan masih bersifat mendukung kegiatan CSR PLN (Program PLN Peduli) dan donasi atau bantuan insidental. Dengan berpedoman pada Perdir 0004.P/2017, program-program CSR Perusahaan akan difokuskan pada kegiatan yang menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan *corporate branding*.

Salah satu kegiatan CSR pada tahun 2019 adalah kolaborasi dengan PLN dan PT Icon+ melaksanakan kegiatan CSR Inspeksi Instalasi Pelanggan dan Pembentukan Komunitas Peduli Kelistrikan. Kegiatan yang termasuk rangkaian perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan RI dilaksanakan di 23 UP3 yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Target pemeriksaan instalasi kelistrikan sebanyak 2.300 pelanggan.

Instalasi kelistrikan sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pelanggan karena kewajiban PLN hanya sampai dengan Kwh meter. Tetapi karena masih sering terjadi musibah kebakaran atau kecelakaan tersengat aliran listrik akibat instalasi rumah yang tidak sesuai standar, PLN, HP dan Icon+ berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan instalasi listrik dan masyarakat pengguna.

is one of the Company's key success factors in achieving performance targets and business sustainability.

Therefore, the Company always maintains good and beneficial relationships with the stakeholders by showing empathy and responsibility for the community's social conditions. Through the implementation of quality and sustainable corporate social responsibility (CSR) programs, the Company seeks to share benefits in order to improve community welfare.

HP's CSR programs are regulated in Regulation of the Board of Directors No. 0004.P/DPR-HP/2017 dated October 2, 2017 concerning Guidelines for Implementation of Corporate Social Responsibility (Perdir 0004.P/2017). The scope of the Company's CSR activities covers the fields of education, health, social community and the environment. The existing CSR activities are mostly supporting PLN's CSR activities (PLN Cares Program), donations or incidental aids. Based on Perdir 0004.P/2017, the Company's CSR programs are expected to focus on activities that produce measurable and sustainable impacts, as well as to be able to enhance corporate branding.

One of the CSR activities in 2019 was collaboration with PLN and PT Icon+ to carry out CSR activities for Customer Installation Inspections and the Establishment of Electricity Care Community. Those activities were held to celebrate the 74<sup>th</sup> Independence Day of the Republic of Indonesia in 23 UP3 in DKI Jakarta, Banten and parts of West Java. The electrical installation inspection target was 2,300 customers.

Electrical installation is actually the responsibility of the customer since PLN's obligation is only up to Kwh meter. However, due to frequent fires or accidents of electric shock due to non-standard home installations, PLN, HP and Icon+ took the initiative to carry out this activity as a form of concern for the safety of electrical installations and the users/public.



Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Perusahaan juga menginisiasi terbentuknya Komunitas Peduli Kelistrikan. Komunitas tersebut didukung oleh pemerintah daerah setempat hingga ke struktur RT/RW. Tujuan pembentukan komunitas adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keselamatan komunitasnya terhadap bahaya listrik.

### **PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI**

Tidak ada perubahan komposisi Direksi Perusahaan pada tahun 2019.

### **APRESIASI**

Mewakili Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan, arahan dan nasihat penting sepanjang tahun 2019, serta kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh insan Perusahaan yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan integritas menghadapi berbagai tantangan yang ada. Semoga PT Haleyora Power dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi Pemegang Saham, pegawai, dan masyarakat luas.

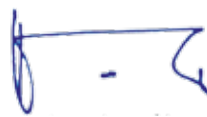
Along with those activities, the Company also initiated the formation of Electricity Care Community. The community is supported by the local government up to RT/RW level. The purpose of forming this community is to increase community participation in maintaining the safety of their community against the dangers of electricity.

### **CHANGES IN COMPOSITION OF the BOARD OF DIRECTORS**

There were no changes in composition of the Company's Board of Directors in 2019.

### **APPRECIATIONS**

On behalf of the Board of Directors, I would like to thank the Board of Commissioners for providing insightful supports, guidances and advices during 2019, as well as to Shareholders for their trust. My highest appreciation goes to all personnel of the Company who work hard with high dedication and integrity in facing various challenges. Hopefully, PT Haleyora Power will continue to provide optimal benefits to Shareholders, employees and the society.



**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director

## Direksi

### Board of Directors



**Sinung Triwulandari**  
Direktur Operasi  
Director of Operations

**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director

**Sutrisno Samad**  
Direktur Keuangan & SDM  
Director of Finance &  
Human Resources

# SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019

## Statement Letter of the Board of Commissioners and the Board of Directors Relating to the Responsibility on the 2019 Annual Report

Laporan Tahunan 2019 PT Haleyora Power menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Dewan Komisaris dan Direksi PT Haleyora Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2019 PT Haleyora Power.

Jakarta, Juni 2020

The 2019 Annual Report of PT Haleyora Power presents information regarding performance of the company, corporate governance practices, corporate social responsibility implementation, Financial Statements for the year ended December 31, 2019, and other relevant and significant information for the stakeholders.

We, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Haleyora Power the undersigned, are fully responsible for the accuracy of the contents of the 2019 Annual Report of PT Haleyora Power.

Jakarta, June 2020

### Dewan Komisaris Board of Commissioners



**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner



**Purnama T. Sianturi**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner



**Karyawan Aji**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

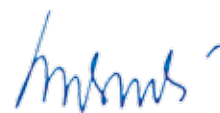
### Direksi Board of Directors



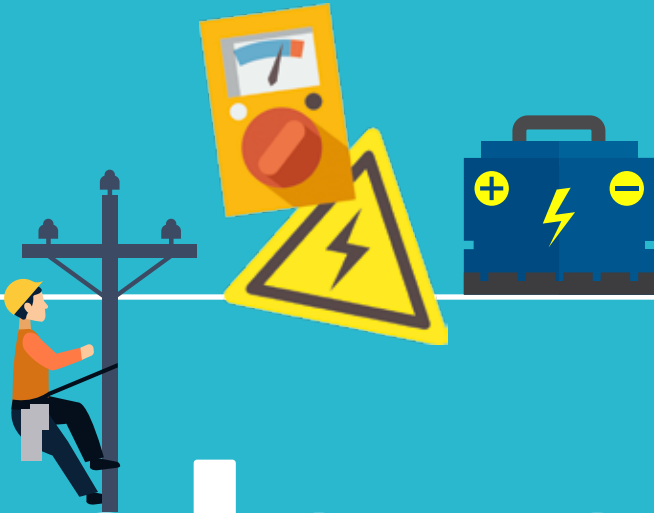
**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director



**Sinung Triwulandari**  
Direktur Operasi  
Director of Operations

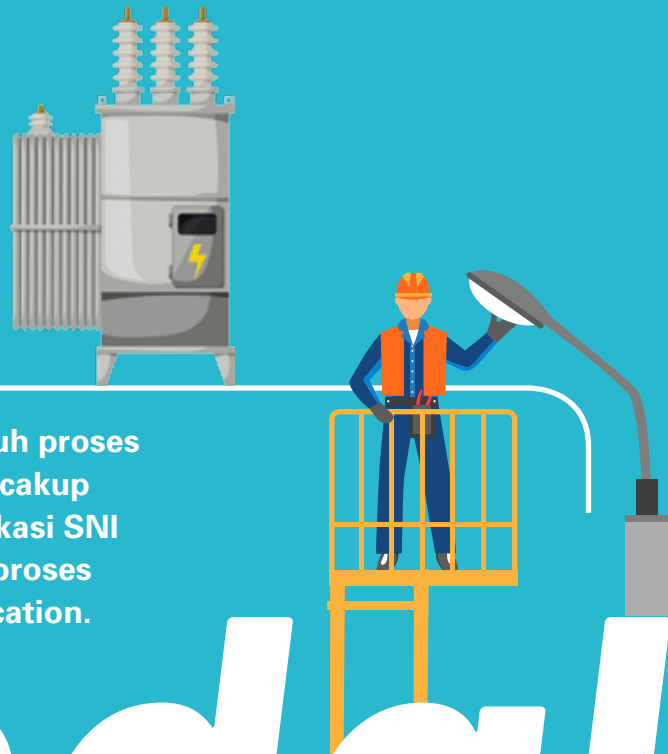


**Sutrisno Samad**  
Direktur Keuangan & SDM  
Director of Finance & Human Resources



# pelayanan yang





Hingga akhir tahun 2019, seluruh proses bisnis di Perusahaan yang mencakup 12 proses bisnis telah tersertifikasi SNI ISO 9001:2015 setelah melalui proses asesmen oleh PLN LMK-Certification.

# andal

## RELIABLE SERVICES

At end of 2019, all business processes in the Company which include 12 business processes have obtained SNI ISO 9001:2015 certificate undertaking assessment process held by PLN LMK-Certification.



# Identitas Perusahaan

## Company Identity



**Nama**  
Name  
**PT Haleyora Power**


**Nama Panggilan**  
Nickname  
**HP**

**Status Perusahaan**  
Company Status  
Anak Perusahaan PT PLN (Persero)  
Subsidiary of PT PLN (Persero)



**Kepemilikan Saham**  
Shareholders

- PT PLN (Persero) sebanyak 99.999 lembar saham atau sebanyak 99,99% saham dan
- Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar saham atau sebesar 0,01%.
  - PT PLN (Persero) with 99,999 shares or 99.99% shares, and
  - Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan of PT PLN (Persero) with 1 shares or 0.01%



**Bidang Usaha**  
Business Sectors

Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan yang meliputi:

- Survei Teknis Perluasan Jaringan Distribusi, Pelayanan Pelanggan, Pembangunan dan *Updating Data* Jaringan Distribusi.
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi, yang mencakup:
  - Gardu Induk
  - Gardu Distribusi
  - Jaringan Tegangan Tinggi (JTT)
  - Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
  - Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
  - Sambungan Rumah (SR)
  - Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
  - Penyediaan Material Pemeliharaan

Providing operation and maintenance services including:

- Technical survey of distribution networks expansion, customer service, construction and updating of distribution network data.
- Operation and maintenance of transmission and distribution installations, including:
  - Substation
  - Distribution Substation
  - High-Voltage Network (JTT)
  - Medium-Voltage Network (JTM)
  - Low-Voltage Network (JTR)
  - Household Connection (SR)
  - Metering and Limiting Device (APP)
  - Maintenance Materials Provision



**Tanggal Pendirian**  
Date of Establishment  
18 Oktober 2011  
October 18, 2011

**Dasar Hukum Pendirian**  
Establishment Legal Basis

Akta Pendirian No. 36, tertanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar HP telah mengalami perubahan beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 104 tanggal 27 November 2017 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan kepengurusan Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 tanggal 30 November 2017.

Deed of establishment No. 36, dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta. The Articles of association of HP have been amended several times, recently by notarial deed No. 104 dated November 27, 2017 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta related to changes of the company's management composition. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0196200 dated November 30, 2017.





**Modal Dasar**  
**Authorized Capital**

Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 100.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).  
Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) which is divided into 100,000 shares, per shares with nominal of Rp1,000,000 (one million rupiah).




**Jaringan Kantor**  
**Office Network**

- 7 Region
- 38 Area
- 4 APD (Area Pengatur Distribusi)
- 231 Rayon
- 7 Regions
- 38 Areas
- 4 APDs
- 231 Rayons




**Kantor Pusat**  
**Head Office**

Kindo Square, Blok A15–A16  
Jalan Duren Tiga Raya No. 101,  
Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan  
Tel. : (021) 7919 2517  
Fax. : (021) 7919 2516  
Kindo Square, Block A15–A16  
Jalan Duren Tiga Raya No. 101,  
Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta  
Tel. : (021) 7919 2517  
Fax. : (021) 7919 2516



**Situs**  
**Website**

[www.haleyorapower.co.id](https://www.haleyorapower.co.id)



**Surat Elektronik**  
**E-mail**

[kontak@haleyorapower.co.id](mailto:kontak@haleyorapower.co.id)



**Contact Center Instagram**  
**Contact Center Instagram**

[@haleyorapower](https://www.instagram.com/haleyorapower)

# Sekilas Perusahaan

## Company in Brief



PT Haleyora Power (“HP”) adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011. Pada awalnya, HP dibentuk untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik 260 MW (PLTU 3x30 MW dan PLTD 10x17 MW) untuk memasok listrik bagi kegiatan penambangan dan *smelter* PT Aneka Tambang (Antam) yang akan dibuka di Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara. Pada perkembangannya, rencana kerja sama tersebut tidak terealisasi karena berbagai sebab sehingga HP berstatus non-aktif.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi dinamika perubahan bisnis yang dihadapi PLN, HP diarahkan untuk mengelola bisnis penjualan tenaga listrik (ritel) yang diperkirakan akan semakin kompetitif di masa mendatang melalui pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan layanan dan tarif khusus, sehingga dapat menekan subsidi.

Sebagai tahap awal, HP ditunjuk untuk mewakili PLN menjalin kerja sama dengan PT Pelindo II dengan mendirikan perusahaan patungan PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)

PT Haleyora Power (“HP”) is a subsidiary of PT PLN (Persero) which was established on October 18, 2011. Initially, HP was incorporated to build and operate 260 MW power plant (PLTU 3x30 MW and PLTD 10x17 MW) to supply power to mining and smelter activities of PT Aneka Tambang (Antam) to be opened in Buli, East Halmahera, North Maluku. In its development, the cooperation plan was not realized due to various reasons so that HP was then inactive.

Subsequently, to anticipate the dynamic business faced by PLN, HP was directed to manage power sales (retail) which was expected to be increasingly competitive in the future through development of power supply with special services and tariffs, so as to reduce subsidies.

As an initial step, HP was appointed to represent PLN in cooperation with PT Pelindo II by establishing a joint venture company PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) in which



## Pada tahun 2019, Perusahaan menyelesaikan akuisisi 5% kepemilikan saham minoritas di HPI senilai Rp8,83 miliar sehingga kepemilikan saham HP di HPI berubah dari 90% menjadi 95% dan 5% sisanya dimiliki YPK PLN.

In 2019, the Company completed the acquisition of a 5% minority shareholding in HPI worth Rp8.83 billion so that HP's share ownership in HPI changed from 90% to 95% and the remaining 5% was owned by YPK PLN.

di mana HP menjadi pemegang 45%. Perjanjian pendirian perusahaan No. 001/041/HP/2012 ditandatangani pada 4 Oktober 2012. Bidang usaha EPI adalah menyalurkan dan menjual listrik kepada *tenant* di kawasan Pelindo II dengan skema penjualan listrik secara *bulk* dan tarif premium B2B (*business to business*).

Pada tanggal 14 September 2012, HP menerima penugasan untuk menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance/O&M*) transmisi dan distribusi tenaga listrik, bekerja sama dengan unit-unit PLN Wilayah berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2013, HP mengakuisisi PT Mitra Insan Utama (MIU), perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Kesejahteraan (YPK) PLN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja. MIU kemudian berubah nama menjadi PT Haleyora Powerindo (HPI) berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 17 tanggal 23 Januari 2013. Bidang

HP holds 45%. The company establishment agreement No. 001/041/HP/2012 was signed on October 4, 2012. EPI's business line is to distribute and sell power to tenants in Pelindo II area with a bulk power sales scheme and B2B (*business to business*) premium rates.

On September 14, 2012, HP was assigned to provide operation and maintenance (O&M) services for transmission and distribution of power, in cooperation with Regional PLN units based on the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No 459.K/DIR/2012 concerning Security of Operation and Maintenance of Power Transmission and Distribution Services.

In 2013, HP acquired PT Mitra Insan Utama (MIU), a company whose majority shares are owned by Yayasan Pendidikan Kesejahteraan (YPK) PLN engaged in workforce supply. MIU then changed its name to PT Haleyora Powerindo (HPI) based on Meeting Deed No. 17 dated January 23, 2013. HPI's business areas include technical services for plant operations



## Sekilas Perusahaan Company in Brief

usaha HPI meliputi layanan Teknik untuk operasi dan pemeliharaan pembangkit dan distribusi, layanan non-teknik (*buliding management, billing management*), *industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM)*.

Pada tanggal 18 April 2017, Direksi PLN menerbitkan Peraturan Direksi No. 0030.P/DIR/2017 tentang Perubahan Peraturan Direksi No. 734.K/DIR/2013 tentang Kebijakan Zonasi/Regionalisasi Wilayah Operasi PT Haleyora Power dan PLN Tarakan di mana HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatera, Jawa dan Bali, sedangkan PT PLN Tarakan mengelola wilayah kerja Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Proses transisi telah dimulai sejak pertengahan tahun 2017 di mana HP telah menata ulang rencana kerja dan anggaran serta rencana jangka panjang perusahaan secara menyeluruh dengan memperhatikan zonasi wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Saat ini, HP memiliki wilayah operasional yang terdiri dari 7 region dan 3 area khusus mencakup 60 area/APP/UPT tersebar di Sumatera dan Jawa.

and maintenance and distribution, non-technical services (building management, billing management), industrial cleaning, integrated document management system (IDMS), enterprise asset management (EAM).

On April 18, 2017, the PLN's Board of Directors issued Regulation of the Board of Directors No. 0030.P/DIR/2017 concerning Amendment to the Board of Directors Regulation No. 734.K/DIR/2013 concerning Zoning/Regionalization Policy of Operational Areas of PT Haleyora Power and PLN Tarakan with HP appointed to manage operational areas covering Sumatera, Java and Bali, while PT PLN Tarakan manages operational areas consisting of Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua.

The transition process has begun since mid-2017 with HP reorganizing its work plan and budget as well as the Company's long-term plan comprehensively with due regard to the predetermined zoning of the operational areas.

Currently, HP's operational areas consisting of 7 regions and 3 special areas covering 60 areas/APP/UPT spread across Sumatera and Java.





# Jejak Langkah

## Milestones



- Didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011
- Established on October 18, 2011

2011

- Penugasan bidang O&M Transmisi dan Distribusi berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) (Perdir) No. 459.K/DIR/2012.
- Mendirikan perusahaan patungan PT EPI dengan PT Pelindo 2.
- Assignment in the field of O&M Transmission and Distribution based on the Directors of PT PLN (Persero) Regulation No. 459.K/DIR/2012.
- Established a joint venture company named PT EPI with PT Pelindo 2.

2012

- Mengakuisisi PT MIU.
- Mengerjakan proyek di Salatiga (*Pilot Project 2 Layer*), SBU, Majalaya, Padang.
- Menerima Perdir No. 734. DIR/2013 tentang Penugasan Layanan O&M Transmisi dan Distribusi.
- Acquired PT MIU.
- Carried out projects in Salatiga (Pilot Project 2 Layers), SBU, Majalaya, Padang.
- Accepted the Directors of PT PLN (Persero) Regulation No. 734.DIR/2013 on Assignment of O&M Transmission and Distribution Services.

2013

- Perjanjian kerja sama (PKS) antara PLN dan HP (037.P.J.040/DIR/2014).
- Implementasi Perdir 734. DIR/2013.
- Implementasi PKS di Jawa Timur dan DKI
- Migrasi proyek ex HPI di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.
- Cooperation agreement (PKS) between PLN and HP (037.P.J.040/DIR/2014).
- Implementation of the Directors of PT PLN (Persero) Regulation No. 734.DIR/2013.
- Implementation of PKS in East Java and DKI.
- Migration of ex HPI projects in PLN Distribution of West Java and Banten.

2014



- Perubahan nama dari MIU menjadi HPI.
- Mengerjakan proyek eksisting di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua.
- Change name from MIU to HPI.
- Carried out existing projects in Kalimantan, Java, Sumatra, and Papua.

- Proyek di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten dimigrasi ke HPI.
- Menjalankan proyek eksisting (lelang/penunjukan).
- Projects in PLN Distribution of West Java and Banten were migrated to HPI.
- Carried our existing projects (tender/appointment).



- Perluasan di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI.
- Persiapan layanan *end-to-end*.
- Business expansion in PLN Distribution of West Java and Banten, Central Java, East Java and Jakarta.
- Preparation to provide end-to-end service.

2015

- Menjalankan proyek eksisting (lelang/ penunjukan).
- Perluasan di Sulawesi dan Nusa Tenggara.
- Carried our existing projects (tender/ appointment).
- Business expansion in Sulawesi and Nusa Tenggara.

- Perluasan di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan Banten
- Proyek percontohan layanan *end-to-end* distribusi di Sidoarjo, Semarang, Sumatera.
- Sosialisasi layanan *end-to-end* di Jawa dan Sumatera.
- Business expansion in Central Java, East Java, Jakarta and Banten.
- Pilot project of end-to-end distribution service in Sidoarjo, Semarang, Sumatra.
- Socialization of end-to-end service in Java and Sumatra.

2016-2018

- Menjalankan proyek eksisting (lelang/ penunjukan).
- Perluasan di Ambon, Kalimantan, Sulawesi.
- Migrasi proyek ke penugasan HP dan PT PLN Tarakan.
- Zonasi penugasan.
- Carried our existing projects (tender/ appointment).
- Business expansion in Ambon, Kalimantan, Sulawesi.
- Project migration to the assignment of HP and PT PLN Tarakan.
- Zoning of assignment.

- Meluncurkan produk layanan digital ListriQu
- Launched the ListriQu digital service product

2019

# Bidang Usaha

## Business Sectors

### Bidang Usaha menurut Anggaran Dasar

Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan, dan jasa, yaitu terdiri dari:

1. Menjalankan usaha di bidang industri pembangkitan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran, serta usaha-usaha lain terkait ketenagalistrikan; industri mesin listrik dan perlengkapannya; fabrikasi peralatan listrik dan elektronik; daur ulang peralatan listrik dan elektronik; pembangkitan listrik tenaga batu bara, minyak bumi, gas, air, panas bumi dan *co-generation*; serta kegiatan usaha terkait.
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat; dan bertindak sebagai pemasok, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, yang meliputi pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik; serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan (gardu induk listrik, transmisi, dan distribusi); sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri; sertifikasi sistem manajemen mutu; konsultasi bidang kelistrikan, antara lain meliputi perencanaan perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana; konsultasi bidang listrik elektronika, pengujian dan penerapan alat listrik, serta kegiatan usaha terkait lainnya.

### Business Sectors According to the Articles of Association

The purpose and objectives of the Company based on Article 3 of the Articles of Association are business in the fields of industry, trade, construction, and services, which consist of:

1. Performing business in the electricity generation industry, which includes for power plant, sales, distribution, and other ventures related to electricity; electrical machinery industry and its equipment; fabrication of electrical and electronic equipment; recycling of electrical and electronic equipment; coal power plant, petroleum, gas, water, geothermal, and cogeneration; and related business activities.
2. Performing business in trade sector, including import and export and trade in electrical and electronic equipment, covering import and export trade between island/region and local and inter-port (interinsulair), either on their own account and for the calculation of other person or legal entity on the basis of commission or by mandate; and acting as a supplier, wholesaler, distributor, commissioner, representative, or agency, both domestically and abroad
3. Performing business in the sector of construction, which is including the installation, maintenance of electricity equipment and the development of technologies that support the supply of electricity; management and utilization of natural resources and other energy sources for the benefit of electricity, in accordance with applicable laws and regulations.
4. Performing business in the sector of inspection and testing of electric power installations services; certification of feasible operation of the electricity system (substation, transmission, and distribution); electrical product quality certification by domestic products; quality management system certification; consultation in the sector of electrical electronic, including planning of housing, office buildings and facilities, and infrastructure; consultation in the sector of electrical electronic, testing and electrical appliances, and the other related business activities.

## Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini

Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan yang meliputi:

1. Survei teknis perluasan jaringan distribusi, Pelayanan pelanggan, Pembangunan dan *updating* data jaringan distribusi.
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Transmisi dan Distribusi, yang mencakup:
  - a. Gardu Induk
  - b. Gardu Distribusi
  - c. Jaringan Tegangan Tinggi (JTT)
  - d. Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
  - e. Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
  - f. Sambungan Rumah (SR)
  - g. Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
  - h. Penyediaan Material Pemeliharaan

## Current Business Activities

Providing operation and maintenance services including:

1. Technical survey of distribution network expansion, customer service, construction and updating of distribution network data.
2. Operation and Maintenance of Transmission and Distribution Installation, including:
  - a. Substation
  - b. Distribution Substation
  - c. High-Voltage Network (JTT)
  - d. Medium-Voltage Network (JTM)
  - e. Low-Voltage Network (JTR)
  - f. Household Connection (SR)
  - g. Metering and Limiting Device (APP)
  - h. Maintenance Materials Provision

## Produk dan/atau Jasa yang Dihasilkan

HP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan wilayah operasional Jawa dan Sumatera. Dalam menjalankan operasional tersebut HP menyusun *catalogue service* sebagai panduan kepada pelanggan sebagai berikut:

## Products and Services

HP has a major business segment as a service provider for the operation and maintenance of electricity transmission and distribution with operational areas of Java and Sumatra. In performing these operations, HP compiles the catalogue service as a guide to the customer are as follows:

DISTRIBUSI Distribution		NIAGA Commerce		TRANSMISI Transmission	
PROBIS	SERVICES	PROBIS	SERVICES	PROBIS	SERVICES
OPERASI Operation	OPERATOR/ COMMAND CENTRE	YANBUNG	MCB ON	OPHAR	OP SEL 20 KV
	YANDAL & PATROL	MANBILL	PDIL		HAR SEL 20 KV
	CORRECTIVE ACTION		CATER		HAR INSTRUMEN
HAR	PRAKONDISI ROW Precondition Row	REVASS GARDU	PENAGIHAN Billing	OPHAR TT	OP SEL 150 KV
	HAR ROW		PDP & REKON ENERGI		GROUND PATROL TRANS
	HAR JTM		HAR GARDU, JTR & SR HAR Substation, SVN & HW		HAR SEL 150 KV
	HAR JAR & GARDU		HAR METER		HAR INSTRUMENT
	HAR KUBIKEL		P2TL		HAR SWITCH YARD 150 KV
	Har Meter Solution				

# Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan

## Objective, Target, and Strategy of the Company

### Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah “untuk berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan dan jasa”.

### Objective Company

In accordance with the Articles of Association, purpose and objective of this Company is “to strive in the sector of industry, trade, development, and services”.

### Sasaran Perusahaan

Sasaran yang ingin dicapai Perusahaan dalam rangka menuju Visi Perusahaan yang ditetapkan merupakan sasaran utama yang pencapaiannya dilakukan dengan tahapan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

### Target of the Company

Target that the Company wants to achieve towards the Company Vision is the main target that the achievement is performed by phase in the long-term company plan (RJPP)

Adapun sasaran setiap tahun yang akan dicapai HP dijabarkan lebih lanjut dalam *Roadmap* Menuju Visi Perusahaan, sebagaimana uraian berikut:

The annual target that HP will achieve are further described in the Roadmap to the Corporate Vision, are as follow:

HIGH LEVEL STRATEGY ROADMAP	VISI Vision	MISI Mission
	Menjadi <i>Asset Operator</i> sistem Ketenagalistrikan yang terkemuka dengan standar dunia	1. Mengamankan, menyederhanakan, dan mempercepat proses bisnis layanan O&M di bidang Ketenagalistrikan. 2. Menjalankan bisnis <i>Asset Operator</i> sistem ketenagalistrikan yang berkualitas dan efisien. 3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme <i>Human Capital</i> untuk menjamin kepuasan pelanggan. 4. Meningkatkan daya saing dan <i>sustainability</i> perusahaan melalui pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan.
Become the Leading Asset of the Electricity System Operator with World-Class Standards	1. Secure, simplify and accelerate the O&M service business process in the electricity sector 2. Run an efficient and high quality electricity system Operator Asset business 3. Develop competence and Professionalism of Human Capital to ensure customer satisfaction 4. Increase competitiveness and sustainability company through business development in the electricity sector	

PERSPEKTIF BSC BSC Perspective	PANDANGAN INDUSTRI Industry Foresight	GAP AS IS GAP as is	SASARAN STRATEGIS Strategic Target	PROGRAM PRIORITAS Priority Program	KPI
Pelanggan Customers	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan pelanggan akan kecepatan dan kualitas layanan semakin tinggi</li> <li>Daya tawar pelanggan akan semakin tinggi seiring dengan UU perlindungan konsumen</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Customer demands for speed and quality of service are increasingly high</li> <li>Customer bargaining power will increase along with the Law of Consumer Protection</li> </ol>	CSI HP < CSI LEADING PRACTICE	CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun standar perilaku layanan</li> <li>Membangun                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Build Service Behavior Standards</li> <li>Build Customer Relationship Management</li> </ol> </li> </ol>	CSI
Produk dan Layanan Produk and Services	<ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan O&amp;M Ketenagalistrikan tumbuh seiring dengan 35.000 MW</li> <li>Tuntutan kualitas produk O&amp;M Ketenagalistrikan berbasis K3</li> <li>Terbukanya layanan jasa O&amp;M Ketenagalistrikan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>O&amp;M electricity service grow along with 35.000 MW</li> <li>K3-based demand for product quality O&amp;M electricity</li> <li>The opening of electricity O&amp;M services Non Captive Market</li> </ol>	Bersifat Reaktif Kolektif Collective Reactive	PRODUCT DEVELOPMENT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan produk baru dengan optimalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>Pengembangan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>New product development with optimalization resource and utilization of information technology</li> <li>Development End to End Services</li> </ol> </li> </ol>	End to End Services
Proses Bisnis Internal Internal Bisnis Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan Layanan berbasis IT semakin meningkat</li> <li>Tuntutan</li> <li>Tuntutan standarisasi layanan berdasarkan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Demands for IT-based services are increasing</li> <li>Demands of Zero Accident</li> <li>Demands of standardization services based of best pratice</li> </ol>	Business as Usual	PROBIS EXCELLENT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pada 2. Standardisasi Bisnis Proses O&amp;M Ketenagalistrikan</li> <li>Membangun layanan modern berbasis .</li> <li>Menyusun dan</li> <li>Menyusun perencanaan kerja berbasis</li> <li>Reinforcement at Work Service Resource Management</li> <li>Standarization of Business Precesses O&amp;M Electricity</li> <li>Build mobility-based modern services</li> <li>Set Service Catalogue and Costing Model O</li> <li>Compile asset based management work plant</li> </ol>	HP Go Mobile



**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan**  
Objective, Target, and Strategy of the Company

PERSPEKTIF BSC BSC Perspective	PANDANGAN INDUSTRI Industry Foresight	GAP AS IS GAP as is	SASARAN STRATEGIS Strategic Target	PROGRAM PRIORITAS Priority Program	KPI
Sumber Daya Manusia Human Resources	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan Kompetensi dan Profesionalisme SDM</li> <li>Tuntutan sikap dan perilaku layanan yang ekselen</li> </ol> <p>1. Demands of Competence and Professionalism Human Resources 2. Demand for excellent service attitudes and behaviors</p>	Bersifat secara Personalia Personnel	HCM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan pengembangan Organisasi melalui alignment dengan Organisasi Induk dan Anak Perusahaan</li> <li>Pengembangan training</li> <li>Pengembangan kompetensi pengelolaan SDM</li> <li>Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja</li> </ol> <p>1. Reinforcement and development organization through alignment with Main Organization and Subsidiaries 2. Development of Leadership training 3. Development of competence of management human resources 4. Conducting labor training and certification</p>	Sertifikasi HCR & OCR Certification HCR & OCR
Keuangan dan Pasar Finance and Market	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasar semakin terbuka dan persaingan industri O&amp;M semakin ketat</li> <li>Tuntutan efisiensi dan peningkatan laba dari</li> </ol> <p>1. Market is increasingly open and O&amp;M industry competition is increasingly tigh 2. Demands for efficiency and profit growth from non-captive market</p>	Fokus di Pasar Captive Focus on Market Captive	PENETRASI PASAR MARKET PENETRATION	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan potensi Pengukuran Kinerja berbasis</li> <li>Implementasi EDP terkait pada perbaikan SCM</li> </ol> <p>1. Do the business intelligence potency non captive 2. Leading industry based performance measurement 3. Implementation EDP related to repair SCM</p>	End to End Services
Kepemimpinan Leadership	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan transparansi dan GCG dalam pengelolaan bisnis</li> <li>Diperlukan pemimpin masa depan yang kompeten, visioner, berintegritas dan menjadi</li> </ol> <p>1. Transparency and GCG demands in business management 2. Future leaders who are competent, visionary, integrity and be a role model</p>	Kepemimpinan belum tumbuh Grass Road leadership hasn't grow yet	VISIONARY INTEGRITY LEADERSHIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan kepemimpinan di seluruh level</li> <li>Pelatihan</li> <li>Pembinaan</li> </ol> <p>1. Leadership coaching at all stages 2. Teamwork coaching 3. Mental Workforce coaching</p>	GCG KPKU



**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan**  
Objective, Target, and Strategy of the Company

HIGH LEVEL STRATEGY ROADMAP	Stabilization		Excellent Performance		Trend Setter
	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Training Leaders Competencies 2. End to end 50% 3. Revenue Growth 15% 4. GCG = 85 5. OFI KPKU = SA 376 6. HP Go Mobile 50%	1. Training Leaders Competencies 2. End to end 50% 3. Revenue Growth 20% 4. GCG = 87 5. KPKU = 425 6. HP Go Mobile 50%	1. Innovation 2. End to end 100% 3. Revenue Growth 15% 4. GCG = 88 5. OFI KPKU = SA 476 6. HP Go Mobile 100%	1. Innovation 2. Sertifikasi TK 100% 3. Revenue Growth 15% 4. GCG = 90 5. KPKU = 500 6. HP Go Mobile 100%	1. Innovation 2. Sertifikasi TK 100% 3. Revenue Growth 15% 4. GCG = 91 5. OFI KPKU = SA 576 6. HP Go Mobile 100%

## Strategi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) yang dituangkan dalam matriks *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) maka HP menetapkan 7 (tujuh) Strategi Utama sesuai dengan RJP di atas yaitu:

1. *Performance Improvement*, dalam rangka menjawab tantangan yang terkait tuntutan profesionalisme dalam standar layanan dan penerapan MEA.
2. *Product Development and Diversification*, dalam rangka mengoptimalkan kekuatan internal untuk meraih peluang pasar *non captive*.
3. *Human Capital Management Excellent*, dalam rangka memenuhi HCR & OCR guna meningkatkan profesionalisme dan kepuasan tenaga kerja.
4. *Penetrasi Market Non Captive*, dalam rangka peningkatan laba Perusahaan.
5. *Business Process Excellent*, dalam rangka menyiapkan diri untuk menjadi *leader practice* di bidang O&M sistem ketenagalistrikan dan serta pengelolaan *management building* dan *back office*.
6. *Customer Service Excellent*, dalam rangka memenuhi tuntutan profesionalisme standar layanan dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

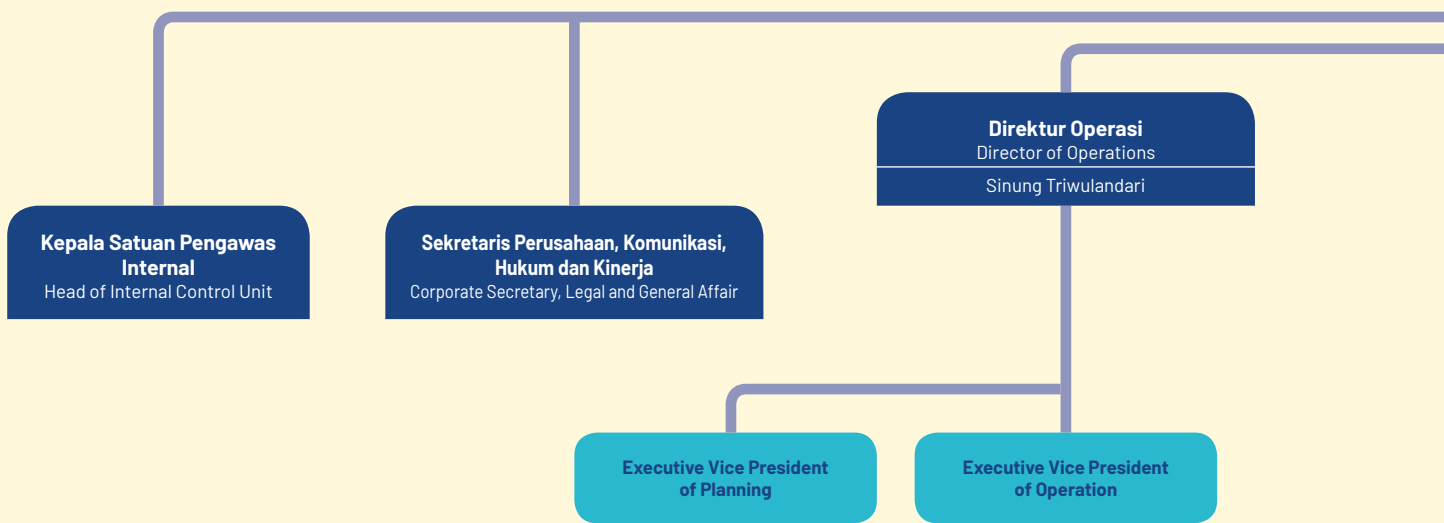
## Strategy of the Company

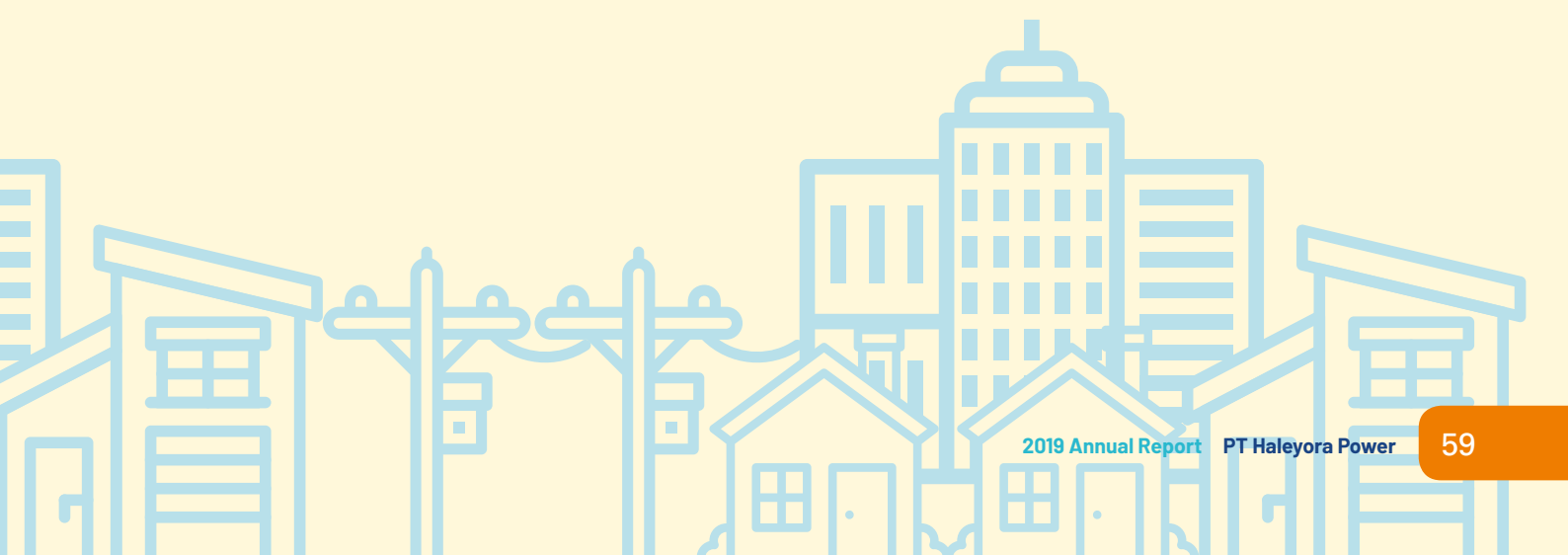
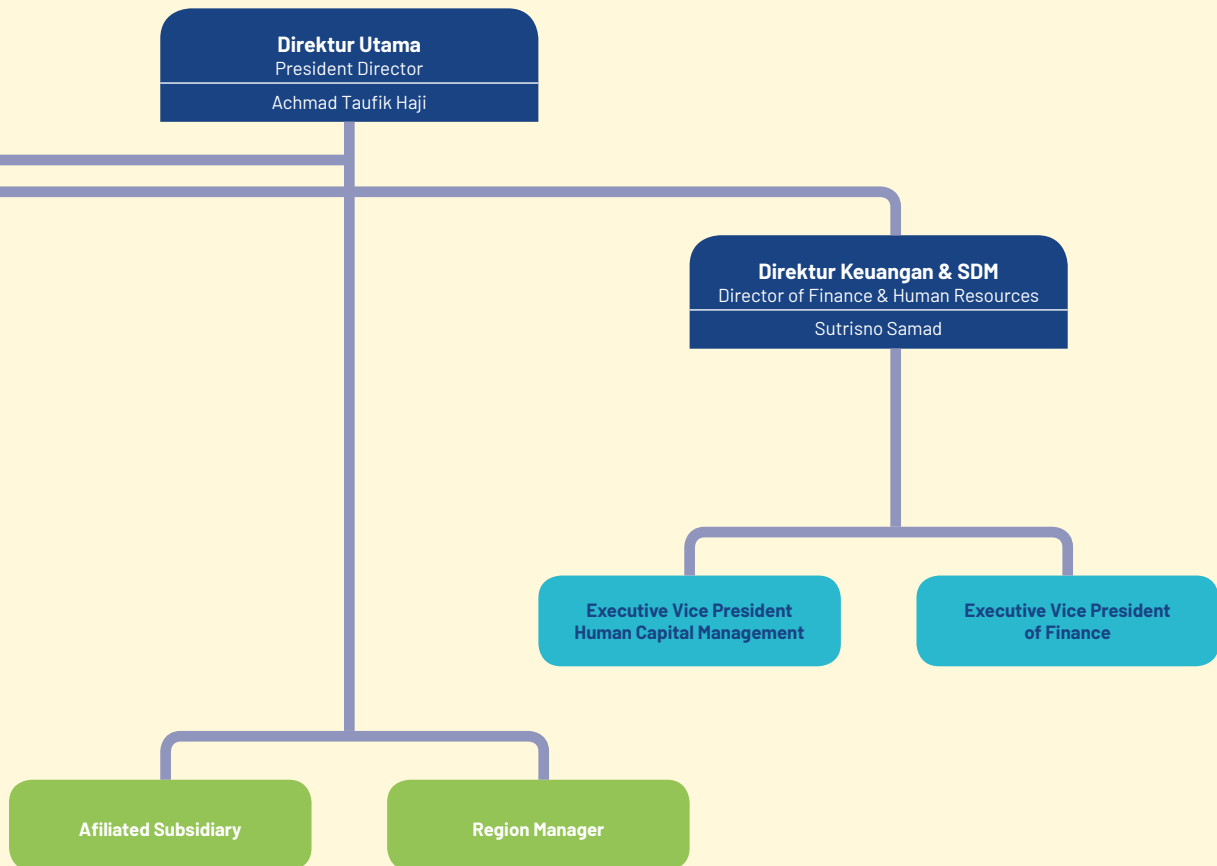
Based on the analysis results of *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat* (SWOT) as stated in the matrix *Threat, Opportunity, Weakness, Strength* (TOWS) that HP stipulates 7 (seven) Main Strategies in accordance with the RJP above, which are:

1. *Performance Improvement*, in answering the challenges related to the demands of professionalism in service standards and MEA application.
2. *Product Development and Diversification*, in optimizing the internal power to reach non-captive market opportunities.
3. *Human Capital Management Excellent*, in order to meet HCR & OCR in improving professionalism and job satisfaction.
4. *Non-Captive Market Penetration*, in order to increase profit of the Company.
5. *Business Process Excellent*, in order to prepare to be the leader practice in the sector of O&M in the electricity system and management building and back office management.
6. *Customer Service Excellent*, in order to meet the demands of professional service standards in encountering free market competition.

# Struktur Organisasi

## Organizational Structure





# Visi dan Misi Perusahaan

## Vision and Mission of the Company



# Visi

## Vision

**Menjadi *Asset Operator* Sistem Ketenagalistrikan yang Terkemuka dengan Standar Kelas Dunia.**

Becoming the Leading Electricity System Operator Assets with the World-Class Standards.

### Penjelasan Visi

#### Vision Explanation

#### **Asset Operator**

Perusahaan mampu mengoperasikan aset ketenagalistrikan secara efisien dan standar keandalan kelas dunia.

#### **Asset Operator**

The company is able to operate electricity asset efficiently and world-class reliability standards.

#### **Terkemuka**

Perusahaan mampu menjadi yang terkemuka di ASEAN.

#### **Leading**

The company is able to become the leading in ASEAN.

#### **Kelas Dunia**

Perusahaan mampu memberikan pelayanan dengan kualitas standar 25% terbaik dunia, dari sisi keselamatan ketenagalistrikan, kecepatan pelayanan gangguan, dan keandalan pasokan listrik.

#### **World-Class**

The company is able to provide services with the 25% best standard quality in the world, in terms of electricity safety, interruptions service rapidity, and electricity supply reliability.

# Misi

## Mission



- 1. Mengamankan, menyederhanakan dan mempercepat proses bisnis layanan O&M di bidang ketenagalistrikan.**  
Securing, simplifying and accelerating the O&M service business process in the electricity sector.
- 2. Menjalankan bisnis *asset operator* sistem ketenagalistrikan yang berkualitas dan efisien.**  
Performing a quality and efficient asset business of electricity system operator.
- 3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme *Human Capital* untuk menjamin kepuasan pelanggan.**  
Developing Human Capital competency and professionalism to ensure customer satisfaction.
- 4. Meningkatkan daya saing dan *sustainability* Perusahaan melalui pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan.**  
Improving the competitiveness and sustainability of the company through business development in the electricity sector.

### **Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi dan Misi Perusahaan**

Pernyataan Visi dan Misi Perusahaan telah di-review dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pengesahan RJP 2018-2022.

### **Approval of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Vision and Mission of the Company**

Vision and mission statement of the company has been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with RJP ratification 2018-2022.



# Tata Nilai dan Budaya Perusahaan

## Corporate Values and Culture

HP telah merumuskan pedoman tata nilai Perusahaan yang berperan dalam pembentukan karakter insan HP. Perumusan tata nilai tersebut sejalan dengan perkembangan bisnis dan mengedepankan strategi terutama pada sumber daya manusia dengan harapan lebih mudah dipahami, dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh insan HP.

HP has formulated corporate values governance guidelines which play a role in developing the characters of HP professionals. That Corporate values formulation is in line with the business development and prioritizing strategies especially on human resources by expected that it will understandable, knowable, and implemented by the entire of HP person.



## BeCommitted

Sikap perhatian dan kesediaan untuk selalu berkomitmen terhadap *Safety, Integrity and Quality* layanan terhadap pelanggan (internal dan eksternal) maupun citra Perusahaan.

- **Safety**  
Perusahaan memastikan tercapainya *zero accident* dalam seluruh lingkup pekerjaan.
- **Integrity**  
Perusahaan memastikan integritas/kejujuran setiap insan HP melakukan kegiatan yang mengedepankan integritas perilaku, Integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG).
- **Quality**  
Perusahaan memastikan pengelolaan project berbasis kepada *Work Service Resource Management* dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan berdasarkan proses bisnis yang *excellence* berbasis teknologi informasi, sehingga Perusahaan menjadi *trend setter* dan *quality setter*.

Attention and willingness behavior to always be committed into *Safety, Integrity and Quality* services to the customer (internal and external) and the company's image.

- **Safety**  
The company ensures the achievement of zero accidents in the entire occupations.
- **Integrity**  
The company ensures the integrity/honesty for every person in HP in performing activities which prioritize integrity of behavior, Integrity of data delivery and business processes that are always based on Good Corporate Governance (GCG).
- **Quality**  
The company ensures the project management based on *Work Service Resource Management* and ensuring the achievement of work quality based on business processes that are excellence based on information technology, so the company becomes a trend setter and quality setter.



## Learners

Sifat yang secara berkelanjutan memperluas ilmu pengetahuan untuk meningkatkan *knowledge, skill, dan attitude* dalam bekerja yang disesuaikan dengan perubahan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Has the nature of continuously learning to improve knowledge, skills, and attitude in work that is adapted to changes in order to provide the best service to customers.

## Innovative

Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam mengembangkan ide, gagasan dan *best practice* untuk dapat mempermudah/menunjang proses bisnis demi kepentingan Perusahaan dan peningkatan pelayanan pelanggan.

An activity that is perform continuously and sustainably in developing idea, concept and best practices to be able to facilitate/support the business processes in the interests of the company and customer service improvement.

## Enthusiastic

Sikap bersemangat yang berapi-api dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi motivasi yang luar biasa untuk melayani pelanggan.

Fiery spirit attitude in performing the work to be an extraordinary motivation in serving the customer.

## Visioner

Sikap yang menciptakan visi dan tujuan yang jelas berkenaan dengan pemahaman masa depan yang lebih baik dan usaha-usaha dalam peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.

An attitude in creating clear vision and purpose in relation by understanding a better future and efforts in improving customer service quality.

## Emphaty

Kemampuan untuk merasakan kondisi emosional (perasaan) yang dimiliki pegawai dan pelanggan.

The ability to feel the emotional condition (feeling) own by the employees and customer.

# Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris

## Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners



**Fahmi El Amruzi**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	51 tahun	51 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Bandung, Jawa Barat	Bandung, West Java
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993)</li> <li>Master of Business Administration dari University of Missouri Saint Louis, Amerika Serikat (2006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1993)</li> <li>Master of Business Administration from the University of Missouri Saint Louis, USA (2006)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris tanggal 18 September 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment or Substitution of the Board of Commissioners' Member dated September 18, 2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>EVP Supply Chain Management, Direktorat Pengadaan Strategis 1, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-sekarang)</li> <li>Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis PT PLN (Persero) (2015-2017)</li> <li>Wakil Direktur Utama PT Unindo (2013-2015)</li> <li>Direktur Perencanaan PT PLN Batam (2010-2013)</li> <li>Manajer Senior Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010)</li> <li>Manajer Area Jaringan Gambir PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2008-2010)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EVP Supply Chain Management, Directorate of Strategic Procurement 1, PT PLN (Persero) Head Office (2017-present)</li> <li>Division Head of Power Transaction and Business Partnership of PT PLN (Persero) (2015-present)</li> <li>Vice President Director of PT Unindo (2013-2015)</li> <li>Director of Planning of PT PLN Batam</li> <li>Senior Manager of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office (2010)</li> <li>Manager of Network Area of Gambir, PLN Distribution of Jakarta Raya and Tangerang (2008-2010)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	EVP Supply Chain Management, Direktorat Pengadaan Strategis 1, PT PLN (Persero) Kantor Pusat	EVP Supply Chain Management, Directorate of Strategic Procurement 1, PT PLN (Persero) Head Office
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan Kerja ke Region 1 Jawa Barat di Bandung (7 Februari)</li> <li>Kunjungan Kerja ke Region 6 Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru (11 Maret)</li> <li>Benchmarking ke PT Chevron Pacific Indonesia, Duri, Riau (11 Maret)</li> <li>Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Pidanaan Pengurus Korporasi – PT Pertamina (Persero) Jakarta (11 Juli)</li> <li>Knowledge Sharing PT Cogindo – Jakarta (30 Agustus)</li> <li>Seminar Digital Leadership – PTC Jakarta (3-4-Oktober)</li> <li>Seminar Quality Risk Governance Profesional – PLN Pusdiklat, Jakarta (28-30 Oktober)</li> <li>Kunjungan Kerja ke Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Yogyakarta (9 Desember)</li> <li>Kunjungan Kerja ke Region 5 DKI Jakarta di Jakarta (18 Desember)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Working Visit to Region 1 West Java in Bandung (February 7)</li> <li>Working Visit to Reion 6 Riau and Riau Islands in Pekanbaru (March 11)</li> <li>Benchmarking to PT Chevron Pacific Indonesia, Duri, Riau (March 11)</li> <li>Seminar on Legal Cases and Prevention of Criminal Prosecution for Corporate Managers - PT Pertamina (Persero) Jakarta (July 11)</li> <li>Knowledge Sharing at PT Cogindo- Jakarta (August 30)</li> <li>Digital Leadership Seminar - PTC Jakarta (October 3-4)</li> <li>Professional Quality Risk Governance Seminar - PLN Pusdiklat, Jakarta (October 28-30)</li> <li>Working Visit to Region 2 Central Java and DI Yogyakarta in Yogyakarta (December 9)</li> <li>Working Visit to Region 5 DKI Jakarta in Jakarta (December 18)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Shareholders



**Karyawan Aji**  
Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	52 tahun	52 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)</li> <li>Master of Electrical Engineering dari Curtin University of Technology, Australia (2007)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Nuclear Engineering from University of Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)</li> <li>Master of Electrical Engineering from Curtin University of Technology, Australia (2007)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018	Circular GMS on Dismissal of Okto Rinaldi and Appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioner dated September 1, 2018
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>EVP Talent Management, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-sekarang)</li> <li>EVP Organization Development, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</li> <li>General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017)</li> <li>Manajer Eksekutif Direksi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</li> <li>Manajer Senior Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EVP Talent Development at Directorate of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Head Office (2018-present)</li> <li>EVP Organization Development at Directorate of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</li> <li>General Manager of PLN Region of West Nusa Tenggara (2016-2017)</li> <li>Manager of Board Executive, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)</li> <li>Senior Manager of Power Plant Operation and Maintenance, PT PLN (Persero) Head Office (2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	EVP Talent Development, Direktorat Human Capital Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat	EVP Talent Development at Directorate of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Head Office
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan Kerja ke Region 1 Jawa Barat di Bandung (7 Februari)</li> <li>Kunjungan Kerja ke Region 6 Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru (11 Maret)</li> <li><i>Benchmarking</i> ke PT Chevron Pacific Indonesia, Duri, Riau (11 Maret)</li> <li>Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Pidanaan Pengurus Korporasi – PT Pertamina (Persero) Jakarta (11 Juli)</li> <li><i>Knowledge Sharing</i> PT Cogindo – Jakarta (30 Agustus)</li> <li>Seminar <i>Digital Leadership</i> – PTC Jakarta (3-4-Oktober)</li> <li>Seminar <i>Quality Risk Governance</i> Profesional – PLN Pusdiklat, Jakarta (28-30 Oktober)</li> <li>Kunjungan Kerja ke Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Yogyakarta (9 Desember)</li> <li>Kunjungan Kerja ke Region 5 DKI Jakarta di Jakarta (18 Desember)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Working Visit to Region 1 West Java in Bandung (February 7)</li> <li>Working Visit to Reion 6 Riau and Riau Islands in Pekanbaru (March 11)</li> <li>Benchmarking to PT Chevron Pacific Indonesia, Duri, Riau (March 11)</li> <li>Seminar on Legal Cases and Prevention of Criminal Prosecution for Corporate Managers - PT Pertamina (Persero) Jakarta (July 11)</li> <li>Knowledge Sharing at PT Cogindo- Jakarta (August 30)</li> <li>Digital Leadership Seminar - PTC Jakarta (October 3-4)</li> <li>Professional Quality Risk Governance Seminar - PLN Pusdiklat, Jakarta (October 28-30)</li> <li>Working Visit to Region 2 Central Java and DI Yogyakarta in Yogyakarta (December 9)</li> <li>Working Visit to Region 5 DKI Jakarta in Jakarta (December 18)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Shareholders



## Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris

Identity and Brief Profile of the Board of Commissioners



**Purnama T. Sianturi**

Plt. Komisaris  
Act. Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	51 tahun	51 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1990)</li> <li>• Magister Humaniora dari Universitas Sumatera Utara (2002)</li> <li>• Doktor dari Universitas Sumatera Utara (2007)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor of Law from Padjadjaran University, Bandung (1990)</li> <li>• Master of Humanities from University of North Sumatra (2002)</li> <li>• Doctoral Degree from University of North Sumatra (2007)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018	Circular GMS on Dismissal of Okto Rinaldi and Appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioner dated September 1, 2018
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Departemen Keuangan (2015-sekarang)</li> <li>• Direktur Lelang DJKN, Kementerian Keuangan (2012-2015)</li> <li>• Direktur Hukum dan Humas DJKN, Kementerian Keuangan (2011-2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director of State Receivables and Other State Assets, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (2015-present)</li> <li>• Director of Auction, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (2012-2015)</li> <li>• Director of Law and Public Relations, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (2011-2012)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN, Departemen Keuangan	Director of State Receivables and Other State Assets, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan Kerja ke Region 1 Jawa Barat di Bandung (7 Februari)</li> <li>• Kunjungan Kerja ke Region 6 Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru (11 Maret)</li> <li>• <i>Benchmarking</i> ke PT Chevron Pacific Indonesia, Duri, Riau (11 Maret)</li> <li>• Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Pemidanaan Pengurus Korporasi – PT Pertamina (Persero) Jakarta (11 Juli)</li> <li>• <i>Knowledge Sharing</i> PT Cogindo – Jakarta (30 Agustus)</li> <li>• Seminar <i>Digital Leadership</i> – PTC Jakarta (3-4-Oktober)</li> <li>• Seminar <i>Quality Risk Governance</i> Profesional – PLN Pusdiklat, Jakarta (28-30 Oktober)</li> <li>• Kunjungan Kerja ke Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Yogyakarta (9 Desember)</li> <li>• Kunjungan Kerja ke Region 5 DKI Jakarta di Jakarta (18 Desember)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Working Visit to Region 1 West Java in Bandung (February 7)</li> <li>• Working Visit to Reion 6 Riau and Riau Islands in Pekanbaru (March 11)</li> <li>• Benchmarking to PT Chevron Pacific Indonesia, Duri, Riau (March 11)</li> <li>• Seminar on Legal Cases and Prevention of Criminal Prosecution for Corporate Managers - PT Pertamina (Persero) Jakarta (July 11)</li> <li>• Knowledge Sharing at PT Cogindo- Jakarta (August 30)</li> <li>• Digital Leadership Seminar - PTC Jakarta (October 3-4)</li> <li>• Professional Quality Risk Governance Seminar - PLN Pusdiklat, Jakarta (October 28-30)</li> <li>• Working Visit to Region 2 Central Java and DI Yogyakarta in Yogyakarta (December 9)</li> <li>• Working Visit to Region 5 DKI Jakarta in Jakarta (December 18)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Shareholders

# Identitas dan Riwayat Singkat Direksi

## Identity and Brief Profile of the Board of Directors



**Achmad Taufik Haji**  
Direktur Utama  
President Director

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	59 tahun	59 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Bandung, Jawa Barat	Bandung, West Java
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1983)</li> <li>Magister Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2001)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1983)</li> <li>Master of Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (2001)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated May 26, 2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa dan Bali, Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatera, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)</li> <li>Kepala Divisi Distribusi Jawa dan Bali, Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatera, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)</li> <li>General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2010-2012)</li> <li>Deputi Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Direktorat Jawa, Madura, dan Bali, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2009)</li> <li>General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (2002-2008)</li> <li>Kepala Cabang Kuala Kapuas, PLN Wilayah VI (1994-1997)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Division Head of Distribution and Customer Service of Jawa and Bali, Directorate of Operations of Jawa-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)</li> <li>Division Head of Distribution of Jawa and Bali, Directorate of Operations of Jawa-Bali-Sumatra, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)</li> <li>General Manager of PLN Distribution of West Java and Banten (2010-2012)</li> <li>Deputy Director of Commerce and Customer Service, Directorate of Jawa, Madura, and Bali, PT PLN (Persero) Head Office (2008-2009)</li> <li>General Manager of PLN Region of Riau and Riau Islands (2002-2008)</li> <li>Head of Branch Office of Kuala Kapuas, PLN Region VI (1994-1997)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop AMC PT Haleyora Power – ICE BSD (5-6 Maret)</li> <li>Leadership and Innovation (25-26 Maret)</li> <li>Seminar X-Men 4 Expert (24-25 Juni)</li> <li>Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Pidanaan Pengurus Korporasi – PT Pertamina (Persero) Jakarta (11 Juli)</li> <li>Seminar KPKU (22-23 Agustus)</li> <li>Seminar Quality Risk Governance Profesional – PLN Pusdiklat, Jakarta (28-30 Oktober)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMC Workshop PT Haleyora Power - ICE BSD (March 5-6)</li> <li>Leadership and Innovation (March 25-26)</li> <li>X-Men 4 Expert Seminar (June 24-25)</li> <li>Seminar on Legal Cases and Prevention of Criminal Prosecution for Corporate Managers - PT Pertamina (Persero) Jakarta (July 11)</li> <li>KPKU Seminar (August 22-23)</li> <li>Professional Quality Risk Governance Seminar - PLN Pusdiklat, Jakarta (October 28-30)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders





## Identitas dan Riwayat Singkat Direksi

Identity and Brief Profile of the Board of Directors



### Sutrisno Samad

Direktur Keuangan & SDM  
Director of Finance & Human Resources

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	56 tahun	56 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Semarang, Jawa Tengah	Semarang, Central Java
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1983)</li> <li>Magister Manajemen dari STIKUBANK (2001)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Accounting Economics from Diponegoro University, Semarang (1983)</li> <li>Master of Management from STIKUBANK (2001)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated May 26, 2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajer Keuangan, PLN Distribusi Jawa Timur (2013-2016)</li> <li>Manajer Keuangan, PLN Wilayah Sumatera Barat (2010-2013)</li> <li>Deputi Manajer Akuntansi, PLN Distribusi Jawa Tengah (2009-2010)</li> <li>Deputi Manajer Pengelolaan Biaya, PLN Distribusi Jawa Tengah (2006-2009)</li> <li>Asisten Manajer Keuangan Cabang Yogyakarta, PLN Distribusi Jawa Tengah (2003-2006)</li> <li>Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan Cabang Magelang, PLN Distribusi Jawa Tengah (2001-2003)</li> <li>Kepala Bagian Administrasi Cabang Salatiga, PLN Distribusi Jawa Tengah (1997-2000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manager of Finance at PLN Distribution of East Java (2013-2016)</li> <li>Manager of Finance at PLN Region of West Sumatera (2010-2013)</li> <li>Deputy Manager of Accounting at PLN Distribution of Central Java (2009-2010)</li> <li>Deputy Manager of Cost Management at PLN Distribution of Central Java (2006-2009)</li> <li>Assistant Manager of Finance at Yogyakarta Branch, PLN Distribution of Central Java (2003-2006)</li> <li>Section Head of Customer Service at Magelang Branch, PLN Distribution of Central Java (2001-2003)</li> <li>Section Head of Administration at Salatiga Branch, PLN Distribution of Central Java (1997-2000)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop AMC PT Haleyora Power – ICE BSD (5-6 Maret)</li> <li>Leadership and Innovation (25-26 Maret)</li> <li>Seminar X-Men 4 Expert (24-25 Juni)</li> <li>Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Pemidanaan Pengurus Korporasi – PT Pertamina (Persero) Jakarta (11 Juli)</li> <li>Seminar KPKU (22-23 Agustus)</li> <li>Seminar Quality Risk Governance Profesional – PLN Pusdiklat, Jakarta (28-30 Oktober)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMC Workshop PT Haleyora Power - ICE BSD (March 5-6)</li> <li>Leadership and Innovation (March 25-26)</li> <li>X-Men 4 Expert Seminar (June 24-25)</li> <li>Seminar on Legal Cases and Prevention of Criminal Prosecution for Corporate Managers - PT Pertamina (Persero) Jakarta (July 11)</li> <li>KPKU Seminar (August 22-23)</li> <li>Professional Quality Risk Governance Seminar - PLN Pusdiklat, Jakarta (October 28-30)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders



## Identitas dan Riwayat Singkat Direksi Identity and Brief Profile of the Board of Directors



**Sinung Triwulandari**  
Direktur Operasi  
Director of Operations

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	48 tahun	48 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah (1995)</li> <li>Master of Science in Information Technology dari University of Abertay Dundee, Inggris (2007)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Electrical Engineering from Muhammadiyah University (1995)</li> <li>Master of Science in Information Technology from the University of Abertay Dundee, UK (2007)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated November 7, 2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Divisi Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Haleyora Power (2014-2017)</li> <li>Senior Specialist II Kinerja (TK) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (tugas karya ke PT Haleyora Power) (2013-2014)</li> <li>Manajer Area Metro, PLN Distribusi Lampung (2012-2013)</li> <li>Manajer Cabang Kotabumi, PLN wilayah Lampung (2011-2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Division Head of Operations and Business Development at PT Haleyora Power (2014-2017)</li> <li>Senior Specialist II Performance (work assignment) of PT PLN (Persero) Head Office (seconded to PT Haleyora Power) (2013-2014)</li> <li>Manager of Metro Area, PLN Distribution of Lampung (2012-2013)</li> <li>Manager of Kotabumi Branch, PLN region of Lampung (2011-2012)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop AMC PT Haleyora Power – ICE BSD (5-6 Maret)</li> <li>Leadership and Innovation (25-26 Maret)</li> <li>Seminar X-Men 4 Expert (24-25 Juni)</li> <li>Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Pidanaaan Pengurus Korporasi – PT Pertamina (Persero) Jakarta (11 Juli)</li> <li>Seminar KPKU (22-23 Agustus)</li> <li>Seminar Quality Risk Governance Profesional – PLN Pusdiklat, Jakarta (28-30 Oktober)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMC Workshop PT Haleyora Power - ICE BSD (March 5-6)</li> <li>Leadership and Innovation (March 25-26)</li> <li>X-Men 4 Expert Seminar (June 24-25)</li> <li>Seminar on Legal Cases and Prevention of Criminal Prosecution for Corporate Managers - PT Pertamina (Persero) Jakarta (July 11)</li> <li>KPKU Seminar (August 22-23)</li> <li>Professional Quality Risk Governance Seminar - PLN Pusdiklat, Jakarta (October 28-30)</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders

# Profil Sumber Daya Manusia

## Profile of Human Resources

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah pekerja grup HP mencapai 31.372 orang yang terdiri dari 25 pegawai tugas karya, 206 pegawai organik dan 31.141 tenaga kerja (*workforce*) proyek. Jumlah tersebut naik 5,6% dari 23.844 orang pada tahun 2018 seiring dengan penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kontrak pekerjaan pada tahun 2019.

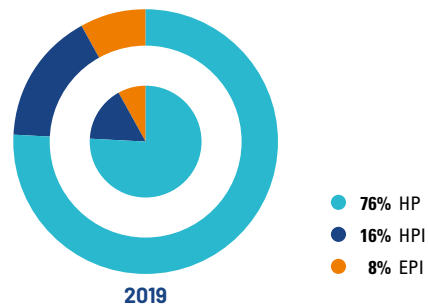
As of December 31, 2019, HP group had 31,372 employees consisting of 25 assigned employees, 206 organic employees and 31,141 project workforce. This number increased by 5.6% from 23,844 employees at end of 2018, in line with the increase in the number of customers and work contracts in 2019.

### Berdasarkan Status Tenaga Kerja

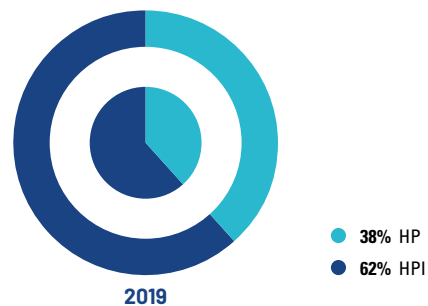
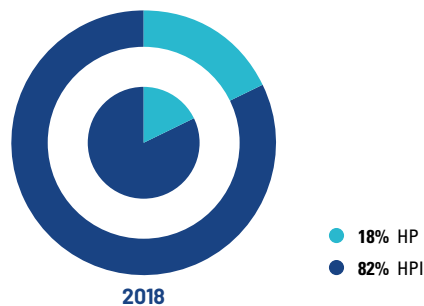
### Composition based on Employment Status

ORGANISASI Organization	TUGAS KARYA Seconded			ORGANIK Organic			PROYEK Project			JUMLAH Total		
	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%
HP	17	19	11.8	41	79	92.7	12,469	21,909	75.7	12,527	22,007	75.7
HPI	4	4	0.0	187	127	-32.1	12,467	9,232	-25.9	12,658	9,363	-26.0
EPI	2	2	0.0	-	-	-	-	-	-	2	2	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>8.7</b>	<b>228</b>	<b>206</b>	<b>-32.1</b>	<b>24,936</b>	<b>31,141</b>	<b>92.7</b>	<b>25,187</b>	<b>31,372</b>	<b>75.7</b>

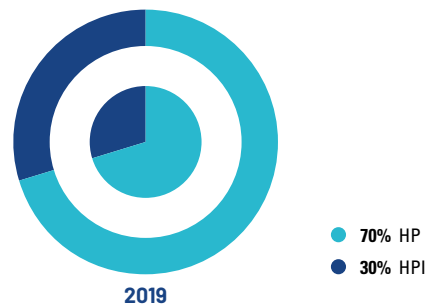
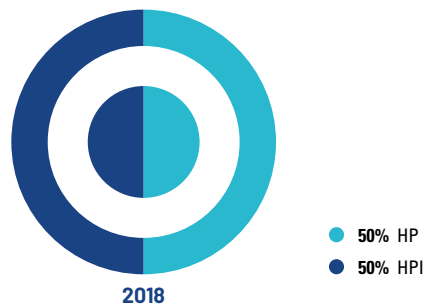
#### Tugas Karya Seconded



#### Organik Organic



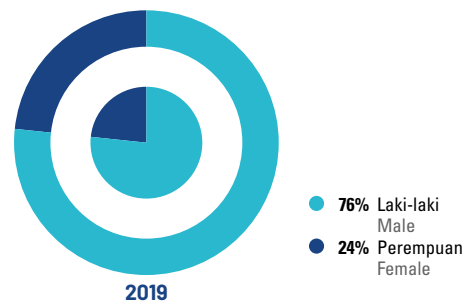
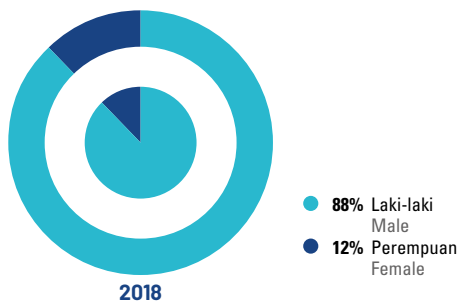
#### Proyek Project



**Berdasarkan Status Gender**

**Composition based on Gender**

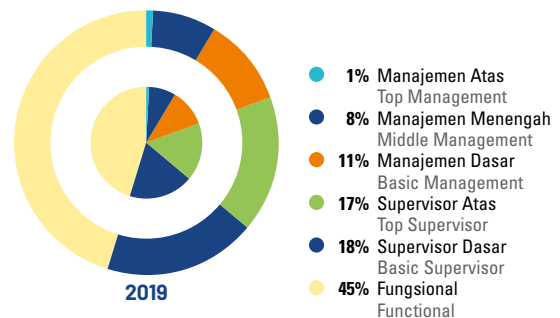
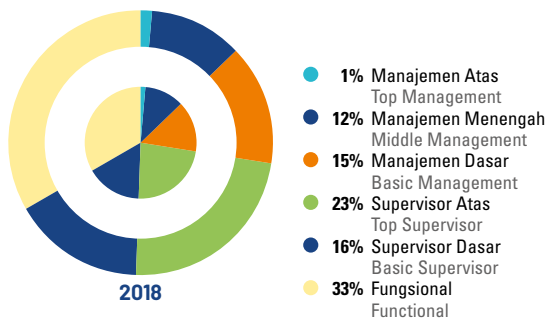
Gender	2018	2019	Gender
Laki-laki	58	78	Male
Perempuan	8	24	Female
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>



**Berdasarkan Tingkat Jabatan**

**Composition based on Position Level**

Tingkat Jabatan	2018	2019	Position Level
Manajemen Atas	1	1	Top Management
Manajemen Menengah	8	8	Middle Management
Manajemen Dasar	10	11	Basic Management
Supervisor Atas	16	17	Top Supervisor
Supervisor Dasar	11	19	Basic Supervisor
Fungsional	21	46	Functional
On the Job Training (OJT)	-	-	On the Job Training (OJT)
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>



**Profil Sumber Daya Manusia**  
Profile of Human Resources

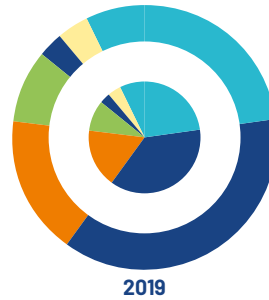
**Berdasarkan Usia**

**Composition based on Age**

Usia	2018	2019	Age
<25 tahun (termasuk OJT)	1	23	<25 year old (included OJT)
26–30 tahun	28	38	26–30 years old
31–35 tahun	16	17	31–35 years old
36–40 tahun	8	9	36–40 years old
41–45 tahun	4	3	41–45 years old
46–50 tahun	4	4	46–50 years old
>50 tahun	8	7	>50 years old
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>



- 1% <25 tahun/years old
- 40% 26–30 tahun/years old
- 23% 31–35 tahun/years old
- 12% 36–40 tahun/years old
- 6% 41–45 tahun/years old
- 6% 46–50 tahun/years old
- 12% >50 tahun/years old



- 23% <25 tahun/years old
- 37% 26–30 tahun/years old
- 17% 31–35 tahun/years old
- 9% 36–40 tahun/years old
- 3% 41–45 tahun/years old
- 4% 46–50 tahun/years old
- 7% >50 tahun/years old

**Berdasarkan Pendidikan**

**Composition based on Education**

Pendidikan	2018	2019	Education
S2	10	10	Master
S1	47	84	Bachelor
Diploma	9	28	Diploma
SMP/SMA/SMK	–	–	Junior High/High School/ Vocational School
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>



- 15% S2  
Master
- 71% S1  
Bachelor
- 14% Diploma



- 8% S2  
Master
- 69% S1  
Bachelor
- 23% Diploma

## Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pada tahun 2019 Perusahaan melaksanakan program pelatihan/pengembangan antara lain:

## Employee Competence Development

In 2019, the Company carried out training/development programs, including:

No.	Topik Pelatihan/Workshop Training/Workshop Subject	Waktu Date	Jumlah Peserta Number of Participant
1	Workshop AMC/AMC Workshop	5–6 Maret/March	60
2	Anggaran Perusahaan/Company Budgeting	6–7 Maret/March	1
3	SPS4	13 Maret/March	12
4	PSAK 72-73/Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS) 72-73	13–14 Maret/March	2
5	Workshop Manajemen Risiko/Risk Management Workshop	25–26 Maret/March	5
6	Leadership and Innovation	25–26 Maret/March	6
7	X-Men 4 Expert	24–25 Juni/June	24
8	Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Korporasi/ Seminar on Legal Cases and Corporate Crime Prevention	11 Juli/July	6
9	KPKU/Commission for the Supervision of Business Competition	22–23 Agustus/August	50
10	Indonesia HR Summit	18–19 September/September	3
11	Quality Risk Governance Professional	28–29 Oktober/October	6
12	Sertifikasi Level 5 MSDM BNSP/Level 5 HR Management BNSP Certification	28 Oktober–1 November October 28–November 1	1
13	ESQ Quantum Excellence Batch 1-2	12–13 November/November 19–20 November/November	100
14	Sertifikasi Kompetensi Level 4 Distribusi Tenaga Listrik/Level 4 Competency Certification on Power Distribution	19–20 November/November	14
15	Sertifikasi Level 4 MSDM BNSP/Level 4 HR Management BNSP Certification	30 November/November	1
16	Sertifikasi Level 2 dan 3 IPTL/Level 2 and 3 IPTL Certification	9–11 Desember/December	6
17	ESQ Quantum Excellence Batch 3-4	12–13 Desember/December	100
<b>Jumlah Peserta Pelatihan</b> Total Participants			<b>397</b>

## Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja

Pada tahun 2019, Perusahaan merencanakan sertifikasi untuk 1.987 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region. Sampai akhir tahun 2019 sertifikasi telah terealisasi untuk 2.164 atau 109% dari target.

## Work Force Competence Development

In 2019, the Company planned to certify 1,987 technical workforce in all regions. At end of 2019, certification was realized for 2,164 workforce or 109% of the target.

## Biaya Pelatihan

Biaya pelatihan dan pengembangan pada tahun 2019 sebesar Rp944,75 juta, meningkat 25% dibandingkan Rp752,71 juta pada tahun 2018.

## Training Expenses

Training and development expenses in 2019 amounted to Rp944.75 million, an increase of 25% compared to Rp752.71 million in 2018.

# Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

## Shareholders Structure and Composition

Struktur dan komposisi kepemilikan saham HP per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

HP shareholders structure and composition as of December 31, 2019 are as follows:

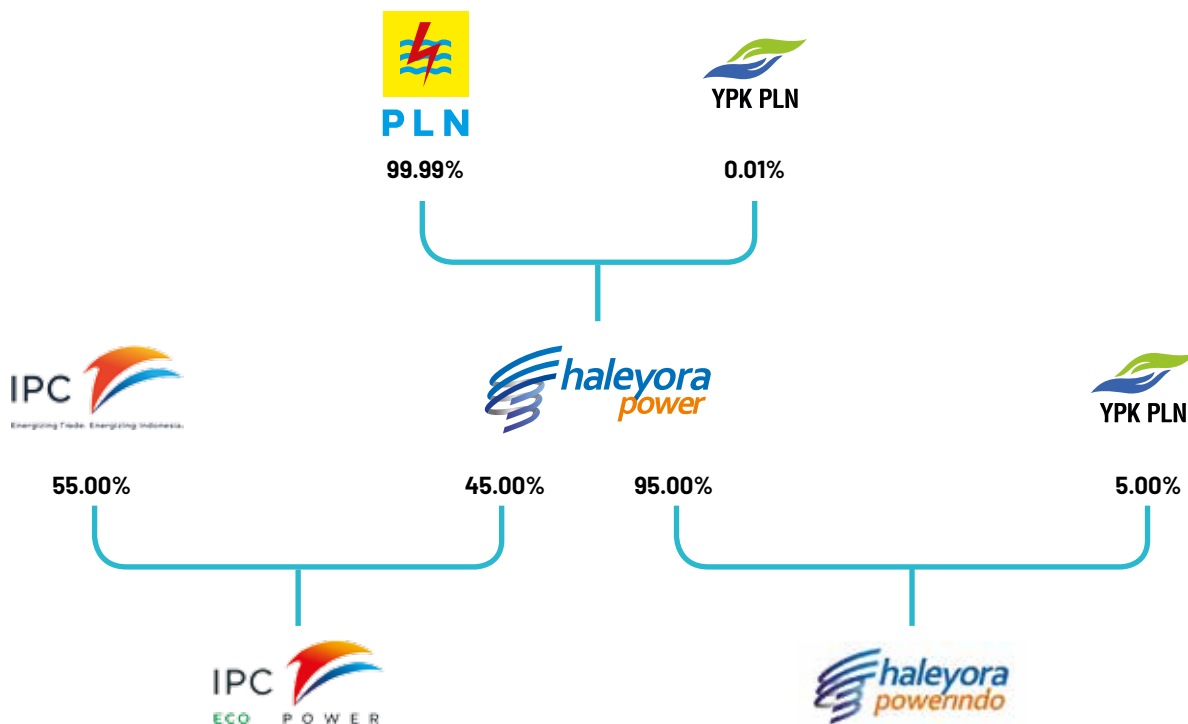


Komposisi Saham HP tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

There is no shares composition of HP owned by the Board of Commissioners or Directors of the Company.

# Struktur Grup Perusahaan

## Structure of the Company Group





# Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

## The Company Supporting Institutions and Professions

<b>Nama Name</b>	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	
<b>Alamat Address</b>	Plaza Asia Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190	Plaza Asia 10 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
<b>Jasa yang Diberikan Services</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa audit umum Laporan Keuangan</li><li>2. Jasa audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal</li><li>3. <i>Review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. General audit of financial statements</li><li>2. Audit compliance with the laws and regulations and internal control</li><li>3. Performance Evaluation review</li></ol>



# Daftar Entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Patungan

## List of Subsidiaries, Associated, and Joint Ventures Company

### Entitas Anak Perusahaan

### Subsidiary Entity

Sampai dengan akhir tahun 2019, HP memiliki 1 (satu) anak perusahaan, yaitu:

As of 2019, HP has 1 (one) subsidiary, are as follow:

No.	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Establishment Date	Status Operasi Perusahaan Operation Status of Company	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Shareholders	Bidang Usaha Business Sector
1	PT HPindo (HPI)	17 Januari 2013	Beroperasi	Jl. PHH Mustopha No. 45, Bandung, Jawa Barat 40124 T. (022) 727 8420 F. (022) 727 9468 www.hapindo.co.id	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT HP (90%)</li> <li>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (5%)</li> <li>Perseorangan (5%)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Teknik</li> <li>Management Billing</li> <li>Non Teknik</li> </ol>
	PT HPindo (HPI)	January 17, 2013	Operating	Jl. PHH Mustopha No. 45, Bandung, West Java 40124 T. (022) 727 8420 F. (022) 727 9468 www.hapindo.co.id	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT HP (90%)</li> <li>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (5%)</li> <li>Individual (5%)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Technical Services</li> <li>Management Billing</li> <li>Non -Technical</li> </ol>

### Entitas Asosiasi

### Association Entity

Sampai dengan akhir tahun 2019, HP tidak memiliki Entitas Asosiasi tetapi memiliki sejumlah entitas berelasi yaitu perusahaan yang berada di bawah grup PT PLN (Persero).

As of 2019, HP does not have an association entity but has a number of related entities, that is the company under PT PLN (Persero) group.

## Perusahaan Patungan

Sampai dengan akhir tahun 2019, HP memiliki 1 (satu) Perusahaan Patungan yang dibentuk hasil kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu:

## Joint Venture

As of 2019, HP has 1 (one) joint venture company that set as collaboration result with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), are as follow:

No.	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Establishment Date	Status Operasi Perusahaan Operation Status of Company	Alamat Perusahaan Address	Kepemilikan Saham Shareholders	Bidang Usaha Business Sector
1	PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	5 November 2012	Beroperasi	Jl. Yos Sudarso No. 30 T. 430 5047 F. 430 5052	1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (55%) 2. PT HP (45%)	Menyalurkan dan menjual listrik di kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia II
	PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	November 5, 2012	Operating	Jl. Yos Sudarso No. 30 T. 430 5047 F. 430 5052	1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (55%) 2. PT HP (45%)	Distributing and selling electricity in the port area owned by PT Pelabuhan Indonesia II

# Wilayah Operasi

## Operational Map



**REGION 1 (JAWA BARAT)**

Region 1 (West Java)

**REGION 2 (JAWA TENGAH & DIY)**

Region 2 (Central Java & DIY)

**REGION 3 (JAWA TIMUR)**

Region 3 (East Java)

**REGION 4 (SUMATERA BARAT)**

Region 4 (West Sumatra)

**REGION 5 (DKI JAKARTA & BANTEN)**

Region 5 (DKI Jakarta & Banten)

**REGION 6 (RIAU & KEPULAUAN RIAU)**

Region 6 (Riau & Riau Islands)

## Pelanggan Utama

### Main Customer

1. PLN DISTRIBUSI BANTEN
2. PLN DISTRIBUSI JAKARTA RAYA
3. PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT
4. PLN DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA
5. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR
6. PLN WILAYAH SUMATERA UTARA
7. PLN WILAYAH SUMATERA BARAT
8. PLN WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
9. PLN WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BENGKULU
10. PLN DISTRIBUSI LAMPUNG
11. PLN WILAYAH BANGKA BELITUNG
12. PLN P3B SUMATERA
13. PLN TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT
14. PLN TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH
15. PLN TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI



# Situs Perusahaan

## The Company Website



[www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id)

Perusahaan memiliki *corporate website* dengan alamat <https://www.haleyorapower.co.id>. Perusahaan selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses.

The Company has a corporate website at <http://www.haleyorapower.co.id>. The Company continually updates its corporate website to be more informative and convenient to access.

Situs Perusahaan menggunakan bahasa Indonesia dan secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima) bagian besar yang terdiri dari:

The Company's Website is Indonesian and is categorized into 5 (five) major sections consisting of:

1. Profil, berisi informasi mengenai profil perusahaan, manajemen, struktur organisasi, struktur grup Perusahaan, peta wilayah kerja serta anak perusahaan dan afiliasi.
2. Produk dan Layanan, berisi informasi mengenai layanan transmisi, distribusi, komersial, dan *e-commerce*.
3. Tata kelola, berisi informasi mengenai praktik tata kelola, pedoman, *whistleblowing system*, pengendalian gratifikasi, LHKPN, penilaian GCG, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Laporan Tahunan, Kebijakan IT, dan Kebijakan CSR.
4. Komunikasi Berkelanjutan, berisi informasi berita kegiatan Perusahaan, dokumentasi, kegiatan Haleyora Peduli, pengadaan, dan majalah 4 bulanan Media Haloyora.
5. Kontak, berisi informasi alamat kontak Kantor Pusat Perusahaan, Kantor Region, anak perusahaan dan afiliasi.

1. Profile, containing information about the company profile, management, organizational structure, structure of the Company group, map of working areas as well as subsidiaries and affiliates.
2. Products and Services, containing information about transmission, distribution, commercial, and e-commerce services.
3. Governance, containing information on corporate governance practices, guidelines, *whistleblowing system*, gratification control, LHKPN, GCG assessment, Public Information Disclosure (KIP), Internal Control System Policy, Annual Reports, IT Policy, and CSR Policy.
4. Sustainable Communication, containing information on Company's activities, documentation, Haleyora Cares activities, procurement, and four monthly magazine Media Haloyora.
5. Contact, containing address of the Company's Head Office, Regional Office, subsidiaries and affiliates.



# Penghargaan dan Sertifikasi

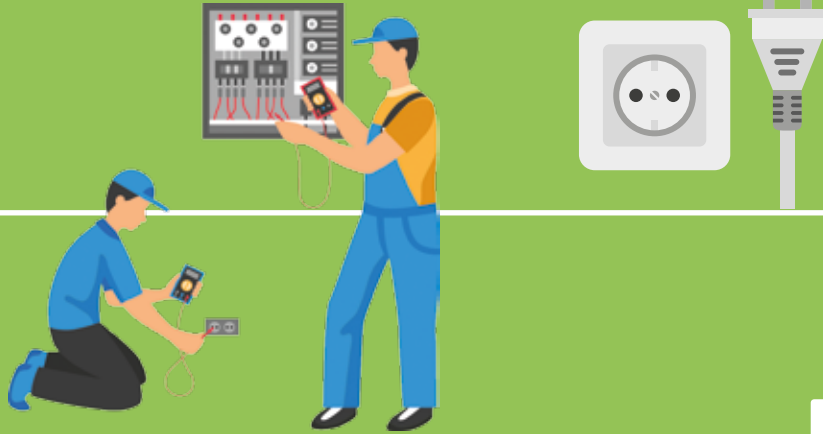
## Award and Certification



Marketing the Inovation Terbaik BUMN Branding & Marketing Award 2019.

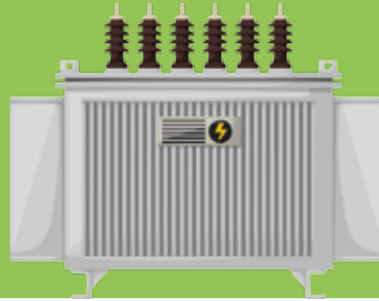


Marketing the Inovation Terbaik BUMN Branding & Marketing Award 2019



# kompeten dan





Pada tahun 2019, Perusahaan menargetkan sertifikasi kompetensi untuk 1.987 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region dengan realisasi 2.164 orang atau tercapai 109% dari target.



# profesional



## COMPETENT AND PROFESSIONAL

In 2019, the Company targeted competency certification for 1,987 technical workforce in all regions with 2,164 people realized or 109% of the target.



# Pembahasan dan Analisis Manajemen

## Management Discussion and Analysis



### GAMBARAN UMUM

Memasuki tahun 2019, dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berkepanjangan semakin memberi tekanan pada perdagangan dunia. Dampaknya, hampir semua negara mengalami tantangan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian negara maju maupun negara berkembang berada dalam tren melambat dan berjuang untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi ke depan.

Di dalam negeri, selain karena dampak perang dagang, pertumbuhan Indonesia sepanjang paruh pertama 2019 masih tertahan karena adanya perhelatan nasional pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada bulan April 2019. Tensi politik yang sempat meninggi membuat kalangan usaha bersikap menunggu hingga pemerintahan dan kabinet baru terbentuk untuk mengeksekusi rencana-rencana investasi.

### OVERVIEW

Entering the year 2019, the impact of the prolonged trade war between the United States (US) and China increasingly put pressure on the world trade. As a result, almost all countries experienced economic growth challenges. The economies of both developed and developing countries were on a slowing trend and struggling to avoid future economic crises.

Domestically, apart from the impact of the trade war, Indonesia's growth during the first half of 2019 was held back due to the national legislative elections and presidential elections in April 2019. The rising political tension made businesses wait until a new government and cabinet were formed to execute their investment plans.



**Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk dan pengembangan infrastruktur yang memicu tumbuhnya kawasan industri, bisnis dan permukiman baru mendorong peningkatan kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.**

Economic growth, population growth and infrastructure development that triggered the growth of new industrial, commercial and residential estates encouraged an increasing growth in power demand from year to year.



**5.0%**

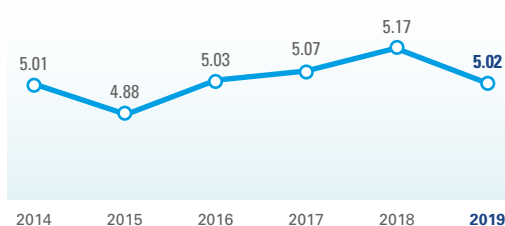
Tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) penjualan listrik PLN dalam 5 tahun terakhir dari 202.845 GWh pada tahun 2015 menjadi 245.518 GWh di akhir 2019.

The compound annual growth rate (CAGR) of PLN's electricity sales in the last 5 years from 202,845 GWh in 2015 to 245,518 GWh at the end of 2019.

Kombinasi dari kondisi global dan situasi di dalam negeri berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan hanya mencapai 5,02%, lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun 2018, terutama karena kontraksi pertumbuhan investasi barang modal sebagai imbas dari perlambatan perekonomian global.

The combination of global conditions and the situation at home resulted in slowing domestic economic growth. The Central Statistics Agency (BPS) announced that Indonesia's annual economic growth reached only 5.02%, lower than 5.17% in 2018, mainly due to contraction in capital goods investment growth as a result of the global economic slowdown.

**Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2014–2019 (%)**  
Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) 2014–2019 (%)



## Tinjauan Industri Ketenagalistrikan

### Power Sector Review

Terlepas dari gejolak perekonomian global, pemerintah tetap menunjukkan konsistensinya melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Pemerintah telah menetapkan 227 Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 56 Tahun 2018. Di dalam Perpres tersebut, proyek strategis nasional mencakup 223 proyek infrastruktur ditambah 4 program di mana salah satunya adalah program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Despite the global economic turmoil, the government showed its consistency in continuing acceleration of infrastructure development in order to increase national economic competitiveness, growth and distribution. The government announced 227 National Strategic Projects (PSN) through Presidential Regulation (Perpres) No. 56 of 2018. In this Presidential Regulation, national strategic projects included 223 infrastructure projects plus 4 programs, one of which is electricity infrastructure development program.

## TINJAUAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

PLN adalah satu-satunya BUMN penyelenggara ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peran PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan mengalami perubahan setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009). PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Pemegang IUPTL adalah pelaku usaha yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Walaupun demikian, PLN tetap menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## POWER SECTOR REVIEW

PT PLN (Persero) is the only state-owned power supplier for public purposes that was incorporated based on Government Regulation No. 23 of 1994 concerning Transformation of General Power Company (Perum) to State Power Company (Persero). The role of PLN as the power supplier underwent changes after issuance of Law 30/2009. Based on this law, PLN no longer holds a monopoly on power supply in Indonesia and no longer plays the role of Authorized Power Business (PKUK), but as Holder of Power Supply Business License (IUPTL). IUPTL holder is a business player that obtained a license to conduct power supply business for public purposes which includes power plants, transmissions, distributions and sales to consumers. Nevertheless, PLN as an extension of the Government in supplying power for public purposes.

### Kebutuhan Tenaga Listrik

Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan program elektrifikasi, serta program-program pembangunan yang memicu tumbuhnya kawasan bisnis dan permukiman baru. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa, yang membutuhkan tenaga listrik sebagai salah satu pendukung proses produksinya. Selain itu, hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi listrik untuk peralatan listrik/elektronik. Berdasarkan data PLN,

### Power Needs

The growth in national electricity demand is driven by several main factors, including economic growth, population growth and electrification programs, as well as development programs that have triggered the growth of new business and residential areas. Economic growth has an impact on increasing demand for goods and services, which require electricity as a support for the production process. In addition, economic growth increases people's welfare which encourages an increase in electricity consumption for electrical/electronic devices. Based on PLN data, realization of PLN's electricity sales in the last five years has continued

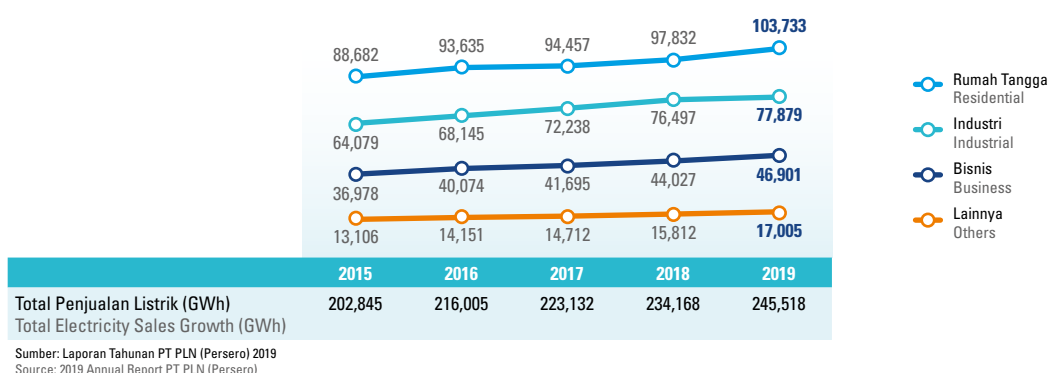




realisasi penjualan listrik PLN dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 202.845 GWh menjadi 245.518 GWh dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) mencapai 5%.

to increase from 202,845 GWh to 245,518 GWh with a compound annual growth rate (CAGR) reaching 5%.

**Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik 2015–2019 (GWh)**  
Electricity Sales Growth 2015–2019 (GWh)



### Jumlah Pelanggan PLN

Pada tahun 2019, jumlah pelanggan PLN mencapai 75,71 juta pelanggan, tumbuh 5,3% dibandingkan 71,92 juta pelanggan pada tahun 2018. Penambahan pelanggan terbesar terjadi pada Segmen Rumah Tangga sebanyak 3,5 juta pelanggan baru, meningkat 5,4% menjadi 69,62 juta pelanggan. Secara persentase, segmen Industri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,0% dari 99,18 ribu pelanggan pada tahun 2018 menjadi 104,92 ribu pelanggan. Sedangkan segmen Bisnis naik 2,1% dari 3,75 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 3,83 juta pelanggan.

### Number of PLN Customers

At end of 2019, PLN had 75.71 million customers, growing 5.3% compared to 71.92 million customers at end of 2018. The largest increase in customers occurred in the Household Segment with 3.5 million new customers, an increase of 5.4% to 69.62 million customers. In percentage terms, the Industry Segment recorded the highest growth of 19.0% from 99.18 thousand customers at end of 2018 to 104.92 thousand customers. Meanwhile, the Business Segment increased by 2.1% from 3.75 million customers at end of 2018 to 3.83 million customers.

Berdasarkan wilayah, peningkatan jumlah pelanggan terbesar pada tahun 2019 terjadi di Regional Jawa Bagian Tengah yang mencatat penambahan 1,07 juta pelanggan baru, meningkat 4,3% dari 25,21 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 26,28 juta pelanggan. Regional Sumatera mencatat penambahan 810,15 ribu pelanggan baru atau meningkat 5,6% menjadi 15,31 juta pelanggan. Sedangkan Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara meningkat 866,08 ribu pelanggan baru atau naik 5,8% dari 14,93 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 15,80 juta pelanggan pada tahun 2019.

By region, the largest increase in the number of customers in 2019 occurred in Central Java Region, which recorded the addition of 1.07 million new customers, an increase of 4.3% from 25.21 million customers at end of 2018 to 26.28 million customers. Sumatera region recorded an additional 810.15 thousand new customers, an increase of 5.6% to 15.31 million customers. Meanwhile, East Java, Bali & Nusa Tenggara increased by 866.08 thousand new customers, an increase of 5.8% from 14.93 million customers at end of 2018 to 15.80 million customers at end of 2019.

## Tinjauan Industri Ketenagalistrikan

### Power Sector Review

#### Jumlah Pelanggan PLN per Wilayah Regional

#### PLN Customers by Region

Wilayah Regional	2017	2018	2019	Perubahan Change	Region
	a	b	c	d = (c-b)/c	
Sumatera*	13,669,601	14,502,646	15,312,795	5.6	Sumatra
Jawa Bagian Barat	7,137,946	7,537,581	7,919,461	5.1	Western part Java
Jawa Bagian Tengah	23,995,271	25,206,136	26,281,435	4.3	Central part Java
Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara**	14,195,660	14,930,660	15,796,739	5.8	Eastern part Java, Bali & Nusa Tenggara
Kalimantan	3,739,769	4,012,854	4,270,003	6.4	Kalimantan
Sulawesi**	4,211,622	4,518,687	4,831,245	6.9	Sulawesi
Maluku & Papua	1,118,414	1,208,833	1,293,936	7.0	Maluku & Papua
<b>Jumlah</b>	<b>68,068,283</b>	<b>71,917,397</b>	<b>75,705,614</b>	<b>5.3%</b>	<b>Total</b>

\* Termasuk Batam  
Including Batam.

\*\* Pada tahun 2017 Nusa Tenggara masuk Regional Sulawesi bukan masuk Regional Jawa Bagian Timur dan Bali  
In 2017, Nusa Tenggara Region was included in Sulawesi Region not included in Eastern Part Java and Bali Region

Sumber: Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2019.

Source: 2019 Annual Report PT PLN (Persero).

Jumlah pelanggan di Jawa, Bali & Nusa Tenggara tetap mendominasi sebanyak 49,99 juta pelanggan dengan kontribusi sekitar 66% dari jumlah pelanggan PLN secara nasional. Dari total pelanggan Jawa, Bali & Nusa Tenggara, jumlah pelanggan di regional Jawa Bagian Tengah mencapai 26,28 juta (34,7% dari total pelanggan), Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara sebanyak 15,80 juta (20,9% dari total pelanggan) dan Jawa Bagian Barat sebanyak 7,92 juta (10,5% dari total pelanggan). Sedangkan jumlah pelanggan di wilayah regional Sumatera sebesar 15,31 juta (20,2% dari total pelanggan).

The number of customers in Java, Bali & Nusa Tenggara still dominated as many as 49.99 million customers with a contribution of around 66% of the total national PLN customers. Of the total customers in Java, Bali & Nusa Tenggara, the number of customers in Central Java region reached 26.28 million (34.7% of total customers), East Java, Bali & Nusa Tenggara 15.80 million (20.9% of total customers) and West Java 7.92 million (10.5% of total customers). Meanwhile, Sumatra region recorded 15.31 million (20.2% of total customers).

### Tingkat Keandalan Layanan

Tingkat keandalan layanan PLN diukur dengan menggunakan indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) yang menghitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan. Sedangkan indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency/SAIFI*) menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan. Semakin rendah indeks SAIDI dan SAIFI mengindikasikan keandalan layanan yang semakin baik.

### Service Reliability Level

PLN's service reliability level is measured using System Average Interruption Duration Index (SAIDI) which calculates the length of time a customer experiences an interruption in minutes per customer. Meanwhile, System Average Interruption Frequency (SAIFI) index calculates the number of interruptions per customer. The lower SAIDI and SAIFI, the better service reliability.

Pada tahun 2019, indeks SAIDI mencapai 1.136,72 menit per pelanggan, atau meningkat 18,61% dibandingkan 958,35 menit per pelanggan pada tahun 2018. Sedangkan indeks SAIFI sebesar 11,51 kali per pelanggan, naik 16,26% dibandingkan 9,90 kali per pelanggan pada tahun 2018.

In 2019, SAIDI index reached 1,136.72 minutes per customer, or an increase of 18.61% compared to 958.35 minutes per customer in 2018. While SAIFI index was 11.51 times per customer, up 16.26% compared to 9.90 times per customer in 2018.



## Tinjauan Industri Ketenagalistrikan Power Sector Review

Gangguan distribusi memiliki kontribusi terbesar, yaitu 77,7% dari total gangguan. Gangguan distribusi tersebut didominasi oleh gangguan fasilitas penyulang (56,3%) dengan kontribusi terbesar pada gangguan unplanned konduktor saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebesar 42,0% dan pemadaman terencana (38,0%) dengan kontribusi terbesar adalah pemeliharaan penyulang (27,0%).

Berdasarkan wilayah regional, hampir semua indeks SAIDI menunjukkan kenaikan (memburuk), kecuali pada Regional Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan indeks SAIFI menurun hampir di seluruh Regional kecuali Sumatera, Jawa Bagian Tengah dan Sulawesi.

### TINJAUAN KINERJA USAHA

PT Haleyora Power (HP) merupakan salah satu anak perusahaan sekaligus mitra strategis yang mendukung bisnis PLN dengan tugas utama mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance/ O&M*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan. Dasar penugasannya adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 yang diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 734.K/DIR/2013.

Dalam operasinya, Perusahaan berperan sebagai *operating holding* yang memiliki bisnis internal yang dilakukan sendiri dan bisnis yang dikelola melalui anak perusahaan, yaitu PT Haleyora Powerindo (HPI). Kompetensi inti HP adalah memberi jasa kepada PLN berupa manajemen proyek untuk pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi tegangan menengah, tegangan rendah, dan jaringan distribusi. Layanan ini dibutuhkan PLN untuk menjamin kualitas, kontinuitas dan keandalan operasi PLN dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

Untuk melaksanakan harmonisasi dan optimalisasi PLN Group sejalan dengan strategi SOLID (*Secured, Optimizing, Leading, Increasing & Develop New Age*), Perusahaan telah merumuskan peran Haleyora Group, yaitu:

1. *Securing Bussines Sustainability* PLN Group: Perusahaan sebagai mitra strategis bagi PLN dalam memberikan jaminan ketersediaan layanan *operation & maintenance* transmisi dan distribusi (O&M T&D) dengan target menguasai pangsa pasar sebesar 50% di Jawa, Sumatera, dan Bali pada tahun 2021;

Distributional interruptions had the largest contribution with 77.7% of total interruptions. Distributional interruptions were dominated by disrupted feeder facilities (56.3%) with the largest contribution to unplanned interruptions of medium voltage overhead conductor (SUTM) by 42.0% and planned blackouts (38.0%) with the largest contribution being feeder maintenance (27.0%).

By region, almost all SAIDI indices showed an increase (worsened), except for the regions of East Java, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan and Sulawesi. Meanwhile, SAIFI index decreased in almost all regions except for Sumatera, Central Java and Sulawesi regions.

### BUSINESS PERFORMANCE REVIEW

PT Haleyora Power (HP) is a subsidiary and strategic partner of PT PLN (Persero) that supports the parent company's business by securing operations and maintenance (O&M) for power transmission and distribution network services. The assignment is based on Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 459.K/DIR/2012 which was amended with Regulation of the Board of Directors No. 734.K/DIR/2013.

In its operations, the Company acts as an operating holding that has its own internal business and other business managed by a subsidiary, namely PT Haleyora Powerindo (HPI). HP's core competency is to provide services to PLN in the form of project management for the operation and maintenance works for medium and low voltage transmission networks and distribution networks. These services are needed by PLN to ensure the quality, continuity and reliability of PLN's operations in providing services to its customers.

To carry out harmonization and optimization of PLN Group in line with the SOLID (Secured, Optimizing, Leading, Increasing & Developing New Age) strategy, the Company formulated the role of the Haleyora Group, as follows:

1. *Securing Business Sustainability* of PLN Group: The Company as a strategic partner for PLN in securing availability of transmission and distribution operation & maintenance services (O&M T&D) with a target of controlling a market share of 50% in Java, Sumatera and Bali by 2021;

## Tinjauan Kinerja Usaha

### Business Performance Review

2. *Optimizing Cost Efficiency* PLN Group: Perusahaan sebagai *asset operator* yang mampu mengoperasikan dan memelihara sistem transmisi dan distribusi (T&D) melalui *Asset Management Contract (AMC)* dan *Business Process Re-engineering (BPR)*;
3. *Leading Industry Capabilities* PLN Group: Perusahaan berperan sebagai *trend setter* dan model bisnis bagi penyedia jasa lainnya;
4. *Developing New Edge*: Perusahaan mengembangkan layanan alternatif berbasis digital untuk mengantisipasi *disruptive technologies*.

### Program Prioritas

Perusahaan telah menetapkan prioritas program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2019 untuk mewujudkan kinerja operasi yang unggul dan melayani pertumbuhan pelanggan. Dengan sumber daya yang dimiliki, program kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Improving financial capability*,
2. *Efficiency drive*,
3. *Market development*,
4. *Improving customer service*,
5. *Improving organization & human capital competencies*,
6. *Product standardization & digitalization of business process*.

Untuk meningkatkan dan menyempurnakan model operasi dan kualitas layanan, Perusahaan menerapkan *best practice O&M end-to-end process* distribusi dan perbaikan proses bisnis dengan berpedoman pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Inisiatif tersebut bertujuan untuk menempatkan posisi HP sebagai pemimpin di dalam industri operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi yang mampu menciptakan diferensiasi kualitas layanan, pencapaian *Service Level Agreement (SLA)* dan nilai tambah layanan kepada PLN. Selain itu, Perusahaan juga telah berkomitmen untuk mencapai kinerja keselamatan nihil kecelakaan (*zero accident*) melalui pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang konsisten, penerapan budaya *safety, integrity, and quality* serta implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3).

### Kontrak Penugasan

Pada tahun 2019, Perusahaan melaksanakan 122 kontrak penugasan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi. Kontrak-kontrak tersebut berasal dari 6 Unit Induk Distribusi (UID), 5 Unit Induk Wilayah

2. *Optimizing Cost Efficiency* of PLN Group: The Company as an *asset operator* capable of operating and maintaining transmission and distribution systems (T&D) through *Asset Management Contract (AMC)* and *Business Process Re-engineering (BPR)*;
3. *Leading Industry Capabilities* of PLN Group: The Company acts as a *trend setter* and business model for other service providers;
4. *Developing New Edge*: The Company develops digital-based alternative services to anticipate *disruptive technologies*.

### Priority Programs

The Company set priorities for work programs to be implemented throughout 2019 to realize superior operating performance and to serve customer growth. With the available resources, the Company's work programs were as follows:

1. *Improving financial capability*,
2. *Efficiency drive*,
3. *Market development*,
4. *Improving customer service*,
5. *Improving organization & human capital competencies*,
6. *Product standardization & digitalization of business process*.

To improve and refine operation model and service quality, the Company implements O&M best practices of end-to-end distribution process and business process re-engineering based on ISO 9001:2015 quality management system standard.

The strategic initiative aims to secure HP's position as a leader in the operation and maintenance for transmission and distribution networks that is able to provide differentiation and service quality improvement, *Service Level Agreement (SLA)* achievement and value added services to PLN. In addition, the Company is also committed to achieving zero accident safety performance by encouraging consistent Occupational Health and Safety (K3), implementing a culture of safety, integrity, and quality, as well as K3 Management System (SMK3).

### Assignment Contracts

In 2019, the Company entered into 122 assignment contracts to secure distribution and transmission operation and maintenance services. These contracts came from 6 Parent Units of Distribution (UID), 5 Parent Units of Region



**Tinjauan Kinerja Usaha**  
Business Performance Review

(UIW), 1 Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), 3 Unit Induk Transmisi (UIT), dan 1 Unit Induk Pusat Pengatur Beban yang meliputi 57 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan 315 Unit Layanan Pelanggan (ULP).

(UIW), 1 Parent Unit of Load Distribution and Arrangement (UIP3B) and 1 Parent Unit of Transmission (UIT) including 57 Customer Service Implementing Units (UP3) and 315 Customer Service Units (ULP).

No.	Wilayah Kerja Working Area	PLN UID/UIW/UIT/UIP3B/UP3/UP2D/UPT/ULP	Jumlah Penugasan Number of Assignment	Unit Dilayani Unit Served
1	Region 1 Jawa Barat Region 1 West Java	UID Jawa Barat Parent Unit of Distribution of West Java	19	82
		UID Jawa Bagian Tengah Parent Unit of Distribution of Central Part Java	1	9
2	Region 2 Jawa Tengah dan DIY Region 2 Central Java and DIY	UID Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Parent Unit of Distribution of Central Java and DIY	9	31
3	Region 3 Jawa Timur Region 3 East Java	UID Jawa Timur Parent Unit of Distribution of East Java	29	93
		UIT Jawa Bagian Timur dan Bali Parent Unit of Transmission of Eastern Part Java and Bali	1	13
		UIP2B Jawa Bali Parent Unit of Load Distribution and Arrangement of Java Bali	1	1
4	Region 4 Sumatera Barat Region 4 West Sumatra	UIW Sumatera Barat Parent Unit of Region of West Sumatra	8	32
		UIW Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu Parent Unit of Region of South Sumatra, Jambi and Bengkulu		2
5	Region 5 DKI Jakarta dan Banten Region 5 DKI Jakarta and Banten	UID Jakarta Raya Parent Unit of Distribution of Jakarta Raya	22	10
		UID Banten Parent Unit of Distribution of Banten	10	11
		UIT Jawa Bagian Barat Parent Unit of Transmission of Western Part Java	4	12
		UID Lampung Parent Unit of Distribution of Lampung	6	16
		UIW Bangka Belitung Parent Unit of Region of Bangka Belitung	3	7
6	Region 6 Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Region 6 Riau and Riau Islands	UIW Riau dan Kepulauan Riau Parent Unit of Region of Riau and Riau Islands	6	26
		UIW Sumatera Utara Parent Unit of Region of North Sumatra	1	5
		UIP3B Sumatera Parent Unit of Load Distribution and Arrangement of Sumatra	2	32
<b>Total</b>			<b>122</b>	<b>382</b>

**Tinjauan Kinerja Usaha**  
Business Performance Review

**Pertumbuhan Pelanggan**

**1. Bidang Distribusi**

Pada tahun 2019, jumlah pelanggan bidang distribusi bertambah 40 Unit Layanan Pelanggan (ULP) dari target 36 ULP. ULP tersebut berasal dari 10 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3).

**Customer Growth**

**1. Distribution**

In 2019, the number of distribution customers increased by 40 Customer Service Units (ULP) from the target of 36 ULP. ULP came from 10 Customer Service Implementating Units (UP3).

No.	Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Customer Service Implementing Unit	Jumlah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Number of Customer Service Unit	Jenis Kontrak Type of Contract		
			Distribusi Distribution		Niaga Commerce
			Operasi Distribusi Distribution Operation	Pemeliharaan Distribusi Maintenance of Distribution Line	Manajemen Billing Billing Management
1	Malang	14			
2	Bandungan	1			
3	Purwokerto	2			
4	Dumai	1			
5	Gunung Putri	3			
6	Sumedang	4			
7	Tasikmalaya	7			
8	Lampung-Metro	4			
9	Rengat	1			
10	Pekanbaru	3			
<b>Jumlah Pertumbuhan Pelanggan Total Customer Growth</b>		<b>40</b>			

**2. Bidang transmisi**

Jumlah pelanggan bidang transmisi bertambah 12 Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) dari target 12 ULTG. ULTG tersebut berasal dari 4 Unit Pelaksana Transmisi (UPT).

**2. Transmission**

The number of transmission customers increased by 12 Transmission Service and Substation Units (ULTG) from the target of 12 ULTG. ULTG came from 4 Transmission Implementing Units (UPT).

No.	Unit Pelaksana Transmisi (UPT)	Jumlah ULTG Number of ULTG	Transmission Implementing Unit (UPT)
1	UPT Pulogadung	3	UPT Pulogadung
2	UPT Duri Kosambi	3	UPT Duri Kosambi
3	UPT Cawang	3	UPT Cawang
4	Dumai	3	Dumai
<b>Jumlah Pertumbuhan Pelanggan</b>		<b>12</b>	<b>Total Customer Growth</b>





### Asset Management Contract Distribusi

*Project Asset Management Contract* (AMC) Distribusi meliputi bidang operasi dan pemeliharaan distribusi yang diukur dari penambahan unit PLN setingkat UP3 yang sudah menandatangani kontrak kerja sama AMC Distribusi pada suatu periode tertentu. Kontrak AMC merupakan kontrak yang meliputi peran Perusahaan sebagai *asset operator* sekaligus *asset manager*. Pada tahun 2019 Perusahaan mendapat tambahan 12 kontrak AMC dengan UP3 yang meliputi 15 ULP. Pertumbuhan kontrak AMC tersebut memenuhi target sebanyak 12 UP3.

### Service Level Agreement (SLA)

Pada tahun 2019, manajemen telah menyepakati Service Level Agreement (SLA) pekerjaan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen dengan target 100%. Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi pencapaian SLA di 6 region rata-rata sebesar 97,96%. Pencapaian SLA tertinggi sebesar 100% di Region 5 DKI Jakarta & Banten dan terendah sebesar 94,62% di Region 4 Sumatera Barat.

### Distribution Asset Management Contract

Distribution Asset Management Contract (AMC) Project includes distribution operations and maintenance as measured by the addition of UP3-level PLN units that signed Distribution AMC cooperation contracts in a certain period. AMC contract is a contract covering the Company's role as an asset operator as well as an asset manager. In 2019, the Company received additional 12 AMC contracts with UP3 covering 15 ULP. AMC contract growth met the target of 12 UP3.

### Service Level Agreement (SLA)

In 2019, the management agreed on a Service Level Agreement (SLA) for distribution operation and maintenance services as stipulated in Management Contract with a target of 100%. At end of 2019, average SLA realization in 6 regions was 97.96%. The highest SLA was 100% in Region 5 of DKI Jakarta & Banten and the lowest was 94.62% in Region 4 of West Sumatra.

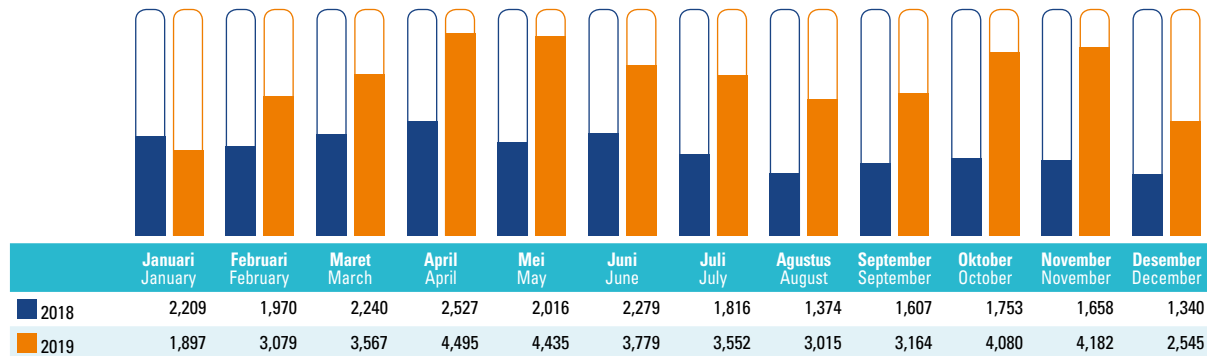
No.	Region	Pencapaian SLA SLA Achievement	Region
1	Region 1 Jawa Barat	98.07%	Region 1 West Java
2	Region 2 Jawa Tengah dan DIY	99.00%	Region 2 Central Java and DIY
3	Region 3 Jawa Timur	98.00%	Region 3 East Java
4	Region 4 Sumatera Barat	95.00%	Region 4 West Sumatra
5	Region 5 DKI Jakarta and Banten	100.00%	Region 5 DKI Jakarta and Banten
6	Region 6 Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	98.00%	Region 6 Riau and Riau Islands
7	Region 7 Lampung	97.00%	Region 7 Lampung
<b>Jumlah Rata-rata</b>		<b>97.96%</b>	<b>Average</b>

Tidak tercapainya target SLA menyebabkan Perusahaan dikenakan denda/penalti. Akumulasi denda pada tahun 2019 mencapai Rp41,79 miliar, naik 83,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp22,79 miliar. Penyebab denda SLA di *project* Pelayanan Teknik didominasi oleh Kinerja *Response Time*, Gangguan Penyulang dan Gangguan *Recloser*. Sedangkan untuk Manbill, penyebab denda SLA adalah Saldo Piutang dan Operator Gardu Induk (OGI) di mana prosedur pelaporan pergantian *shift* tidak bisa dijalankan di beberapa Gardu Induk yang tidak bisa melakukan pergantian *shift* per 8 jam karena faktor keamanan lokasi yang tidak memungkinkan.

The unachieved SLA target caused the Company to be subject to fines/penalties. Accumulated fines in 2019 reached Rp41.79 billion, up 83.4% compared to 2018 which amounted to Rp22.79 billion. The causes of SLA fines in Technical Services projects were dominated by Response Time Performance, Feeder Interruption and Recloser Interruption. As for Billing Management, the causes of SLA fines were Accounts Receivable Balance and Substation Operators (OGI) where the shift change reporting procedure could not be carried out in several substations that could not make 8-hour shift due to unfeasible location security.

**Tinjauan Kinerja Usaha**  
Business Performance Review

**Denda SLA Bulanan 2018–2019 (Rp miliar)**  
Monthly SLA Penalty (Rp billion)



**Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu**

Perusahaan menerapkan standar operasi yang mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 sebagai jaminan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sejak tahun 2014, HP telah memperoleh Sertifikat ISO 9001 dari LMK-Certification/PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi. Saat ini Perusahaan telah mengadopsi ISO 9001 versi terbaru yaitu ISO 9001:2015 yang lebih menekankan pemikiran berbasis risiko (*risk based thinking*) dengan keluaran (*output*) yang diharapkan adalah kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Pada tahun 2019, Perusahaan menargetkan sertifikasi proses bisnis yang belum tersertifikasi ISO 9001:2015. Hingga akhir tahun, seluruh proses bisnis di Perusahaan yang mencakup 12 proses bisnis telah dinilai oleh LMK-Certification dan telah pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001:2015 berdasarkan sertifikat No. 0542-M tanggal 9 Desember 2019. Proses bisnis yang telah mendapat sertifikasi adalah sebagai berikut:

**Quality Management System Certification**

The Company adopts ISO 9001 Quality Management System certified operating standards to ensure service quality provided to customers refers. Since 2014, HP has obtained ISO 9001 Certificate from LMK-Certification/PT PLN (Persero) Certification Center. Currently, HP has adopted the latest version of ISO 9001, namely ISO 9001:2015 which emphasizes risk-based thinking with expected output including customer satisfaction and corporate performance improvement.

In 2019, the Company targeted to certify business processes that were not yet ISO 9001: 2015 certified. At end of the year, all business processes in the Company which included 12 business processes had been assessed by LMK-Certification and met SNI requirements of ISO 9001: 2015 based on certificate No. 0542-M dated December 9, 2019. Business processes that have been certified are as follows:





No.	Lingkup Bisnis	Eksisting Existing	Penambahan Addition	Business Scope
1	Operasi Pemeliharaan Jaringan Distribusi (Ophardist)	✓		Distribution Line Maintenance Operation
2	Manajemen <i>Billing</i> (Manbill)	✓		Billing Management
3	Jasa Operator dan Pemeliharaan Gardu Induk	✓		Substation Operator and Maintenance Service
4	Penyambungan Pelanggan	✓		Customer Connection
5	Deteksi Kabel	✓		Cable Detection
6	Asesmen Kabel	✓		Cable Assessment
7	<i>Retail Account Marketing</i> (RAM)		✓	Retail Account Marketing (RAM)
8	Operator Gardu Induk 150 kV		✓	Sub Station Operator 150 kV
9	Petugas <i>Ground Patrol</i> (PGP)		✓	Ground Patrol Officer
10	Operator PLTD		✓	Diesel Engine Power Plant
11	<i>Command Center</i>		✓	Command Center
12	ListiQu		✓	ListiQu
<b>Jumlah Proses Bisnis Tersertifikasi</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Number of Certified Business Process</b>

## Aspek Pemasaran

### Strategi Pemasaran

Saat ini, pelanggan utama Perusahaan adalah PLN. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengedepankan misinya mendukung PLN dalam merealisasikan pelayanan sistem distribusi yang andal dan berkualitas dengan secara konsisten memberikan standar layanan tertinggi dan mendukung PLN dalam menerapkan sistem *revenue assurance* (REVASS) dan efisiensi jaringan distribusi tenaga listrik.

### Pangsa Pasar

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017, HP ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja Sumatera, Jawa dan Bali. Saat ini, Perusahaan memiliki 6 region dan 3 area khusus yang berada di Sumatera dan Jawa. Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan menguasai 38% pangsa pasar dan ditargetkan menjadi 44% pada tahun 2020.

### Inovasi Layanan

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa, HP menghadapi tingkat kompetisi yang tinggi terutama di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, HP terus menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, antara lain dengan menghadirkan layanan pelanggan berbasis digital.

## Marketing

### Marketing Strategy

Currently, the Company's main customer is PLN. In running its business, the Company always prioritizes its mission to support PLN in realizing reliable and quality distribution system services by consistently providing the highest service standards and supporting PLN in implementation of revenue assurance (REVASS) system and efficiency of power distribution network.

### Market Share

Based on Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0030.P/DIR/2017, HP was appointed to manage operational areas of Sumatera, Java and Bali. Currently, the Company has 6 regions and 3 special areas located in Sumatera and Java. At end of 2019, the Company had 38% market share and is targeted to reach 44% in 2020.

### Service Innovation

As a company engaged in the service sector, HP faces a fierce competition, especially in the use of information technology. Therefore, HP continues to adapt to technological advances, including by providing digital-based customer service.

## Tinjauan Kinerja Usaha

### Business Performance Review

Pada tanggal 17 Februari 2019, Perusahaan meluncurkan aplikasi Layanan Instalasi Listrik Pelanggan (ListriQu) untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh konsumen. Layanan ListriQu telah mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Surabaya. Di tahun 2020, ListriQu akan dikembangkan untuk melayani UID Jawa Tengah dan DIY, UIW S2JB, UIW Sulselrabar, UIW MMU, UIW NTT, dan UID Bali.

Kehadiran aplikasi ListriQu akan membantu membantu pelanggan saat terjadi gangguan instalasi di rumah. Penggunaan aplikasi ListriQu sangat mudah, pelanggan hanya perlu membuka aplikasi ListriQu dan menginput data yang diperlukan. Selanjutnya, petugas ListriQu akan datang untuk menangani gangguan pada instalasi pelanggan. Layanan ListriQu ini bergaransi mulai dari jasa hingga material yang digunakan.

Bagi Perusahaan, implementasi aplikasi ListriQu memberikan beberapa benefit, antara lain dapat mengalihkan petugas Yandal ke penugasan lain (mengantisipasi disrupsi atas pekerjaan-pekerjaan di PLN), mengurangi biaya operasional di pelayanan teknik, serta sebagai proses bisnis baru, dalam hal ini digitalisasi layanan. Selain memiliki pelayanan yang cepat, ListriQu juga memiliki kru bersertifikat, transparansi harga, kualitas terbaik, dan garansi pelayanan. Ke depan, aplikasi ListriQu akan terus disempurnakan dengan fitur-fitur seperti *Home appliance*, *Q-meter*, serta *Q-premium*.

Sebagaimana aplikasi layanan berbayar lainnya, ListriQu berkolaborasi dengan lembaga perbankan atau perusahaan pengelola sistem pembayaran digital untuk memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan. Perusahaan telah bekerja sama dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan melakukan integrasi *e-payment* untuk meningkatkan kemudahan metode pembayaran ListriQu. Proses pembangunan dan uji integrasi telah dilakukan pada akhir tahun 2019 dan ditargetkan pada bulan Februari 2020 pelanggan sudah dapat melakukan pembayaran jasa layanan ListriQu menggunakan LinkAja.

### Profitabilitas

Perusahaan tidak menerapkan segmentasi pasar ataupun segmentasi produk layanan. Pada tahun 2019, pendapatan usaha Perusahaan tumbuh 21,3% dari Rp2,07 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp2,51 triliun. Sedangkan beban usaha mencapai Rp2,22 triliun, tumbuh 22,2% dari Rp1,82 triliun pada tahun 2018 dan laba bersih sebesar Rp179,32 miliar, naik 29,3% dibandingkan Rp138,68 miliar pada tahun 2018.

On February 17, 2019, the Company launched Customer Electrical Installation Services (ListriQu) application to improve services to all consumers. ListriQu services have covered the areas of DKI Jakarta, Banten and Surabaya. In 2020, ListriQu will be developed to serve UID Central Java and DIY, UIW S2JB, UIW Sulselrabar, UIW MMU, UIW NTT and UID Bali.

ListriQu application will help customers that experience installation disruption at home. Using ListriQu application is very easy, customers only need to open ListriQu application and input the required data. After that, ListriQu technicians will come to handle interruption in customer installations. ListriQu offers warranty for services and materials used.

To the Company, implementation of ListriQu application provides several benefits, including being able to transfer Yandal officers to other assignments (anticipating disruption of jobs at PLN), reducing operational costs in technical services, as well as being a new business process, in this case digitizing services. Besides fast response, ListriQu also has certified crews and offers price transparency, best quality and service warranty. Going forward, ListriQu application will continue to be refined with features such as Home appliance, Q-meter and Q-premium.

Like other paid service applications, ListriQu collaborates with banking institutions or digital payment system management companies to make payments easier for customers. The Company has collaborated with PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) by integrating e-payment to improve the ease of ListriQu payment method. Development and integration testing were carried out at end of 2019 and it is targeted that by February 2020 customers will be able to make payments for ListriQu services using LinkAja.

### Profitability

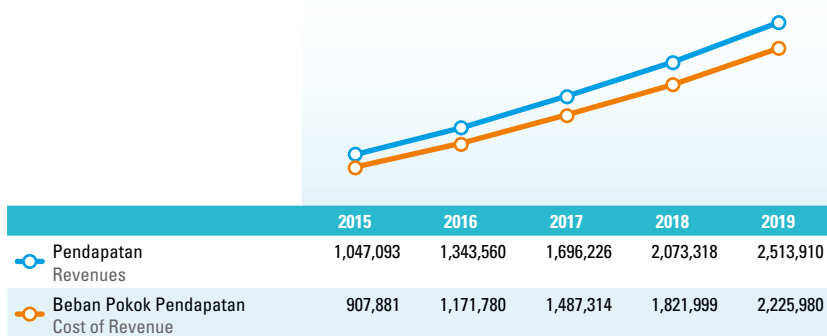
The Company does not apply market segmentation or service product segmentation. In 2019, the Company's operating revenues grew by 21.3% from Rp2.07 trillion in 2018 to Rp2.51 trillion. Meanwhile, operating expenses reached Rp2.22 trillion, increased by 22.2% from Rp1.82 trillion in 2018 and net income of Rp179.32 billion, up 29.3% compared to Rp138.68 billion in 2018.



Grafik berikut menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan, beban pokok pendapatan (BPP) dan laba bersih dalam 5 tahun terakhir. Jarak antara pertumbuhan pendapatan dan beban usaha yang semakin lebar dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam melakukan efisiensi dan optimalisasi pengendalian biaya.

The following graph shows the trend of growths in revenues, cost of revenues (BPP) and net income in the last 5 years. The growth gap between revenues and operating expenses which gets wider from year to year shows the Company's success in implementing efficiency and optimizing cost control.

**Pendapatan–Beban Pokok Pendapatan 2015–2019 (Rp juta)**  
Revenues–Cost of Revenues 2015–2019 (Rp million)



**Laba Bersih 2015–2019 (Rp juta)**  
Net Profit 2015–2019 (Rp million)



## PROSPEK USAHA

Prospek usaha Perusahaan sangat berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan PLN dalam rangka meningkatkan kualitas dan keandalan sistem serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Berdasarkan UU 30/2009, PLN selaku Pemegang IUPTL untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus, dalam jumlah yang cukup dengan mutu dan keandalan yang baik. PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik

## BUSINESS PROSPECTS

The Company's business prospects are closely related to PLN's power infrastructure development plan in order to improve the quality and reliability of the system and to meet customer needs. Based on Law 30/2009, PLN as IUPTL Holder for public purposes is obliged to provide electricity continuously, in sufficient quantities with good quality and reliability. PLN must be able to serve current and future electricity needs according to the mandate of

**Prospek Usaha**  
Business Prospects

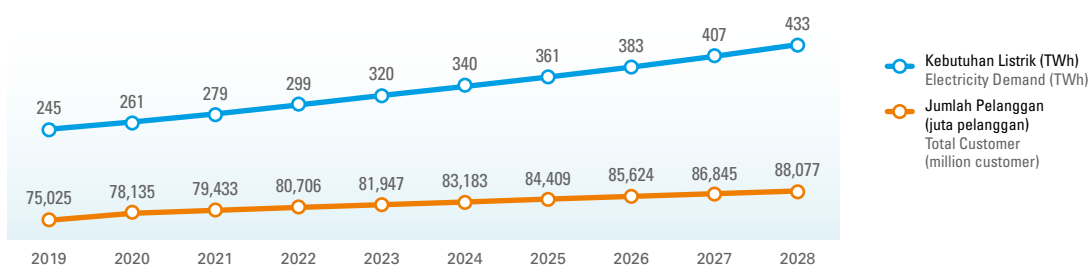
saat ini maupun di masa yang akan datang sesuai amanat undang-undang tersebut dengan merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem tenaga listrik jangka panjang berdasarkan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.

Dengan laju pembangunan infrastruktur yang masif, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sosial-politik selama beberapa tahun terakhir, maka kebutuhan tenaga listrik Indonesia akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Saat ini PLN telah memiliki dokumen perencanaan sepuluh tahun ke depan yang disebut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2019-2028. Di dalam RUPTL 2019-2028, PLN memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional sebesar 6,42% per tahun. Dasar penentuan meliputi data historis penjualan per segmen pelanggan serta asumsi pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi 10 tahun mendatang. Berdasarkan asumsi tersebut, pada tahun 2028 kebutuhan listrik nasional akan mencapai 432.713 GWh dengan proyeksi jumlah pelanggan mencapai 88,1 juta pelanggan.

this law by planning and implementing long-term power system development based on projected national electricity demand growth.

With the massive pace of infrastructure development, economic growth and socio-political stability over the last few years, Indonesia’s demand for electricity will continue to increase in the coming years. Currently, PLN has a planning document for the next ten years called General Plan for Electricity Supply (RUPTL) for the period of 2019-2028. In 2019-2028 RUPTL, PLN projects the national electricity demand growth of 6.42% per year. The projection basis includes historical data on sales per customer segment as well as assumptions for population growth, economic growth and inflation for the next 10 years. Based on these assumptions, in 2028, the national electricity demand will reach 432,713 GWh with a projected number of customers to reach 88.1 million customers.

**Proyeksi Pertumbuhan Pelanggan vs Kebutuhan Daya Listrik**  
Projected Growth of Customer vs Electricity Power Demand



Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028  
Source: General Plan for Electricity Supply (RUPTL) 2019-2028

Kebutuhan tenaga listrik tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, hingga jaringan distribusi, agar listrik dapat disalurkan hingga ke konsumen dengan mutu dan keandalan yang terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 432.713 GWh pada tahun 2028, dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkuit (kms) serta gardu induk dengan kapasitas total 124.341 MVA.

The need for electricity requires development of electricity infrastructure, starting from power plants, transmission networks to distribution networks, so that electricity can be distributed to consumers with the best quality and reliability. To meet the electricity demand of 432,713 GWh in 2028, it is necessary to build power plants with a total capacity of 56,395 MW, transmission network of 57,293 circuit kilometers (kms) and substations with a total capacity of 124,341 MVA.





Pada tahun 2020, Perusahaan telah menjalani tahun ke-9 penugasan. Perusahaan memasuki periode *excellence performance* di mana kualitas kinerja operasional maupun keuangan harus semakin baik. Perusahaan berkomitmen melaksanakan penugasan PLN dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kontribusi penting di dalam meningkatkan kualitas keandalan dan intensitas layanan kepada pelanggan PLN.

Perusahaan menargetkan pertumbuhan pangsa pasar sebesar 9% di 2020, dari 38% pada tahun 2019 menjadi 44%. Pangsa pasar 44% dihitung dari jumlah ULP PLN se Sumatera, Jawa dan Bali atau setara dengan 250 ULP. Selain itu, Perusahaan tetap menargetkan pencapaian SLA sebesar 100% melalui perbaikan kualitas proses bisnis internal dan sumber daya manusia, serta terus berkomitmen untuk mencapai nihil kecelakaan melalui implementasi SMK3.

## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

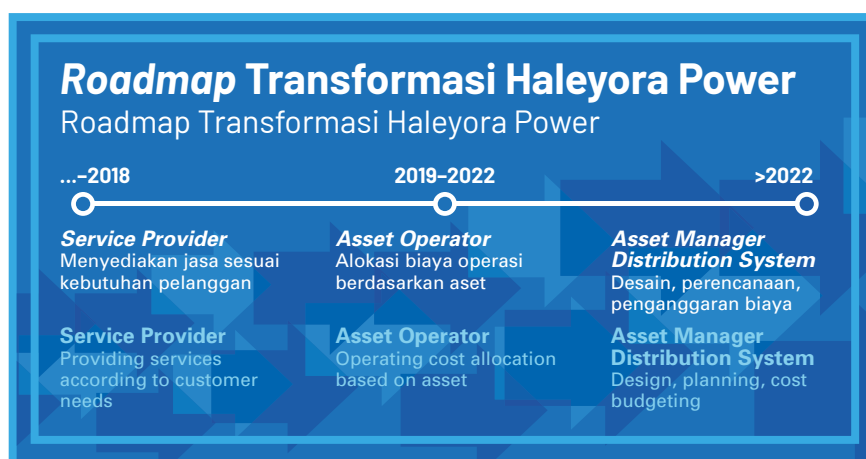
Di tahun 2018, Perusahaan menginisiasi proses transformasi yang berorientasi jangka panjang untuk mengoptimalkan peran HP dalam mendukung keberlanjutan bisnis PLN. Sasaran utama dari transformasi ini adalah kualitas, reliabilitas, efektivitas biaya dan kepuasan pelanggan.

In 2020, the Company has served its 9<sup>th</sup> year of assignment. The Company is entering a period of performance excellence where the quality of operational and financial performances must improve. The Company is committed to carrying out PLN assignments excellently to make a meaningful contribution in improving the quality of reliability and intensity of services to PLN customers.

The Company targets a market share growth of 9% in 2020, from 38% in 2019 to 44%. The 44% market share is calculated from the total ULP PLN in Sumatera, Java and Bali, or the equivalent of 250 ULP. In addition, the Company targets 100% SLA achievement through quality improvement in internal business processes and human resources, and keeps its commitment to achieving zero accidents through SMK3 implementation.

## BUSINESS SUSTAINABILITY

In 2018, the Company initiated a long-term oriented transformation process to optimize HP's role in supporting PLN's business sustainability. The main targets of this transformation are quality, reliability, cost effectiveness and customer satisfaction.



Berdasarkan analisis atas tantangan dan peluang, Perusahaan menetapkan *Roadmap* Transformasi HP dalam 5 tahun ke depan untuk menjadi *asset manager* melalui penyesuaian portofolio usaha. Saat ini Perusahaan telah mengklasifikasi portofolio usaha menjadi 10 paket, di antaranya adalah paket layanan O&M distribusi *end-to-end*,

Based on an analysis of threats and opportunities, the Company established HP Transformation Roadmap for the next 5 years to become an asset manager by aligning its business portfolios. Currently, the Company classifies its business portfolios into 10 packages, including end-to-end distribution O&M service package and 2 distribution O&M

## Informasi Kelangsungan Usaha

### Business Sustainability

dan 2 paket O&M distribusi *asset management contract* (AMC) yaitu AMC sebagai *asset operator* dan AMC sebagai *asset manager*. Tabel berikut menunjukkan 10 portofolio HP dan HPI dan target waktu implementasinya dalam 5 tahun ke depan.

asset management contract (AMC) packages, consisting of AMC as an asset operator and AMC as an asset manager. The following table shows 10 portfolios of HP and HPI and the respective implementation timeline for the next 5 years.

No.	Portofolio Bisnis Grup HP Business Portfolio of HP Group	Jangka Menengah Medium-Term		Jangka Panjang Long-Term		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Operasi & Pemeliharaan (Ophar) Distribusi- <i>End-to-End</i> End-to-End-Distribution Operation & Maintenance (O&M) Services					
2	Ophar Distribusi-Asset Operator (AMC) Asset Operator-Distribution O&M Services (AMC)					
3	Ophar Distribusi-Asset Manager (AMC) Asset Manager-Distribution O&M Services (AMC)					
4	Layanan ListriQu ListriQu Service					
5	Layanan Niaga <i>End-to-End</i> End-to-End Commercial Service					
6	Ophar Transmisi Transmission O&M Services					
7	Industrial Cleaning*					
8	Pengelolaan Gedung* Building Management*					
9	Back Office Supporting*					
10	Pengelolaan Arsip Digital* Digital Archive Management*					

\* Portofolio HPI/HPI Portfolio

Sebagai *asset operator*, Perusahaan harus menjadi mitra pelanggan yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara *end-to-end* demi mengamankan keberlanjutan usaha pelanggan. Oleh karena itu, strategi Perusahaan untuk bertransformasi menjadi *leading asset operator* adalah dengan melakukan *business process re-engineering*, di mana HP akan lebih proaktif dalam memelihara aset tanpa menunggu terjadinya gangguan atau keluhan dari pelanggan. Pemeliharaan yang dilakukan lebih menekankan kepada *condition based* dan *predictive maintenance*.

As an asset operator, the Company will carry out greater responsibilities than as a service provider. Asset operator must serve as customers' partner that initiates end-to-end maintenance and repairs to ensure the customers' business sustainability. Therefore, the Company's strategy to transform into a leading asset operator is to conduct business process re-engineering, where HP will be more proactive in assets maintenance without preceding interruption or complaint from customers. The maintenance carried out emphasizes condition-based and predictive maintenance.

Untuk mencapai target pangsa pasar 44% pada tahun 2020, Perusahaan akan melakukan penambahan *project* baik pada pasar *captive* maupun *non-captive*. Pasar *captive* bidang O&M Transmisi dan Distribusi berasal dari unit-

To achieve the targeted market share of 44% in 2020, the Company will undertake additional projects in both captive and non-captive markets. The captive phase of Transmission and Distribution O&M comes from PLN units in Sumatra,



**Informasi Kelangsungan Usaha**  
Business Sustainability

unit PLN di Sumatera, Jawa dan Bali sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No, 0734.P/DIR/2014 dan No, 030.P/DIR/2017. Sedangkan pengembangan pasar *non-captive* di antaranya adalah:

1. Pengembangan produk ListriQu dengan *marketplace* sebagai berikut:
  - a) ListriQu Residential di DKI, Banten, Jawa Timur Metropolitan, Bojonegoro,
  - b) ListriQu Premium (CBM, PDKB) di UID Jawa Timur dan UID DKI Jakarta,
  - c) ListriQu PV Rooftop di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Pekanbaru.
2. Pekerjaan *industrial cleaning* oleh HPI.
3. Pekerjaan *building management* oleh HPI.

Java and Bali in accordance with Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0734.P/DIR/2014 and No. 030.P/DIR/2017. Meanwhile, expansion of non-captive markets includes:

1. ListriQu product development with the following marketplaces:
  - a) ListriQu Residential in DKI, Banten, East Java Metropolitan, Bojonegoro,
  - b) ListriQu Premium (CBM, PDKB) in UID East Java and UID DKI Jakarta,
  - c) ListriQu PV Rooftop in Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung and Pekanbaru.
2. Industrial cleaning works by HPI.
3. Building management works by HPI.

# Tinjauan Kinerja Keuangan

## Financial Performance Review



Pembahasan kinerja keuangan berikut ini disusun berdasarkan data-data keuangan dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Haleyora Power dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

#### Pendapatan

Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp2.513,91 miliar, meningkat 21,3% dari Rp2.073,32 miliar pada tahun 2018.

Pertumbuhan pendapatan terutama disebabkan penambahan jumlah pelanggan baru bidang distribusi sebanyak 21 Unit Layanan Pelanggan (ULP), bidang transmisi sebanyak 13 Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) dan bidang

The following discussion of financial performance is prepared based on financial data from the Consolidated Financial Statements of PT Haleyora Power and Subsidiaries for the years ended December 31, 2019 and 2018 which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) with an unqualified opinion in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS

#### Revenues

In 2019, the Company recorded revenues of Rp2,513.91 billion, an increase of 21.3% from Rp2,073.32 billion in 2018.

The growth in revenue was mainly due to additional new customers in distribution sector of 21 Customer Service Units (ULP), transmission sector of 13 Transmission Service and Substation Units (ULTG) and Asset Management



**Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan O&M dan pendapatan lainnya di mana pendapatan O&M mencakup pekerjaan Pelayanan Jasa Teknik dan Pelayanan Jasa Non Teknik. Pelayanan Jasa Teknik adalah kontributor terbesar dari struktur pendapatan Perusahaan.**

The Company's revenues consist of O&M and other revenues where O&M revenues include technical services and non-technical services. Technical Services are the largest contributor to the Company's revenues structure.



**21.3%**

**Pertumbuhan pendapatan Perusahaan pada tahun 2019 terutama disebabkan penambahan jumlah pelanggan baru di sektor distribusi dan transmisi.**

The Company's revenue growth in 2019 mainly due to additional new customers in distribution and transmission sectors.

*Asset Management Contract (AMC) Distribusi* sebanyak 11 Unit Pelayanan Pelaksanaan Pelanggan (UP3).

Penambahan proyek baru terjadi di wilayah Jawa Timur (Manbill Gresik, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Malang) dan wilayah DKI Jakarta dan Banten (UITJBB, Scada Banten, Bulungan, Cikokol, Cikupa, Jatinegara, Kepulauan Seribu, Kramat Jati, Lenteng Agung, Pondok Gede, dan Teluk Naga).

*Contract (AMC) Distribution* sector of 11 Customer Service Provider Units (UP3).

The addition of new projects occurred in East Java region (Manbill Gresik, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, North Surabaya, South Surabaya, West Surabaya and Malang) as well as in DKI Jakarta and Banten regions (UITJBB, Scada Banten, Bulungan, Cikokol, Cikupa, Jatinegara, Kepulauan Seribu, Kramat Jati, Lenteng Agung, Pondok Gede, and Teluk Naga).

Dalam jutaan Rupiah

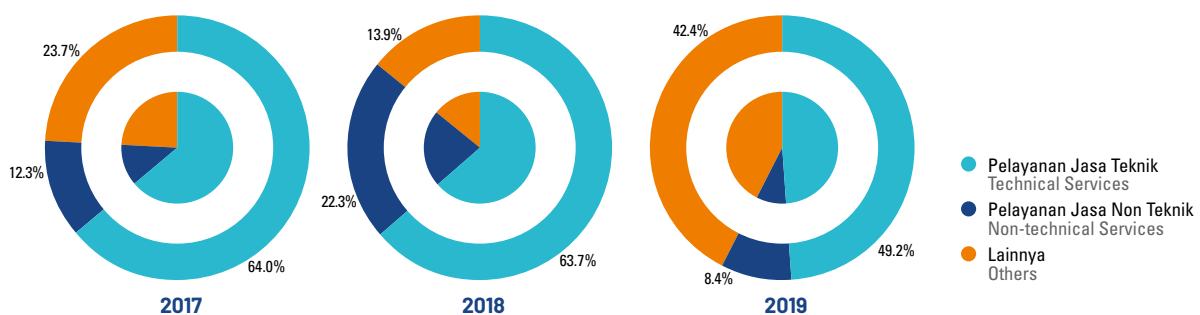
In million Rupiah

Pendapatan	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Revenues
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Operasi dan Pemeliharaan						Operation and Maintenance Services
Pelayanan Jasa Teknik	1,086,278	1,321,188	1,538,022	216,834	16.4%	Technical Services
Pelayanan Jasa Non Teknik	208,047	463,358	500,280	36,922	8.0%	Non-technical Services
Lainnya	401,901	288,772	475,608	186,836	64.7%	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1,696,226</b>	<b>2,073,318</b>	<b>2,513,910</b>	<b>440,592</b>	<b>21.3%</b>	<b>Total</b>

## Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review

Pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan Operasi dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance/O&M*) dan pendapatan lainnya. Pendapatan O&M mencakup pekerjaan Pelayanan Jasa Teknik dan Pelayanan Jasa Non Teknik. Pelayanan Jasa Teknik menjadi kontributor terbesar dari struktur pendapatan Perusahaan. Komposisi pendapatan Perusahaan ditunjukkan dalam diagram berikut:

The Company's revenues consist of Operation and Maintenance (O&M) and other revenues. O&M revenues include technical services and non-technical services. Technical Services are the largest contributor to the Company's revenues structure. The composition of the Company's revenue is shown in the following diagram:



## Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan (BPP) Perusahaan merupakan biaya yang dibutuhkan dalam proses penyerahan jasa kepada pihak pemberi jasa. Pada tahun 2019, BPP mencapai Rp2.225,98 miliar, naik 22,2% dibandingkan Rp1.822,00 miliar pada tahun 2018.

## Cost of Revenues

The Company's Cost of Revenues (BPP) is a cost required in the process of delivering services to service providers. In 2019, BPP reached Rp2,225.98 billion, up 22.2% compared to Rp1,822.00 billion in 2018.

Peningkatan BPP terutama disebabkan adanya penambahan proyek-proyek baru yang berdampak kenaikan signifikan pada akun-akun:

The increase in BPP was mainly due to the addition of new projects that had a significant impact on the following accounts:

- Jasa tenaga kerja langsung naik 21,1% atau Rp316,12 miliar dari Rp1.498,98 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.815,10 miliar.
- Kendaraan operasional naik 33,9% atau Rp38,78 miliar dari Rp114,47 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp153,25 miliar.
- Pemakaian alat kerja dan material naik 24,4% atau Rp14,10 miliar dari Rp57,77 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp71,87 miliar.
- Imbalan kerja naik 34,2% atau Rp10,72 miliar dari Rp31,39 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp42,11 miliar.

- Direct labor increased by 21.1% or Rp316.12 billion from Rp1,498.98 billion in 2018 to Rp1,815.10 billion.
- Operational vehicle rose by 33.9% or Rp38.78 billion from Rp114.47 billion in 2018 to Rp153.25 billion.
- Tools and materials grew by 24.4% or Rp14.10 billion from Rp57.77 billion in 2018 to Rp71.87 billion.
- Employee benefits up 34.2% or Rp10.72 billion from Rp31.39 billion in 2018 to Rp42.11 billion.





**Tinjauan Kinerja Keuangan**  
Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Beban Pokok Pendapatan	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Cost of Revenues
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Jasa Tenaga Kerja Langsung	1,185,362	1,498,983	1,815,101	316,118	21.1%	Direct Labour
Kendaraan Operasional	123,485	114,473	153,249	38,776	33.9%	Operational Vehicles
Pemakaian Alat Kerja dan Material	62,772	57,775	71,875	14,100	24.4%	Labour and Material Usage Tool
Imbalan Kerja	37,032	31,386	42,109	10,723	34.2%	Employee Benefits
Denda Operasional	14,265	24,494	27,899	3,405	13.9%	Operational Penalty
Subkontraktor	7,076	19,256	12,079	(7,177)	-37.3%	Subcontractor
Pemeliharaan dan Penunjang Operasional	8,235	3,082	6,933	3,851	125.0%	Maintenance and Overhead
Lainnya	49,087	72,550	96,735	24,185	33.3%	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1,487,314</b>	<b>1,821,999</b>	<b>2,225,980</b>	<b>403,981</b>	<b>22.2%</b>	<b>Total</b>

### Laba Kotor

Pertumbuhan pendapatan Perusahaan pada tahun 2019 menghasilkan laba kotor sebesar Rp287,93 miliar, naik 14,6% dibandingkan Rp251,32 miliar pada tahun 2018.

### Penghasilan Keuangan

Perusahaan memperoleh penghasilan keuangan sebesar Rp9,14 miliar, naik 22,3% dari Rp7,47 miliar pada tahun 2018.

### Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi

Bagian laba bersih entitas asosiasi merupakan bagian laba bersih dari PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI), entitas asosiasi Perusahaan dengan 45% penyertaan saham. Pada tahun 2019, bagian laba bersih EPI sebesar Rp6,72 miliar, turun 5,0% dari Rp7,07 miliar pada tahun 2018.

### Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi sebesar Rp58,75 miliar, naik 14,5% dibandingkan Rp51,31 miliar pada tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh biaya kepegawaian naik 56,4% atau Rp11,92 miliar dari Rp21,14 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp33,06 miliar.

Sebaliknya, biaya honorarium turun 32,3% atau Rp5,28 miliar dari Rp16,36 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp11,08 miliar dan biaya pemeliharaan turun 19,6% atau Rp1,01 miliar dari Rp5,15 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1,14 miliar.

### Gross Profit

The Company's revenues growth in 2019 resulted in a gross profit of Rp287.93 billion, up 14.6% compared to Rp251.32 billion in 2018.

### Financial Income

The Company received financial income of Rp9.14 billion, increased by 22.3% from Rp7.47 billion in 2018.

### Share of Net Income of Associated Entities

Share of net income of associated entities is part of net income of PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI), an associated entity of the Company with 45% shares. In 2019, EPI's share of net income was Rp6.72 billion, down 5.0% from Rp7.07 billion in 2018.

### General and Administrative Expenses

General and administrative expenses amounted to Rp58.75 billion, up 14.5% compared to Rp51.31 billion in 2018. This growth was mainly due to an increase in employee costs by 56.4% or Rp11.92 billion from Rp21.14 billion in 2018 to Rp33.06 billion.

In contrary, honorarium decreased by 32.3% or Rp5.28 billion from Rp16.36 billion in 2018 to Rp11.08 billion and maintenance cost decreased by 19.6% or Rp1.01 billion from Rp5.15 billion in 2018 to Rp1.14 billion.

## Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Beban Umum dan Administrasi	2017	2018	2019	Perubahan/Change		General and Administrative Expenses
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Kepegawaian	26,588	21,142	33,063	11,921	56.4%	Personnel
Honorarium	13,351	16,358	11,082	(5,276)	-32.3%	Honorarium
Pemeliharaan	3,679	5,151	4,143	(1,008)	-19.6%	Maintenance
Lainnya	5,479	8,654	10,465	1,811	20.9%	Others
<b>Jumlah</b>	<b>49,097</b>	<b>51,305</b>	<b>58,753</b>	<b>7,448</b>	<b>14.5%</b>	<b>Total</b>

### Beban Lain-Lain-Bersih

Beban lain-lain-Bersih yang merupakan beban di luar usaha turun signifikan dari Rp19,77 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp39 juta. Hal ini terutama disebabkan tidak adanya pos beban pajak (2018: Rp11,29 miliar) dan penurunan beban lainnya dari Rp8,76 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp323 juta.

### Other Expenses-Net

Other expenses-Net which were non-operating expenses decreased significantly from Rp19.77 billion in 2018 to Rp39 million. This was mainly due to the absence of tax expenses (2018: Rp11.29 billion) and a decrease in other expenses from Rp8.76 billion in 2018 to Rp323 million.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Beban Lain-lain-Bersih	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Other Expenses-Net
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Pendapatan Sewa	-	-	360	360		Rent Income
Pendapatan <i>Reward</i>	-	132	-	(132)	-100.0%	Reward Income
Denda dan Biaya Terkait	(6,338)	162	-	(162)	-100.0%	Penalty and Related Expenses
Pendapatan Klaim Asuransi	3,412	1	-	(1)	-100.0%	Insurance Claim Income
Beban Pajak	(3,057)	(11,291)	-	11,291	-100.0%	Tax Expenses
Sumbangan Pengembangan Masyarakat	(67)	(20)	(76)	(56)	280.0%	Community Development Donation
Beban STP	(89)	(18)	-	18	-100.0%	STP Expenses
Lainnya	(7,614)	(8,762)	(323)	8,439	-96.3%	Others
<b>Jumlah</b>	<b>(13,753)</b>	<b>(19,796)</b>	<b>(39)</b>	<b>19,757</b>	<b>-99.8%</b>	<b>Total</b>

### Laba sebelum Pajak

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp244,92 miliar, naik 25,8% dari Rp194,70 miliar pada tahun 2018.

### Income before Tax

The Company recorded income before tax of Rp244.92 billion, up 25.8% from Rp194.70 billion in 2018.

### Beban Pajak

Beban pajak tahun berjalan sebesar Rp65,60 miliar, naik 17,1% dibandingkan Rp56,02 miliar pada tahun sebelumnya.

### Tax Expenses

Tax expenses for the year amounted to Rp65.60 billion, increased by 17.1% compared to Rp56.02 billion in the previous year.

### Laba Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan sebesar Rp179,32 miliar, meningkat 29,3% dari Rp138,68 miliar pada tahun 2018.

### Income for the Year

Net income for the year amounted to Rp179.32 billion, rose by 29.3% from Rp138.68 billion in 2018.



Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Income for the Year</b>
<b>Diatribusikan Kepada:</b>				<b>Attributable to:</b>
Pemilik Entitas Induk	117,145	135,254	177,350	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	5,326	3,427	1,972	Non-controlling Interests
<b>Jumlah</b>	<b>122,471</b>	<b>138,681</b>	<b>179,322</b>	<b>Total</b>

### Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak

Penghasilan komprehensif lain berasal dari pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi yaitu pengukuran kembali atas program imbalan pasti dan beban pajak terkait. Pada tahun 2019 Perusahaan mencatat rugi komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp6,08 miliar. Pada tahun 2018 Perusahaan mencatat rugi komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp5,43 miliar.

### Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp173,24 miliar, naik 30,0% dari Rp133,25 miliar pada tahun sebelumnya.

### Other Comprehensive Income (Loss) for the Year After Tax

Other comprehensive income is derived from accounts that are not reclassified to profit or loss, which includes re-measurement of defined benefit plan and the respective tax expenses. In 2019, the Company recorded other comprehensive loss of Rp6.08 billion. Whereas in 2018, the Company recorded other comprehensive loss of Rp5.43 billion.

### Total Comprehensive Income for the Year

Total comprehensive income for the year amounted to Rp173.24 billion, rose by 30.0% from Rp133.25 billion in the previous year.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Comprehensive Income for the Year</b>
<b>Diatribusikan Kepada:</b>				<b>Attributable to:</b>
Pemilik Entitas Induk	126,183	129,827	171,273	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	5,326	3,427	1,972	Non-controlling Interests
<b>Jumlah</b>	<b>131,509</b>	<b>133,254</b>	<b>173,245</b>	<b>Total</b>

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

### Aset

Pada akhir tahun 2019, jumlah aset Perusahaan sebesar Rp966,98 miliar, naik 17,2% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2018 sebesar Rp824,91 miliar.

Kenaikan aset terutama didorong oleh aset lancar yang bertambah Rp115,76 miliar atau naik 16,2% dari Rp715,87 miliar pada akhir tahun 2018 menjadi Rp831,62 miliar pada periode yang sama tahun 2019. Sedangkan aset tidak lancar bertambah sebesar Rp26,32 miliar atau naik 24,1% dari Rp109,04 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp135,36 miliar.

## CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

### Assets

At end of 2019, total assets of the Company were recorded at Rp966.98 billion, up 17.2% compared to the position at end of 2018 which amounted to Rp824.91 billion.

The increase in assets was mainly driven by current assets which grew by Rp115.76 billion or 16.2% from Rp715.87 billion at end of 2018 to Rp831.62 billion. While non-current assets rose by Rp26.32 billion or 24.1% from Rp109.04 billion at end of 2018 to Rp135.36 billion.

**Tinjauan Kinerja Keuangan**  
Financial Performance Review

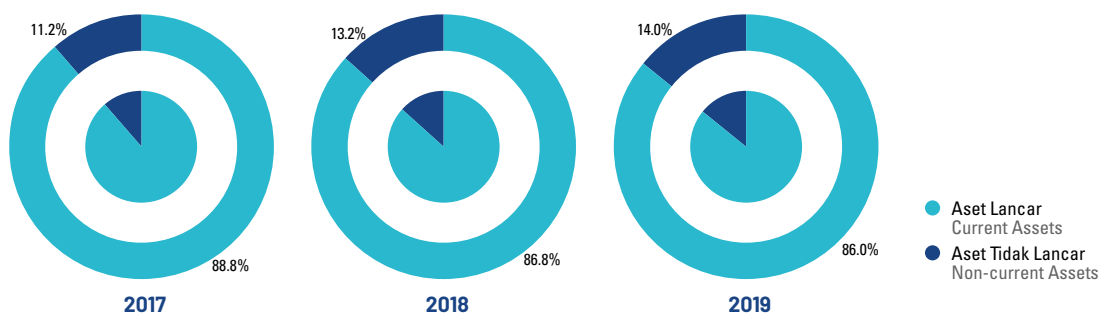
Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Aset	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Assets
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Aset Lancar	637,767	715,865	831,622	115,757	16.2%	Current Assets
Aset Tidak Lancar	80,726	109,041	135,361	26,320	24.1%	Non-current Assets
<b>Jumlah</b>	<b>718,493</b>	<b>824,906</b>	<b>966,983</b>	<b>142,077</b>	<b>17.2%</b>	<b>Total</b>

Komposisi aset lancar dan aset tidak lancar dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam diagram berikut:

The composition of current assets and non-current assets at end of the last three years is shown in the following diagram:



**Aset Lancar**

Aset lancar sebesar Rp831,62 miliar, naik 16,2% dibandingkan Rp715,86 miliar pada tahun 2018. Kenaikan aset lancar terutama karena:

- Piutang usaha – pihak berelasi naik 83,4% atau Rp182,14 miliar dari Rp218,48 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp400,62 miliar.

Tingginya realisasi piutang usaha terutama disebabkan tidak tercapainya target *Collection on Period* (COP). Secara konsolidasi, COP mencapai 45 hari di mana COP HP 34 hari dan HPI 67 hari. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya *delay time* dalam proses pembayaran atas jasa yang telah diserahkan kepada pemberi kerja.

Wilayah yang memiliki tingkat COP yang terbaik pada tahun 2019 adalah wilayah kerja PLN UIW Jawa Tengah dan DIY, APB Jawa Timur, PLN UID Jaya dan Tangerang, UID Banten, dan UIW Sumatera Utara dengan rentang COP 12 hingga 35 hari. Sedangkan wilayah dengan tingkat COP yang kurang baik berada pada wilayah kerja PLN UIT Jawa Bagian Barat, PLN UIT Jawa Bagian Timur dan Bali, dan PLN UIP3B Sumatera dengan rentang COP 46 hingga 127 hari. Kondisi COP tinggi yang dialami HPI terjadi di wilayah kerja Unit Pekanbaru, Proyek Medan dan Proyek Masohi yaitu pada nilai 160, 152 dan 99 hari.

**Current Assets**

Current assets amounted to Rp831.62 billion, up 16.2% compared to Rp715.86 billion at end of 2018. The increase in current assets was mainly due to:

- Trade receivables - related parties increased by 83.4% or Rp182.14 billion from Rp218.48 billion at end of 2018 to Rp400.62 billion.

The high realized trade receivables was mainly due to inability to achieve *Collection on Period* (COP) target. On a consolidated basis, COP reached 45 days, with COP of HP was 34 days and HPI was 67 days. This indicated delay time in payment process for services delivered to employers.

Regions with best COP rates in 2019 were PLN UIW Central Java and DIY, APB East Java, PLN UID Jaya and Tangerang, UID Banten and UIW North Sumatra with COP ranging from 12 to 35 days. Meanwhile, regions with longer COP rates were PLN UIT West Java, PLN UIT East Java and Bali, and PLN UIP3B Sumatra with COP ranging from 46 to 127 days. The longest COP occurred in regions Pekanbaru Unit, Medan Project and Masohi Project, respectively with 160, 152 and 99 days.



**Tinjauan Kinerja Keuangan**  
Financial Performance Review

- Pajak dibayar di muka naik 22,5% atau Rp8,24 miliar dari Rp36,61 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp44,86 miliar.

Kenaikan pajak dibayar di muka terutama karena adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang terus terkompensasi ke masa berikutnya karena Perusahaan bertransaksi dengan Wajib Pungut (Wapu) dan belum melakukan restitusi pajak 2017 sampai dengan 2019. PPN masukan pada tahun 2019 sebesar Rp41,73 miliar, naik 21,7% atau Rp7,45 miliar dari Rp34,28 miliar pada tahun 2018.

- Biaya dibayar di muka dan uang muka naik 129,2% atau Rp9,42 miliar dari Rp7,29 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp16,71 miliar terutama karena adanya biaya sewa kantor sebesar Rp14,53 miliar, naik 158,3% dari Rp5,62 miliar pada tahun sebelumnya.
- Rekening yang dibatasi penggunaannya naik 6,2% atau Rp3,47 miliar dari Rp55,57 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp59,04 miliar.

Kenaikan rekening yang dibatasi penggunaannya terutama karena rekening tabungan bisnis pada Bank Mandiri sebesar Rp55,46 miliar, naik 5,9% dari Rp52,39 miliar pada tahun sebelumnya. Rekening tabungan bisnis merupakan rekening penyimpanan atas dana untuk pembelian saham pada entitas asosiasi.

Sebaliknya kas dan setara kas turun 20,3% atau Rp77,95 miliar dari Rp383,55 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp305,60 miliar dan piutang lain-lain turun 68,9% atau Rp9,88 miliar dari Rp14,34 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp4,47 miliar.

- Prepaid taxes increased by 22.5% or Rp8.24 billion from Rp36.61 billion at end of 2018 to Rp44.86 billion.

The increase in prepaid taxes was mainly due to an increase in Value Added Tax (VAT) input which would be compensated for to the next period because the Company transacted with taxpayers (Wapu) and had not made tax refunds from 2017 to 2019. VAT input at end of 2019 was Rp41.73 billion, up 21.7% or Rp7.45 billion from Rp34.28 billion at end of 2018.

- Prepaid expenses and advances rose by 129.2% or Rp9.42 billion from Rp7.29 billion at end of 2018 to Rp16.71 billion mainly due to office rental expense of Rp14.53 billion, up 158.3% from Rp5.62 billion at end of the previous year.
- Restricted accounts grew by 6.2% or Rp3.47 billion from Rp55.57 billion at end of 2018 to Rp59.04 billion.

The growth in restricted accounts in banks was mainly due to business saving account at Bank Mandiri of Rp55.46 billion, up 5.9% from Rp52.39 billion in the previous year. Business saving account was used to place funds for purchase of shares in associated entities.

In contrary, cash and cash equivalents decreased by 20.3% or Rp77.95 billion from Rp383.55 billion at end of 2018 to Rp305.60 billion and other receivables fell by 68.9% or Rp9.88 billion from Rp14.34 billion at end of 2018 to Rp4.47 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Aset Lancar	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Current Assets
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Kas dan Setara Kas	306,750	383,545	305,598	(77,947)	-20.3%	Cash and Cash Equivalents
Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya	50,647	55,569	59,039	3,470	6.2%	Restricted Cash in Banks
<b>Piutang Usaha</b>						<b>Trade Receivables</b>
Pihak Berelasi	232,167	218,482	400,621	182,139	83.4%	Related Parties
Pihak Ketiga	42	20	335	315	1,575.0%	Third Parties
Piutang Lain-lain	4,206	14,344	4,465	(9,879)	-68.9%	Other Receivables
Pajak Dibayar di Muka	40,045	36,615	44,857	8,242	22.5%	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	3,910	7,290	16,707	9,417	129.2%	Prepaid Expenses and Advances
<b>Jumlah</b>	<b>637,767</b>	<b>715,865</b>	<b>831,622</b>	<b>115,757</b>	<b>16.2%</b>	<b>Total</b>

## Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review

### Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar sebesar Rp135,36 miliar, naik 24,1% dibandingkan Rp109,04 miliar pada tahun 2018. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh:

- Aset tetap naik 40,5% atau Rp12,31 miliar dari Rp30,42 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp42,73 miliar. Kenaikan aset tetap berasal dari pengadaan perlengkapan umum (general equipment) pada tahun 2019 untuk mendukung peningkatan kegiatan usaha yang dicatat berdasarkan biaya perolehan sebesar Rp23,68 miliar dengan penyusutan sebesar Rp11,65 miliar.
- Aset pajak tangguhan naik 35,6% atau Rp10,89 miliar dari Rp30,56 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp41,44 miliar karena penambahan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp10,89 miliar.
- Investasi pada entitas asosiasi yang merupakan investasi Perusahaan pada PT EPI naik 3,0% atau Rp1,41 miliar dari Rp47,48 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp48,89 miliar.
- Biaya yang ditangguhkan naik 176,1% atau Rp1,02 miliar dari Rp581 juta menjadi Rp1,60 miliar.

### Non-current Assets

Non-current assets amounted to Rp135.36 billion, up 24.1% compared to Rp109.04 billion at end of 2018. The increase in non-current assets was mainly due:

- Fixed assets rose by 40.5% or Rp12.31 billion from Rp 30.42 billion at end of 2018 to Rp42.73 billion. The increase in fixed assets came from procurement of general equipment in 2019 to support increasing business activities which were recorded at acquisition costs of Rp23.68 billion with a depreciation of Rp11.65 billion.
- Deferred tax assets grew by 35.6% or Rp10.89 billion from Rp30.56 billion at end of 2018 to Rp41.44 billion due to additional employee benefit liabilities of Rp10.89 billion.
- Investments in associated entities, which represent the Company's investment in PT EPI, increased by 3.0% or Rp1.41 billion from Rp47.48 billion at end of 2018 to Rp48.89 billion.
- Deferred expenses rose by 176.1% or Rp1.02 billion from Rp581 million to Rp1.60 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Aset Tidak Lancar	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Non-current Assets
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Aset Tetap	14,059	30,421	42,732	12,311	40.5%	Property and Equipment
Aset Tak Berwujud	263	7	694	687	9,814.3%	Intangible Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	42,698	47,476	48,889	1,413	3.0%	Investment in Associate
Piutang Lain-lain	80	-	-	-	-	Other Receivables
Beban Tangguhan	-	581	1,604	1,023	176.1%	Deferred Charges
Aset Pajak Tangguhan	23,626	30,556	41,442	10,886	35.6%	Deferred Tax Assets
<b>Jumlah</b>	<b>80,726</b>	<b>109,041</b>	<b>135,361</b>	<b>26,320</b>	<b>24.1%</b>	<b>Total</b>

### Liabilitas

Pada akhir tahun 2019, jumlah liabilitas Perusahaan sebesar Rp259,59 miliar, naik 22,7% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2018 sebesar Rp211,60 miliar. Kenaikan liabilitas terutama didorong oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp43,54 miliar.

### Liabilities

At end of 2019, total liabilities of the Company were Rp259.59 billion, up 22.7% compared to its position at end of 2018 which amounted to Rp211.60 billion. The growth in liabilities was mainly driven by an increase in long-term liabilities of Rp43.54 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Liabilitas	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Liabilitas Jangka Pendek	89,129	93,214	97,663	4,449	4.8%	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	90,735	118,382	161,925	43,543	36.8%	Long-term Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>179,864</b>	<b>211,596</b>	<b>259,588</b>	<b>47,992</b>	<b>22.7%</b>	<b>Total</b>

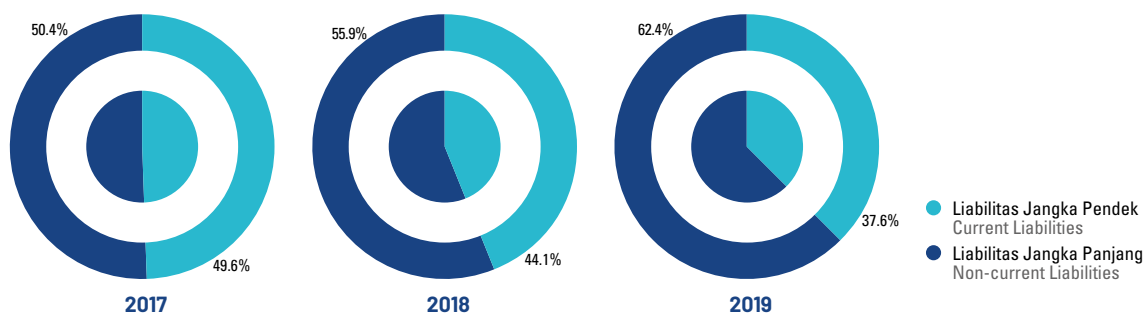




**Tinjauan Kinerja Keuangan**  
Financial Performance Review

Komposisi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam diagram berikut:

Composition of current and non-current liabilities in the past three years is shown in the following diagram:



**Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas jangka pendek sebesar Rp97,66 miliar, naik 4,8% dibandingkan Rp93,21 miliar pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh:

- Utang usaha yang merupakan utang sehubungan dengan pembelian/sewa barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak terdiri dari utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga. Utang usaha pihak ketiga naik 49,4% atau Rp9,29 miliar dari 18,83 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp28,13 miliar untuk pembelian barang dan jasa.

Sebaliknya, utang usaha pihak berelasi turun 71,8% atau Rp1,07 miliar dari Rp1,49 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp420 juta terutama karena penurunan utang pemeliharaan jaringan distribusi dan perlengkapan kepada PLN dari Rp1,49 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp420 juta.

- Biaya yang masih harus dibayar berupa bonus dan insentif kerja, gaji dan tunjangan, dan biaya lainnya naik 23,8% atau Rp10,65 miliar dari Rp44,69 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp55,35 miliar seiring dengan peningkatan aktivitas operasional Perusahaan.
- Utang pajak naik 74,9% atau Rp4,62 miliar dari Rp6,17 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp10,79 miliar terutama karena kenaikan pajak kini perusahaan dari Rp3,70 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp7,07 miliar.

**Current Liabilities**

Current liabilities amounted to Rp97.66 billion, up 4.8% compared to Rp93.21 billion at end of 2018 mainly driven by:

- Trade payables related to purchase/lease of goods and services to support operations of the Company and its subsidiaries consist of related-party payables and third-party payables. Third-party payables rose by 49.4% or Rp9.29 billion from Rp18.83 billion at end of 2018 to Rp28.13 billion for purchase of goods and services.

In contrary, related-party payables decreased by 71.8% or Rp1.07 billion from Rp1.49 billion at end of 2018 to Rp420 million mainly due to decreasing payables to PLN for distribution network maintenance and equipment from Rp1.49 billion at end of 2018 to Rp420 million.

- Accrued expenses for bonuses and incentives, salaries and benefits, and other expenses increased by 23.8% from Rp10.65 billion from Rp44.69 billion at end of 2018 to Rp55.35 billion in line with the increasing the Company's operational activities.
- Taxes payable rose by 74.9% or Rp4.62 billion from Rp6.17 billion at end of 2018 to Rp10.79 billion mainly due to growing current corporate income taxes from Rp3.70 billion at end of 2018 to Rp7.07 billion.

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Review

Sebaliknya, utang lain-lain yang terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan pihak ketiga turun 86,4% atau Rp19,04 miliar dari Rp22,03 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2,95 miliar.

On the other hand, other payables consisting of related-party payables and third-party payables decreased by 86.4% or Rp19.04 billion from Rp22.03 billion in 2018 to Rp2.95 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Current Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Utang Usaha						Trade Payables
Pihak Berelasi	3,283	1,492	420	(1,072)	-71.8%	Related Parties
Pihak Ketiga	30,512	18,832	28,126	9,294	49.4%	Third Parties
Utang Lain-lain						Other Payables
Pihak Berelasi	8,575	13,343	1,604	(11,739)	-88.0%	Related Parties
Pihak Ketiga	1,340	8,686	1,381	(7,305)	-84.1%	Third Parties
Utang Pajak	9,674	6,167	10,785	4,618	74.9%	Taxes Payable
Biaya Masih Harus Dibayar	35,745	44,694	55,347	10,653	23.8%	Accrued Expenses
<b>Jumlah</b>	<b>89,129</b>	<b>93,214</b>	<b>97,663</b>	<b>4,449</b>	<b>4.8%</b>	<b>Total</b>

### Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang sebesar Rp161,93 miliar, naik 36,8% dibandingkan Rp118,38 miliar pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh kenaikan pada akun liabilitas imbalan kerja.

### Non-Current Liabilities

Non-current liabilities amounted to Rp161.93 billion, up 36.8% compared to Rp118.38 billion at end of 2018 mainly due to an increase in employee benefits liability.

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja tanpa pendanaan berupa uang pesangon kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Penyisihan imbalan pascakerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan tahun 2019 adalah sebesar Rp161,93 miliar (2018: Rp118,28 miliar).

The Company provides post-employment benefits without funding in the form of severance pay to employees who meet the requirements in accordance with the Company's regulation based on Labor Law No. 13/2003. Allowance for post-employment benefits is recorded based on an independent actuary calculation using Projected Unit Credit method. The post-employment benefits liability recognized in 2019 financial statements was Rp161.93 billion (2018:Rp118.28 billion).

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Liabilitas Jangka Panjang	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Non-Current Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Liabilitas Jangka Pendek	89,129	93,214	97,663	4,449	4.8%	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	90,735	118,382	161,925	43,543	36.8%	Long-term Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>179,864</b>	<b>211,596</b>	<b>259,588</b>	<b>47,992</b>	<b>22.7%</b>	<b>Total</b>



## Ekuitas

Ekuitas Perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp707,40 miliar, meningkat 15,3% dibandingkan Rp613,31 miliar pada tahun 2018. Peningkatan ekuitas terutama dipengaruhi oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp108,01 miliar.

## Equity

The Company's equity at end of 2019 amounted to Rp707.40 billion, up 15.3% compared to Rp613.31 billion at end of 2018. The growth in equity was mainly due to an increase in retained earnings of Rp108.01 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Ekuitas	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Equity
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Modal saham	100,000	100,000	100,000	-	0.0%	Capital stock
Penghasilan komprehensif lain	62,263	56,836	50,759	(6,077)	-10.7%	Other comprehensif income
Tambahan modal disetor	315	315	315	-	0.0%	Additional paid-in capital
Saldo laba	355,227	431,908	539,919	108,011	25.0%	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:						Equity attributable to:
Pemilik entitas induk	517,805	589,059	690,993	101,934	17.3%	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	20,824	24,251	16,402	(7,849)	-32.4%	Non-controlling interests
<b>Jumlah</b>	<b>538,629</b>	<b>613,310</b>	<b>707,395</b>	<b>94,085</b>	<b>15.3%</b>	<b>Total</b>

## Laporan Arus Kas

Dari aktivitas operasi, Perusahaan memperoleh kas sebesar Rp85,00 miliar, turun dibandingkan Rp229,58 miliar pada tahun 2018. Kas tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.341,36 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan bunga sebesar Rp9,14 miliar dan penerimaan restitusi PPN sebesar Rp5,19 miliar.

## Statements of Cash Flows

From operating activities, the Company received cash of Rp85.00 billion, a decrease compared to Rp229.58 billion in 2018. This cash came from cash receipts from customers of Rp2,341.36 billion. In addition, there were interest receipts of Rp9.14 billion and receipts of VAT refunds of Rp5.19 billion.

Kas dari hasil operasi digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.847,78 miliar dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok sebesar Rp408,59 miliar. Selain itu, terdapat pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp68,18 miliar dan pembayaran imbalan pascakerja sebesar Rp6,67 miliar. Pada akhir tahun, saldo kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp24,40 miliar.

Cash from operating activities was used for payments to employees amounting to Rp1,847.78 billion and payments for goods and services to suppliers amounting to Rp. 408.59 billion. In addition, there were income tax payments of Rp68.18 billion and payments for post-employment benefits of Rp6.67 billion. At end of the year, the net cash balance provided by operating activities amounted to Rp24.40 billion.

Dari aktivitas investasi Perusahaan menerima kas sebesar Rp5,30 miliar yang berasal dari penerimaan dividen dari entitas asosiasi. Kas tersebut digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap sebesar Rp24,28 miliar, perolehan aset tidak berwujud sebesar Rp745 juta, dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp3,47 miliar. Pada akhir tahun, saldo kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp23,19 miliar.

From investing activities, the Company received cash amounting to Rp5.30 billion, which originated from dividends received from associated entities. The cash was used to finance acquisition of fixed assets amounting to Rp24.28 billion, acquisition of intangible assets amounting to Rp745 million and placement at restricted bank account amounting to Rp3.47 billion. At end of the year, the net cash balance used in investing activities amounted to Rp23.19 billion.

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Review

Dari aktivitas pendanaan, Perusahaan telah melakukan pembagian dividen tahun buku 2018 kepada PLN dan YPK PLN pada bulan Desember 2019. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Juni 2019 dan surat dari PT PLN (Persero) No. 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 1 Juli 2019, dividen untuk tahun buku 2018 ditetapkan sebesar 50% dari saldo laba atau sebesar Rp69,34 miliar. Selain itu, terdapat pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp994 juta dan pembelian saham minoritas pada anak perusahaan sebesar Rp8,83 miliar.

Pada akhir tahun, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp79,16 miliar.

Dengan posisi kas dan setara kas di awal tahun sebesar Rp383,55 miliar dan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp77,95 miliar, maka posisi kas dan setara kas di akhir tahun adalah sebesar Rp305,60 miliar.

From financing activities, the Company distributed dividends for 2018 financial year to PLN and YPK PLN in December 2019. Based on Resolution of Annual GMS on June 13, 2019 and a letter from PT PLN (Persero) No. 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019, dividends for 2018 financial year were set at 50% of retained earnings or amounting to Rp69.34 billion. In addition, there were dividend payments to non-controlling interests of Rp994 million and purchases of minority shares in subsidiaries of Rp8.83 billion.

At end of the year, the net cash balance used in financing activities was Rp79.16 billion.

With cash and cash equivalents at the beginning of the year amounting to Rp383.55 billion and a decrease in cash and cash equivalents of Rp77.95 billion, the cash and cash equivalents balance at end of the year was Rp305.60 billion.

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Arus Kas	2017	2018	2019	Perubahan/Change		Cash Flow
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	42,445	162,156	24,399	(137,757)	-85.0%	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	(1,598)	(26,788)	(23,186)	3,602	-13.4%	Cash Flows from Investment Activities
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan	(212)	(58,573)	(79,160)	(20,587)	35.1%	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	40,635	76,795	(77,947)	(154,742)	-201.5%	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	266,115	306,750	383,545	76,795	25.0%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	306,750	383,545	305,598	(77,947)	-20.3%	Cash and Cash Equivalents at End of Year

## ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG, DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

### Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat dianalisis melalui rasio solvabilitas dan likuiditas.

### Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari rasio utang terhadap

## SOLVENCY, COLLECTABILITY AND OTHER FINANCIAL RATIOS

### Solvency

The ability of the Company to pay its liabilities is demonstrated through the analysis of solvency and liquidity ratios.

### Solvability Ratio

Solvability Ratio is used to assess the Company's ability to pay its long-term debts as well as total debts. This ratio consists of debt to total assets ratio (DAR) and debt to total



**Tinjauan Kinerja Keuangan**  
Financial Performance Review

jumlah aset (*debt to total assets ratio*/DAR dan dan rasio utang terhadap jumlah ekuitas (*debt to total equity ratio*/DER). Rasio solvabilitas Perusahaan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

equity ratio (DER). The Company's solvency ratio in the last 3 years are as follows:

Rasio Solvabilitas	2017	2018	2019	Perubahan/ Change	Solvability Ratios
Rasio Utang terhadap Aset	0.25	0.26	0.27	4.7%	Debt to Assets Ratio (DAR)
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0.33	0.35	0.37	6.4%	Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai rasio utang terhadap aset tahun 2019 sebesar 0,27, meningkat 4,7% dibandingkan 0,26 pada tahun 2018. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,37, meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,35.

Debt to asset ratio at end of 2019 was 0.27, an increase of 4.7% compared to 0.26 at end of 2018. While debt to equity ratio was 0.37, an increase of 6.4% compared to 0.35 at end of 2018.

Kenaikan solvabilitas Perusahaan pada tahun 2019 merupakan dampak langsung dari naiknya saldo liabilitas yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan di masa mendatang. Namun demikian, rasio solvabilitas tetap terjaga dengan jumlah aset dan ekuitas yang juga meningkat. Hingga saat ini, Perusahaan masih memiliki kemampuan memenuhi belanja modal dari sumber keuangan internal untuk mendukung pengembangan usaha di masa depan.

The increase in the Company's solvency in 2019 was a direct impact of higher balance of liabilities to support business growth which will have a positive impact on increasing revenues in the future. However, solvency ratio was maintained as total assets and equity also increased. Currently, the Company still has the ability to meet capital expenditures from internal financial sources to support future business development.

**Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Tingkat Likuiditas Perusahaan dapat dilihat dari rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio lancar (*current ratio*). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Dalam hal ini, sebagai penyedia jasa operasional, Perusahaan tidak memiliki persediaan sehingga nilai rasio cepat sama dengan nilai rasio lancar.

**Liquidity Ratio**

Liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay its short-term liabilities. The Company's Liquidity Level is reflected on cash ratio, quick ratio and current ratio. The higher these ratios indicate that the Company is able to meet its maturing liabilities. In this case, as an operational service provider, the Company does not have inventory so that quick ratio is equal to current ratio.

Rasio Likuiditas	2017	2018	2019	Perubahan/ Change	Liquidity Ratios
Rasio Kas (Kas dan Setara Kas/ Liabilitas Jangka Pendek)	3.44	4.11	3.13	-24.0%	Cash Ratio (Cash and Cash Equivalents/ Short-term Liabilities)
Rasio Cepat (Aset Lancar-persediaan/ Liabilitas Jangka Pendek)	7.16	7.68	8.52	10.9%	Quick Ratio (Current Assets-inventory/ Short-term Liabilities)
Rasio Lancar (Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek)	7.16	7.68	8.52	10.9%	Current Ratio (Current Assets/Short-term Liabilities)

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Review

Nilai rasio kas tahun 2019 sebesar 3,13, turun 24,0% dibandingkan 4,11 pada tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh periode penagihan piutang (COP) yang lebih panjang pada tahun 2019 sehingga kas dan setara kas Perusahaan mengalami penurunan 20,3% atau setara Rp77,95 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai rasio cepat tahun 2019 sebesar 8,52, meningkat 10,9% dibandingkan 7,68 pada tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan aset lancar sebesar 16,2% sedangkan liabilitas jangka pendek hanya naik 4,8% dari tahun sebelumnya.

### Kolektabilitas Piutang

Nilai periode penagihan piutang (COP) pada tahun 2019 mencapai 45 hari, lebih panjang dibandingkan tahun 2018 yaitu 40 hari. Angka tersebut merupakan konsolidasi dari COP HP dan HPI masing-masing 34 hari dan 67 hari. COP HPI lebih panjang karena skema penagihan HPI berbeda dengan HP yang memiliki skema penugasan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 734.K/DIR/2013 yang memberikan kemudahan bagi HP dalam hal penagihan.

Cash ratio at end of 2019 was 3.13, down 24.0% compared to 4.11 at end of 2018. This was mainly due to an improved collection period (COP) so that the Company's cash and cash equivalents increased significantly by 20.3% or equivalent to Rp77.95 billion compared to the previous year.

Quick ratio at end of 2019 was 8.52, an increase of 10.9% compared to 7.68 at end of 2018. This was mainly due to the growth in current assets of 16.2% while current liabilities only up 4.8% from the previous year.

### Receivables Collectability

Collection on period (COP) in 2019 reached 45 days, which was longer than 2018 of 40 days. This figure is a consolidation of COP HP and HPI, respectively 34 days and 67 days. COP of HPI was longer because HPI billing scheme was different from HP which has assignment scheme based on Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) NO. 734.K/DIR/2013 which facilitates HP's terms of billing.

Perioden Penagihan	2017	2018	2019	Collection Period
Hari	38	40	45	Days

### Rasio Profitabilitas

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas atau disebut juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari tingkat pengembalian modal (*return on equity/ROE*), tingkat pengembalian aset (*return on assets/ROE*), tingkat pengembalian investasi (*return on investment/ROI*) dan rasio margin laba (*profit margin ratio*).

### Profitability Ratio

The Company's ability to generate profit is measured using profitability ratio. Profitability ratio consists of return on equity (ROE), return on assets (ROE), return on investment (ROI) and profit margin ratio.

Rasio Profitabilitas	2017	2018	2019	Perubahan/ Change	Profitability Ratios
Tingkat Pengembalian Aset	17.05%	16.81%	18.54%	10.3%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Modal	22.74%	22.61%	25.35%	12.1%	Return on Equity (ROE)
Tingkat Pengembalian Investasi	22.73%	22.61%	25.35%	12.1%	Return on Investment (ROI)
Rasio Margin Laba	7.22%	6.69%	7.13%	6.6%	Profit Margin Ratio





### Tingkat Pengembalian Aset

Nilai tingkat pengembalian aset (ROA) pada tahun 2019 sebesar 18,54%, meningkat 10,3% dibandingkan 18,54% pada tahun 2018. Kenaikan ini mengindikasikan pertumbuhan laba Perusahaan yang semakin optimal.

### Tingkat Pengembalian Modal

Tingkat pengembalian modal (ROE) pada tahun 2019 sebesar 23,35%, meningkat 12,1% dibandingkan 22,61% pada tahun 2018 karena kenaikan laba bersih lebih tinggi dari kenaikan nilai aset bersih (ekuitas).

### Tingkat Pengembalian Investasi

Tingkat pengembalian investasi (ROI) pada tahun 2019 sebesar 23,35%, meningkat 6,6% dibandingkan 22,61% pada tahun 2018.

### Rasio Marjin Laba

Rasio larjin laba Perusahaan pada tahun 2019 sebesar 7,13%, naik 6,6% dibandingkan 6,69% pada tahun 2018. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan laba bersih Perusahaan.

### Return on Assets

Return on assets (ROA) in 2019 was 18.54%, an increase of 10.3% compared to 18.54% in 2018. This increase indicated that the Company's profit growth was more optimal.

### Return on Equity

Return on equity (ROE) in 2019 was 23.35%, an increase of 12.1% compared to 22.61% in 2018 since the increase in net income was higher than the increase in net asset (equity).

### Return on Investment

Return on investment (ROI) in 2019 was 23.35%, an increase of 6.6% compared to 22.61% in 2018.

### Profit Margin Ratio

The Company's profit margin ratio in 2019 was 7.13%, up 6.6% compared to 6.69% in 2018. This growth was mainly influenced by an increase in the Company's net profit.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

### Struktur Permodalan

Perusahaan mengelola modal untuk memastikan kemampuan melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur permodalan Perusahaan terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2019, struktur modal yang dibiayai oleh liabilitas sebesar 26,8% atau Rp259,59 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari tahun 2018 di mana proporsi liabilitas Perusahaan sebesar 25,7% dari struktur modal atau Rp211,60 miliar. Adapun yang dibiayai ekuitas sebesar 73,2% atau Rp707,40 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 74,3% atau Rp613,31 miliar.

## CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE

### Capital Structure

The Company manages its capital to ensure its business continuity and compliance with capital adequacy ratio. The Company's capital structure consists of liabilities and equity. At end of 2019, the capital structure financed by liabilities was 26.8% or Rp 259.59 billion. This percentage was higher than at end of 2018 where the proportion of the Company's liabilities was 25.7% of the capital structure or Rp211.60 billion. As for those financed by equity amounting to 73.2% or Rp707.40 billion, lower percentage than at end of 2018 which amounted to 74.3% or Rp613,31 billion.

Struktur Modal	2017		2018		2019		Capital Structure
	Rp juta/ million	Rp juta/ million	%	Rp juta/ million	%		
Liabilitas	179,864	211,596	25.7%	259,588	26.8%	Liability	
Liabilitas Jangka Pendek	89,129	93,214	11.3%	97,663	10.1%	Short-term Liabilities	
Liabilitas Jangka Panjang	90,735	118,382	14.4%	161,925	16.7%	Long-term Liabilities	
Ekuitas	538,629	613,310	74.3%	707,395	73.2%	Equity	
Total Liabilitas dan Ekuitas	718,493	824,906	100.0%	966,983	100.0%	Total Liabilities and Equity	

## Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review

### Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital/WACC*) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah akan meminimalkan WACC sebab biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak.

Tetapi peningkatan utang akan meningkatkan biaya beban bunga yang berisiko mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi yang optimal. Selain itu, Perusahaan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap rasio likuiditas karena semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan optimal. Rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

### Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

#### Tujuan Ikatan, Pihak yang Berikatan, Sumber Dana, dan Mata Uang

Perusahaan melakukan sejumlah perikatan material yang bertujuan untuk investasi barang modal, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga. Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan investasi alat kerja untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan sebesar Rp24,28 miliar, relatif sama dengan tahun 2018 sebesar Rp24,16 miliar. Ikatan material untuk investasi barang modal pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### Management Policy for Capital Structure

The Company strives to minimize capital cost so as to maximize the value of the Company. Therefore, the Company's policy in seeking funding will always take into account financial risks that may arise in the future.

Optimal capital structure is achieved with a minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). The increased use of debt will minimize WACC because cost of debt is cheaper than cost of equity. In addition, the use of debt will also reduce taxable costs resulting in tax savings.

However, an increase in debt will increase interest costs may reduce the overall value of the Company. Hence, the Company manages the use of debt and capital to obtain optimal balance. In addition, the Company always monitors liquidity ratio because the higher liquidity ratio, the capital structure will be optimal. This ratio indicates the Company's ability to pay its short-term liabilities.

### Material Commitments for Capital Expenditure

#### Commitment Objectives, Binding Parties, Source of Fund and Denomination

The Company entered into a number of material commitments aimed at capital expenditure, both with related parties and third parties. In 2019, the Company invested in work equipment to support its operations amounting to Rp24.28 billion, slightly higher than 2018 of Rp24.16 billion. Material commitments for capital expenditure in 2019 were as follows:



Tujuan Perikatan The Objective of Commitments	Pihak yang Berikatan Binding Parties	Bentuk Investasi Form of Investment	Sumber Dana Source of Fund	Denominasi Mata Uang Currency
Mendukung Kegiatan Operasional Perusahaan Supporting Operational Activities of the company	PT Panel Mulia Total PT Galeri Teknologi Indonesia PT Datascript PT Best Instrument Indonesia PT Agung Solusi Trans PT Krisbow Indonesia PT Prima Sentral Distribusi PT Sympac Indonesia PT Elekrika Rekayasa Energi PT Cipta Tapak Sejahtera PT Tridinamika Jaya Instrument PT Niagaprima Paramita PT Waluya Istana Nusantara PT Pendopo Niagadayatama	Pengadaan Alat Kerja dan Pendukung Procurement of Work Tools and Supporting	Internal	Rupiah

#### Langkah Perlindungan Risiko

Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan perlindungan risiko atas mata uang asing karena seluruh transaksi pengikatan dan belanja modal dilakukan dalam mata uang rupiah. Perusahaan dan entitas anak juga tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan lainnya. Hingga saat ini, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

#### Risk Mitigation

The Company and its subsidiaries do not enter into foreign exchange hedging because all binding transactions and capital expenditure are denominated in rupiah. The Company and its subsidiaries also do not insure fixed assets against the risk of loss due to fire and others. To date, management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate a decline in the value of property and equipment at the reporting date.

#### Realisasi Investasi Barang Modal

Nilai Aset Tetap Perusahaan pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp42,73 miliar, meningkat 40,5% dibandingkan Rp30,42 miliar pada tahun 2018. Pertumbuhan aset tetap disebabkan oleh pertumbuhan proyek/kontrak baru sehingga membutuhkan investasi alat kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dengan baik. Rincian investasi barang modal tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### Realized Capital Expenditure

The amount of the Company's Fixed Assets at end of 2019 was Rp42.73 billion, an increase of 40.5% compared to Rp30.42 billion at end of 2018. The increased fixed assets was caused by the growth of new projects/contracts that required investment in working equipment to support operations properly. Details of capital expenditure in 2019 were as follows:

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Uraian	Saldo Awal (1 Januari 2019) Beginning Balance (January 1, 2019)	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Saldo Akhir (31 Desember 2019) Beginning Balance (December 31, 2019)	Description
<b>BIAYA PEROLEHAN</b>					<b>ACQUISITION COST</b>
Tanah	3,116	–	–	3,116	Land
Bangunan	2,175	165	–	2,340	Building
Kendaraan Bermotor	1,602	–	–	1,602	Motor Vehicle
Perlengkapan Umum	39,237	23,685	–	62,922	General Equipment
Aset dalam Penyelesaian	–	425	–	425	Construction in Progress
<b>Subjumlah</b>	<b>46,128</b>	<b>24,275</b>	<b>–</b>	<b>70,405</b>	<b>Subtotal</b>
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>					<b>ACCUMULATED DEPRECIATION</b>
Bangunan	454	117	–	571	Building
Kendaraan Bermotor	158	200	–	358	Motor Vehicle
Perlengkapan Umum	15,096	11,648	–	26,744	General Equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>15,707</b>	<b>11,965</b>	<b>–</b>	<b>27,673</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>30,421</b>			<b>42,732</b>	<b>Total Recorded</b>

### Informasi Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

Perusahaan menetapkan target yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dasar untuk melaksanakan seluruh aktivitas operasional setiap tahun.

### Comparison of Target and Realization in 2019 and Projection for 2020

The Company incorporated its targets in Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as the basis for carrying out all operational activities every year.

### Target, Realisasi dan Proyeksi Laba Rugi

### Target, Realization and Projection of Income

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Uraian	2019			2020		Description
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)	Target	Pertumbuhan Growth (%)	
Pendapatan Usaha	2,295,187	2,513,910	109.5%	2,812,437	11.9%	Operating Revenues
Beban Usaha	(2,052,408)	(2,225,980)	108.5%	(2,578,945)	15.9%	Operating Expenses
Laba Usaha	242,779	287,930	118.6%	233,492	-18.9%	Net Income
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	10,027	15,743	157.0%	14,890	-5.4%	Revenue (Expenses) outside of Income
Laba (Rugi) sebelum Pajak	252,806	244,920	96.9%	248,382	1.4%	Income before Tax
Beban Pajak	(63,202)	(65,598)	103.8%	(73,154)	11.5%	Tax Expenses



**Tinjauan Kinerja Keuangan**  
Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Uraian	2019			2020		Description
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)	Target	Pertumbuhan Growth (%)	
Laba setelah Pajak	189,605	179,322	94.6%	175,228	-2.3%	After-tax Profit
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	(6,077)	-	-	-	Other Comprehensive Income for the Year
<b>Laba Komprehensif</b>	<b>-</b>	<b>173,245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Comprehensive Income</b>

Realisasi pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp2.513,91 miliar, tercapai 109,5% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp2.295,19 miliar. Pencapaian di atas target disebabkan adanya penambahan pelanggan.

Realization of operating revenues in 2019 amounted to Rp2,513.91 billion, reaching 109.5% of 2019 RKAP of Rp2,295.19 billion. The favorable achievement was due to an increase in number of customers.

Realisasi beban usaha tahun 2019 sebesar Rp2.225,98 miliar, tercapai 108,5% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp2.052,41 miliar. Realisasi di atas target disebabkan bertambahnya aktivitas Perusahaan karena adanya penambahan proyek-proyek baru.

Realization of operating expenses in 2019 amounted to Rp2,225.98 billion, reaching 108.5% of 2019 RKAP of Rp2,052.41 billion. The unfavorable realization was due to increased Company's activities driven by additional new projects.

Pada tahun 2020, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 11,9% dari realisasi 2019 atau menjadi Rp2.812,44 miliar berdasarkan asumsi pertumbuhan pelanggan baru di wilayah Sumatera dan Jawa. Sedangkan beban usaha diproyeksikan tumbuh 15,9% dari realisasi 2019 atau menjadi Rp2.578,95 miliar seiring dengan bertambahnya kontrak proyek secara *end-to-end services* dimulai dari kontrak pemeliharaan dan niaga di dalam area PT PLN (Persero). Laba bersih pada tahun 2020 diproyeksikan tumbuh 2,3% dari realisasi 2019 atau menjadi sebesar Rp175,23 miliar.

In 2020, the Company projects a growth in operating income of 11.9% from 2019 realization to reach Rp2.812,44 billion based on the assumption of new customer growth in Sumatera and Java. While operating expenses are projected to grow 15.9% from 2019 realization to reach Rp2,578.95 billion, in line with increasing project contracts for end-to-end services starting from maintenance and commercial contracts within the areas of PT PLN (Persero). Net income for was projected to grow by 2.3% from 2019 realization to reach Rp175.23 billion.

**Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan**

**Target, Realization and Projection of Financial Positions**

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Uraian	2019			2020		Description
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)	Target	Pertumbuhan Growth (%)	
Aset Lancar	767,671	831,622	108.3%	916,204	10.2%	Current Assets
Aset Tidak Lancar	216,448	135,361	62.5%	256,160	89.2%	Non-Current Assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>984,119</b>	<b>966,983</b>	<b>98.3%</b>	<b>1,172,364</b>	<b>21.2%</b>	<b>Total Assets</b>

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Review

Dalam jutaan Rupiah

In million Rupiah

Uraian	2019			2020		Description
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)	Target	Pertumbuhan Growth (%)	
Liabilitas Jangka Pendek	55,394	97,663	176.3%	135,165	38.4%	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	140,187	161,925	115.5%	149,612	-7.6%	Non-Current Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>195,581</b>	<b>259,588</b>	<b>132.7%</b>	<b>284,777</b>	<b>9.7%</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>788,539</b>	<b>707,395</b>	<b>89.7%</b>	<b>887,587</b>	<b>25.5%</b>	<b>Equity</b>

### Aset Lancar

Realisasi aset lancar pada tahun 2019 sebesar Rp831,62 miliar, tercapai 108,3% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp767,67 miliar hal tersebut diperoleh sebagai hasil dari peningkatan pendapatan usaha di tahun 2019 yang berdampak pada peningkatan piutang usaha di tahun 2019 sebesar 83,5% dibandingkan tahun 2018.

Perusahaan menargetkan pertumbuhan aset lancar pada RKAP 2020 sebesar 10,2% dari realisasi 2019 atau menjadi Rp916,20 miliar berdasarkan proyeksi investasi pada proyek-proyek baru seperti alat kerja, kendaraan proyek, dan kantor region.

### Aset Tidak Lancar

Realisasi aset tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp135,36 miliar, tercapai 62,5% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp216,45 miliar. Realisasi di bawah target terutama disebabkan karena tidak tercapainya rencana pembelanjaan investasi di tahun 2019, sehingga peningkatan Aset Tidak Lancar menjadi tidak tercapai.

Pada tahun 2020, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan aset tidak lancar sebesar 89,22% dari realisasi 2019 atau menjadi Rp256,16 miliar.

### Liabilitas

Realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2019 sebesar Rp97,66 miliar, tercapai 176,3% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp55,39 miliar. Sedangkan liabilitas jangka panjang sebesar Rp161,93 miliar, tercapai 115,5% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp140,19 miliar. Realisasi di atas target tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek atas belanja operasional dalam rangka peningkatan

### Current Assets

Realized current assets at end of 2019 amounted to Rp831.62 billion, reaching 108.3% of 2019 RKAP of Rp767.67 billion. This was a result of an increase in operating income in 2019 which drove higher trade receivables at end of 2019 by 83.5% compared to 2018.

The Company is targeting growth of current assets in 2020 RKAP of 10.2% from 2019 realization to reach Rp916.20 billion based on investment projection in new projects, such as work equipment, project vehicles and regional offices.

### Non-Current Assets

Realized non-current assets as of December 31, 2019 amounted to Rp135.36 billion, reaching 62.5% of 2019 RKAP of Rp216.45 billion. The low realization was mainly due to inability to achieve investment spending plan in 2019, so that the increase in Non-Current Assets was not achieved.

In 2020, the Company projects non-current asset growth of 89.22% from 2019 realization to reach Rp256.16 billion.

### Liabilities

Realized current liabilities at end of 2019 amounted to Rp97.66 billion, reaching 176.3% of 2019 RKAP of Rp55.39 billion. Meanwhile, non-current liabilities amounted to Rp161.93 billion, reaching 115.5% of 2019 RKAP of Rp140.19 billion. The high realization was due to higher current liabilities for operating expenses in order to increase revenue growth and higher non-current liabilities, mainly post-employment





pertumbuhan pendapatan dan peningkatan liabilitas jangka panjang pada liabilitas imbalan pascakerja sebagai dampak atas peningkatan jumlah tenaga kerja.

Pada tahun 2020, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan liabilitas sebesar 9,7% dari realisasi 2019 atau menjadi Rp284,78 miliar dengan asumsi pada tahun 2020 Perusahaan akan merealisasikan semua pembayaran kepada pihak ketiga ataupun ke Negara (utang pajak) untuk menjaga rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) ataupun DAR (*Debt to Asset Ratio*).

### Ekuitas

Realisasi ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp707,40 miliar, tercapai 89,7% terhadap RKAP 2019 sebesar Rp788,54 miliar. Realisasi di bawah target karena belum terlaksananya rencana konversi saldo laba menjadi modal saham (*stock dividend*) yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2019.

Pada tahun 2020, Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan ekuitas sebesar 25,5% dari realisasi 2019 sejalan dengan proyeksi peningkatan laba bersih.

## INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

## DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

### Kebijakan Dividen

Perusahaan membagikan dividen atas laba bersih sesuai dengan keputusan pemegang saham di dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang.

### Dividen Dibagikan

Berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagaimana yang tercantum dalam akta No. 2 tanggal 12 Juni 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, dan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 1 Juli 2019, Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku

benefits liability, as a result of an increase in the number of employees.

In 2020, the Company projects liabilities growth of 9.7% from 2019 realization to reach Rp284.78 billion assuming that in 2020 the Company will realize all payments to third parties and to the State (tax liabilities) to maintain DER (*Debt to Equity Ratio*) and DAR (*Debt to Asset Ratio*).

### Equity

Realized equity at end of 2019 amounted to Rp707.40 billion, reaching 89.7% of 2019 RKAP of Rp788.54 billion. The low realization was because the plan to convert retained earnings into stock dividend in 2019 was not executed.

In 2020, the Company projects equity growth of 25.5% from 2019 realization, in line with the projected increase in net income.

## SUBSEQUENT EVENTS

There were no information and material facts occurred subsequent to the date of the audit report.

## DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

### Dividend Policy

The Company distributes dividend from net income, in accordance with shareholders' decision in General Meeting of Shareholders (GMS), which is determined based on performance of the current year and the need for long-term business development.

### Distributed Dividend

Based on resolution of Annual General Meeting of Shareholders (GMS) as stated in deed No. 2 dated June 12, 2019 of Muhammad Hanafi, SH, a notary in Jakarta, and a letter from President Director of PT PLN (Persero) No. 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019, Shareholders approved dividend distribution for 2018 financial year

## Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review

2018 sebesar 50% dari saldo laba atau sebesar Rp69,34 miliar. Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas kepada PLN dan YPK PLN masing-masing sebesar Rp69,33 miliar dan Rp7 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan sebagaimana yang tercantum dalam akta No. 34 tanggal 16 Mei 2018 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp58,57 miliar dan telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2018 dan 22 November 2018 kepada PT PLN (Persero) dan YPK PLN.

### PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN ATAU MANAJEMEN (ESOP/MESOP)

Perusahaan merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bukan merupakan perusahaan publik sehingga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan/atau manajemen (*Management Stock Option Program/MESOP*).

### REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perusahaan bukan merupakan perusahaan publik dan belum pernah melakukan aktivitas penawaran umum.

### DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 April 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H. perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Haleyora Powerindo dan Akta No. 44 tanggal 24 April 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., perihal Jual Beli Saham PT Haleyora Powerindo, Perusahaan telah melakukan pembelian saham minoritas sebesar 5% dengan nilai Rp8,83 miliar. Pembelian saham minoritas tersebut menyebabkan turunnya nilai kepentingan non pengendali.

amounting to 50% of retained earnings or Rp69.34 billion. The company has paid cash dividend to PLN and YPK PLN amounting to Rp69.33 billion and Rp7 million, respectively, on December 31, 2019.

Based on resolution of Annual GMS as stated in deed No. 34 dated May 16, 2018 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, Shareholders approved dividend distribution from retained earnings as of December 31, 2017 which amounted to Rp58.57 billion and had been paid on November 1, 2018 and November 22, 2018 to PT PLN (Persero) and YPK PLN.

### EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM (ESOP/MESOP)

The Company is a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE) which is not a public company. Therefore, it does not have employee and/or management stock option program (ESOP/MESOP).

### REALIZATION OF USE OF PROCEED FROM PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2019, the Company was not a public company and did not conduct any public offering.

### DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Based on Deed No. 43 dated April 24, 2019 of Muhammad Hanafi, S.H. regarding Statement of Decision of PT Haleyora Powerindo's Shareholders and Deed No. 44 dated April 24, 2019 of Muhammad Hanafi, S.H. regarding Sale and Purchase of PT Haleyora Powerindo's Shares, the Company purchased 5% minority shares at Rp8.83 billion. The purchase of such minority shares caused the non-controlling interests to decrease in value.



## INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

### Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode pelaporan.

### Transaksi Dengan Pihak-pihak yang Berelasi (Afiliasi)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi (hubungan afiliasi). Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

### Sifat Hubungan Berelasi

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN merupakan pemegang saham Perusahaan.
- EPI merupakan entitas asosiasi Perusahaan.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON+, PLNE, PLN Batubara, PLN Tarakan, PLN Gas dan Geothermal dan BAG merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personel manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

## INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICT OF INTEREST AND OR AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS

### Transactions Involving Conflicts of Interest

There were no transactions involving conflict of interest during the reporting period.

### Transactions with Affiliated Parties

In its business activities, the Company and subsidiaries carry out certain transactions with affiliated parties. All significant transactions with affiliated parties, whether arms's length or not, are disclosed in notes to the consolidated financial statements.

### Nature of Affiliated Party Relationship

- The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and State-Owned Enterprises (SOE).
- PLN and PLN's Education and Welfare Foundation are the shareholders of the Company.
- EPI is the Company's associated entity.
- IP, PJB, PLN Batam, ICON+, PLNE, PLN Batubara, PLN Tarakan, PLN Gas and Geothermal and BAG are companies with common shareholders and or management.
- The Board of Commissioners and the Board of Directors are key management personnel of the Company and its subsidiaries.

Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT PLN (Persero) (PLN)	Pemegang saham Perusahaan Ultimate shareholders	Piutang usaha, utang usaha, piutang dan utang lain-lain dan pendapatan Trade receivable, trade payable, other receivable and payable and revenue
Bank BNI	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank
Bank Mandiri	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in bank and time deposit

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Review

Nama Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Bank BRI	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan SOE owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank
PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan utang lain-lain Trade receivable and others payable
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan utang lain-lain Trade receivable and others payable
PT Indonesia Power (IP)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PT PLN Batubara (PLNBB)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PLN Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PT PLN Gas dan Geothermal (PLNGG)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivable
PT Cogindo Daya Bersama (CDB)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue
PT Jambi Prima Coal (JPC)	Perusahaan sepengendali Entity under common control	Piutang usaha dan pendapatan Trade receivable and revenue
PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)	Entitas asosiasi Associate	Piutang usaha dan piutang lain-lain Trade receivable and others receivable

### Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Nilai transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan dengan berbagai pihak tersebut di atas dalam dua tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

### Amount of Transactions with Affiliated Parties

The Company's transactions with a number of affiliated parties in the last two years are shown in the following table:

Transaksi	2018		2019		Transaction
	Rp	%	Rp	%	
Kas dan Setara Kas	379,246	45.98	300,895	31.12	Cash and Cash Equivalents
Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya	55,201	6.69	58,247	6.02	Restricted Cash in Bank
Piutang Usaha	218,482	41.42	400,621	26.49	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	200	0.00	126	0.02	Other Receivables
Utang Usaha	1,492	0.16	420	0.69	Trade Payable
Utang Lain-lain	13,343	0.60	1,604	6.30	Other Payables
Pendapatan	2,073,318	100.00	2,513,848	99.99	Revenue



### **Kewajaran Transaksi**

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perusahaan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

### **Kebijakan Perusahaan tentang Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Terkait**

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan telah diaudit oleh auditor independen.

### **PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN**

Tidak ada perubahan peraturan yang berdampak pada kinerja Perusahaan pada tahun 2019.

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR**

Pada tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi di Perusahaan yaitu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

### **Fairness of Transactions**

All transactions with affiliated parties are in according with policy and requirement agreed upon by both parties. Therefore, the Company considers that all transactions are fair in accordance with SFAS No.7 (Revised 2010) regarding Related Party Disclosures.

### **The Company's Policy on Review Mechanisms over Transactions and Compliance with Related Regulations**

Review mechanism over affiliated party transactions is through audit process, either performed by internal auditor and external auditor. As an effort to ensure fairness of transactions and conformity to the accounting standards generally accepted in Indonesia, affiliated party transactions report has been audited by independent auditor.

### **CHANGES IN REGULATIONS AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY'S PERFORMANCE**

There were no changes in regulations that impacted the Company's performance in 2019.

### **CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES THAT WERE EFFECTIVE FOR THE LAST FINANCIAL YEAR**

In 2019, there were changes in the Company's accounting policies, consisting adoption of new and revised Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) that were effective for the financial year beginning on or after January 1, 2019 as follows:

- PSAK 22 (Revised 2018): Business Combinations;
- PSAK 24 (Revised 2018): Employee Benefits - Amendments, Curtailments, or Completions;
- PSAK 26 (Revised 2018): Borrowing Cost;
- PSAK 46 (Revised 2018): Income Tax;
- PSAK 66 (Revised 2018): Joint Arrangements;
- ISAK 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;
- ISAK 34: Uncertainty over Income Tax Treatments.

## Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Review

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Implementation of the aforementioned standards had no significant impact on the amounts reported in the current period or the previous year.

### INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

### INFORMATION ON EXTRAORDINARY AND IRREGULAR FINANCIAL TRANSACTIONS

During 2019, there were no extraordinary and irregular financial transactions.

### KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Sebagai Wajib Pajak dan Pemotong Pajak, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu. Pada tahun 2019, Perusahaan membayar pajak penghasilan sebesar Rp65,60 miliar, meningkat 17,1% dibandingkan Rp56,02 miliar pada tahun sebelumnya.

### CONTRIBUTIONS TO THE STATE

As a Taxpayer and as a Tax Withholder, the Company is committed to continuously paying taxes in a timely manner. In 2019, the Company paid income taxes of Rp65.60 billion, an increase of 17.1% compared to Rp56.02 billion in the previous year.





# Pengelolaan *Human Capital*

## Human Capital Management



*Human capital* menjadi faktor penting bagi setiap organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif di era disrupsi. Sebagai salah satu anak usaha PLN, Perusahaan membutuhkan tenaga kerja sektor ketenagalistrikan yang siap dan mampu mengembangkan *personal skill* untuk mendukung kapabilitas Perusahaan dalam mengemban tugas mengamankan kinerja sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik PLN kepada pelanggan dari berbagai potensi gangguan.

Untuk menjawab tantangan bisnis dan mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan, HP terus melakukan pembenahan dan penguatan elemen-elemen dasar organisasi dan *human capital* melalui kebijakan yang berbasis kompetensi untuk menciptakan keunggulan operasi.

Tantangan utama dalam mengelola *human capital* adalah menyelaraskan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan tertentu. Perusahaan melaksanakan program pengembangan kompetensi yang

Human capital is a crucial factor for any organization to achieve competitive advantage in a disruption era. As one of PLN's subsidiaries, the Company needs human capital in electricity sector who are ready and able to develop their personal skills to support the Company's capabilities in carrying out the task of securing the performance of PLN's electricity transmission and distribution systems to customers from various potential disruptions.

To respond to business challenges and to support the Company's business sustainability, HP continues to reform and strengthen the basic elements of the organization and human capital through competency-based policies in order to create operational excellence.

The main challenge in managing human capital is to align required competency standards to perform certain jobs. The Company carries out a continuous competency development program in the form of trainings, workshops or upscaling



**Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan standar kompetensi diri secara berkelanjutan melalui program-program pengembangan yang tersedia agar mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.**

Every employee has equal opportunities to improve self-competency standards on an ongoing basis through available development programs in order to be able to face changes in a dynamic business environment.



**25.0%**

**Kenaikan biaya pelatihan dan pengembangan dari Rp752,71 juta pada tahun 2018 menjadi Rp944,75 juta.**

The increase in training and development expenses from Rp752.71 million in 2018 to Rp944.75 million.

berkesinambungan berupa pelatihan, *workshop* atau *upscalling* kapabilitas pegawai sesuai bidang kerjanya masing-masing. Perusahaan memberikan pelatihan secara bertahap hingga para tenaga kerja memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi setelah menempuh uji kompetensi keahliannya.

Perusahaan juga membangun budaya perusahaan sehingga pegawai dan tenaga kerja yang berasal dari latar belakang berbeda-beda dapat diarahkan untuk menuju suatu tujuan bersama. Karena sifat pekerjaannya berhubungan dengan pelayanan masyarakat, insan HP harus memiliki integritas tinggi dan kepedulian terhadap pelanggannya.

### **Pengelolaan Human Capital**

Penanggung jawab pengelolaan human capital di HP berada pada Divisi Human Capital Management (Divisi HCM) yang dipimpin oleh Executive Vice President Human (EVP) HCM. Strategi pengelolaan human capital sesuai Keputusan Direksi No. 002.K/DIR-HP/2013 tanggal 26 April 2013 difokuskan pada pembenahan dan penguatan 8 aspek

the capabilities of employees based on their respective fields of work. The Company provides training in stages until the employees obtain competency/professional certification after taking their skill competency test.

The Company also builds a corporate culture so that employees and workforce from different backgrounds can be directed towards a common goal. Because the nature of their work is related to public service, HP personnel must have high integrity and care for their customers.

### **Human Capital Management Strategy**

The responsibility of human capital management at HP is held by Human Capital Management Division (HCM Division) led by an Executive Vice President Human (EVP) of HCM. The human capital management strategy in accordance with Decision of the Board of Directors No. 002.K/DIR-HP/2013 dated April 26, 2013 is focused on improving and

**Pengelolaan Human Capital**  
Human Capital Management

kepegawaian di grup HP. Hal ini bertujuan untuk mendukung implementasi strategi korporasi dalam mendukung tujuan perusahaan menjadi aset operator di bidang distribusi dan retail ketenagalistrikan.

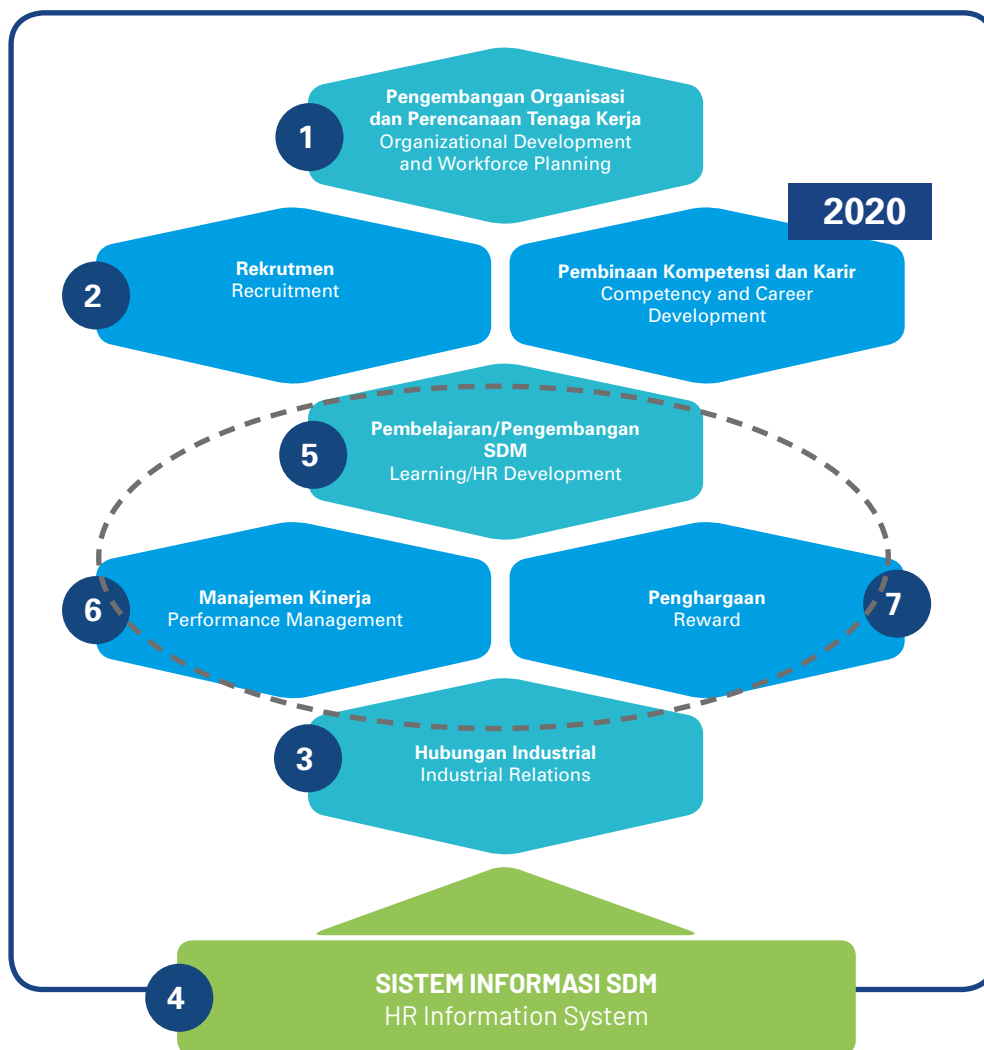
strengthening 8 manpower aspects in HP group. This aims to support the implementation of corporate strategy in supporting the Company's objective of becoming an asset operator in the electricity distribution and retail sector.



Pada tahun 2018, Perusahaan telah menyelesaikan pembenahan pada aspek-aspek: 1) pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja, 2) rekrutmen, dan 3) hubungan industrial. Sedangkan di tahun 2019, pembenahan pengelolaan *human capital* difokuskan pada aspek pembelajaran/pengembangan *human capital*, manajemen kinerja dan penghargaan.

In 2018, the Company completed improvements in the following aspects: 1) organizational development and workforce planning, 2) recruitment, and 3) industrial relations. Meanwhile, in 2019, human capital management improvement was focused on the aspects of human capital learning/development, performance management and awards.





**Profil Pegawai**

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah pekerja grup HP mencapai 31.372 orang yang terdiri dari 25 pegawai tugas karya, 206 pegawai organik dan 31.141 tenaga kerja (*workforce*) proyek. Jumlah tersebut naik 5,6% dari 23.844 orang pada tahun 2018 seiring dengan penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kontrak pekerjaan pada tahun 2019.

**Employee Profile**

As of December 31, 2019, HP group had 31,372 employees consisting of 25 seconded employees, 206 organic employees and 31,141 project workforce. This number increased by 5.6% from 23,844 employees at end of 2018, in line with the increase in the number of customers and work contracts in 2019.

**Pengelolaan Human Capital**  
Human Capital Management

**Berdasarkan Status Tenaga Kerja**

**Composition based on Employment Status**

ORGANISASI Organization	TUGAS KARYA Seconded			ORGANIK Organic			PROYEK Project			JUMLAH Total		
	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%
HP	17	19	11.8	41	79	92.7	12,469	21,909	75.7	12,527	22,007	75.7
HPI	4	4	0.0	187	127	-32.1	12,467	9,232	-25.9	12,658	9,363	-26.0
EPI	2	2	0.0	-	-	-	-	-	-	2	2	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>8.7</b>	<b>228</b>	<b>206</b>	<b>-32.1</b>	<b>24,936</b>	<b>31,141</b>	<b>92.7</b>	<b>25,187</b>	<b>31,372</b>	<b>75.7</b>

Komposisi pegawai (tugas karya dan organik) pada tahun 2019 dengan pembandingan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Employee compositions (assigned and organic) at end of 2019 and 2018 were as follows:

**Berdasarkan Status Gender**

**Composition based on Gender**

Gender	2018	2019	Gender
Laki-laki	58	78	Male
Perempuan	8	24	Female
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>

**Berdasarkan Tingkat Jabatan**

**Composition based on Position Level**

Tingkat Jabatan	2018	2019	Position Level
Manajemen Atas	1	1	Top Management
Manajemen Menengah	8	8	Middle Management
Manajemen Dasar	10	11	Basic Management
Supervisor Atas	16	17	Top Supervisor
Supervisor Dasar	11	19	Basic Supervisor
Fungsional	21	46	Functional
On the Job Training (OJT)	-	-	On the Job Training (OJT)
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>

**Berdasarkan Usia**

**Composition based on Age**

Usia	2018	2019	Age
<25 tahun (termasuk OJT)	1	23	<25 year old (included OJT)
26-30 tahun	28	38	26-30 years old
31-35 tahun	16	17	31-35 years old
36-40 tahun	8	9	36-40 years old
41-45 tahun	4	3	41-45 years old
46-50 tahun	4	4	46-50 years old
>50 tahun	8	7	>50 years old
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>



**Berdasarkan Pendidikan**

**Composition based on Education**

Pendidikan	2018	2019	Education
S2	10	10	Master
S1	47	84	Bachelor
Diploma	9	28	Diploma
SMP/SMA/SMK	-	-	Junior High/High School/ Vocational School
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>Total</b>

**Rekrutmen**

Dalam memenuhi kebutuhan pegawai organik, Perusahaan melaksanakan rekrutmen dan seleksi bersama dengan PLN dan anak perusahaan lainnya (*joint recruitment*). Kebutuhan pegawai baru tahun 2019 sesuai dengan perencanaan tenaga kerja adalah sebanyak 25 orang dengan realisasi sebagai berikut:

**Recruitment**

To meet the needs of organic employees, the Company carries out joint recruitment and selection with PLN and other subsidiaries (*joint recruitment*). The need for new employees in 2019 according to the manpower plan was 25 employees with the following realization:

No.	Jurusan	Kebutuhan (orang) Requirement (people)	Realisasi (orang) Realization (people)	Major
1	S1 Akuntansi	2	2	Bachelor of Accounting
2	S1 Hukum	1	1	Bachelor of Law
3	S1 Komunikasi	1	1	Bachelor of Communication
4	S1 Psikologi Industri dan Organisasi	1	1	Bachelor of Industrial and Organizational Psychology
5	S1 Teknik Elektro Arus Kuat	10	13	Bachelor of Electrical Engineering
6	D3 Administrasi	1	1	Diploma of Administration
7	D3 Akuntansi	1	1	Diploma of Accounting
8	D3 Teknik Elektro Arus Kuat	8	4	Diploma of Electrical Engineering
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>24</b>	<b>Total</b>

Selain rekrutmen dari sumber eksternal, Perusahaan melaksanakan rekrutmen pegawai dari sumber internal melalui *job posting* untuk berbagai jenjang jabatan. Rekrutmen internal bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memperkaya pengalaman, mengembangkan kompetensi dan meningkatkan karir. Pada tahun 2019, sebanyak 17 pegawai mendapat penempatan baru termasuk di anak perusahaan HPI.

In addition to external recruitment, the Company holds internal recruitment through job posting for various position levels. Internal recruitment aims to provide opportunities for employees to enrich their experiences, to develop their competencies and to advance their careers. In 2019, 17 employees received new assignments, including to HPI's subsidiaries.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek di wilayah kerja HP (region dan area), Perusahaan telah melaksanakan rekrutmen secara *online* dengan tahapan sebagai berikut:

To meet the needs of project workforce in HP's work regions and areas, the Company carried out online recruitment with the following stages:

1. Psikotes *online* untuk rekrutmen Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (UIT JBB) pada bulan Mei sampai Agustus 2019.

1. Online psychological test for recruitment for West Java Main Transmission Unit (UIT JBB) from May to August 2019.



## Pengelolaan Human Capital Human Capital Management

2. Pembuatan *website* rekrutmen *online* untuk pelaksanaan rekrutmen UIT JBB dan UIT JBT (Jawa Bagian Timur).

Hasil rekrutmen tenaga kerja tahun 2019 adalah sebanyak 5.706 orang.

### Pengembangan Kompetensi

Setiap pegawai Perusahaan dituntut untuk meningkatkan standar kompetensi diri secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui program-program pengembangan yang tersedia.

Program pelatihan dan pengembangan disusun berdasarkan *Learning Needs Analysis* (LNA) yang dilakukan oleh Pusdiklat PLN dan mengacu pada *Roadmap Transformasi HP* yang membutuhkan standardisasi kompetensi. LNA merupakan program dari PLN, untuk membantu keberhasilan anak perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diberikan secara berjenjang, mulai dari tingkatan tenaga kerja (*workforce*), supervisor dan para manajer. Program pelatihan yang diberikan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Pelatihan *hard skill* yang dilaksanakan oleh HP seperti pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Pengelolaan Gardu Induk, Gardu Distribusi dan Asesmen Kabel, dan sebagainya.
2. Pelatihan *soft skill/leadership* yang dilaksanakan oleh Pusdiklat PLN, seperti pelatihan *Supervisory Education* atau *Executive Education*.
3. Pelatihan di luar masalah ketenagalistrikan seperti *Awareness ISO 9001:2015*, pembelajaran manajemen bisnis area, *Safety and Quality* bagi para Manajer Area dan Supervisor (SPV).
4. Sertifikasi Kompetensi yang merupakan prasyarat *mandatory* bagi tenaga kerja teknik Perusahaan.

Pada tahun 2019 Perusahaan melaksanakan program pelatihan/pengembangan antara lain:

2. Development of online recruitment website for recruitment for UIT JBB and UIT JBT (Eastern Java).

In 2019, the Company recruited 5,706 employees.

### Competency Development

Every employee of the Company is required to improve self-competence standard on an ongoing basis in order to be able to face changes in a dynamic business environment. The Company provides equal opportunities to all employees to improve their competence through available development programs.

Training and development program is prepared based on Learning Needs Analysis (LNA) conducted by PLN Training Center and refers to HP Transformation Roadmap which requires competency standardization. LNA is PLN's program to help the success of subsidiaries in running their business processes and able to overcome their challenges.

Training and competency development programs are given in stages, for workforce, supervisor and manager levels. The training program is divided into 4 categories, as follows:

1. Hard skill training carried out by HP, such as trainings for General Occupational Health and Safety Expert (AK3U), First Aid for Accidents (P3K), Management of Substation, Distribution Substation and Cable Assessment, and so on.
2. Soft skill/leadership training held by PLN Training Center, such as Supervisory Education or Executive Education training.
3. Non-electricity trainings, such as ISO 9001:2015 Awareness, area business management learning, Safety and Quality for Area Managers and Supervisors (SPV).
4. Competency Certification which is a mandatory prerequisite for the Company's technical workforce.

In 2019, the Company carried out training/development programs, including:



No.	Topik Pelatihan/ <i>Workshop</i> Training/ <i>Workshop</i> SUBject	Waktu Date	Jumlah Peserta Number of Participant
1	Workshop AMC/AMC Workshop	5–6 Maret/March	60
2	Anggaran Perusahaan/ <i>Company Budgeting</i>	6–7 Maret/March	1
3	SPS4	13 Maret/March	12
4	PSAK 72-73/Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS) 72-73	13–14 Maret/March	2
5	Workshop Manajemen Risiko/ <i>Risk Management Workshop</i>	25–26 Maret/March	5
6	Leadership and Innovation	25–26 Maret/March	6
7	X-Men 4 Expert	24–25 Juni/June	24
8	Seminar Kasus Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Korporasi/ Seminar on Legal Cases and Corporate Crime Prevention	11 Juli/July	6
9	KPKU/Commission for the Supervision of Business Competition	22–23 Agustus/August	50
10	Indonesia HR Summit	18–19 September/September	3
11	Quality Risk Governance Professional	28–29 Oktober/October	6
12	Sertifikasi Level 5 MSDM BNSP/Level 5 HR Management BNSP Certification	28 Oktober–1 November October 28–November 1	1
13	ESQ Quantum Excellence Batch 1-2	12–13 November/November 19–20 November/November	100
14	Sertifikasi Kompetensi Level 4 Distribusi Tenaga Listrik/Level 4 Competency Certification on Power Distribution	19–20 November/November	14
15	Sertifikasi Level 4 MSDM BNSP/Level 4 HR Management BNSP Certification	30 November/November	1
16	Sertifikasi Level 2 dan 3 IPTL/Level 2 and 3 IPTL Certification	9–11 Desember/December	6
17	ESQ Quantum Excellence Batch 3-4	12–13 Desember/December	100
<b>Jumlah Peserta Pelatihan</b> Total Participants			<b>397</b>

Pelatihan pegawai/tenaga kerja juga diselenggarakan secara *in-house* di setiap region terutama untuk memastikan bahwa setiap personel dapat memahami dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, aman, dan sesuai prosedur operasi standar (SOP).

### Sertifikasi Kompetensi

Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja, Perusahaan berkewajiban untuk memfasilitasi proses untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bekerja sama dengan lembaga sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi bersifat mandatory sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009). Berdasarkan UU 30/2009, pekerja di bidang ketenagalistrikan harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Perusahaan memberikan pembekalan berupa pelatihan/*workshop* bagi tenaga kerja yang akan menempuh uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan oleh lembaga

In-house employee/workforce training is also held in each region, especially to ensure that each personnel can understand and be able to carry out their duties properly, safely and according to standard operating procedures (SOP).

### Competency Certificate

In line with the efforts to improve technical competence of the workforce, the Company is obliged to facilitate the process of obtaining competency certification in collaboration with competency certification institutions. Competency certification is mandatory in accordance with the mandate of Law No. 30 of 2009 concerning Electricity (Law No. 30/2009). Based on Law No. 30/2009, workforce in the electricity sector must obtain a competency certificate issued by a professional certification institution.

The Company provides assistance in the form of training/*workshop* for workforce who will take competency test. Competency test is carried out by designated external

## Pengelolaan Human Capital

### Human Capital Management

eksternal yang ditunjuk, di antaranya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Himpunan Ahli Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (Gema PDKB).

Pada tahun 2019, Perusahaan merencanakan sertifikasi untuk 1.987 tenaga kerja teknik yang tersebar di seluruh region. Sampai akhir tahun 2019 sertifikasi telah terealisasi untuk 2.164 orang atau tercapai 109% dari target.

### Biaya Pelatihan

Biaya pelatihan dan pengembangan pada tahun 2019 sebesar Rp944,75 juta, meningkat 25% dibandingkan Rp752,71 juta pada tahun 2018.

### Human Capital Readiness

*Human Capital Readiness* (HCR) adalah indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan sasaran dan strategi Perusahaan. HCR diukur dari penilaian tingkat kematangan pada periode tertentu. Formulasi yang digunakan dalam penilaian tingkat kematangan HCR adalah dengan menggunakan pengukuran pada aspek peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan implementasi *knowledge management* (KM), pemetaan kompetensi, perencanaan pelaksanaan evaluasi, *monitoring* program peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim HCR-OCR PLN Kantor Pusat dan telah disampaikan melalui surat No. 00014/SKK.00/01/EVP HCMS/2020 tanggal 7 Januari 2020, nilai HCR yang diperoleh HP adalah 3,90 dari target 3,90 atau tercapai 100%.

### Organization Capital Readiness

*Organization Capital Readiness* (OCR) adalah indikator yang digunakan untuk memastikan kesiapan organisasi untuk menjalankan agenda perubahan Perusahaan yang diukur melalui penilaian tingkat kematangan pada periode tertentu. Formulasi yang digunakan dalam penilaian *maturity level* OCR adalah dengan menilai kematangan pengelolaan human capital pada aspek implementasi *leadership*, *alignment*, *culture* dan *teamwork*. Formulasi yang digunakan mengacu pada perhitungan rata-rata dari KPI dan kematangan pencapaian. Tingkat kematangan yang digunakan adalah dengan pemeringkatan level 1 sampai 5 yang merupakan cerminan dari setiap indikator.

agencies, including National Professional Certification Board (BNSP) and Association of Professional Voltage Experts (Gema PDKB).

In 2019, the Company planned to certify 1,987 technical workforce in all regions. At end of 2019, certification was realized for 2,164 workforce or 109% of the target.

### Training Expenses

Training and development expenses in 2019 amounted to Rp944.75 million, an increase of 25% compared to Rp752.71 million in 2018.

### Human Capital Readiness

Human Capital Readiness (HCR) is an indicator used to ensure that employee competency development is in line with the Company's goals and strategies. HCR is measured with an assessment of maturity level in a certain period. The formulation used in the assessment of HCR maturity level is to use measurements in the aspect of employee competency improvement through implementation of knowledge management (KM), competency mapping, evaluation planning, monitoring of competency improvement programs and competency certification.

Based on results of assessment conducted by HCR-OCR team of PLN Head Office that was stated in letter No. 00014/SKK.00/01/EVP HCMS/2020 dated January 7, 2020, HCR score obtained by HP was 3.90 from the target of 3.90 or reached 100%.

### Organization Capital Readiness

Organization Capital Readiness (OCR) is an indicator used to ensure the readiness of an organization to carry out the Company's change agenda, which is measured with an assessment of maturity level in a certain period. The formulation used in OCR maturity level assessment is to assess the maturity of human capital management in the aspects of implementation of leadership, alignment, culture and teamwork. The formulation used refers to average calculation of KPI and achievement maturity. Maturity level is ranged from level 1 to level 5, which is a reflection of each indicator.



Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim HCR-OCR PLN Kantor Pusat dan telah disampaikan melalui surat No. 00014/SKK.00.01/EVP HCMS/2020 tanggal 7 Januari 2020, nilai OCR yang diperoleh HP adalah 3,90 dari target 3,90 atau tercapai 100%.

### **Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)**

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) sebagai pedoman untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan terukur. SIMKP merupakan sistem manajemen strategis dan terpadu untuk menyelaraskan pencapaian kinerja pegawai terhadap sasaran kinerja korporat yang diterapkan di grup PLN berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 045.P/DIR/2017. Penggunaan SIMKP mencakup penilaian kinerja individu, kenaikan tingkat atau *grading*, promosi jabatan, kriteria talenta, dan pengembangan karir pegawai.

Pengisian SIMKP dilakukan pada awal tahun berjalan dan penilaian semester pertama dilaksanakan setiap bulan Agustus. Dengan demikian, siklus penilaian dilakukan dua kali dalam setahun dimulai dari perencanaan pekerjaan setiap pegawai selama setahun ke depan, masa revisi terhadap rencana dan target kerja tersebut, pencapaian sasaran, hingga penilaian akhir tahun. Dengan menggunakan SIMKP, kinerja setiap pegawai dapat termonitor lebih cepat dan mudah dan Perusahaan dapat melakukan kalibrasi/penyelarasan target organisasi dengan target individu berdasarkan realisasi pencapaian kinerja.

Dalam rangka sinergi Holding PLN dengan HP sesuai dengan Surat Direktur HCM PT PLN (Persero) No. 2420/SDM.07.01/DITHCM/2017-R tanggal 19 Desember 2017 perihal Sinergi *Holding* dan Anak Perusahaan, maka pengelolaan pegawai organik HP telah menggunakan SAP yang terintegrasi dengan PLN sesuai dengan Surat EVP Talent Development PLN No. 2809/SDM.03.03/010403/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penyampaian *Workshop* Migrasi Data Pegawai Anak Perusahaan ke SAP.

Based on results of assessment conducted by HCR-OCR team of PLN Head Office that was stated in letter No. 00014/SKK.00/01/EVP HCMS/2020 dated January 7, 2020, OCR score obtained by HP was 3.90 from the target of 3.90 or reached 100%.

### **Employee Performance Management Information System (SIMKP)**

The Company implements Employee Performance Management Information System (SIMKP) as a guideline for evaluating employee performance achievement in an objective, transparent and measurable manner. SIMKP is a strategic and integrated management system to align employee performance achievement with corporate performance targets implemented in PLN group based on Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 045.P/DIR/2017. The use of SIMKP includes individual performance appraisal, level or grading promotion, position promotion, talent criteria and employee career development.

SIMKP is filled at the beginning of the current year and the first semester assessment is carried out every August. Thus, the assessment cycle is carried out twice a year starting from the work planning of each employee for the next year, the revision period of the work plan and targets, target achievement, to year end assessment. By using SIMKP, performance of each employee can be monitored more quickly and easily and the Company can calibrate/align organizational targets with individual targets based on realized performance achievements.

In the framework of synergy between PLN Holding and HP in accordance with Letter of HCM Director of PT PLN (Persero) No. 2420/SDM.07.01/DITHCM/2017-R dated December 19, 2017 regarding Synergy of Holding and Subsidiaries, the management of HP's organic employees uses SAP which is integrated with PLN in accordance with Letter of EVP Talent Development of PLN No. 2809/SDM.03.03/010403/2019 dated September 23, 2019 concerning Submission of Workshop on Subsidiary Employees Data Migration to SAP.

**Pengelolaan Human Capital**  
Human Capital Management

**Rencana Kerja Tahun 2020 di Bidang Human Capital**

Sesuai dengan penetapan Kontrak Manajemen tahun 2020, *Key Performance Indicators* (KPI) Divisi HCM adalah sebagai berikut:

**2020 Work Plan in Human Capital**

In accordance with determination of Management Contract in 2020, *Key Performance Indicators* (KPI) of HCM Division was as follows:

No.	KPI	Formula	Satuan Unit	Target	Bobot Weight
1	Sertifikasi Tenaga Kerja Workforce Certification	▲ (Jumlah tenaga kerja pada bidang tersertifikasi/Jumlah rencana tenaga kerja pada bidang teknis yang akan disertifikasi) x 100 (Number of workforce in the certified field/Number of planned workforce in the technical field to be certified) x 100	%	100.00	6
2	Human Capital Readiness (HCR)	▲ Levelisasi 1-5 oleh Tim Asesmen Leveling 1-5 by the Assessment Team	Level	3.90	3
3	Organizational Capital Readiness (OCR)	▲ Levelisasi 1-5 oleh Tim Asesmen Leveling 1-5 by the Assessment Team	Level	3.90	3
4	Good Corporate Governance (GCG)	▲ Hasil asesmen GCG Result of GCG assessment	Skor Score	89.00	6
5	Penyelesaian Temuan Auditor Settlement of Auditor Findings	▲ Nilai pengurang temuan dan rekomendasi jatuh tempo yang harus sudah ditindaklanjuti The deduction value for findings and recommendation that is due which must be followed up	%	100.00	Max. (-5)

Untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan, Divisi HCM menyusun program kerja sebagai berikut:

1. Peningkatan indeks tingkat kematangan HCR.
2. Peningkatan indeks tingkat kematangan OCR yang meliputi a) *alignment*, b) *leadership*, c) *culture*, d) *teamwork*, dan e) *industrial relationship*.
3. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja pada bidang teknis sesuai peraturan ketenagakerjaan.
4. Peningkatan kompetensi kepemimpinan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
5. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*.
6. Penyelesaian permasalahan hubungan industrial melalui peningkatan kompetensi pengelola sumber daya manusia (SDM) di region dan area melalui pendidikan dan pelatihan hubungan industrial serta pendampingan.
7. Pelaksanaan kegiatan inovasi.

To achieve the predetermined KPI, HCM Division prepared the following work programs:

1. Increasing HCR maturity level index.
2. Increasing OCR maturity level index which includes a) alignment, b) leadership, c) culture, d) teamwork and e) industrial relationship.
3. Implementing workforce certification in the technical field in accordance with manpower regulations.
4. Increasing leadership competency through leadership education and training.
5. Improving competency through e-learning based education and training.
6. Resolving industrial relations problems by improving competence of human resource managers in the regions and areas through education and training in industrial relations and assistance.
7. Implementing innovation activities.







# Teknologi Informasi

## Information Technology



Perusahaan mengembangkan sistem teknologi informasi (*information technology*/"IT") untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis agar lebih efektif, efisien, optimal, mampu memberikan nilai tambah serta mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dalam waktu yang relatif singkat. Bisnis HP yang berinteraksi langsung dengan pelanggan membutuhkan kecepatan dalam merespons keluhan pelanggan. Dengan dukungan sistem informasi yang andal, petugas di lapangan dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yang mengalami gangguan instalasi.

### Tata Kelola Teknologi Informasi

Perusahaan telah memiliki pedoman tata kelola teknologi informasi atau IT *Governance* yang tertuang di dalam Keputusan Direksi No. 0032.K/STH.03.01/2016 tanggal 19 September 2016 Tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT Haleyora Power. IT *Governance* memberikan pedoman untuk menjaga agar pengembangan dan pemanfaatan IT dapat berlangsung secara terukur dan memenuhi prinsip-prinsip GCG.

The Company develops information technology ("IT") systems to support the business processes to be more effective, efficient, optimal, able to provide added value and to support the management's decision-making process in a relatively short time. In addition, HP's core business that is closely related to customers requires speed in responding to customer complaint. With the support of a reliable information system, officers in the field can move swiftly in providing services to customers who experience installation problems.

### Information Technology Governance

The Company has IT Governance guidelines as stated in Decision of the Board of Directors No. 0032.K/STH.03.01/2016 dated September 19, 2016 concerning Policies and General Guidelines for Information Technology Governance in PT Haleyora Power. IT Governance provides guidelines to ensure that IT development and utilization can take place in a measured manner and in compliance with GCG principles.



**Perusahaan telah memiliki pedoman tata kelola teknologi informasi sebagai pedoman untuk menjaga agar pengembangan dan pemanfaatan IT dapat berlangsung secara terukur dan memenuhi prinsip-prinsip GCG.**

The company has IT governance guidelines as a guideline to ensure that IT development and utilization can take place in a measured manner and comply with GCG principles.

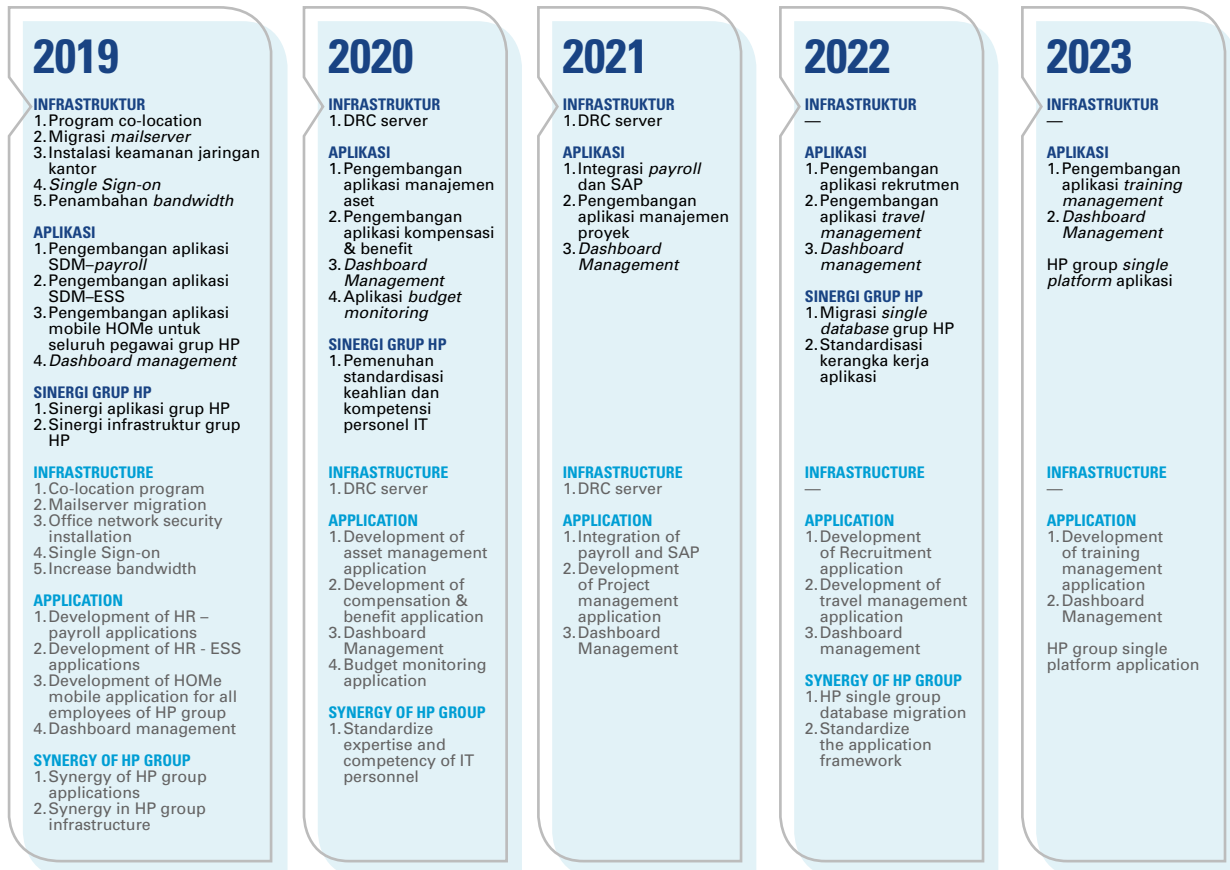
### **IT Master Plan**

Perusahaan menyusun IT *Master Plan* 5 tahunan sebagai arahan kebijakan dan strategi dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan sistem dan infrastruktur IT sehingga lebih sistematis, terukur, terarah dan berkesinambungan. Dalam IT *Master Plan* 2019-2023, fokus pengembangan IT dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 1) Infrastruktur, 2) Aplikasi, 3) Sinergi grup HP, dan 4) HP Group *Single Platform* Aplikasi. Rencana pengembangan masing-masing kelompok dalam 5 tahun ke depan digambarkan dalam diagram berikut:

### **IT Master Plan**

The Company prepared a 5-year IT Master Plan as a policy and strategy direction for planning and implementation of IT systems and infrastructure so that they become more systematic, measurable, focused and sustainable. In IT Master Plan 2019-2023, the focus of IT development is divided into 4 groups, namely: 1) Infrastructure, 2) Applications, 3) HP group synergy and 4) HP Group Single Platform Application. Each group's development plan for the next 5 years is illustrated in the following diagram:

**Teknologi Informasi**  
Information Technology



**Pencapaian Tahun 2019**

Program pengembangan IT yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi *E-Learning System*  
Perusahaan menerapkan sistem pembelajaran berbasis dalam jaringan yang dapat diakses baik dari *web* maupun dari perangkat *mobile*. Sarana pembelajaran dalam jaringan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan tenaga kerja memenuhi kebutuhan kompetensi. Sistem ini dapat menjangkau seluruh unit Perusahaan untuk kebutuhan pembelajaran. Metode pembelajaran dikemas secara terstruktur dan sistematis. Setiap perkembangan proses belajar masing-masing tenaga kerja dapat terpantau sehingga memudahkan Divisi HCM untuk menganalisis kebutuhan kompetensi.
- b. Implementasi MoDeko (*Monitoring Dewan Komisaris*)  
Perusahaan bekerja sama dengan PT PJB mengembangkan aplikasi MoDeko untuk memudahkan *monitoring* dan

**2019 Achievements**

IT development in 2019 included:

- a. Implementation of E-Learning System  
The Company implements a network-based learning system that can be accessed from both the web and from mobile devices. Learning facilities in the network are expected to be a solution to generate employees that meet competency needs. This system can reach all the Company's units to meet their learning needs. The learning method is packaged in a structured and systematic manner. Every development in the learning process of each employee can be monitored, making it easier for HCM Division to analyze competency requirements.
- b. Implementation of MoDeko (Monitoring Dewan Komisaris/ the Board of Commissioners Monitoring)  
The Company collaborates with PT PJB to develop MoDeko application to facilitate monitoring and evaluation of any



evaluasi atas setiap tindak lanjut arahan Dewan Komisaris. Implementasi aplikasi MoDeco telah selesai pada Desember 2020 dan dapat diakses melalui *web* (internet).

c. ListriQu (LinkAja)

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa, HP menghadapi tingkat kompetisi yang tinggi terutama di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, HP terus menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, antara lain dengan menghadirkan layanan pelanggan berbasis digital.

HP terus mengembangkan aplikasi ListriQu (Layanan Instalasi Listrik *Quick & Quality*) sebagai aplikasi layanan jasa kepada pelanggan melalui telepon pintar. ListriQu akan terintegrasi langsung dengan sistem Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT), Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T), dan *Mobile* APKT PLN sehingga setiap pengaduan yang muncul di sistem PLN tersebut yang masuk ke dalam kategori gangguan pada instalasi milik pelanggan (IML) secara otomatis akan terhubung langsung ke sistem ListriQu.

Pada tahun 2019, Perusahaan meningkatkan kemudahan metode pembayaran ListriQu melalui kerja sama dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan melakukan integrasi *e-payment*. Proses pembangunan dan uji integrasi telah dilakukan pada akhir tahun 2019 dan ditargetkan pada bulan Februari 2020 pelanggan sudah dapat melakukan pembayaran jasa layanan ListriQu menggunakan LinkAja.

### Rencana Ke Depan

Saat ini Perusahaan menerapkan sistem pengelolaan proses bisnis yang dikembangkan secara internal namun tidak terintegrasi. Setiap fungsi aplikasi seperti SAP (Fico), Diva System (konsolidasi), HOME (aplikasi operasional) berada dalam *environment* dan basis data yang berbeda. Sistem yang tidak terintegrasi ini akan berdampak pada: a) proses integrasi data antar proses bisnis, b) penyediaan laporan yang komprehensif, c) kebutuhan analisis dan evaluasi data lintas divisi/bidang, d) ketersediaan *dashboard* informasi yang terintegrasi, e) kecepatan pengambilan keputusan, dan f) ketersediaan basis data.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Perusahaan akan mengaplikasikan perangkat lunak *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang terpisah tersebut ke dalam satu sistem yang terpadu sehingga pengelolannya menjadi lebih efektif dan efisien.

follow-up to advices given by the Board of Commissioners. MoDeco application development was completed in December 2020 and can be accessed through the internet.

c. ListriQu (LinkAja)

As a company engaged in the service sector, HP faces a high level of competition, especially in the use of IT. Therefore, HP continues to adapt to technological advances, including by providing digital-based customer service.

HP continues to develop ListriQu (Layanan Instalasi Listrik Quick & Quality/Quick & Quality Electrical Installation Service) application as a service to customers via mobile devices. ListriQu will be integrated directly with PLN's applications including Integrated Complaint Application (APKT) system, Centralized Customer Service Application (AP2T) and Mobile APKT; so that any complaint that arise in PLN system which can be categorized as disruption to the customer's installation (IML) will automatically be connected directly to ListriQu system.

In 2019, the Company improved the convenience of ListriQu payment method by collaborating with PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) by integrating e-payment. The development and integration test were carried out at end of 2019 and it was targeted that by February 2020 customers can make payment for ListriQu services using LinkAja.

### Future Plans

Currently, the Company implements a business process management system that is internally developed but not integrated yet. Each application function, such as SAP (Fico), Diva System (consolidation), HOME (operational application), is in a different environment and database. This non-integrated system will have an impact on: a) data integration among business processes, b) preparation of comprehensive reports, c) the need for data analysis and evaluation across divisions/fields, d) availability of integrated information dashboard, e) the speed of decision making and f) database availability.

To overcome these obstacles, the Company will apply Enterprise Resource Planning (ERP) software to integrate the separate systems into one integrated system so that management process will become more effective and efficient.



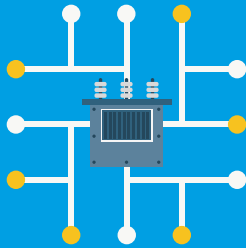
# menjaga





Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap aktivitas usaha untuk menciptakan korporasi yang berintegritas dan terpercaya.

# *komitmen*



## KEEPING COMMITMENTS

The Company is committed to implementing GCG principles in every business activity to create a corporation with integrity and trustworthiness.



# Tata Kelola Perusahaan

## Corporate Governance



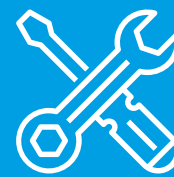
Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* ("GCG") di setiap aktivitas usaha untuk menciptakan korporasi yang berintegritas dan terpercaya. Pengelolaan Perusahaan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perundang-undangan dan *best practice* untuk menghasilkan nilai yang optimal bagi pemegang saham, dan manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas GCG antara lain dilakukan dengan menerbitkan dan melakukan sosialisasi berbagai pedoman dan kebijakan terkait GCG, penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct/COC*) yang konsisten, serta melakukan penilaian penerapan GCG oleh pihak independen secara berkala.

The Company is committed to implementing the principles of good corporate governance ("GCG") in every business activity to create a corporation with integrity and trustworthiness. The management of the Company always refers to the principles of GCG in accordance with the laws and regulations and the best practices to generate optimal value for shareholders, and benefits for stakeholders and the society. Efforts to improve GCG quality include issuance and dissemination of various guidelines and policies related to GCG, consistent enforcement of Code of Conduct (COC) and periodic assessment of GCG implementation by independent parties.



## Secara berkala Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan GCG untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan GCG di Perusahaan.

The Company periodically assesses GCG implementation to measure the level of compliance of GCG implementation in the Company.



# 86.18

Hasil Penilaian GCG mandiri periode tahun 2019.

GCG self-assessment result in 2019.

## PEDOMAN DAN KEBIJAKAN GCG

Perusahaan terus berupaya memperkuat komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, terukur dan berkelanjutan. Perusahaan telah memiliki perangkat pedoman GCG, kebijakan serta prosedur proses bisnis terkait GCG (*GCG softstructure*) sebagai panduan bagi seluruh insan Perusahaan dalam menerapkan praktik GCG terbaik di setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Pedoman GCG (GCG Code) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
2. Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* (CoC) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
3. Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang dikeluarkan pada bulan September 2016;
4. Keputusan Direksi No. 170.K/DIR-HP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT Haleyora Power;

## GCG GUIDELINES AND POLICIES

The Company continues to strengthen its commitment to implementing GCG principles in a consistent, measurable and sustainable manner. The Company has a set of GCG guidelines, policies and business process procedures related to GCG (*GCG soft structure*) as a guide for the Company's personnel in implementing GCG best practices in each of business activities. These documents include:

1. GCG Code issued in September 2016;
2. Code of Conduct (CoC) issued in September 2016;
3. Board Manual issued in September 2016;
4. Decision of the Board of Directors No. 170.K/DIR-HP/2014 dated Desember 1, 2014 concerning Internal Control System Policy of PT Haleyora Power;

## Tujuan Penerapan GCG

### Objectives of GCG Implementation

5. Keputusan Direksi No. 171.K/DIR-HP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan Internal PT Haleyora Power;
6. Peraturan Direksi No. 001.P/DIR-HP/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Haleyora Power;
7. Peraturan Direksi No. 0003.P/DIR-HP/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Haleyora Power;
8. Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR-HP/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Haleyora Power;
9. Peraturan Direksi No. 0141.P/DIR-HP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman *Safety, Integrity* dan *Quality* di Lingkungan PT Haleyora Power;
10. Keputusan Direksi No. 0016/DIR-HP/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Haleyora Power dan Edaran Direksi No. 0001.E/DIR-HP/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Haleyora Power;
11. Keputusan Direksi No. 0031.K/DIR-HP/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Haleyora Power;
12. Peraturan Perusahaan PT Haleyora Power No. KEP.646/PHIJSK-PK/PP/V/2018 tanggal 24 Maret 2018 edisi 2018-2020;
13. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 001.E/DIR-HP/2018 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*.

## TUJUAN PENERAPAN GCG

1. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahwa Perusahaan dikelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan tingkat pengembalian yang wajar dan bernilai tinggi.
2. Mendorong pencapaian visi dan misi Perusahaan.
3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko Perusahaan secara lebih berhati-hati (*prudent*) dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
4. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.

## OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

1. To assure the Shareholders that the Company is managed properly and properly with the aim of providing a reasonable rate of return and high value.
2. To encourage achievement of the Company's vision and mission.
3. To encourage and support development, resource management and risk management of the Company in a more prudent and responsible manner in line with GCG principles.
4. To create added value for all parties.

**Tujuan Penerapan GCG**  
Objectives of GCG Implementation

5. Mendorong terciptanya budaya kerja Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan penuh kebersamaan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan di dalam pengelolaan Perusahaan.
5. To encourage creation of a better corporate work culture with unity.
6. To prevent irregularities in the management of the Company.

**Kegiatan GCG Tahun 2019**  
GCG Activities in 2019

1

Sosialisasi Pedoman GCG, Pedoman Perilaku (CoC), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan Perusahaan dan Whistleblowing System pada tanggal 17-19 Januari, 4 Februari, dan 21-22 Maret 2019.

Socialization of GCG Guidelines, Code of Conduct (CoC), Guidelines for Gratification Control, Corporate Regulations and Whistleblowing System on January 17-19, February 4, and March 21-22, 2019.

2

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai KBLI 2017 melalui Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 27 November 2019.

Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to adjust the aims and objectives as well as business activities in accordance with the 2017 KBLI through Circular GMS Decision dated 27 November 2019.

3

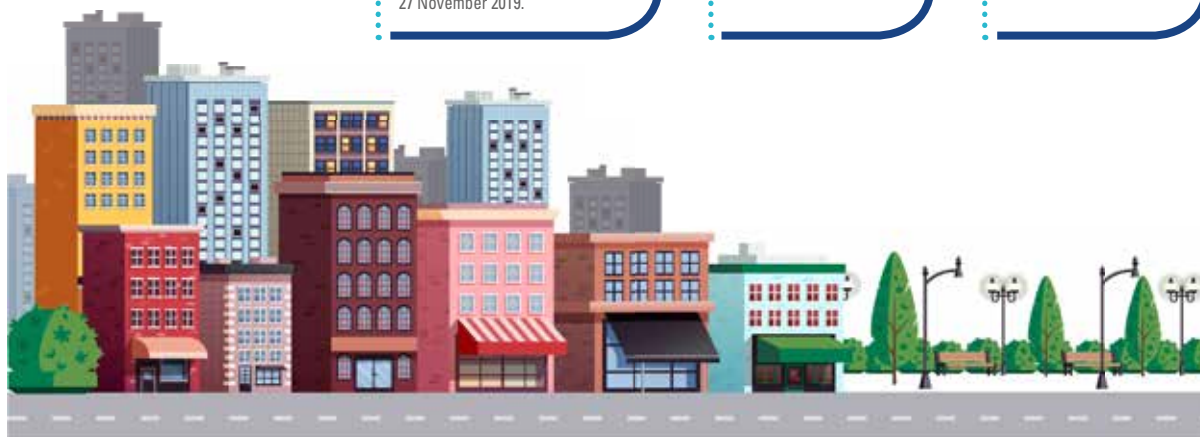
Penetapan Peraturan Direksi No. 0010.P/DIR-HP/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Kebijakan *Anti Fraud* di Lingkungan PT Haleyora Power.

Stipulation of Regulation of Board of Directors No. 0010.P/DIR-HP/2020 dated February 20, 2020 regarding Anti-Fraud Policy in PT Haleyora Power.

4

Penetapan Peraturan Direksi No. 0010.P/DIR-HP/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT Haleyora Power.

Stipulation of Regulation of Board of Directors No. 0010.P/DIR-HP/2020 dated February 20, 2020 regarding Management of Conflict of Interest in PT Haleyora Power.



**Penilaian Penerapan GCG**

Secara berkala Perusahaan melaksanakan penilaian penerapan GCG (Penilaian GCG) untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan GCG di Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dua tahun sekali dan di antara periode tersebut Perusahaan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*). Hasil penilaian GCG akan memberikan gambaran terkini terkait kondisi penerapan GCG di Perusahaan.

**Assessment of GCG Implementation**

The Company periodically assesses GCG implementation (GCG Assessment) to measure the level of compliance of GCG implementation in the Company with Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The assessment is carried out by an independent external party every two years and between these periods the Company conducts self-assessment. GCG assessment results will provide an up-to-date overview of GCG implementation in the Company.

## Tujuan Penerapan GCG

### Objectives of GCG Implementation

## Kriteria yang Digunakan

Kriteria penilaian GCG berdasarkan parameter yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Kriteria yang digunakan meliputi 1) Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan; 2) Pemegang Saham dan RUPS; 3) Dewan Komisaris; 4) Direksi; 5) Pengungkapan informasi dan transparansi; dan 6) Aspek Lainnya.

## Pihak yang Melakukan Penilaian

Pada awal tahun 2020, penilaian GCG dilakukan untuk menilai implementasi GCG periode tahun 2019. Penilaian ini dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh tim yang ditunjuk Direktur Utama. Sebelumnya, penilaian GCG periode tahun 2018 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## Hasil Penilaian GCG Periode Tahun 2019

Periode tahun 2019 adalah periode penilaian mandiri yang dititikberatkan pada evaluasi pemenuhan rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement/Aol*) terhadap hasil penilaian GCG tahun 2018 oleh BPKP. Hasil Penilaian GCG mandiri periode tahun 2019 mencapai skor 86,186, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 80,359 dengan penilaian masing-masing indikator sebagai berikut:

## Assessment Criteria

GCG assessment criteria are based on parameters set out in Decision of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June, 6 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOE. The criteria include 1) Commitment to implementation of sustainable governance; 2) Shareholders and GMS; 3) Board of Commissioners; 4) Board of Directors; 5) Information disclosure and transparency; and 6) Other Aspects.

## Assessors

In early 2020, GCG assessment was performed to assess GCG implementation for 2019 period. This assessment was carried out independently (*self-assessment*) by a team appointed by the President Director. Previously, 2018 GCG assessment was carried out by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

## 2019 GCG Assessment Results

2019 GCG assessment used self-assessment method which was focused on evaluation of fulfillment of Area of Improvement (Aol) revealed by 2018 GCG assessment conducted by BPKP. Overall, 2019 GCG self-assessment results reached a score of 86.186, an increase compared to previous year of 80.359 with the scores of each aspect as follows:

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Capaian 2019 2019 Achievement			Capaian 2018 2018 Achievement		
			Skor Score	%	Predikat Predicate	Skor Score	%	Predikat Predicate
1	Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik secara berkelanjutan Commitment into sustainable implementation of Good Corporate Governance (GCG)	7.00	6.436	92	Sangat Baik Excellent	6.436	91.942	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang saham dan RUPS Shareholders and GMS	9.00	7.650	85	Baik Good	7.703	85.558	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35.00	33.250	95	Sangat Baik Excellent	30.322	86.634	Sangat Baik Excellent
4	Direksi Board of Directors	35.00	32.550	93	Sangat Baik Excellent	30.117	86.048	Sangat Baik Excellent
5	Pengungkapan informasi dan transparansi Information disclosure and transparency	9.00	6.300	70	Cukup Baik Satisfactory	5.771	64.122	Cukup Baik Satisfactory



Tujuan Penerapan GCG  
Objectives of GCG Implementation

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Capaian 2019 2019 Achievement			Capaian 2018 2018 Achievement		
			Skor Score	%	Predikat Predicate	Skor Score	%	Predikat Predicate
6	Aspek lainnya Other aspect	5.00	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>86.186</b>		<b>Sangat Baik Excellent</b>	<b>80.359</b>		<b>Baik Good</b>

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik  
Note: 0-50: Poor | 50-60: Fair | 60-75: Good | 75-85: Very Good | 85-100: Excellence

### Hasil Penilaian GCG Aspek Dewan Komisaris

Hasil penilaian GCG periode tahun 2019 pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terdiri dari 12 indikator dengan 44 parameter dengan pencapaian skor 33,250 dari bobot 35,00 atau 95% dengan predikat "Sangat Baik."

### Results of GCG Assessment on the Aspect of the Board of Commissioners

Results of 2019 GCG assessment on the aspect of implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners consisted of 12 indicators with 44 parameters with a score of 33.250 from 35.00 or 95% with "Very Good" rank.

No.	Indikator Indicator	Jumlah Parameter Number of Parameter	Bobot Weight	Capaian Achievement	
				Skor Score	%
1	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Commissioners (BOC) continuously attends training/learning programs	2	1.35	1.35	100.00
2	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. The BOC implements segregation of duties and establishes required factors to support its duty execution.	4	2.13	2.13	100.00
3	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The BOC grants approval of draft long-term and annual budget and work plan delivered by the Board of Directors (BOD).	2	2.90	2.90	100.00
4	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The BOC provides directions to the BOD on the implementation of the Company's plan and policies.	9	9.59	9.59	100.00
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The BOC performs oversight over the BOD on the implementation of Company plans and policies.	6	6.48	6.13	94.64



## Tujuan Penerapan GCG

### Objectives of GCG Implementation

No.	Indikator Indicator	Jumlah Parameter Number of Parameter	Bobot Weight	Capaian Achievement	
				Skor Score	%
6	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. The BOC performs oversight over the implementation of management policy of subsidiaries/joint ventures.	2	1.50	1.50	100.00
7	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The BOC takes role in the nomination of the BOD's members, assesses the BOD's performance (individual and collegial) and proposes performance bonuses/tantiem by applicable regulation and considering the BOD's performance.	3	2.44	2.01	82.62
8	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. The BOC takes actions against potential conflict of interest concerning him.	1	0.57	0.48	83.33
9	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The BOC monitors and ensures that the GCG principles has been implemented in an effective and sustainable manner.	2	1.66	1.28	77.34
10	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The BOC held effective BOC's meetings and attended the meeting by the applicable rules and regulations.	3	1.35	1.18	87.17
11	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. The BOC has a Secretary to the BOC to support the secretarial duties of the BOC.	4	2.59	2.59	100.00
12	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. The BOC has an effective BOC Committees.	5	2.44	2.11	86.58
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>35.000</b> <b>Sangat Baik</b> <b>Excellent</b>	<b>33.250</b>	<b>95.00</b>

**Tujuan Penerapan GCG**  
Objectives of GCG Implementation

### Hasil Penilaian GCG Aspek Direksi

Hasil penilaian GCG periode tahun 2019 pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terdiri dari 13 indikator dan 52 parameter dengan pencapaian skor 33,550 dari bobot 35,000 atau 93% dengan predikat “Sangat Baik.”

### Results of GCG Assessment on the Aspect of the Board of Directors

Results of 2019 GCG assessment on the aspect of implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors consisted of 13 indicators with 52 parameters with a score of 33.550 from 35.000 or 93% with “Very Good” rank.

No.	Indikator Indicator	Jumlah Parameter Number of Parameter	Bobot Weight	Capaian Achievement	
				Skor Score	%
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Directors (BOD) continuously attends training/learning programs	2	1.09	1.09	100.00
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The BOD has a clear segregation of duties/functions, authorities, and responsibility.	3	1.87	1.50	80.34
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan. The BOD establishes Corporate Plan.	5	4.04	4.00	98.91
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. The BOD takes role in achieving Company’s Performance goals.	11	8.09	8.09	100.00
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The BOD performs operational and financial control over Company’s plan and policies implementation.	4	3.27	3.05	93.39
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. The BOD manages company in accordance with prevailing laws and regulations and Articles of Associations.	2	0.78	0.78	100.00
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> . The BOD builds value added relations for the Company and stakeholders.	8	6.69	6.40	95.68
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. The BOD monitors and manages potential Conflict of interest of the BOD’s members and management.	2	1.09	1.09	100.00

## Tujuan Penerapan GCG

### Objectives of GCG Implementation

No.	Indikator Indicator	Jumlah Parameter Number of Parameter	Bobot Weight	Capaian Achievement	
				Skor Score	%
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. The BOD ensures the company carries out Information disclosure and communication by prevailing laws and regulations moreover, delivery of information to the BOC and shareholders is promptly.	2	1.09	1.09	100.00
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The BOD holds BOD meetings and attends the meetings in accordance with prevailing laws and regulations.	5	1.56	1.32	84.99
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. The BOD shall perform effective and qualified internal audit.	3	1.71	1.50	87.67
12	Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. The BOD performs effective and qualified Corporate Secretary functions.	3	1.71	1.71	100.00
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. The BOD holds the annual GMS and other GMS by prevailing laws and regulations.	2	2.02	1.89	93.27
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>35.000</b> <b>Sangat Baik</b> <b>Excellent</b>	<b>33.550</b>	<b>93.00</b>

## Rekomendasi Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut

Hasil penilaian GCG pada Perusahaan menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Perusahaan sehingga tidak ada pengurangan atas capaian skor total penilaian GCG. Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh organ Perusahaan (tingkat pemenuhan parameter <50%) dan rekomendasinya adalah sebagai berikut:

## Recommendations for Assessment Results and Follow Up

Results of the Company's GCG assessment concluded that there were no violations and deviations committed by the Company so that there was no reduction in the total score of GCG assessment. Matters that require immediate handling by the Company's organs (parameter fulfilment rate <50%) and the respective recommendations are as follows:



Tujuan Penerapan GCG  
Objectives of GCG Implementation

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
<b>A. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola yang Baik secara Berkelanjutan</b> Commitment into Sustainable Implementation of GCG		
A.01	<p>Perusahaan telah melaksanakan program pengendalian gratifikasi, namun belum ada pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan.</p> <p>The Company implements gratification control program; however, there was no report on gratification control within the Company.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti oleh Divisi Corporate Secretary, Komunikasi, Hukum dan Kinerja</p> <p>Recommendations have been followed up by Corporate Secretary, Communication, Legal and Performance</p>
A.02	<p>Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistleblowing system/WBS</i>). Direksi agar menginstruksikan kepada bagian komunikasi untuk melakukan sosialisasi kebijakan WBS di media seperti majalah.</p> <p>The Company has policies for reporting of alleged irregularities in the Company (<i>whistleblowing system/WBS</i>). The Board of Directors should instruct the communications department to disseminate WBS policy through various media, such as magazines.</p>	
<b>B. Aspek Pemegang Saham</b> Aspects of Shareholder		
B.01	<p>Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, tetapi penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS masih melebihi 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir (semua Direksi masih berstatus Pelaksana Teknis/Plt, belum ada yang definitif).</p> <p>Shareholders/GMS determined appointment of members and composition of the Board of Directors according to the needs of the Company; however, determination of definitive members of the Board of Directors by GMS exceeded 30 days from the end of office term (all Directors are still Actings Officers, none was definitive).</p>	<p>Rekomendasi telah disampaikan kepada PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan Pengendali.</p> <p>Recommendations have been submitted to PT PLN (Persero) as the Majority and Controlling Shareholder.</p>
B.02	<p>Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi, namun belum mengatur mengenai mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut. Kepada pemegang saham/RUPS agar membuat pengaturan mengenai mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap Direksi yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan.</p> <p>Shareholders/GMS determined stipulation regarding concurrent positions held by members of the Board of Directors; however, the stipulation did not regulate the mechanism for resigning from such concurrent positions. Shareholders/GMS to determined stipulation regarding mechanism of resignation from concurrent positions held by the Board of Directors no later than 30 days after concurrent position is recognized.</p>	
B.03	<p>Pemegang saham/RUPS telah memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam Keputusan RUPS tidak menyebutkan alasan pemberhentian Direksi tersebut.</p> <p>Shareholders/GMS dismissed members of the Board of Directors in accordance with the laws and regulations; however, GMS Decision did not mention reason for dismissal of the Board of Directors.</p>	

## Tujuan Penerapan GCG

### Objectives of GCG Implementation

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
B.04	<p>Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan penetapan komposisinya sesuai <i>best practices</i>, namun penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS masih melebihi 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir (semua anggota Dewan Komisaris masih berstatus Plt, belum ada yang definitif). Pemegang Saham/RUPS agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk segera menetapkan status definitif bagi anggota Dewan Komisaris yang masih sebagai Plt.</p> <p>Shareholders/GMS determined appointment and composition of members of the Board of Commissioners according to the best practices; however, appointment of members of the Board of Commissioners by GMS exceeded 30 days from the end of office term (all members of the Board of Commissioners were still Acting, none was definitive). Shareholders/GMS should coordinate with the Ministry of SOE to immediately determine definitive status of members of the Board of Commissioners who were still Acting Commissioners.</p>	
B.05	<p>Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris, namun belum menetapkan jumlah maksimal jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Pemegang Saham/RUPS agar menetapkan jumlah maksimal jabatan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Shareholders/GMS determined stipulation regarding concurrent positions held by members of the Board of Commissioners; however, the stipulation did not regulate maximum number of concurrent positions that a member of the Board of Commissioners can hold. Shareholders/GMS to determine maximum number of concurrent positions that a member of the Board of Commissioners can hold.</p>	
B.06	<p>Pemegang Saham/RUPS belum memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2019-2023. Pemegang Saham/RUPS agar memberikan pengesahan RJP.</p> <p>Shareholders/GMS had not ratified 2019-2023 Long Term Plan (RJP). Shareholders/GMS to ratify RJP.</p>	
B.07	<p>Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS, namun belum diberikan secara tepat waktu. Pemegang Saham/RUPS agar lebih tepat waktu dalam memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi perusahaan yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.</p> <p>Shareholders/GMS gave approval/decision on proposed corporate actions that required GMS's approved/decision; however, have not in a timely manner Shareholders/GMS to be more timely in providing approval/decision on proposed corporate actions that required GMS's approved/decision.</p>	



Tujuan Penerapan GCG  
Objectives of GCG Implementation

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
B.08	<p>Pemegang Saham/RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegal, namun belum secara individu. Penilaian kinerja Dewan Komisaris masih mengacu pada KPI gabungan dengan Direksi karena Dewan Komisaris belum memiliki KPI tersendiri.</p> <p>a. Pemegang Saham agar menyusun sistem/pedoman penilaian kinerja individu Direksi yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan, menetapkan target kinerja, dan melakukan penilaian kinerja individu Direksi.</p> <p>b. Dewan Komisaris agar membuat KPI tersendiri yang terpisah dari KPI Direksi dan selanjutnya Pemegang Saham agar melakukan penilaian atas capaian KPI Dewan Komisaris.</p> <p>Shareholders/GMS assessed performance of the Board of Directors collegiality, but not individually. Performance evaluation of the Board of Commissioners referred to joint KPI with the Board of Directors because the Board of Commissioners did not have its own KPI.</p> <p>a. Shareholders to formulate system/guidelines for individual performance assessment of the Board of Directors which includes at least key performance indicators and success criteria, to set performance targets and to conduct individual performance assessment of the Board of Directors.</p> <p>b. The Board of Commissioners to create its own KPI that is separate from KPI of the Board of Directors and, subsequently, Shareholders to evaluate KPI achievement of the Board of Commissioners.</p>	
B.09	<p>Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan, namun belum menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal. Pemegang Saham/RUPS agar menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal.</p> <p>Shareholders/GMS appointed external auditor to audit the Company's financial statements; however, did not establish guidelines for appointment of external auditor. Shareholders/GMS to establish guidelines for appointment of external auditor.</p>	
B.10	<p>Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris, namun belum memiliki pedoman penyusunan laporan tugas Dewan Komisaris. Pemegang Saham/RUPS agar membuat pedoman penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>Shareholders/GMS approved annual report including ratification of financial statements as well as supervisory report of the Board of Commissioners; however, did not have guidelines for preparation of supervisory report of the Board of Commissioners. Shareholders/GMS to prepare guidelines for preparation of supervisory report of the Board of Commissioners.</p>	
B.11	<p>Pemegang Saham belum sepenuhnya memberikan arahan/pembinaan penerapan GCG kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang saham agar lebih meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari penilaian GCG.</p> <p>Shareholders did not provide thorough direction/guidance on GCG implementation to the Board of Directors and the Board of Commissioners. Shareholders should further increase their efforts in following up on areas of improvement identified in GCG assessment.</p>	



## Tujuan Penerapan GCG

### Objectives of GCG Implementation

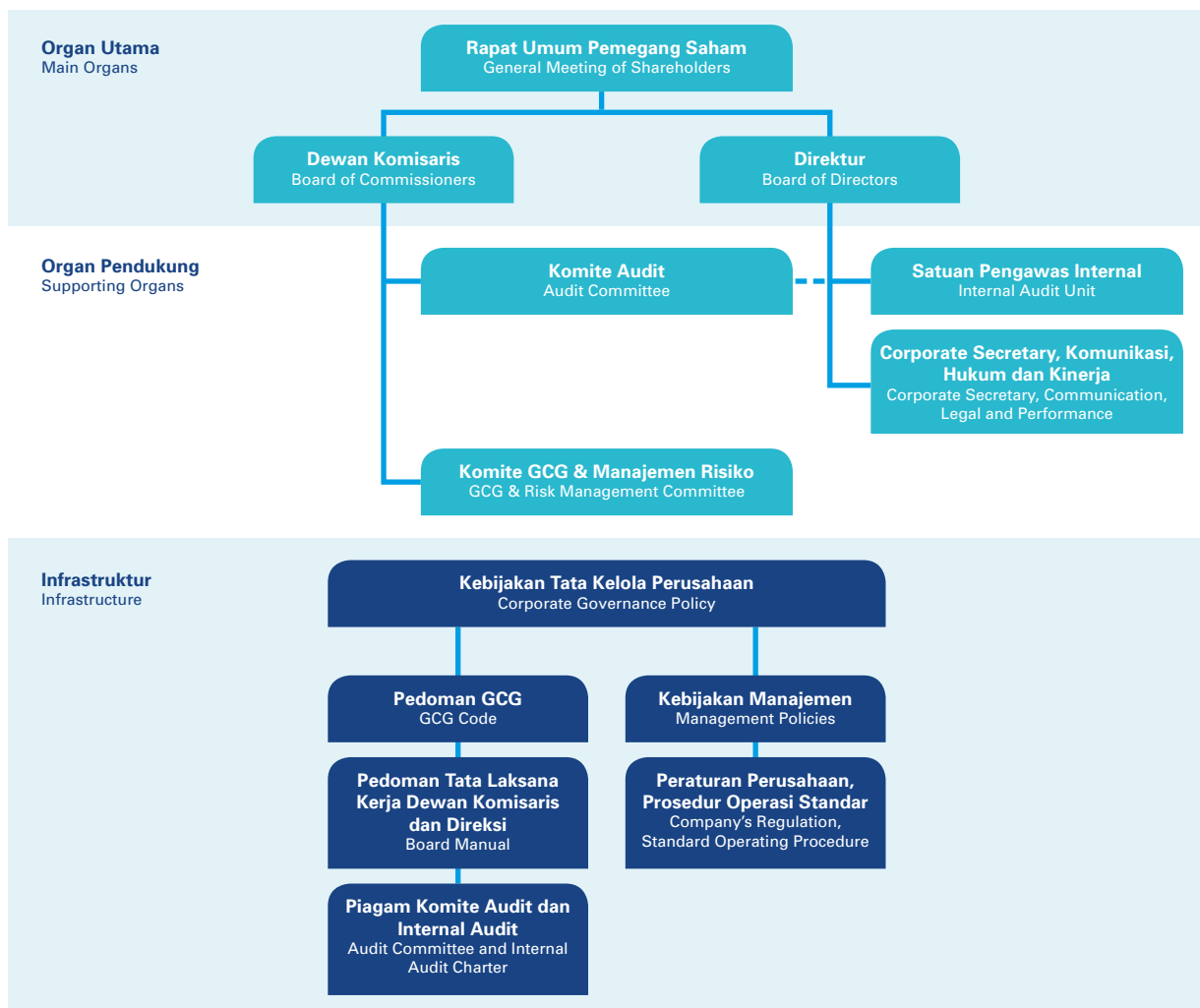
No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
B.12	<p>Pemegang Saham telah merespons informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan, namun belum memiliki mekanisme secara detail terkait pelaporan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala penurunan kinerja dan belum memiliki definisi yang jelas mengenai gejala penurunan kinerja Perusahaan. Pemegang Saham agar membuat mekanisme secara detail terkait pelaporan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala penurunan kinerja dan membuat definisi yang jelas mengenai gejala penurunan kinerja PT Haleyora Power.</p> <p>Shareholders responded to information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners regarding indications of significant decline in performance and losses of the Company; however, did not have detailed mechanism related to reporting from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to Shareholders in the event of a decline in performance and did not define indications of a decline in the Company's performance. Shareholders to establish detailed mechanism related to reporting from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to Shareholders in the event of indications of decline in performance and to make clear definitions regarding indications of decline in performance of PT Haleyora Power.</p>	
	<p><b>C. Aspek Dewan Komisaris</b> Aspects of the Board of Commissioners</p>	
	<p>Tidak ada rekomendasi perbaikan untuk aspek Dewan Komisaris. There are no recommendations for improvement for the Board of Commissioners aspect.</p>	
	<p><b>D. Aspek Direksi</b> Aspects of the Board of Directors</p>	
	<p>Tidak ada rekomendasi perbaikan untuk aspek Direksi. There are no recommendations for improvement for the Board of Directors aspect.</p>	
	<p><b>E. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi</b> Aspects of Information Disclosure and Transparency</p>	
	<p>Tidak ada rekomendasi perbaikan untuk aspek pengungkapan informasi. There are no recommendations for improvement for Information Disclosure aspect.</p>	

## STRUKTUR TATA KELOLA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), secara garis besar struktur tata kelola di Perusahaan terdiri dari organ utama yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki fungsi, peran dan tanggung jawab dalam penerapan GCG di Perusahaan.

## GOVERNANCE STRUCTURE

In accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”), in general the governance structure of Company consists of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners. Each of these organs has functions, roles and responsibilities in implementing GCG within the Company.



## Struktur Tata Kelola Governance Structure

### Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut di antaranya adalah mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur, meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perusahaan, merubah permodalan, mengubah Anggaran Dasar, merencanakan penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan, serta pembentukan anak perusahaan.

Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang bersifat rutin diselenggarakan tiap tahun, yang terdiri dari RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan, serta RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak dan signifikan.

Pelaksanaan RUPS dapat diusulkan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

Selain RUPS yang diselenggarakan secara fisik, sesuai pasal 91 UUPT, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS ("Keputusan RUPS Sirkuler") yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan RUPS secara fisik. Keputusan RUPS Sirkuler berkekuatan hukum setara keputusan RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan tersebut.

### General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is a corporate organ that has the authorities not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the scope specified in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. These authorities include appointment and dismissal of Directors and Commissioners, assignment of management duties and authorities among Directors, holding the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable for the management of the Company, change in equity, amending the Articles of Association, planning the use of income, mergers, consolidations, acquisitions and dissolution of the Company, as well as the establishment of subsidiaries.

According to the Law of Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, the GMS consists of:

1. Annual GMS, held on an annual basis, consisting of Annual GMS on Annual Report Approval and Financial Statements Ratification, and Annual GMS on Corporate Work Plan and Budget Ratification.
2. Extraordinary GMS (EGMS), held on an ad hoc basis, if deemed necessary, for certain matters that require approval as well as urgent and significant decisions.

A GMS can be proposed by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholder. The Board of Directors must hold GMS upon written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

In addition to physical GMS, in accordance with article 91 of the Company Law, Shareholders may make decisions outside GMS ("Circular Decisions of Shareholders") which has the same legally binding force as the physical GMS. The Circular Decisions of Shareholders are legally equivalent to GMS decisions on condition that all shareholders with voting rights agree in writing by signing the decisions.

## Pemegang Saham

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Kepemilikan saham di Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

## Shareholder

The Shareholder is not involved in the Company's operational activities, which are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions in the Articles of Association and the applicable laws and regulations. Shareholding structure in the Company as of December 31, 2019 is as follows:

No.	Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham (lembar)* Total Share (Share)*	Persentase Percentage
1	PT PLN (Persero)	99,999	99.99%
2	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK-PLN)	1	0.001%

\* Satu lembar saham senilai Rp1.000.000  
One share worth Rp1,000,000

## Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham sebagai pemilik Perusahaan memiliki kepentingan terhadap peningkatan keuntungan Perusahaan, peningkatan nilai Perusahaan dan bagaimana Perusahaan dikelola.

Pemegang Saham melalui RUPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan dan mengesahkan RKAP serta memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

## Informasi Mengenai Penyelenggaraan RUPS Tahun 2019

Pada tahun 2019 Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan di Kantor Pusat PLN dihadiri oleh Pemegang Saham, serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2019, dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan dan pengesahan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2019.

## Rights and Responsibilities of the Shareholders

The Shareholder, as capital owner, has the rights and responsibilities in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. The Shareholder, as owner of the Company, has an interest in increasing the Company's income, growing the value of the Company and how the Company is managed.

The Shareholder, through General Meeting of Shareholders, has the responsibilities for approving and ratifying the Corporate Work Plan and approving the Annual Report and ratifying Financial Statements, Performance Reports and Supervisory Report of the Board of Commissioners.

## Information Regarding 2019 GMS

In 2019, the Company held 2 (two) Annual GMS and did not hold Extraordinary GMS. Annual GMS was held at PLN Head Office attended by Shareholders and all members of the Company's Board of Directors and Commissioners.

The Annual GMS regarding Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) was held on January 10, 2019 and Annual GMS on Approval for 2018 Annual Calculation Report was held on July 13, 2019.

## Struktur Tata Kelola

### Governance Structure

#### Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS RKAP dan RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT)

#### Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in GMS on Annual Corporate Work Plan and Budget and GMS on Accountability for Annual Report

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence	
			RUPS RKAP 2019 (10 Januari 2019) EGM of CWPB* (January 10, 2019)	RUPS LPT 2018 (13 Juli 2019) EGM of Company's Annual Report 2018 (July 13, 2019)
1	Fahmi El Amruzi	Komisaris Utama President Commissioner	√	√
2	Karyawan Aji	Plt. Komisaris Act. Commissioner	√**	√**
3	Purnama T. Sianturi	Plt. Komisaris Act. Commissioner	√	√**
4	Achmad Taufik Haji	Direktur Utama President Director	√	√
5	Sutrisno Samad	Direktur Keuangan Director of Finance	√	√
6	Sinung Triwulandari	Direktur Operasi Director of Operation	√	√

Keterangan/Notes:

√ Hadir/Presence

\* Company's Work Plan and Budget

\*\* Dikuasakan kepada Komisaris lain/Delegated to other Commissioner

## DEWAN KOMISARIS

### Komposisi Anggota dan Dasar Hukum Pengangkatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

## BOARD OF COMMISSIONERS

### Composition and Legal Basis of Appointment

Prior to September 1, 2019, composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan	Appointment Basis
Fahmi El Amruzi D.	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan atau Pergantian Anggota Dewan Komisaris tanggal 18 September 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment or Substitution of the Board of Commissioners' Member dated September 18, 2017
Karyawan Aji	Plt. Komisaris Act. Commissioner	RUPS Sirkuler Pemberhentian Okto Rinaldi dan Pengangkatan Karyawan Aji dan Purnama T. Sianturi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris tanggal 1 September 2018	Circular GMS on Dismissal of Okto Rinaldi and Appointment of Karyawan Aji and Purnama T. Sianturi as Acting Commissioner dated September 1, 2018
Purnama T. Sianturi	Plt. Komisaris Act. Commissioner		

## Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi telah mengelola Perusahaan dengan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP), serta bertindak dengan itikad baik untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijabarkan di dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Secara umum, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris mencakup: (1) Fungsi pengawasan; (2) Pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS; (3) Sistem pengendalian internal; (4) Keterbukaan dan kerahasiaan informasi; serta (5) Etika berusaha dan anti korupsi.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat di dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertindak secara kolektif berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri. Pembagian tugas Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas	Duties
Fahmi El Amruzi D.	Komisaris Utama President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memimpin Rapat Dewan Komisaris</li> <li>Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris</li> <li>Ketua Komite Audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chairing the BOC meetings</li> <li>Coordinating duties of the BOC members</li> <li>Chairman of Audit Committee</li> </ul>
Karyawan Aji	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Ketua Komite GCG & Manajemen Risiko	Chairman of GCG & Risk Management Committee
Purnama T. Sianturi	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Anggota Komite Audit	Audit Committee Member

## Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is a corporate organ that functions and is responsible for carrying out supervisory duties and providing advices to the Board of Directors. The Board of Commissioners must ensure that the Board of Directors manages the Company in compliance with the provisions of the Company's Articles of Association, GMS resolutions, the laws and regulations; implements the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP); and acts in good faith to maximize the Company's value for shareholders and stakeholders.

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners are set out in Board Manual ratified by the Board of Commissioners and the Board of Directors. In general, duties and obligations of the Board of Commissioners include: (1) Supervisory function; (2) Performing tasks related to GMS; (3) Internal control system; (4) Information disclosure and confidentiality; and (5) Business ethics and anti-corruption.

The Board of Commissioners' supervisory duties are carried out by reviewing, discussing and providing advices on the Company's internal control, including all systems and processes within the Company that are designed to provide adequate confidence in achievement of the Company's goals, specifically in improving operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting and compliance with the applicable laws and regulations.

## Allocation of Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners must act collectively based on decision of the Board of Commissioners. Allocation of duties among members of the Board of Commissioners is self-governing. Allocation of duties of the Company's Board of Commissioners is as follows:



**Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners

**Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2019. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dikaitkan dengan hubungannya terhadap Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sendiri. Rincian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Terkait RUPS**

1. Memberikan pendapat dan tanggapan atas Rencana Jangka Panjang (RJP) 2019-2023 melalui Surat Dewan Komisaris No. 052/052/SK/HP/2019.
2. Memberikan pendapat dan tanggapan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 melalui Surat Dewan Komisaris No. 002/052/DK/HP/2019.
3. Mengusulkan tantiem 2018 dan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Remunerasi 2019 Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus karyawan 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 040/052/DK/HP/2019.
4. Mengusulkan calon auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan termasuk alasan pengusulan dan proses pencalonannya serta usulan penetapan besaran jasa audit melalui Surat Dewan Komisaris No. 039/052/DK/HP/2019.
5. Memberikan tanggapan atas kinerja Direksi selama tahun buku/KPI Direktorat 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 050/052/DK/HP/2019.
6. Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan dan memberikan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan di dalam Laporan Manajemen (LM) 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 048/052/DK/HP/2019.
7. Memberikan tanggapan tertulis tentang perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Dewan Komisaris No. 072/052/DK/HP/2019.
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan tanggapan atas LM Audited 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 048/052/DK/HP/2019.
9. Memberikan saran perbaikan kinerja dalam tanggapan LM Audited 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 048/052/DK/HP/2019.
10. Memberikan tanggapan atas laporan hasil audit dalam LM Audited 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 048/052/DK/HP/2019.

**Supervisory Report of the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners performed supervisory duties in accordance with 2019 Supervisory Work Plan. Duties of the Board of Commissioners were related to its relationship with Shareholders (GMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners itself. Details of implementation of duties of the Board of Commissioners during 2019 are as follows:

**A. Implementation of Duties and Obligations related to GMS**

1. Provided insights and responses to 2019-2023 Long Term Plan (RJP) through the Board of Commissioners Letter No. 052/052/SK/HP/2019.
2. Provided insights and responses to 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) through the Board of Commissioners Letter No. 002/052/DK/HP/2019.
3. Proposed tantiem for financial year 2018 and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and Remuneration for financial year 2019 for the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as employee bonus for financial year 2018 through the Board of Commissioners Letter No. 040/052/DK/HP/2019.
4. Proposed external auditor to audit financial statements including rationale of the proposed external auditor and the selection process, as well as the proposed audit fee through the Board of Commissioners Letter No. 039/052/DK/HP/2019.
5. Provided responses to performance of the Board of Directors in 2018 based on Directorate KPI through the Board of Commissioners Letter No. 050/052/DK/HP/2019.
6. Monitored the Company's activities and provided insights on issues deemed important for the management of the Company in 2018 Management Report (LM) through the Board of Commissioners Letter No. 048/052/DK/HP/2019.
7. Provided written responses to amendment to the Articles of Association through the Board of Commissioners Letter No. 072/052/DK/HP/2019.
8. Provided explanation, insights and responses to 2018 Audited LM through the Board of Commissioners Letter No. 048/052/DK/HP/2019.
9. Provided recommendations for performance improvements in response to 2018 Audited LM through the Board of Commissioners Letter No. 048/052/DK/HP/2019.
10. Provided responses to audit report in 2018 Audited LM through the Board of Commissioners Letter No. 048/052/DK/HP/2019.



11. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2020 melalui Surat Dewan Komisaris No. 061/052/DK/HP/2019.
12. Menyampaikan Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan I, II, dan III Tahun 2019 melalui Surat Dewan Komisaris No. 037/052/DK/HP/2019, No. 061/052/DK/HP/2019 dan No. 081/052/DK/HP/2019.
13. Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 dan Realisasi KPI 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 014/052/DK/HP/2019.

#### **B. Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Terkait Direksi**

1. Memberikan nasihat kepada Direksi terkait kepengurusan Perusahaan yang disampaikan dalam setiap rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan yang disiapkan Direksi. RJP 2019-2023 telah dibahas dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi tanggal 28 Mei 2019 dan tanggapan tertulis Dewan Komisaris disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris No. 051/052/DK/HP/2019.
3. Meneliti, menelaah dan memberikan tanggapan atas LM Triwulan I, II dan III Tahun 2019 melalui Surat Dewan Komisaris No. 035/052/DK/HP/2019, No. 069/052/DK/HP/2019 dan No. 087/052/DK/HP/2019, dan tanggapan atas LM Tahunan 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 047/052/DK/HP/2019.
4. Memberikan persetujuan tertulis mengenai pembentukan organisasi region yang diusulkan Direksi di dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 30 Desember 2019 melalui Surat Dewan Komisaris No. 098/052/DK/HP/2019.
5. Memberikan tanggapan tertulis atas perubahan Anggaran Dasar yang dibahas di dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi tanggal 20 September 2019 melalui Surat Dewan Komisaris No. 075/052/DK/HP/2019.
6. Memberikan arahan atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan dalam tanggapan atas:
  - LM Audited 2018 melalui Surat Dewan Komisaris No. 047/052/DK/HP/2019,
  - LM Triwulanan Tahun 2019 melalui Surat Dewan Komisaris No. 035/052/DK/HP/2019, No. 069/052/DK/HP/2019 dan No. 087/052/DH/HP/2019,

11. Submitted 2020 Work and Budget Plan (RKA) and KPI of the Board of Commissioners through the Board of Commissioners Letter No. 061/052/DK/HP/2019.
12. Submitted KPI Realization Report of the Board of Commissioners for Quarter I, II, and III of 2019 through the Board of Commissioners Letters No. 037/052/DK/HP/2019, No. 061/052/DK/HP/2019 and No. 081/052/DK/HP/2019.
13. Submitted 2018 the Board of Commissioners' Supervisory Report and 2018 KPI Realization through the Board of Commissioners Letter No. 014/052/DK/HP/2019.

#### **B. Implementation of Duties and Obligations related to the Board of Directors**

1. Provided advices to the Board of Directors regarding the management of the Company which were conveyed in every joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors.
2. Examined, reviewed and signed the Company's RJP prepared by the Board of Directors. 2019-2023 RJP was discussed in a joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors on May 28, 2019 and a written response from the Board of Commissioners was submitted through the Board of Commissioners Letter No. 051/052/DK/HP/2019.
3. Examined, reviewed and provided responses to LM for Quarter I, II and III of 2019 through the Board of Commissioners Letters No. 035/052/DK/HP/2019, No. 069/052/DK/HP/2019 and No. 087/052/DK/HP/2019, and response to 2018 Annual LM through the Board of Commissioners Letter No. 047/052/DK/HP/2019.
4. Provided written approval regarding formation of regional organization proposed by the Board of Directors in a joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors on December 30, 2019 through the Board of Commissioners Letter No. 098/052/DK/HP/2019.
5. Provided written response to amendments to the Articles of Association discussed in a joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors on September 20, 2019 through the Board of Commissioners Letter No. 075/052/DK/HP/2019.
6. Provided guidance for implementation of the Company's plans and policies in response to:
  - 2018 Audited LM through the Board of Commissioners Letter No. 047/052/DK/HP/2019,
  - Quarterly LM in 2019 through the Board of Commissioners Letters No. 035/052/DK/HP/2019, No. 069/052/DK/HP/2019 and No. 087/052/DH/HP/2019,

## Dewan Komisaris Board of Commissioners

- Pembahasan LM Triwulan I, II dan III Tahun 2019 dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019, 30 Agustus 2019, dan 31 Oktober 2019.
- 7. Melakukan pengawasan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta kepatuhan dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP 2019 dan RJP 2019-2023.
- 8. Membahas tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal, serta mengevaluasi efektivitas audit internal dan eksternal dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi.
- 9. Membahas hasil penilaian GCG tahun 2018 dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi tanggal 28 Mei 2019.
- 10. Mengevaluasi tindak lanjut keputusan RUPS dan membahas tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan LPT dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi tanggal 30 Desember 2019.
- 11. Mengevaluasi tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris-Direksi sebelumnya dalam rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi.
- 12. Melakukan kunjungan kerja untuk memperoleh informasi dari fakta di lapangan dan menyampaikan rekomendasi hasil kunjungan kerja kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris No. 099/052/DK/HP/2019.

### C. Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Terkait Dewan Komisaris

1. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2019 dan menyampaikan kepada RUPS melalui Surat Dewan Komisaris No. 178/052/DK/HP/2018, serta RKA dan KPI Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada RUPS melalui Surat Dewan Komisaris No. 062/052/DK/HP/2019.
2. Mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 kali yang terdiri dari 4 rapat internal dan 10 rapat bersama Direksi.
3. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 risalah dan telah disampaikan kepada Corporate Secretary untuk didokumentasikan.
4. Melaksanakan penilaian GCG aspek Dewan Komisaris dan menindaklanjuti *area of improvement* hasil penilaian GCG tahun 2018.

- Discussions on LM for Quarter I, II and III of 2019 in the Board of Commissioners meetings on April 30, 2019, August 30, 2019 and October 31, 2019.
- 7. Supervised implementation of the Company's plans and policies regarding compliance with the laws, regulations and agreements with third parties, as well as compliance in running the Company according to 2019 RKAP and 2019-2023 RJP.
- 8. Discussed follow-up actions on internal and external audit findings, as well as evaluated effectiveness of internal and external audits in joint meetings with the Board of Commissioners-Board of Directors.
- 9. Discussed results of 2018 GCG assessment in a joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors on May 28, 2019.
- 10. Evaluated follow-up on GMS decisions and discussed the Board of Commissioners' response to RKAP and LPT in a joint meeting of the Board of Commissioners-the Board of Directors on December 30, 2019.
- 11. Evaluated follow-up on decisions of the previous the Board of Commissioners-the Board of Directors meetings in joint meetings with the Board of Commissioners-the Board of Directors.
- 12. Conducted work visits to obtain factual information and conveyed recommendations based on work visit results to the Board of Directors through the Board of Commissioners Letter No. 099/052/DK/HP/2019.

### C. Implementation of Duties and Obligations related to the Board of Commissioners

1. Prepared 2019 Work and Budget Plan (RKA) and KPI of the Board of Commissioners and submitted them to GMS through the Board of Commissioners Letter No. 178/052/DK/HP/2018, as well as 2020 RKA and KPI which were submitted to GMS through the Board of Commissioners Letter No. 062/052/DK/HP/2019.
2. Held 14 meetings of the Board of Commissioners consisting of 4 internal meetings and 10 joint meetings with the Board of Directors.
3. Prepared 14 minutes of meetings of the Board of Commissioners and submitted them to Corporate Secretary for documentation.
4. Performed GCG assessment on the aspects of the Board of Commissioners and followed up on areas of improvement for 2018 GCG assessment results.



## Dewan Komisaris Board of Commissioners

5. Membuat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun buku lampau dan melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui realisasi pencapaian KPI Dewan Komisaris. Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi KPI tahun 2018 telah disampaikan ke RUPS melalui Surat Dewan Komisaris No. 014/052/DK/HP/2019.
6. Memantau dan memastikan penerapan GCG di Perusahaan telah dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan.
7. Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat uraian mengenai Dewan Komisaris yang memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama dan rangkap jabatan di perusahaan lain, rapat, serta honorarium, fasilitas dan tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.

### D. Kunjungan Kerja

Dalam rangka mendapatkan informasi mengenai implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan serta kendala-kendala yang dihadapi, Dewan Komisaris didampingi oleh Komite Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke unit-unit Perusahaan. Hasil kunjungan kerja disampaikan ke Direksi, berisi hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan 4 kali kunjungan kerja ke region berikut:

1. Region 1 Jawa Barat di Bandung tanggal 7 Februari 2019.
2. Region 6 Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2019.
3. Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tanggal 9 Desember 2019.
4. Region 5 DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2019.

### Program Induksi bagi Komisaris Baru

Pada tahun 2019 tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru sehingga tidak ada program induksi bagi Komisaris baru.

### Program Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

5. Prepared the Board of Commissioners' Supervisory Report for the previous financial year and assessed performance of the Board of Commissioners based on realization of KPI achievement of the Board of Commissioners. 2018 Supervisory Report and KPI Realization were submitted to GMS through the Board of Commissioners Letter No. 014/052/DK/HP/2019.
6. Monitored and ensured that GCG is implemented in the Company effectively and sustainably.
7. Ensured that the Company's Annual Report contained a description of the Board of Commissioners which elaborated information regarding identity, main occupation and concurrent positions in other companies, meetings, as well as honorarium, facilities and other benefits received from the Company.

### D. Work Visits

In order to obtain information regarding implementation of the Company's plans and policies as well as the existing obstacles, the Board of Commissioners, accompanied by the Board of Commissioners' Committees, conducted work visits to the Company's units. Work visit results were conveyed to the Board of Directors, containing matters that needed to be considered and followed up by the Board of Directors. Throughout 2019, the Board of Commissioners conducted 4 work visits to the following regions:

1. Region 1 West Java in Bandung on February 7, 2019.
2. Region 6 Riau and Riau Islands in Pekanbaru on March 11, 2019.
3. Region 2 Central Java and DI Yogyakarta on December 9, 2019.
4. Region 5 DKI Jakarta on December 18, 2019.

### Induction Program for New Commissioners

In 2019 there was no appointment of new members of the Board of Commissioners so there was no induction program for new Commissioners.

### Competency Development Program

In 2019, Board of Commissioners participated in the following competency development programs:

## Dewan Komisaris Board of Commissioners

Nama Name	Tanggal Date	Program Pengembangan Development Program	Tempat Venue
Fahmi El Amruzi D. Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	7 Februari/February	Kunjungan Kerja ke Region 1 Jawa Barat Working Visit to Region 1 West Java	Bandung
	11 Maret/March	Kunjungan Kerja ke Region 6 Riau dan Kepulauan Riau Working Visit to Region 6 Riau and Riau Islands	Pekanbaru
	11 Maret/March	<i>Benchmarking</i> ke PT Chevron Pacific Indonesia Benchmarking to PT Chevron Pacific Indonesia	Duri, Riau
	11 Juli/July	Seminar Kasus Hukum & Pencegahan Pidanaan Pengurus Korporasi Seminar on Legal Cases & Criminal Claim Prevention for Corporate Managers	PT Pertamina (Persero), Jakarta
	30 Agustus/August	<i>Knowledge Sharing</i> PT Cogindo Knowledge Sharing with PT Cogindo	Jakarta
	3–4 Oktober/October	Seminar <i>Digital Leadership</i> Digital Leadership Seminar	PTC Jakarta
	28–30 Oktober/October	Seminar <i>Quality Risk Governance</i> Profesional Seminar on Professional Quality Risk Governance	PLN Pusdiklat, Jakarta
	9 Desember/December	Kunjungan Kerja ke Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Working Visit to Region 2 Central Java and DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
	18 Desember/December	Kunjungan Kerja ke Region 5 DKI Jakarta Working Visit to Region 5 DKI Jakarta	Jakarta

### Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yaitu Komite Audit dan Komite GCG & Manajemen Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas aspek-aspek operasional dan strategis Perusahaan.

#### Kinerja Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit antara lain telah menelaah dokumen RKAP 2020, RJP 2019-2023, LM dan pencapaian KPI Manajemen triwulanan dan tahunan 2019 serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Audit menelaah rencana kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan

### Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners and Basis of Assessment

The Board of Commissioners has Audit Committee and GCG & Risk Management Committee to assist in carrying out supervisory duties and functions of the Board of Commissioners on the Company's operational and strategic aspects.

#### Audit Committee Performance

Throughout 2019, Audit Committee reviewed 2020 RKAP, 2019-2023 RJP, as well as 2019 Management Reports and quarterly and annual KPI achievements of Management and other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Audit Committee reviewed the Board of Directors' policy plans requiring the approval of the Board of Commissioners and submits the review result to the Board of Commissioners as input for the Board of Commissioners in preparing

**Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners

arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar kajian Komite Audit, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Berkenaan dengan pengendalian internal, Komite Audit telah menyelesaikan tugasnya untuk mengawasi tindak lanjut temuan hasil audit internal (Satuan Pengawas Internal/SPI) dan eksternal (kantor Akuntan Publik) yang hasilnya telah didiskusikan dengan SPI dan KAP dan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris.

**Dasar Penilaian Kinerja Komite Audit**

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit pada tahun 2019 sangat memuaskan berdasarkan capaian KPI Komite Audit sebagai berikut:

guidelines, recommendations, advices and responses of the Board of Commissioners to the Board of Directors, both in writing and in joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Based on Audit Committee's review, the Board of Commissioners has also submitted reports/responses of the Board of Commissioners to GMS.

Regarding internal control, Audit Committee has completed its duties to oversee the follow-up to the audit findings of internal (SPI) and external (Public Accounting Firm/KAP) auditors, whose results have been discussed with SPI and KAP and presented at the Board of Commissioners meeting.

**Basis for Performance Assessment of Audit Committee**

The Board of Commissioners considers Audit Committee's performance in 2019 to be very good based on KPI achievements of Audit Committee as follows:

No.	Program Kerja Work Program	Sasaran Target		Realisasi Realization	
		Parameter	Bobot Weight	Parameter	Bobot Weight
1	Rapat Komite termasuk rapat dengan Dewan Komisaris Committee meetings include with the Board of Commissioners (BOC)	14 kali/times	20	21 kali/times	20
2	Risalah rapat Komite Minutes of Committee meeting	100%	15	100%	15
3	Kajian atas usulan yang disampaikan Direksi Review of proposals submitted by the Board of Directors	100%	10	100%	10
4	Peningkatan kompetensi anggota Komite Competence development of Committee member	1 kali/times	10	1 kali/times	10
5	Kunjungan kerja Komite Committee working visit	1 kali/times	5	1 kali/times	5
6	Laporan hasil kunjungan kerja Komite Committee working visit report	100%	5	100%	5
7	Rencana kerja dan KPI Komite Committee work plan and KPI	1 paper	20	1 paper	20
8	Laporan realisasi kegiatan dan KPI Komite Report of realization on Committee activities and KPI	1 paper	15	1 paper	15
<b>Total</b>			<b>100</b>		<b>100</b>



## Dewan Komisaris Board of Commissioners

### Kinerja Komite GCG & Manajemen Risiko

Komite GCG & Manajemen Risiko (Komite GCG & MR) telah membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi, menguji, dan mengevaluasi strategi, sistem dan kebijakan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, pengembangan *human capital*, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite GCG & MR telah menelaah dokumen RKAP 2020, RJPP 2019-2023, LM dan pencapaian KPI Manajemen Triwulanan dan Tahunan 2019, Laporan Manajemen Risiko (LMR) Triwulanan dan Tahunan 2019, isu-isu strategis HP Group, profil risiko Perusahaan dan RKAP berbasis risiko 2019 serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugas Komite GCG & MR. Komite telah menyampaikan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bagi Dewan Komisaris dalam penyusunan arahan, rekomendasi, nasihat dan tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi baik secara tertulis maupun yang disampaikan di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Atas dasar kajian Komite GCG & MR, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Komite GCG & MR telah menyelesaikan kajian atas besaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018 dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2019. Usulan dan rekomendasi terkait tantiem dan remunerasi tersebut telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

### Dasar Penilaian Kinerja Komite GCG & MR

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite GCG & MR pada tahun 2019 sangat memuaskan berdasarkan capaian KPI Komite GCG & MR sebagai berikut:

### GCG & Risk Management Committee Performance

GCG & Risk Management (GCG & MR) Committee assists the Board of Commissioners in supervising, testing and evaluating the Company's strategies, systems and policies in the areas of risk management, GCG, nomination and remuneration, human capital development and other tasks assigned by the Board of Commissioners.

GCG & MR Committee reviewed RKAP 2020, RJPP 2019-2023, LM and 2019 Quarterly and Annual KPI achievements, 2019 Quarterly and Annual Risk Management Reports (LMR), strategic issues of HP Group, the Company's risk profile and risk-based RKAP 2019 and other duties in accordance with the scope of duties of GCG & MR Committee. The Committee has submitted the results of its review to the Board of Commissioners as input for the Board of Commissioners in preparing the guidelines, recommendations, advices and responses of the Board of Commissioners to the Board of Directors, both in writing and in joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Based on GCG & MR Committee review, the Board of Commissioners has also submitted reports/responses of the Board of Commissioners to GMS.

In carrying out nomination and remuneration functions, CG & MR Committee has completed review on the amount of tantiem for the Board of Commissioners and the Board of Directors for financial year 2018 and remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors for financial year 2019. Proposals and recommendations related to tantiem and remuneration were submitted by the Board of Commissioners for GMS approval.

### Basis for Performance Assessment of GCG & Risk Management Committee

The Board of Commissioners considers GCG & MR Committee's performance in 2019 to be very good based on KPI achievements of GCG & MR Committee as follows:



No.	Program Kerja Work Program	Sasaran Target		Realisasi Realization	
		Parameter	Bobot Weight	Parameter	Bobot Weight
1	Penyusunan rencana kerja Komite Preparing Committee working plan	1 berkas/bundle	20	1 berkas/bundle	20
2	Rapat Komite termasuk rapat dengan Dewan Komisaris Committee meetings include with the BOC	14 kali/times	20	26 kali/times	20
3	Risalah rapat Komite Minutes of Commitee meeting	100%	10	100%	10
4	Kajian atas Laporan Manajemen Risiko Review of Risk Management Report	3 kali/times	10	4 kali/times	10
5	Kajian atas usulan yang disampaikan Direksi Review of proposals submitted by the Board of Directors	100%	10	100%	10
6	Peningkatan kompetensi anggota Komite Competence development of Committee member	1 kali/times	10	1 kali/times	10
7	Kunjungan kerja Komite Committee working visit	1 kali/times	10	1 kali/times	10
8	Laporan kegiatan Komite triwulanan dan tahunan Committee activity report quarterly and annually	2 kali/times	10	1 kali/times	10
<b>Total</b>			<b>100</b>		<b>100</b>

### Komisaris Independen

Sampai akhir tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Berdasarkan Permen tersebut, penyebutan jabatan Komisaris Independen harus disebutkan dalam keputusan pengangkatannya.

Namun demikian, sebagai pernyataan independensi, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### Independent Commissioner

Until the end of 2019, the Company did not have any Independent Commissioner with the criteria set out in Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE. Based on the Regulation, Independent Commissioner position must be stated in the decision of his/her appointment.

Nevertheless, as a statement of independence, all members of the Company's Board of Commissioners signed an Integrity Pact containing statement that they do not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or relationship with the Company that may influence their ability to act independently.

## Direksi

Board of Directors

## DIREKSI

### Komposisi Anggota Dan Dasar Hukum Pengangkatan

Sampai dengan 31 Desember 2019, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

## BOARD OF DIRECTORS

### Composition and Legal Basis of Appointment

As of December 31, 2019, composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan	Appointment Basis
Achmad Taufik Haji	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Mei 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated May 26, 2017
Sutrisno Samad	Direktur Keuangan Director of Finance		
Sinung Triwulandari	Direktur Operasi Director of Operations	RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 7 November 2017	Circular GMS on Dismissal and Appointment of Member of the Board of Directors dated November 7, 2017

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur di dalam *Board Manual*. Direksi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus bertindak dengan itikad baik guna memaksimalkan nilai Perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama memiliki kedudukan dan posisi setara. Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi berdasarkan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Board of Directors are regulated in Board Manual. The Board of Directors carries out its duties, responsibilities and authorities in the best interests of the Company based on the Company's Articles of Association, GMS resolutions and the applicable laws and regulations. The Board of Directors must act in good faith to maximize the value of the Company for the interests of shareholders and other stakeholders. Each member of the Board of Directors, including President Director, has equal position. President Director's duty is to coordinate activities of the Board of Directors according to scope of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors.

### Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Pembagian tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

### Allocation of Duties and Authorities of Members of the Board of Directors

The Board of Directors allocates duties and authorities among members of the Board of Directors to ensure implementation of duties and responsibilities as well as optimal use of its authorities. Allocation of duties and authorities of the Board of Directors is as follows:

#### 1. Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh anggota Direksi, dalam hal:

- Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan;
- Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh;

#### 1. President Director

President Director's duty is to coordinate activities and implementation of duties of all members of the Board of Directors, in terms of:

- Planning, developing and establishing general policies of the Company;
- Directing, developing and establishing comprehensive corporate management strategies;

- c. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan;
  - d. Menyiapkan RJP;
  - e. Menyampaikan RJP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
  - f. Menyiapkan RKAP yang merupakan pejabaran tahunan dari RJP;
  - g. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup untuk memperoleh pengesahan;
  - h. Menyiapkan kebijakan umum sistem pengendalian internal;
  - i. Melaksanakan kebijakan sistem pengendalian internal;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
- c. Controlling and evaluating all activities of the Company;
  - d. Preparing RJP;
  - e. Submitting RJP signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors to GMS for approval;
  - f. Preparing RKAP which is the annual translation of RJP;
  - g. Submitting Annual Report to GMS within 5 (five) months after financial year-end to obtain ratification;
  - h. Preparing general policies of internal control system;
  - i. Implementing general policies of internal control system;
  - j. Performing other duties as stipulated by GMS.

## 2. Direktur Keuangan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan antara lain adalah:

- a. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi perencanaan sumber dana keuangan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan di masa depan;
- b. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi penyusunan RKAP serta dokumen keuangan lainnya;
- c. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan biaya, serta pengelolaan dan pengamanan pendapatan dari arus kas;
- d. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi akuntansi dan audit internal di bidang keuangan;
- e. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
- f. Menetapkan dan memastikan implementasi, kebijakan dan strategi pengawasan kinerja usaha untuk tahun fiskal yang lalu dan berjalan, serta mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa depan;
- g. Menetapkan dan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sudah didukung oleh pengambilan keputusan yang sesuai;
- h. Memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pejabat di bawahnya.

## 2. Director of Finance

Duties and responsibilities of Director of Finance include:

- a. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for planning of financial resources according to the Company's future needs;
- b. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for preparation of RKAP, as well as other financial documents;
- c. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for budget management of revenues and expenses, as well as management and safeguarding of revenues from cash flows;
- d. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for accounting and internal audit in finance;
- e. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for financial management and reporting in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK);
- f. Establishing and ensuring implementation, policies and strategies for business performance monitoring for the past and current financial years and making efforts to improve performance in the future;
- g. Establishing and ensuring all financial-related activities supported by appropriate decision making;
- h. Providing guidelines, advising and supervising subordinate officers.

**Direksi**  
Board of Directors

**3. Direktur Operasi**

Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi antara lain adalah:

- a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai visi melalui perencanaan dan pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJP, termasuk di dalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang sistematika pendanaannya;
- b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengadaan;
- c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik, perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis, termasuk di dalamnya hasil studi kelayakan, disain *engineering*, serta Rencana Kerja dan Spesifikasi (RKS) untuk pelaksanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta pengembangan anak perusahaan dan usaha patungan;
- e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam manajemen risiko, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan ketenagalistrikan (K2), serta kepatuhan;
- f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko, melakukan pembinaan dan pengembangan anak perusahaan dan usaha patungan, serta pembinaan dan pengembangan region dan unit di bawah Direktorat Operasi;
- g. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi listrik serta mengelola pendapatan dan biaya operasi;
- h. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi sistem dan aplikasi teknologi informasi korporat.

**3. Director of Operations**

Duties and responsibilities of Director of Operations include:

- a. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in achieving the vision through planning and development of operations and maintenance services for power transmission and distribution and the Company's business development as outlined in RKAP and RJP, including planning the Company's financial projections and designing its funding systematics;
- b. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in planning, development and implementation of procurement;
- c. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in development of power technology, research and development of operations and maintenance services for power transmission and distribution, strategic procurement of goods and services, including results of feasibility studies, engineering designs and Work Plans and Specifications (RKS) for procurement;
- d. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in managing power transactions, business partnerships, developing business models of operations and maintenance services for power transmission and distribution, as well as developing subsidiaries and joint ventures;
- e. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in risk management, occupational health and safety (K3), power safety (K2) and compliance;
- f. Establishing and ensuring implementation of business development and risk management, providing guidance and development of subsidiaries and joint ventures, as well as fostering and developing regions and units under Directorate of Operations;
- g. Establishing and ensuring implementation of operation and maintenance services management for power transmission and distribution, as well as managing operating revenues and expenses;
- h. Establishing and ensuring implementation of corporate policies and strategies in management of information systems and technology, centralization and integration of corporate information technology systems and applications.



### Program Induksi bagi Direktur Baru

Pada tahun 2019, tidak ada pengangkatan Direktur baru sehingga tidak diadakan program induksi bagi Direktur baru.

### Induction Program for New Directors

In 2019, there was no induction program for new Directors.

### Program Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2019, Direksi telah mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

### Competency Development Program

In 2019, the Board of Directors participated in the following competency development program:

Nama Name	Tanggal Date	Program Pengembangan Development Program	Tempat Venue
Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	5–6 Maret/March	Workshop AMC AMC Workshop	ICE BSD
	25–26 Maret/March	Leadership and Innovation	Pertamina Learning Center
	24–25 Juni/June	X-Men 4 Expert	PLN Udiklat Jakarta
	11 Juli/July	Seminar Kasus Hukum & Pencegahan Pidana Pengurus Korporasi Seminar on Legal Cases & Criminal Claim Prevention for Corporate Managers	PT Pertamina (Persero), Jakarta
	22–23 Agustus/August	KPKU	PLN Udiklat Jakarta
	28–30 Oktober/October	Seminar <i>Quality Risk Governance</i> Profesional Seminar on Professional Quality Risk Governance	PLN Pusdiklat, Jakarta

### Penilaian atas Kinerja Komite Direksi dan Dasar Penilaiannya

Sampai akhir tahun 2019 Direksi tidak memiliki dan membentuk komite di bawah Direksi.

### Performance Assessment of Committees of the Board of Directors and Basis of Assessment

At end of 2019, the Board of Directors did not have and establish any committees of the Board of Directors.

## PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan memiliki Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual adalah perangkat yang menjadi acuan dasar pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Manual* disusun dengan mengacu kepada hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik terbaik GCG. *Board Manual* menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan efisien.

## BOARD MANUAL

The Company has a Board Manual that was signed jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Board Manual is a device that serves as a basic reference for implementation of duties, responsibilities and authorities, as well as management of work relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Board Manual was prepared by referring to company law, provisions of the Articles of Association, the applicable laws and regulations, directives of shareholders and GCG best practices. Board Manual describes the stages of activities in a structured, systematic, easily understood and implemented manner so that they can become guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties in a professional, transparent and efficient manner.



## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Hal-hal yang diatur di dalam *Board Manual* yang terkait Dewan Komisaris di antaranya adalah: (1) Persyaratan, Komposisi, keanggotaan, dan masa Jabatan Dewan Komisaris; (2) Program pengenalan dan peningkatan kapabilitas; serta (3) Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Dewan Komisaris.

Sedangkan pengaturan terkait Direksi antara lain adalah: (1) Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan Direksi; (2) Tanggung jawab Direksi; (3) Tugas dan kewajiban Direksi; (4) Wewenang Direksi; (5) Hak-hak Direksi; (6) Etika jabatan; (7) Penerapan kebijakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi; (8) Pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi; (9) Pembagian tugas Direksi; dan (10) Rapat Direksi.

Matters stipulated in Board Manual pertaining to the Board of Commissioners include: (1) Requirements, composition, membership, and office term of the Board of Commissioners; (2) Induction and capability enhancement programs; and (3) Duties, responsibilities and obligations of the Board of Commissioners.

While regulations related to the Board of Directors include: (1) Requirements, membership and office term of the Board of Directors; (2) Responsibilities of the Board of Directors; (3) Duties and obligations of the Board of Directors; (4) Authorities of the Board of Directors; (5) Rights of the Board of Directors; (6) Position ethics; (7) Implementation of the Company's management policies by the Board of Directors; (8) Delegation of authorities among members of the Board of Directors; (9) Allocation of duties of the Board of Directors; and (10) Meetings of the Board of Directors.

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif dan individu dievaluasi oleh Pemegang Saham di dalam RUPS. Di awal tahun, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi telah menandatangani Kontrak Manajemen dengan PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham untuk memenuhi *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disetujui oleh pemegang saham. Kontrak Kinerja Manajemen tahun 2019 disepakati dan disahkan pada RUPS Pengesahan RKAP pada tanggal 9 Januari 2019.

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

KPI Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN. Hasil pencapaian KPI Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS. Pencapaian KPI Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is collectively assessed by Shareholders in GMS. At the beginning of the year, the Board of Commissioners and the Board of Directors signed a Management Contract with PT PLN (Persero) as the Shareholder to meet Key Performance Indicators (KPI) that were approved by the shareholders. 2019 Management Performance Contract was agreed and ratified in GMS for RKAP Approval on January 9, 2019.

### The Board of Commissioners Performance Assessment

The Board of Commissioners' KPI is prepared by taking into account duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and regulations of the Ministry of SOE. KPI achievement results of the Board of Commissioners are submitted to GMS. The Board of Commissioners' 2019 KPI achievement results were as follows:

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Bobot Weight
<b>DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI</b> <b>The Board of Commissioners and the Board of Directors</b>				<b>45</b>		<b>45</b>
1	Rencana Perusahaan termasuk rencana dan kebijakan Perusahaan The Company's work plan includes the Company's plan and policy	Membahas dan memberikan pendapat sebelum menandatangani persetujuan atas RKAP dan rancangan/revisi RJPP Discuss and provide opinions before signing the approval of the Company's work plan and budget (RKAP) and draft/revision of the Company's long-term plan (RJP)	2 kali/ times	8	4 kali pembahasan, yaitu: – RJP 2019-2023 pada rapat Dewan Komisaris 28 Juli 2019 – RKAP 2020 pada rapat Dewan Komisaris 18 Juli 2019 – Review Visi dan Misi RJP pada rapat Dewan Komisaris 20 September 2019 – Pembahasan teknis RKAP 2020 pada rapat Dewan Komisaris 22 November 2019  4 times discussions: – Long Term Plan (RJP) 2019-2023 on BOC meeting dated July 28, 2019 – Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2020 on BOC meeting dated July 18, 2019 – Review on RJP Vision and Mission on BOC meeting dated September 20, 2019 – RKAP 2020 technical review on BOC meeting dated November 22, 2019	8
		Pemberian pendapat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diserahkan Direksi Provision of opinions within 14 working days after complete documents are submitted by the BOD	14 hari kerja/ workdays	2	2 surat tanggapan: – RKAP 2019 dan KPI Korporat, Surat No. 001.052. DK.HP.2019 tanggal 7 Januari 2019 – RJP 2019-2023, Surat No. 051/052/DK/HP/2029 tanggal 11 Juni 2019  2 response letters: – RKAP 2019 and Corporate KPI, Letter No. 001.052. DK.HP.2019 dated January 7, 2019 – RJP 2019-2023, Letter No. 051/052/DK/HP/2029 dated June 11, 2019	2

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Bobot Weight
2	Kinerja Perusahaan termasuk implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan The Company's performance includes the implementation of the Company's plans and policies	Membahas, memberikan tanggapan serta menandatangani: – Laporan Manajemen (LM) Tahunan – Laporan Manajemen Risiko (LMR) Tahunan – LM Berkala – LMR Berkala Discuss, respond and approve: – Annual Management Report (LM) – Annual Risk Management Report (LMR) – Periodic LM – Periodic LMR	4 kali/ times	8	9 kali pembahasan, yaitu: - LM 2018 Unaudited pada rapat Dewan Komisaris 19 Februari 2019 - LMR 2018 pada rapat Dewan Komisaris 19 Februari 2019 - LM 2018 Audited pada rapat Dewan Komisaris 28 Mei 2019 - LM Triwulan I 2019 pada rapat Dewan Komisaris 30 April 2019 - LMR Triwulan I 2019 pada rapat Dewan Komisaris 30 April 2019 - LM Triwulan II 2019 pada rapat Dewan Komisaris 30 Agustus 2019 - LMR Triwulan II 2019 pada rapat Dewan Komisaris 30 Agustus 2019 - LM Triwulan III 2019 pada rapat Dewan Komisaris 31 Oktober 2019 - LMR Triwulan III 2019 pada rapat Dewan Komisaris 31 Oktober 2019 9 times discussions: - LM 2018 Unaudited on BOC meeting dated February 19, 2019 - LMR 2018 on BOC meeting dated February 19, 2019 - LM 2018 Audited on BOC meeting dated May 28, 2019 - LM Q1 2019 on BOC meeting dated April 30, 2019 - LMR Q1 2019 on BOC meeting dated April 30, 2019 - LM Q2 2019 on BOC meeting dated August 30, 2019 - LMR Q2 2019 on BOC meeting dated August 30, 2019 - LM Q3 2019 on BOC meeting dated October 31, 2019 - LMR Q3 2019 on BOC meeting dated October 31, 2019	8
		Pemberian pendapat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diserahkan Direksi Provision of opinions within 14 working days after complete documents are submitted by the BOD	14 hari kerja/ workdays	2	7 Surat Tanggapan, yaitu: - LM Triwulan I 2019, Surat No. 035/052/DK/HP/2019 tanggal 30 April 2019 - LMR Triwulan I 2019, Surat No. 036/052/DK/2019 tanggal 30 April 2019 - LM Audited 2018, Surat No. 047/052/DK/HP/2019 tanggal 31 Mei 2019 - LM Triwulan II 2019, Surat No. 069/052/DK/HP/2019 tanggal 30 Agustus 2019 - LMR Triwulan II 2019, Surat No. 070/052/DK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 - LM Triwulan III 2019, Surat No. 082/052/DK/HP/2019 tanggal 31 Oktober 2019 - LMR Triwulan III 2019, Surat No. 087/052/DK/2019 tanggal 31 Oktober 2019 7 response letters: - LM Q1 2019, Letter No. 035/052/DK/HP/2019 dated April 30, 2019 - LMR Q1 2019, Letter No. 036/052/DK/2019 dated April 30, 2019 - LM Audited 2018, Letter No. 047/052/DK/HP/2019 Dated May31, 2019 - LM Q2 2019, Letter No. 069/052/DK/HP/2019 dated August 30, 2019 - LMR Q2 2019, Letter No. 070/052/DK/2019 dated August 30, 2019 - LM Q3 2019, Letter No. 082/052/DK/HP/2019 dated October 31, 2019 - LMR Q3 2019, Letter No. 087/052/DK/2019 dated October 31, 2019	2

**Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi**

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Bobot Weight
3	Tindak lanjut temuan audit internal/eksternal Follow-up of findings of internal/external audit	Membahas dan memberikan tanggapan atas: pemeriksaan internal - Tindak lanjut temuan auditor Discuss and provide responses to: - The effectiveness of internal audit - Follow-up of the auditor's findings	4 kali/ times	5	6 kali pembahasan, yaitu: - Tindak lanjut temuan SPI 2018 pada rapat Dewan Komisaris 11 Maret 2019 - Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI 2019 pada rapat Dewan Komisaris 11 Maret 2019 - Progres audit 2018 pada rapat Dewan Komisaris 30 April 2019 - Progres Kantor Akuntan Publik (KAP) 2018 pada rapat Dewan Komisaris 28 Mei 2019 - Tindak lanjut temuan SPI triwulan II 2019 pada rapat Dewan Komisaris 30 Agustus 2019 - Tindak lanjut temuan SPI triwulan III 2019 pada rapat Dewan Komisaris 31 Oktober 2019 6 times discussion: - Follow up 2018 Internal Audit (SPI) findings on BOC meeting dated March 11, 2019 - 2019 SPI Annual Audit Program (PKPT) on BOC meeting dated March 11, 2019 - 2018 audit progress on BOC meeting dated April 30, 2019 - Progress of 2018 Public Accounting Firm (KAP) appointment on BOC meeting dated May 28, 2019 - Follow up Q2 2019 SPI findings on BOC meeting dated August 30, 2019 - Follow up Q3 2019 SPI findings on BOC meeting dated October 31, 2019	4
4	Tanggapan tertulis/persetujuan/nasihat/saran/teguran kepada Direksi Written response/approval/counsel/advice/warning to the BOD	Membahas dan memberikan tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan yang diajukan Direksi Discuss and provide written response/approval on the request of proposals submitted by the BOD	100% usulan Direksi 100% of the BOD proposals	8	2 kali pembahasan, yaitu: - Usulan konversi laba ditahan - Usulan pejabat Corporate Secretary 2 times discussion: - Proposal of retained earnings conversion - Proposal of the Corporate Secretary	6
		Pemberian pendapat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diserahkan oleh Direksi Provision of opinions within 14 working days after complete documents are submitted by the BOD	14 hari kerja/ workdays	2	2 surat tanggapan: - Tentang usulan konversi laba ditahan, Surat No. 021/052/DK/HP/2019 tanggal 13 Maret 2019 - Tentang usulan pejabat Corporate Secretary, Surat No. 042/052/DK/HP/2019 tanggal 13 Mei 2019 2 response letters: - Concerning the proposal of retained earnings conversion, Letter No. 021/052/DK/HP/2019 dated March 13, 2019 - Concerning proposal of the Corporate Secretary, Letter No. 042/052/DK/HP/2019 dated may 13, 2019	2
		Pemberian nasihat/saran/teguran Providing advice/recommendation/warning	3 kali/ times	5	10 kali, disampaikan pada RDD 10 times, discussed in BOC-BOD joint meetings	5
5	Kunjungan Kerja Working Visit	Kunjungan kerja ke unit pelaksana/ anak perusahaan Working visit to units/subsidiary	4 kali/ times	5	4 kali kunjungan kerja 4 times of working visit	5

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Bobot Weight
<b>DEWAN KOMISARIS DENGAN RUPS</b> <b>Board of Commissioners and GMS</b>			<b>25</b>		<b>25</b>	
6	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Delivering the BOC work program and KPI	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan KPI Dewan Komisaris BOC Work Plan and Budget (RKA) and KPI	1 kali/ times	5	RKA dan KPI Dewan Komisaris 2020 melalui Surat No. 061/052/DK/HP/2019 tanggal 25 Juli 2019 BOC RKA and KPI 2020 through Letter No. 061/052/DK/HP/2019 dated July 25, 2019	5
7	Pendapat Dewan Komisaris BOC opinion	Pendapat atas: - RJP - RKAP - LM & KPI Tahunan - Usulan kantor akuntan publik (KAP) - Usulan remunerasi - Usulan penggunaan laba bersih Opinion on: - RJP - RKAP - Annual LM and KPI - Proposed appointment of public accounting firm (KAP) - Proposed remuneration - Proposed use of the net profit	4 kali/ times	10	6 surat tanggapan, yaitu: - RKAP 2019, Surat No. 002/052/DK/HP/2019 tanggal 8 Januari 2019 - RJP 2019-2023, Surat No. 052/052/DK/HP/2019 tanggal 13 Juni 2019 - LM Audited 2018, Surat No. 048/052/DK/HP/2019 tanggal 11 Juni 2019 - Usulan KAP, Surat No. 039/052/DK/P/2019 tanggal 10 Mei 2019 - Usulan penggunaan laba bersih, Surat No. 038/052/DK/HP/2019 tanggal 10 Mei 2019 - Usulan tantiem, remunerasi dan bonus, Surat No. 040/052/DK/HP/2019 tanggal 10 Mei 2019 6 response letter: - RKAP 2019, Letter No. 002/052/DK/HP/2019 dated January 8, 2019 - RJP 2019-2023, Letter No. 052/052/DK/HP/2019 dated June 13, 2019 - LM Audited 2018, Letter No. 048/052/DK/HP/2019 dated June 11, 2019 - Proposal of KAP, Letter No. 039/052/DK/P/2019 dated May 10, 2019 - Proposal of the use of net profit, Letter No. 038/052/DK/HP/2019 dated May 10, 2019 - Proposed of tantiem, remuneration and bonus, Letter No. 040/052/DK/HP/2019 dated May 10, 2019	10
8	Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Report of the BOC supervisory duty	Laporan terdiri atas: - Laporan pengawasan dan KPI tahunan - Realisasi KPI berkala The report consists of: - Annual supervisory report and KPI - Realization of quarterly KPI achievement	4 kali/ times	5	4 laporan terdiri dari: - Laporan pengawasan Dewan Komisaris 2018, Surat No. 014/052/DK/HP/2019 tanggal 28 Februari 2019 - Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan I 2019, Surat No. 037/052/DK/HP/2019 tanggal 30 April 2019 - Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan II 2019, Surat No. 060/052/DK/HP/2019 tanggal 25 Juli 2019 - Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan III 2019, Surat No. 081/052/DK/HP/2019 tanggal 31 Oktober 2019 4 reports consist of: - BOC supervisory report 2018, Letter No. 014/052/DK/HP/2019 dated February 28, 2019 - Realization of the BOC KPI on Q1 2019, Letter No. 037/052/DK/HP/2019 dated April 30, 2019 - Realization of the BOC KPI on Q2 2019, Letter No. 060/052/DK/HP/2019 dated July 25, 2019 - Realization of the BOC KPI on Q3 2019, Letter No. 081/052/DK/HP/2019 dated October 31, 2019	5
9	RUPS GMS	Dewan Komisaris hadir kuorum pada RUPS BOC quorum attendance at the GMS	2 kali/ times	5	2 kali RUPS terdiri dari: - RUPS RKAP 2019 tanggal 10 Januari 2019 - RUPS LPT 2018 tanggal 13 Juni 2019 2 times GMS consists of: - GMS of RKAP 2019 - GMS of Annual Report 2018	5

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Bobot Weight
<b>INTERNAL DEWAN KOMISARIS</b> Internal of the Board of Commissioners				<b>30</b>		<b>30</b>
10	Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi The BOC meetings may invite the BOD	Rapat Dewan Komisaris BOC meeting	12 kali/ times	10	Rapat Dewan Komisaris diadakan 14 kali, terdiri dari 10 kali rapat Dewan Komisaris-Direksi (RDD) dan 4 kali rapat internal Dewan Komisaris (RID) The BOC meeting was held 14 times, consisting of 10 BOC-BOD joint meetings and 4 BOC internal meetings	10
		Komisaris hadir dalam rapat Commissioner attendance	100%	5	Hadir kuorum Quorum presence	5
		Penyelesaian risalah rapat Completion of the minutes of meeting	100%	5	Risalah rapat sejumlah 14 risalah 15 minutes of the meetings	5
11	Pengenalan/Induksi/peningkatan kompetensi Orientation/Induction/competence development	Pengenalan/induksi dan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar/ <i>workshop</i> Orientation/induction and competence development by attending seminar/ <i>workshop</i>	2 kali/ times	5	5 kali/times	5
12	Pengelolaan GCG GCG management	Mengikuti asesmen GCG 2018 aspek Dewan Komisaris Following the 2018 GCG assessment on the BOC aspects	Skor minimal 32 Minimum score of 32	5	Skor penilaian mandiri GCG aspek Dewan Komisaris 33 GCG self-assessment score on the BOC aspect was 33	5
<b>Jumlah Nilai</b> Total Score				<b>100</b>		<b>100</b>

### Penilaian Kinerja Direksi

Dasar penilaian kinerja Direksi adalah KPI Direksi/KPI Manajemen yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. KPI tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

KPI Manajemen menjadi indikator tingkat kesehatan perusahaan yang pengukurannya mengacu pada:

- Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;

### The Board of Directors Performance Assessment

Basis for performance assessment of the Board of Directors is KPI of Management/the Board of Directors that are jointly established with the Board of Commissioners at the beginning of the management period. KPI is basically a qualitative and quantitative measurement of RKAP which is the objective of preparation and implementation of activity budget.

KPI of Management are indicators of the Company's soundness level whose measurements refer to:

- Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises;



## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

### Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0065.P/DIR/2015 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi;</p> <p>3. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan;</p> <p>4. Surat Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) No. 0015/SKK. 00.01/SPKK/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Penyampaian Kontrak Manajemen Tahun 2018.</p> | <p>2. Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0065.P/DIR/2015 concerning Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment;</p> <p>3. Circular of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0001.E/DIR/2018 concerning Implementation Guidelines for Calculation of Organizational Performance Score of Units and Subsidiaries;</p> <p>4. Letter of Head of Corporate Performance Monitoring Unit of PT PLN (Persero) No. 0015/SKK.00.01/SPKK/2018 dated January 26, 2018 concerning Submission of 2018 Management Contracts.</p> |
|---|--|

Laporan pencapaian KPI Manajemen bulanan disampaikan kepada Divisi Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) dan laporan pencapaian KPI tahunan disampaikan kepada RUPS di mana Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja KPI Manajemen pada tahun operasional. Dalam pertanggungjawaban tersebut, Direksi menjabarkan kaitan pencapaian KPI dengan kondisi lapangan dan kebijakan strategis yang dijalankan Direksi. Sedangkan Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan selama tahun operasional. Tabel berikut menyajikan hasil pencapaian KPI Manajemen tahun 2019:

Monthly Management's KPI achievement report is submitted to Corporate Performance Management Division of PT PLN (Persero) and annual KPI achievement report are submitted to GMS as part of accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners on Management's KPI achievement in the operational year. In this accountability, the Board of Directors outlines the relationship among KPI achievements, factual conditions and strategic policies implemented by the Board of Directors. Whereas the Board of Commissioners provides explanation and is accountable on supervisory and advisory aspects that are carried out during the operational year. The following table presents results of 2019 Management's KPI:

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score
				a	b	b/a	
<b>1</b>	<b>FOKUS PELANGGAN</b> <b>Customer Focus</b>						
1.1	Indeks kepuasan pelanggan Customer satisfaction Index	Indeks Index	10	88.50	73.51	83.06%	8.30
<b>2</b>	<b>EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES</b> <b>Products and Process Effectiveness</b>						
2.1	Pencapaian <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pekerjaan sesuai penugasan SLA achievement in accordance with the assignment	%	14	100.00	98.13	98.13%	13.73
2.2	Penambahan pelanggan baru: Additional new customer:						
a.	Distribusi/Distribution	Unit	9	36.00	40.00	100.00%	9.00
b.	Transmisi/Transmission	Unit	9	12.00	12.00	100.00%	9.00
2.3	AMC Distribusi AMC Distribution	Unit	10	12.00	12.00	100.00%	10.00
2.4	Pengembangan produk baru ListriQu New developed product ListriQu	Kali Times	8	2,400	2,767	100.00%	8.00
2.5	Sertifikasi/Certification						

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score
				a	b	b/a	
	a. Tenaga kerja/Workforce	%	4	100.00	83.81	83.81%	3.35
	b. Proses bisnis/Business process	%	4	100.00	100.00	100.00%	4.00
<b>3</b>	<b>FOKUS TENAGA KERJA</b> <b>Employment Focus</b>						
3.1	Human Capital Readiness (HCR)	Level	3	3.90	3.90	100.00%	3.00
3.2	Organization Capital Readiness (OCR)	Level	3	3.90	3.90	100.00%	3.00
<b>4</b>	<b>KEUANGAN DAN PASAR</b> <b>Finance and Market</b>						
4.1	Pendapatan pengembangan produk ListriQu Revenue of developed product ListriQu	Rp juta Rp million	3	500.00	39.30	7.86%	0.23
4.2	Rasio Operasi Operating Ratios	%	10	89.42	90.86	98.38%	0.23
4.3	Sinergi antar anak perusahaan PLN lain Synergy between PLN subsidiaries	Rp juta Rp million	7	243.62	240.27	98.62%	6.90
<b>5</b>	<b>KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN</b> <b>Leadership, Governance and Community Responsibility</b>						
5.1	Good Corporate Governance (GCG)	Skor Score	3	86.00	86.19	100.00%	3.00
5.2	Penyelesaian temuan auditor Completion of auditor's findings	%	3	100.00	99.57	99.57%	2.98
5.3	Kepatuhan pada Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup Compliance on Safety, Occupational Health and Environment						Maks. 10 Max. 10 -2.75
<b>Jumlah Nilai</b> Total Score				<b>100.00</b>			<b>91.57</b>

Hasil penilaian KPI Manajemen tahun 2019 mencapai skor 91,57 di mana berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk pada kategori "AA" atau kondisi "SEHAT".

The results of 2019 Management's KPI assessment reached a score of 91.57. Based on Decision of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises, such score is under "AA" or "SOUND" category.

## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

## KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Kebijakan

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS. Secara umum, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan dan standar gaji profesional di industri sejenis. Selain itu, sebagai anak perusahaan BUMN, besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya yang terakhir No. 01/MBU/05/2019. Besaran remunerasi terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem.

### Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi dan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menugaskan Komite GCG & MR yang salah satu tugas pokoknya adalah bidang nominasi dan remunerasi untuk mengkaji usulan Direksi dan menyusun rekomendasi yang diperlukan. Hasil kajian dan rekomendasi menjadi bagian dari usulan penetapan remunerasi dan tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS.

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 PT Haleyora Power tanggal 13 Juli 2019 menyetujui dan menetapkan paket remunerasi tahun buku 2019 dan tantiem tahun buku 2018 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019 dan 2018

Secara total besaran kompensasi berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp12,82 miliar sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp9,65 miliar.

## REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

### Policy

Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through GMS resolution. In general, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined based on duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors taking into account the Company's financial capabilities and professional salary standards in similar industries. In addition, as an SOE subsidiary, remuneration amount of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors also refers to Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Income Determination for the Board of Directors, the Board of Commissioners and SOE Supervisory Board including the latest amendment No. 01/MBU/05/2019. Remuneration amount consists of salary, allowances and bonuses.

### Procedure of Proposal and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remuneration and bonuses for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners assigns GCG & MR Committee, whose main tasks include nomination and remuneration, to review the Board of Directors' proposal and to prepare recommendation as needed. The review results and recommendations become part of the proposed remuneration and tantiem for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to GMS.

Annual GMS on Approval for Annual Report and Ratification of Financial Statements for Financial Year 2018 of PT Haleyora Power on July 13, 2019 approved and determined remuneration package for financial year 2019 and tantiem for financial year 2018 for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

### Remuneration Amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors for Financial Years 2019 and 2018

In total, compensation amount in the form of salaries, facilities, allowances and bonuses received by the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2019 amounted to Rp12.82 billion while in 2018 it was Rp9.65 billion.

**Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**  
Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

**FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat yang dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat dihadiri oleh Direksi (rapat gabungan) untuk membahas laporan kinerja Perusahaan dan mendiskusikan, memutuskan, dan atau memberi persetujuan kepada Direksi atas tindakan korporasi tertentu. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menyelenggarakan 14 kali rapat termasuk rapat gabungan dengan Direksi.

**Rapat Internal Dewan Komisaris**

Pada tahun 2019 Dewan Komisaris menyelenggarakan 4 kali rapat internal dengan kehadiran dan agenda sebagai berikut:

**FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS**

**The Board of Commissioners Meetings**

The Board of Commissioners must hold meeting attended by the majority of all members of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners meeting can be attended by the Board of Directors (joint meeting) to discuss the Company's performance reports and discuss, decide, and or give approval to the Board of Directors for certain corporate actions. Throughout 2019, the Board of Commissioners held 14 meetings including joint meetings with the Board of Directors.

**Internal Meeting of the Board of Commissioners**

In 2019 the Board of Commissioners held 4 internal meetings with attendance and agenda as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance		Nama Name	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate			
1	19 Februari/February	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi* Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018 The BOC Supervisory Report 2018
2	30 April/April	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2019</li> <li>2. Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2018</li> <li>3. Usulan tantiem tahun buku 2018 dan remunerasi tahun 2019 untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus karyawan tahun buku 2018</li> <li>4. Laporan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan I tahun 2019</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposed public accounting firm (KAP) in 2019</li> <li>2. Proposed use of the Company's net profit for financial year 2018</li> <li>3. Proposed tantiem of 2018 financial year and 2019 remuneration for the BOD and the BOC and the employee bonus of 2018 financial year</li> <li>4. Report on the realization of the BOC's KPI for Q1 2019</li> </ol>
3	18 Juli/July	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi* Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan II 2019</li> <li>2. Laporan Komite Dewan Komisaris triwulan II 2019</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realization of the BOC's KPI for Q2 2019</li> <li>2. Report of the BOC's Committees for Q2 2019</li> </ol>

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance		Nama Name	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate			
4	31 Oktober/October	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan III 2019</li> <li>2. Laporan Komite Dewan Komisaris triwulan III 2019</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realization of the BOC's KPI for Q3 2019</li> <li>2. Report of the BOC's Committees for Q3 2019</li> </ol>

\* Dikuasakan kepada Komisaris lain/Delegated to other Commissioner

### Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan bersama Direksi dapat berlangsung atas inisiatif Dewan Komisaris atau Direksi. Di dalam rapat gabungan, Direksi berkonsultasi dengan Dewan Komisaris untuk memperoleh kesamaan visi dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pengelola Perusahaan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menyelenggarakan 10 kali rapat dengan Direksi dengan kehadiran dan agenda sebagai berikut:

### Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

Joint Meetings with the Directors may take place at the initiative of the Board of Commissioners or Directors. In joint meetings, the Board of Directors consults with the Board of Commissioners to obtain a common vision and alignment of actions between the Board of Commissioners as supervisors and the Board of Directors as managers of the Company. Throughout 2019, the Board of Commissioners held 10 meetings with the Board of Directors with attendance and the following agenda:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance		Nama Name	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate				
1	19 Februari/ February	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi* Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris-Direksi 2018</li> <li>2. Laporan Manajemen (LM) <i>Unaudited</i> 2018</li> <li>3. Laporan Manajemen Risiko (LMR) 2018</li> <li>4. Realisasi KPI Direktorat 2018</li> <li>5. Rencana strategis korporat tahun 2019</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow-up the decisions of the Board of Commissioners-Directors meeting in 2018</li> <li>2. Management Report (LM) Unaudited 2018</li> <li>3. Risk Management Report (LMR) 2018</li> <li>4. Realization of Directorate KPI 2018</li> <li>6. Corporate strategic plan for 2019</li> </ol>



## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance		Nama Name	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate				
2	11 Maret/ March	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji* Purnama T. Sianturi*	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Penjelasan surat usulan Direksi No. 0102/MNJ.00.01/HP PUSAT/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Usulan Perubahan Batas Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>3. Penjelasan rencana implementasi arahan Pemegang Saham dan arahan Dewan Komisaris pada RUPS RKAP 2019</li> <li>4. Tindak lanjut temuan SPI tahun 2018</li> <li>5. Program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) SPI tahun 2019</li> <li>6. KPI direktorat 2019               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Explanation of the Board of Directors' proposal letter No. 0102 / MNJ.00.01 / HP PUSAT / 2018 dated 13 November 2018 concerning Proposal to Change the Limit of Authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners</li> <li>3. Explanation of plan for implementing of Shareholders and the Board of Commissioners directions at GMS of RKAP 2019</li> <li>4. Follow up on SPI findings in 2018</li> <li>5. SPI annual audit work program (PKPT) in 2019</li> <li>6. KPI directorate 2019</li> </ol> </li> </ol>
3	30 April/April	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris sampai dengan triwulan I 2019</li> <li>2. Persetujuan KPI direktorat 2019</li> <li>3. Progres audit tahun 2018</li> <li>4. LM dan realisasi KPI triwulan I 2019</li> <li>5. LMR triwulan I 2019               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow-up decisions of the Board of Commissioners meeting up to Q1 2019</li> <li>2. Approval of Directorate KPI 2019</li> <li>3. Progress of 2018 audit</li> <li>4. LM and realization of KPI Q1 2019</li> <li>5. LMR Q1 2019</li> </ol> </li> </ol>
4	28 Mei/May	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Persetujuan RJP 2019-2023</li> <li>3. Progres audit KAP tahun 2018</li> <li>4. Progres LM Audited dan realisasi KPI Direktorat tahun 2018               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Approval of RJP 2019-2023</li> <li>3. Progress of 2018 audit by KAP</li> <li>4. Progress of LM Audited and realization of Directorate KPI 2018</li> </ol> </li> </ol>



## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance		Nama Name	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate				
5	18 Juli/July	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi* Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>RKAP 2020</li> <li>Rencana kebijakan strategis Perusahaan mengenai pengadaan, SDM dan pengembangan karir, IT, lingkungan bisnis, pengelolaan anak perusahaan, mutu &amp; pelayanan, investasi dan manajemen risiko tahun 2020</li> <li>Progres ListriQu                             <ol style="list-style-type: none"> <li>RKAP 2020</li> <li>The Company's strategic policy plan regarding procurement, human resources and career development, IT, business environment, subsidiary management, quality &amp; service, investment and risk management in 2020</li> <li>Progress of ListriQu</li> </ol> </li> </ol>
6	30 Agustus/ August	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Knowledge sharing dengan Cogindo</li> <li>Presentasi HPI dan EPI</li> <li>Rapat Dewan Komisaris dengan agenda:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkini</li> <li>LM dan KPI triwulan II 2019</li> <li>LMR triwulan II 2019</li> <li>Tindak lanjut temuan SPI triwulan II 2019</li> </ol> </li> <li>Knowledge sharing with Cogindo</li> <li>Presentation from HPI and EPI</li> <li>The Board of Commissioners Meeting with the following agenda:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Current information</li> <li>LM and KPI Q2 2019</li> <li>LMR Q2 2019</li> <li>Follow up on SPI findings I Q2 2019</li> </ol> </li> </ol>
7	20 September/ September	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji* Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris</li> <li>Isu strategis HP Group</li> <li>Strategi pencapaian kinerja 2019                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up decisions of the Board of Commissioners meetings</li> <li>HP Group strategic issues</li> <li>Strategy for achieving performance in 2019</li> </ol> </li> </ol>
8	31 Oktober/ October	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem manajemen P2TL</li> <li>LM triwulan III 2019</li> <li>LMR triwulan III 2019</li> <li>Tindak lanjut temuan SPI triwulan III 2019                             <ol style="list-style-type: none"> <li>P2TL management system</li> <li>LM Q3 2019</li> <li>LMR Q3 2019</li> <li>Follow up on SPI findings for Q3 2019</li> </ol> </li> </ol>



## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance		Nama Name	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate				
9	22 November/ November	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji* Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAP 2020 (hasil pembahasan teknis)</li> <li>2. Pengembangan usaha HP Group</li> <li>3. Progres Sistem Manajemen P2TL</li> <li>4. IT <i>Masterplan</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAP 2020 (results of technical discussion)</li> <li>2. HP Group business development</li> <li>3. Progress of P2TL Management System</li> <li>4. 4. IT Master Plan</li> </ol> </li> </ol>
10	30 November/ November	Kuorum Quorum	100%	Fahmi El Amruzi Karyawan Aji* Purnama T. Sianturi	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut arahan RUPS dan tanggapan Dewan Komisaris pada RUPS RKAP 2019 dan LPT 2018</li> <li>2. Tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris tahun 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tanggapan Dewan Komisaris atas LM Triwulanan tahun 2019</li> <li>4. Lain-lain: Usulan organisasi Region 7 dan Region 8                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow-up to GMS direction and the Board of Commissioners' response at GMS of RKAP 2019 and LPT 2018</li> <li>2. Follow-up decisions of the Board of Commissioners meetings in 2019</li> <li>3. Follow-up responses from the Board of Commissioners on 2019 Quarterly LM</li> <li>4. Others: Proposal of Region 7 and Region 8 organization</li> </ol> </li> </ol>

\* Dikuasakan kepada Komisaris lain/Delegated to other Commissioner

### Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Selain rapat bulanan, rapat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila ada kebutuhan yang mendesak dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi berikut pejabat yang terkait, dan untuk menghasilkan keputusan, kehadiran Direksi dalam rapat harus memenuhi kuorum. Sepanjang tahun 2019, Direksi mengadakan 12 kali rapat dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

### The Board of Directors Meetings

The Board of Directors is obliged to hold a the Board of Directors meeting periodically at least 1 (one) time every month. Meetings can be held if attended by a majority of all members of the Board of Directors. Apart from monthly meetings, meetings can be held at any time if there is an urgent need and requires an immediate decision. The Board of Directors meeting is attended by members of the Board of Directors and related officials, and to produce a decision, the attendance of the Board of Directors at the meeting must meet quorum. Throughout 2019, the Board of Directors held 12 meetings with following agenda and attendance:

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance		Nama Name	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate			
1	22 Januari/January	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS RKAP 2019 PT HPI</li> <li>2. <i>Cascading</i> KPI</li> <li>3. Rapat kerja HP 2019</li> <li>4. Progres Pengambilan saham Minoritas PT HPI</li> <li>5. Progress Probis</li> <li>6. Progres laba ditahan menjadi modal disetor</li> <li>7. Penyusunan PRK 2019</li> <li>8. Program Strategis               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GMS of RKAP 2019 PT HPI</li> <li>2. KPI cascading</li> <li>3. HP work meeting 2019</li> <li>4. Progress of PT HPI's Minority Shares Acquisition</li> <li>5. Progress of Probis</li> <li>6. Progress of Retained Profits to paid-up capital</li> <li>7. Preparation of PRP 2019</li> <li>8. Strategic Programs</li> </ol> </li> </ol>
2	4 Februari/February	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Kinerja Perusahaan hingga Januari 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>4. Persiapan rapat Dewan Komisaris bulan Februari               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company performance until January 2019</li> <li>3. Follow-up of Management Reviews</li> <li>4. Preparation for the BOC meeting in February</li> </ol> </li> </ol>
3	8 Maret/March	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Kinerja Perusahaan hingga Februari 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>4. Persiapan rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Maret               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company Performance until February 2019</li> <li>3. Follow up of management review</li> <li>4. Preparation for the BOC-BOD meeting in March</li> </ol> </li> </ol>
4	1 April/April	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Kinerja Perusahaan hingga Maret 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>4. Persiapan rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan April               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company Performance until March 2019</li> <li>3. Follow up of management review</li> <li>4. Preparation for the BOD-BOC meeting in April</li> </ol> </li> </ol>

**Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**  
Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance		Nama Name	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate			
5	6 Mei/May	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkini</li> <li>Kinerja Perusahaan hingga April 2019</li> <li>Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>Persiapan rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Mei</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latest information</li> <li>Company Performance until April 2019</li> <li>Follow up of management review</li> <li>Preparation for the BOC-BOD meeting in May</li> </ol>
6	10 Juni/June	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkini</li> <li>Kinerja Perusahaan hingga Mei 2019</li> <li>Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Juni</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latest information</li> <li>Company Performance until May 2019</li> <li>Follow up of management review</li> <li>Preparation for the BOC-BOD meeting in June</li> </ol>
7	15 Juli/July	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkini</li> <li>Kinerja Perusahaan hingga Juni 2019</li> <li>Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Juli</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latest information</li> <li>Company Performance until June 2019</li> <li>Follow up of management review</li> <li>Preparation for the BOC-BOD meeting in July</li> </ol>
8	15 Agustus/August	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkini</li> <li>Kinerja Perusahaan hingga Juli 2019</li> <li>Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Agustus</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latest information</li> <li>Company Performance until July 2019</li> <li>Follow up of management review</li> <li>Preparation for the BOC-BOD meeting in August</li> </ol>
9	2 September/ September	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkini</li> <li>Kinerja Perusahaan hingga Agustus 2019</li> <li>Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan September</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latest information</li> <li>Company Performance until August 2019</li> <li>Follow up of management review</li> <li>Preparation for the BOC-BOD meeting in September</li> </ol>

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance		Nama Name	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Tingkat Kehadiran Attendance Rate			
10	16 Oktober/October	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Kinerja Perusahaan hingga September 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>4. Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Oktober</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company Performance until September 2019</li> <li>3. Follow up of management review</li> <li>4. Preparation for the BOC-BOD meeting in October</li> </ol>
11	11 November/ November	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Kinerja Perusahaan hingga Oktober 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>4. Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan November</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company Performance until October 2019</li> <li>3. Follow up of management review</li> <li>4. Preparation for the BOC-BOD meeting in November</li> </ol>
12	13 Desember/ December	Kuorum Quorum	100%	Achmad Taufik Haji Sutrisno Samad Sinung Triwulandari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Kinerja Perusahaan hingga November 2019</li> <li>3. Tindak lanjut tinjauan Manajemen</li> <li>4. Persiapan Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Desember</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company Performance until November 2019</li> <li>3. Follow up of management review</li> <li>4. Preparation for the BOC-BOD meeting in December</li> </ol>

## INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Pemegang saham utama dan pengendali diwakili oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) dan secara teknis berada di bawah Sekretaris Perusahaan cq. Fungsi Hubungan Investor. Skema kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

## INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

The major and controlling shareholder of the Company is PT PLN (Persero) with a shareholding of 99.999%. The main and controlling shareholder is represented by President Director of PT PLN (Persero) and is technically under Corporate Secretary cq. Investor Relations Function. The Company's share ownership scheme is as follows:



## **Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi** Diversity Policy in Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

### **HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI**

Untuk menjaga independensi, menghindari potensi benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, Perusahaan memiliki aturan yang melarang adanya hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan atau Pengendali.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan atau Pengendali baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Hubungan yang terjalin semata-mata karena hubungan kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan hak dari Pemegang Saham. Dalam menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham telah memperhatikan unsur-unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman, kompetensi, usia dan gender. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi diperlukan sebagai upaya untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif karena memperhatikan berbagai sudut pandang.

Sebagaimana ditunjukkan di profil Dewan Komisaris dan Direksi pada bagian Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki komposisi yang beragam baik dari segi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan keahlian. Keberagaman

### **AFFILIATED RELATIONSHIP AMONG THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDER**

To maintain independence, to avoid potential conflict of interest and to maintain accountability in decision making, the Company has a rule that prohibits affiliation among members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholder.

All members of the Board of Directors currently in office do not have financial or family relations up to the third degree with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholder either straight line or sideways, including relationship arising from marriage. Relationships are formed solely because of work relations based on duties and responsibilities of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association, Board Manual and the applicable laws and regulations.

### **DIVERSITY POLICY IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS**

The Company does not have specific policy to regulate diversity in composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Determination of composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors is authorized rights of Shareholders. In determining composition of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Shareholders take into account diversity elements, which are a combination of education, experience, competence, age and gender. Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors is required to encourage more objective and comprehensive decision making because they consider various points of view.

As shown in profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company's Profile section of this Annual Report, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company have a diverse composition in terms of education, work experience, age and expertise.



**Komite Audit**  
Audit Committee

komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menunjukkan pemenuhan bidang keahlian yang dibutuhkan serta aspek persamaan kesempatan. Keberadaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan pegawai karir dengan pengalaman penugasan yang lengkap di lingkungan PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa sistem talent management dan pembinaan karir di Perusahaan telah berjalan dengan baik.

Diversity in composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors reflects fulfillment of the required expertise and the aspect of equal opportunity. Several members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who are career employees with thorough experience within PT PLN (Persero) show that talent management and career path system in the Company runs effectively.

**KOMITE AUDIT**

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memberikan pendapat profesional dan independen terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Perusahaan.

**AUDIT COMMITTEE**

Audit Committee is established by the Board of Commissioners to provide professional and independent opinion related to financial statements and information submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and to evaluate effectiveness of the Company's internal control.

Anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Perusahaan sebagai ketua dan atau anggota, dan anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee members consist of the Company's Commissioners as chairman and/or members and independent members with expertise and experience according to the required qualifications. Audit Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners.

**Komposisi Komite Audit**

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

**Composition of Audit Committee**

The composition of the Company's Audit Committee was as follows:

Jabatan	Nama Name	Position
Ketua merangkap Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi D.	Chairman and President Commissioner
Anggota merangkap Plt. Komisaris	Purnama T. Sianturi	Member and Act. Commissioner
Anggota	Didik Sukristiyo Yuwono	Member

**Profil Anggota Komite Audit Bukan Komisaris**

**Profile of Non-Commissioner Audit Committee Member**



**Didik Sukristiyo Yuwono**

**Komite Audit**  
Audit Committee

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	49 tahun	49 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma 3 Ekonomi Akuntansi Universitas Brawijaya (1994)</li> <li>Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Sumatera Utara (2004)</li> <li>Register Negara Akuntan sejak 2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma 3 of Accounting Economics, University of Brawijaya (1994)</li> <li>Bachelor of Economics in Accounting, University of North Sumatra (2004)</li> <li>State Register of Accountant since 2004</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	Keputusan Dewan Komisaris No. 002.SK/DK/HP/2019 tanggal 26 Februari 2019	Decree of the Board of Commissioners No. 002.SK/DK/HP/2017 dated February 26, 2019
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vice President Akuntansi Segmen pada Divisi Akuntansi Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018-2019)</li> <li>Manajer Senior Akuntansi Segmen pada Divisi Akuntansi Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2017-2018)</li> <li>Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (2016-2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vice President of Segment Accounting at Accounting Division, Directorate of Finance, PT PLN (Persero) Head Office (2018-2019)</li> <li>Senior Manager of Segment Accounting at Accounting Division, Directorate of Finance, PT PLN (Persero) Head Office (2017-2018)</li> <li>Manager of Finance, Human Resources and Administration at PLN Parent Unit of Transmission of Western Part Java (2016-2017)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap	Does not have concurrent positions
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	Pada tahun 2019 tidak mengikuti program peningkatan kompetensi.	Did not attend any competency improvement program in 2019.

**Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit**

Kriteria independensi anggota Komite Audit Perusahaan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 agar anggota Komite dapat bertindak independen, objektif, bebas dari benturan kepentingan dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

**Statement of Independence of Audit Committee Members**

Independence criteria for members of the Company's Audit Committee refer to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 so that Committee members can act independently, objectively, free from conflict of interest and professionally in carrying out their duties and in giving opinions to the Board of Commissioners. All members of the Company's Audit Committee have fulfilled the following independence criteria:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Fahmi El Amruzi D.	Purnama T. Sianturi	Didik Sukristiyo Yuwono
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be an employee in the Public Accountants Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Service Office, or any other party providing Insurance Services, Non-Insurance Services, Appraisers, and/or other Consulting Services to the Company within the last 6 months.	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Shall have no direct or indirect shares in the Company.	√	√	√

## Komite Audit Audit Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Fahmi El Amruzi D.	Purnama T. Sianturi	Didik Sukristiyo Yuwono
Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last 6 months.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. Shall have no family relationship cause of marriage and descent to the second level, horizontally or vertically with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Principal Shareholders of the Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Shall have no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Shall not in the position in institutional that the business activity in providing services to the Company.	√	√	√

### Piagam Komite Audit

Komite Audit telah menyusun Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja yang telah disahkan dengan SK Dewan Komisaris No. 007.SK/DK/HP/2017 tanggal 12 Desember 2017. Piagam Komite Audit menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Secara garis besar, tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### A. Bidang Audit

- 1) Memonitor efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor internal maupun eksternal;
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit baik yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun auditor eksternal.
- 3) Memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan serta pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap setiap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan;
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

### Audit Committee Charter

Audit Committee established Audit Committee Charter as a work guideline that was approved by Decision of the Board of Commissioners No. 007.SK/DK/HP/2017 dated December 12, 2017. Audit Committee Charter outlines duties, responsibilities and obligations of Audit Committee.

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Audit Committee are regulated in Audit Committee Charter. In general, main duties of Audit Committee are as follows:

#### A. Audit

- 1) Monitoring effectiveness of internal control system and audits conducted by internal and external auditors;
- 2) Evaluating audit works and results, both those carried out by Internal Audit Unit (SPI) and external auditor;
- 3) Providing recommendations for internal control system improvement and monitoring the implementation;
- 4) Ensuring that there are satisfactory evaluation procedures for any financial information issued by the Company;
- 5) Providing recommendations regarding appointment of public accountants and public accounting firms to the Board of Commissioners to be submitted to GMS;



### B. Bidang Perencanaan dan Implementasi

- 6) Menelaah dan memberikan hasil kajian/tanggapan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen (LM), dan informasi lainnya;
- 7) Menelaah pengaduan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Perusahaan;

### C. Bidang Kinerja

- 8) Memberikan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;
- 9) Memberikan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan evaluasi lebih lanjut;

### D. Bidang Pengembangan Usaha

- 10) Memantau dan mengevaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan;
- 11) Mengevaluasi rencana pengembangan/ekspansi bisnis Perusahaan;

### E. Rencana Kerja dan Pelaporan Komite Audit

- 12) Membuat rencana kerja dan KPI Komite tahunan;
- 13) Menyampaikan laporan kegiatan Komite dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mengkaji dan menyusun tanggapan atas RKAP Tahun 2020 dan RJP Tahun 2019-2023;
2. Mengevaluasi LM dan pencapaian KPI Manajemen Triwulanan dan Tahunan tahun 2019;
3. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit eksternal (KAP) dan internal (SPI);
4. Membahas rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI 2019 bersama SPI;
5. Mengkaji Laporan SPI 2018;
6. Mengevaluasi rencana penyetoran modal PT Haleyora Power;
7. Menyusun Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial (KKO-KKF) project;
8. Menyusun formula sistem Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

### B. Planning and Implementation

- 6) Reviewing and providing review results/responses to information pertaining to the Company, long-term plans (RJP), work plans and budget (RKAP) of the Company, Management Reports (LM) and other information;
- 7) Reviewing complaints from stakeholders related to the Company's operations;

### C. Performance

- 8) Providing recommendations regarding the Board of Directors' KPI at the beginning of each financial year;
- 9) Providing recommendations regarding performance assessment of the Board of Directors based on KPI and/or other instruments to be submitted to the Board of Commissioners for further evaluation;

### D. Business Development

- 10) Monitoring and evaluating realization of the Company's business plans;
- 11) Reviewing the Company's business development/expansion plans;

### E. Audit Committee Work Plan and Reporting

- 12) Preparing annual work plan and KPI of the Committee;
- 13) Submitting reports on the Committee's activities and quarterly and annual realizations of the Committee's KPI;
- 14) Performing other tasks assigned by Board of Commissioners based on the laws and regulations.

## Audit Committee's Duties Performed in 2019

During 2019, Audit Committee performed its duties including but not limited to:

1. Reviewed and prepared responses to RKAP 2020 and RJP 2019-2023;
2. Evaluated LM and quarterly achievements Management's KPI in 2019;
3. Monitored follow-up on internal and external audit findings;
4. Discussed the SPI 2019 Annual Audit Work Program (PKPT) plan with SPI;
5. Reviewed the 2018 SPI Report;
6. Evaluated the capital injection plan of PT Haleyora Power;
7. Prepared project Operational Feasibility Study and Financial Feasibility Study (KKO-KKF);
8. Developed formula of Electricity Consumption Control (P2TL) system;

## Komite GCG & Manajemen Risiko GCG & Risk Management Committee

- |  |   |
|--|---|
| <p>9. Mengkaji isu-isu strategis HP Group;</p> <p>10. Memonitor progres audit KAP tahun buku 2018;</p> <p>11. Melakukan asesmen PSAK 71, 72, 73;</p> <p>12. Mengevaluasi upaya manajemen dalam pencapaian kinerja 2019, peningkatan pengendalian biaya dan pendapatan operasi;</p> <p>13. Mengkaji batasan kewenangan pengadaan Direksi;</p> <p>14. Memantau permasalahan hubungan industrial di Perusahaan;</p> <p>15. Mengevaluasi program strategis ListriQu dan AMC;</p> <p>16. Menyusun kajian pembentukan region baru;</p> <p>17. Mengkaji draf RJP 2020-2024;</p> <p>18. Mengkaji rencana perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;</p> <p>19. Memonitor tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris tahun 2019;</p> <p>20. Memonitor tindak lanjut keputusan RUPS 2019;</p> <p>21. Memberikan pendapat yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris;</p> <p>22. Menyusun rencana kerja dan KPI Komite Audit Tahun 2020;</p> <p>23. Membuat laporan perkembangan realisasi KPI Komite Audit Triwulan II 2019;</p> <p>24. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan realisasi KPI Komite Audit tahun 2019.</p> | <p>9. Reviewed strategic issues of HP Group;</p> <p>10. Monitor the progress of KAP audit for 2018 financial year;</p> <p>11. Assessed PSAK 71, 72, 73;</p> <p>12. Evaluated management's efforts in achieving 2019 performance, increasing cost control and operating income;</p> <p>13. Reviewed the procurement authority limits of the Board of Directors;</p> <p>14. Monitor industrial relations issues in the Company;</p> <p>15. Evaluated strategic programs of ListriQu and AMC;</p> <p>16. Prepared study of new region formation;</p> <p>17. Reviewed RJP 2020-2024 draft;</p> <p>18. Reviewed plan for amendment of the Company's Articles of Association;</p> <p>19. Monitor the follow-up decision of BOC meetings in 2019;</p> <p>20. Monitor the follow-up of 2019 GMS resolutions;</p> <p>21. Provided the opinions conveyed at BOC meeting;</p> <p>22. Prepared Audit Committee work plan and KPI 2020;</p> <p>23. Prepared a report on the progress of Audit Committee's KPI realization in Q2 2019;</p> <p>24. Prepared a report on the implementation of duties and realization of Audit Committee KPI in 2019.</p> |
|--|---|

Realisasi kinerja Komite Audit secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk pencapaian KPI Komite Audit. Pada tahun 2019, KPI Komite Audit yang terdiri dari 8 program kerja terpenuhi seluruhnya dengan skor 100.

Realization of Audit Committee's performance is indicated quantitatively in Audit Committee's KPI achievements. In 2019, Audit Committee's KPI consisted of 8 work programs that were fully implemented with a score of 100.

### Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit menyelenggarakan 12 kali rapat termasuk rapat dengan Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit 100%.

### Audit Committee Meetings

During 2019, there were 12 meetings, including meetings with the Board of Commissioners, with 100% attendance of Audit Committee members.

## KOMITE GCG & MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG & Manajemen Risiko (GCG & MR) dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan Perusahaan di bidang manajemen risiko, GCG, nominasi dan remunerasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

## GCG & RISK MANAGEMENT COMMITTEE

GCG & Risk Management (GCG & MR) Committee was established by the Board of Commissioners to assist in carrying out supervisory duties on the Company's activities in the areas of risk management, GCG, nomination and remuneration and human resource development.

**Komite GCG & Manajemen Risiko**  
GCG & Risk Management Committee

Anggota Komite GCG & MR terdiri dari Komisaris Perusahaan sebagai ketua dan atau anggota, dan anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite GCG & MR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

GCG & MR Committee members consist of the Company's Commissioners as chairman and/or members and independent members with expertise and experience according to the required qualifications. GCG & MR Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners.

**Komposisi Komite GCG & MR**

Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 01.SK/DK/HP/2018 dan SK No. 02.SK/DK/HP/2018, susunan anggota Komite GCG & MR adalah sebagai berikut:

**Composition of GCG & MR Committee**

Based on Decisions of the Board of Commissioners No. 01.SK/DK/HP/2018 and No. 02.SK/DK/HP/2018, composition of the Company's GCG & MR was as follows:

Jabatan	Nama Name	Position
Ketua merangkap Plt. Komisaris	Karyawan Aji	Chairman and Act. Commissioner
Anggota	Kurniawan Andriyanto	Member

**Profil Anggota Komite GCG & MR Bukan Komisaris**

**Profile of Non-Commissioner GCG & MR Committee Member**



**Kurniawan Andriyanto**

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	38 tahun	38 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004)</li> <li>Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Mechanical Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2004)</li> <li>Master of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (2012)</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	Keputusan Dewan Komisaris No. 02.SK/DK/HP/2018 tanggal 1 Desember 2018	Decree of the Board of Commissioners No. 02.SK/DK/HP/2018 dated December 1, 2018



## Komite GCG & Manajemen Risiko GCG & Risk Management Committee

### Pengalaman Kerja Professional Background

- Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Proyek pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018)
- Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Investasi dan Operasi pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018)
- Deputy Manajer Asesmen, Pemantauan, dan Pelaporan Risiko Investasi dan Operasi, pada Bidang Manajemen Risiko Proyek dan Operasi, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016-2018)
- Manager of Project Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the field of Project and Operation Risk Management, Risk Management Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2018)
- Manager of Investment and Operation Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the field of Project and Operation Risk Management, Risk Management and Compliance Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2018)
- Deputy Manager of Investment and Operation Risk Assessment, Monitoring, and Reporting in the field of Project and Operation Risk Management, Risk Management and Compliance Division, Directorate of Corporate Planning PT PLN (Persero) Head Office (2016-2018)

<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap	Does not have concurrent positions
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	Pada tahun 2019 tidak mengikuti program peningkatan kompetensi.	Did not attend any competency improvement program in 2019.

## Pernyataan Independensi Anggota Komite GCG & MR

Kriteria independensi anggota Komite GCG & MR Perusahaan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 agar anggota Komite dapat bertindak independen, objektif, bebas dari benturan kepentingan dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite GCG & MR Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi, yaitu:

## Statement of Independence of GCG & MR Committee Members

Independence criteria for members of the Company's GCG & MR Committee refer to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 so that Committee members can act independently, objectively, free from conflict of interest and professionally in carrying out their duties and in giving opinions to the Board of Commissioners. All members of the Company's GCG & MR Committee have fulfilled the following independence criteria:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Karyawan Aji	Kurniawan Andriyanto
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be an employee in the Public Accountants Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Service Office, or any other party providing Insurance Services, Non-Insurance Services, Appraisers, and/or other Consulting Services to the Company within the last 6 months.	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Shall have no direct or indirect shares in the Company.	√	√
Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Shall not be a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last 6 months.	√	√

**Komite GCG & Manajemen Risiko**  
GCG & Risk Management Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Karyawan Aji	Kurniawan Andriyanto
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. Shall have no family relationship cause of marriage and descent to the second level, horizontally or vertically with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Principal Shareholders of the Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Shall have no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Shall not in the position in institutional that the business activity in providing services to the Company.	√	√

### Piagam Komite GCG & MR

Komite GCG & MR telah menyusun Piagam Komite GCG & MR sebagai pedoman kerja Komite GCG & MR yang telah disahkan dengan SK Dewan Komisaris No. 006.SK/DK/HP/2017 tanggal 12 Desember 2017. Piagam Komite GCG & MR menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite GCG & MR.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite GCG & MR diatur dalam Piagam Komite GCG & MR. Secara garis besar, tugas pokok Komite GCG & MR adalah sebagai berikut:

#### A. Bidang Manajemen Risiko

- 1) Memberikan tanggapan atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;
- 2) Mengevaluasi model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan tanggapan untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- 3) Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;

#### B. Bidang GCG

- 4) Melakukan kajian atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bisnis Perusahaan;
- 5) Melakukan kajian dan memantau penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
- 6) Memastikan jalannya pengurusan Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan mengenai GCG;
- 7) Memastikan GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

### GCG & MR Committee Charter

GCG & MR Committee established GCG & MR Committee Charter as a work guideline that was approved by Decision of the Board of Commissioners No. 006.SK/DK/HP/2017 dated December 12, 2017. GCG & MR Committee Charter outlines duties, responsibilities and obligations of GCG & MR Committee.

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of GCG & MR Committee are regulated in GCG & MR Committee Charter. In general, main duties of GCG & MR Committee are as follows:

#### A. Risk Management

- 1) Responding to policies and implementation of the Company's risk management;
- 2) Evaluating risk measurement model used by the Company and providing recommendations for further improvement;
- 3) Monitoring various potential risks faced by the Company;

#### B. GCG

- 4) Reviewing the Company's compliance with the laws and regulations relevant to the Company's business;
- 5) Evaluating and monitoring GCG implementation in the Company;
- 6) Ensuring that management of the Company is in accordance with GCG principles and regulations;
- 7) Ensuring that GCG is implemented effectively and sustainably;

## Komite GCG & Manajemen Risiko GCG & Risk Management Committee

### C. Bidang Nominasi dan Remunerasi

- 8) Memberikan tanggapan atas kebijakan nominasi dan remunerasi;
- 9) Memberikan rekomendasi dan memantau prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan untuk memastikan agar sesuai dengan kebijakan nominasi;
- 10) Memberikan rekomendasi calon Direksi Perusahaan yang akan diusulkan kepada RUPS, apabila diperlukan;
- 11) Memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan;

### D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 12) Memberikan tanggapan atas kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- 13) Memberikan tanggapan atas kebijakan manajemen dan prosedur operasi standar (SOP) di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- 14) Melakukan kajian implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia;

### E. Rencana Kerja dan Pelaporan Komite GCG & MR

- 15) Membuat rencana kerja dan KPI Komite tahunan;
- 16) Menyampaikan laporan kegiatan Komite dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pelaksanaan Tugas Komite GCG & MR Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite GCG & MR telah melaksanakan tugas-tugasnya termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Memberikan pendapat Komite mengenai RKAP tahun 2019 dan RJP tahun 2019-2023;
2. Mengevaluasi Laporan Manajemen dan pencapaian KPI Perusahaan Triwulanan dan Tahunan tahun 2019;
3. Mengevaluasi Laporan Manajemen Risiko Triwulanan dan Tahunan Tahun 2019;
4. Mengkaji isu-isu strategis HP Group;
5. Mengkaji profil risiko Perusahaan tahun 2019;
6. Mengevaluasi RKAP berbasis risiko tahun 2019;
7. Menyusun kajian risiko program ListriQu;
8. Memonitor proses penghentian tenaga kerja Perusahaan;
9. Memonitor dinamika hubungan industrial di Perusahaan;

### C. Nomination and Remuneration

- 8) Providing responses to nomination and remuneration policy;
- 9) Providing recommendations and monitoring procedures for appointment of prospective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of subsidiaries/joint ventures to ensure compliance with the nomination policy;
- 10) Providing recommendations for candidates for prospective Directors of the Company to be proposed to GMS, if needed;
- 11) Providing recommendations for remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors, if needed;

### D. Human Resources Development

- 12) Providing responses to policies for human resources management and development;
- 13) Providing responses to Management's policies and standard operating procedures (SOP) in human resource development;
- 14) Conducting study on implementation system of human resource planning;

### E. GCG & MR Committee Work Plan and Reporting

- 15) Preparing annual work plan and KPI of the Committee;
- 16) Submitting reports on the Committee's activities quarterly and annually and realization of the Committee's KPI;
- 17) Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the laws and regulations.

## GCG & MR Committee's Duties Performed in 2019

During 2019, GCG & MR Committee performed its duties including but not limited to:

1. Reviewed and prepared Committee's opinion on RKAP 2019 and RJP 2019-2023;
2. Evaluated Management Reports and quarterly achievements of the Company's KPI in 2019;
3. Evaluated Management Reports and annual achievements of the Company's KPI in 2019;
4. Reviewed strategic issues of HP Group;
5. Assessed the Company's risk profile in 2019;
6. Evaluated risk-based RKAP in 2019;
7. Prepared risk review of ListriQu program;
8. Monitor the Company's workforce termination process;
9. Monitor the dynamics of industrial relations in the Company;



## Komite GCG & Manajemen Risiko GCG & Risk Management Committee

10. Menyusun kajian rencana pembentukan region baru;
  11. Mengevaluasi upaya Perusahaan untuk pencapaian kinerja 2019, peningkatan pengendalian biaya dan pendapatan operasi;
  12. Menyampaikan usulan perbaikan proses bisnis Perusahaan untuk mengantisipasi risiko korporat;
  13. Menyusun kajian risiko kegiatan laba ditahan menjadi modal disetor;
  14. Menyusun kajian risiko program AMC;
  15. Mengevaluasi rencana perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
  16. Menyusun kajian risiko KKO-KKF project;
  17. Menyusun kajian risiko sistem P2TL;
  18. Memonitor tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris tahun 2019;
  19. Memonitor tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2019;
  20. Memberikan pendapat Komite yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris;
  21. Menyusun rencana kerja dan KPI Komite GCG & MR tahun 2020;
  22. Menyusun laporan perkembangan realisasi KPI Komite GCG & MR triwulan II tahun 2019;
  23. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan realisasi KPI Komite GCG & MR tahun 2019.
10. Prepared a study of formation new regions plan;
  11. Evaluated the Company's efforts for achieving 2019 performance, increasing cost control and operating income;
  12. Submitted a proposal to improve the Company's business processes to anticipate corporate risks;
  13. Prepared a risk assessment of retained earnings to paid-up capital;
  14. Prepared a risk assessment for AMC program;
  15. Evaluated the plan to change the Company's Articles of Association;
  16. Prepared a risk assessment for project KKO-KKF;
  17. Prepared a risk assessment for P2TL system;
  18. Monitor the follow-up of BOD meeting decisions in 2019;
  19. Monitor the follow-up of GMS resolutions in 2019;
  20. Provided the Committee's opinion which is conveyed at BOC meeting;
  21. Prepared work plans and KPI 2020 of GCG & MR Committee;
  22. Prepared a progress report on KPI realization of GCG & MR Committee for Q2 2019;
  23. Prepared a Duty Implementation Report and KPI 2019 realization of GCG & MR Committee KPI;

Realisasi kinerja Komite GCG & MR secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk pencapaian KPI Komite GCG & MR. Pada tahun 2019, KPI Komite GCG & MR yang terdiri dari 8 program kerja terpenuhi seluruhnya dengan skor 100.

Realization of GCG & MR Committee's performance is indicated quantitatively in GCG & MR Committee's KPI achievements. In 2018, GCG & MR Committee's KPI consisted of 8 work programs that were fully implemented with a score of 100.

### Rapat Komite GCG & MR

Sepanjang tahun 2019 Komite menyelenggarakan 12 kali rapat termasuk rapat dengan Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Komite GCG & MR 100%.

### GCG & MR Committee Meetings

During 2018, there were 12 meetings, including meetings with the Board of Commissioners, with 100% attendance of GCG & MR Committee members.

### Kebijakan Suksesi Direksi

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan Perusahaan di masa depan, Perusahaan menyelenggarakan program pengembangan kompetensi di bidang teknis, manajemen, strategi pengembangan usaha, dan sebagainya. Pada saatnya pergantian kepemimpinan, Perusahaan akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Direksi dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite GCG & MR yang salah satu bidangnya adalah menjalankan fungsi pengawasan di bidang nominasi dan remunerasi. Kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Pemegang Saham Utama yaitu PT PLN (Persero) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

### Succession Policy for the Board of Directors

To prepare candidates for its future leaders, the Company runs competency development programs in technical, management, business development strategies and so forth. At the time of leadership change, the Company will propose internal candidates through an election conducted by the Board of Directors and facilitated by the Board of Commissioners through GCG & MR Committee, whose main tasks include supervision on nomination and remuneration. The internal candidates are then proposed to Major Shareholder, namely PT PLN (Persero), to undergo a fit and proper test.

## Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Kebijakan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kandidat Direktur yang diangkat oleh RUPS dapat berasal dari internal Perusahaan, anak perusahaan PLN dan atau kalangan profesional eksternal.
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Direktur oleh PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham, atau pihak independen yang ditunjuk.
3. Jumlah dan komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, tepat dan cepat.
4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta atau jabatan lainnya di perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Succession policy for the Board of Directors is as follows:

1. Candidates for the Board of Directors appointed by GMS may come from the Company's internal, PLN's subsidiaries and/or external professionals.
2. Appointment of Directors is carried out through fit and proper test mechanism on candidates for Directors by PT PLN (Persero) as Shareholder, or appointed independent party.
3. Number and composition of the Board of Directors are adjusted to the needs and developments of the Company so as decision making process can run effectively, precisely and quickly.
4. Candidates for Directors are prohibited from holding multiple positions as Director or Commissioner in SOE/ROE/private company or other positions in other company that may lead to conflict of interest, except upon GMS approval.

## SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris untuk memimpin dan menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris diatur di dalam *Board Manual*, yakni sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris;
2. Menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, laporan hasil pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan;
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, yaitu RKA, realisasi KPI berkala, laporan pengawasan dan realisasi KPI;
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat, pembuatan risalah rapat, serta tugas lain yang terkait;

## SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of the Board of Commissioners is appointed by the Board of Commissioners to lead and carry out the Secretariat functions of the Board of Commissioners. Secretary of the Board of Commissioners comes from outside the Company and has a term of office set by the Board of Commissioners.

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners are regulated in Board Manual, as follows:

1. Leading and coordinating secretariat activities within the Board of Commissioners, which will be further regulated by the Board of Commissioners;
2. Providing information needed by the Board of Commissioners, such as periodic reports from the Board of Directors (monthly reports, quarterly reports, annual reports, SPI audit reports) as well as other reports/information regarding the Company;
3. Compiling and finalizing reports and documents which are the obligations of the Board of Commissioners, namely work plan and budget (RKA), periodic KPI realization, supervisory report and KPI realization;
4. Organizing the Board of Commissioners' meetings, preparing and sending invitations, delivering meeting materials, preparing minutes of meetings, and other related tasks;

**Sekretaris Dewan Komisaris**  
Secretary of the Board of Commissioners

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Dewan Komisaris;</li> <li>6. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak yang berkepentingan;</li> <li>7. Menjadi penghubung (<i>liaison officer</i>) Dewan Komisaris dengan pihak lain;</li> <li>8. Jika diberikan penugasan oleh Dewan Komisaris melalui surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut;</li> <li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Coordinating and facilitating the activities of the Board of Commissioners Committees;</li> <li>6. Compiling and administering minutes of meetings and the Board of Commissioners documents and sending meeting decisions to interested parties;</li> <li>7. As a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties;</li> <li>8. If assigned by the Board of Commissioners through a written assignment letter, access notes or information about employees, funds, assets and other resources belonging to the Company related to the implementation of their duties and the assignment result should be reported in writing;</li> <li>9. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.</li> </ol> |
|--|--|

**Profil Sekretaris Dewan Komisaris**

**Profile of the Secretary of the Board of Commissioners**



**Murniati**

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	64 tahun	64 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	S1 Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Nasional (STTN) (1993)	Bachelor of Electrical Engineering, Sekolah Tinggi Teknik Nasional (STTN) (1993)
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	Keputusan Dewan Komisaris No. 005.SK/DK/HP/2017	Decree of the Board of Commissioners No. 005.SK/DK/HP/2017
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Senior Bidang Umum pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2015)</li> <li>• Manajer Senior Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) (2009-2011)</li> <li>• Ahli Analisis Investasi pada Direktorat Perencanaan PT PLN Persero) (2000-2009)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Staff of General Affair at Secretariat of Board of Commissioners, PT PLN (Persero) (2012-2015)</li> <li>• Senior Manager of Investor Relations and Corporate Governance at Corporate Secretariat, PT PLN (Persero) (2009-2011)</li> <li>• Investment Analyst Expert at Directorate of Planning, PT PLN Persero) (2000-2009)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap	Does not have concurrent positions



## Corporate Secretary

### Corporate Secretary

#### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Trainings and Competence Development

Mengoordinasikan dan mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris tahun 2019 ke unit-unit sebagai berikut:

- Region 1 Jawa Barat di Bandung
- Region 6 Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru
- Region 2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di DI Yogyakarta
- Region 5 DKI Jakarta di Jakarta

Coordinating and following work visit of Board of Commissioners in 2019 to the following units:

- Region 1 West Java in Bandung
- Region 6 Riau and Riau Islands in Pekanbaru
- Region 2 Central Java and DI Yogyakarta in DI Yogyakarta
- Region 5 DKI Jakarta in Jakarta

### Ringkasan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 kali rapat.
2. Membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 risalah.
3. Menyelenggarakan rapat Komite sebanyak 20 kali rapat.
4. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
5. Menyelenggarakan program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris.
6. Membuat Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris tahun 2020.
7. Membuat Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2019.
8. Membuat Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris triwulanan tahun 2019.
9. Mengadministrasikan surat-surat masuk atau ditujukan kepada Dewan Komisaris sebanyak 56 surat, dan surat-surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris baik sebagai jawaban dari surat masuk, maupun dalam jenis surat lainnya sebanyak 100 surat.

### Activity Report of Secretary of the Board of Commissioners

Throughout 2019, Secretary of the Board of Commissioners has carried out the following tasks:

1. Held 14 meetings of the Board of Commissioners.
2. Prepared and managed 14 minutes of the Board of Commissioners' meetings.
3. Held 20 meetings of Committee.
4. Organized working visit of the Board of Commissioners.
5. Organized competency improvement programs for the Board of Commissioners.
6. Prepared 2020 Work Plan and KPI of the Board of Commissioners.
7. Prepared Supervisory Report and KPI of the Board of Commissioners for 2019.
8. Prepared quarterly KPI Realization Report 2019 of the Board of Commissioners.
9. Administered 56 incoming letters or addressed to the Board of Commissioners, and 100 letters issued by the Board of Commissioners as a response to incoming letters, and other types of letters.

## CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary merupakan nomenklatur jabatan untuk Sekretaris Perusahaan di lingkungan grup PT PLN (Persero) yang menjalankan fungsi *liaison officer*, untuk menjembatani kepentingan Perusahaan dengan pihak eksternal, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Corporate Secretary, Komunikasi, Hukum dan Kinerja bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham.

## CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a designation within PT PLN (Persero) group that carries out the liaison officer function, to communicate the Company's interests to external parties and to ensure the Company's compliance with GCG and the applicable laws and regulations in carrying out its operations.

Corporate Secretary, Communication, Legal and Performance reports directly to President Director. Appointment and termination of Corporate Secretary are based on Decision of the Board of Directors upon approval of the Board of Commissioners and reported to Shareholders.



**Corporate Secretary**  
Corporate Secretary

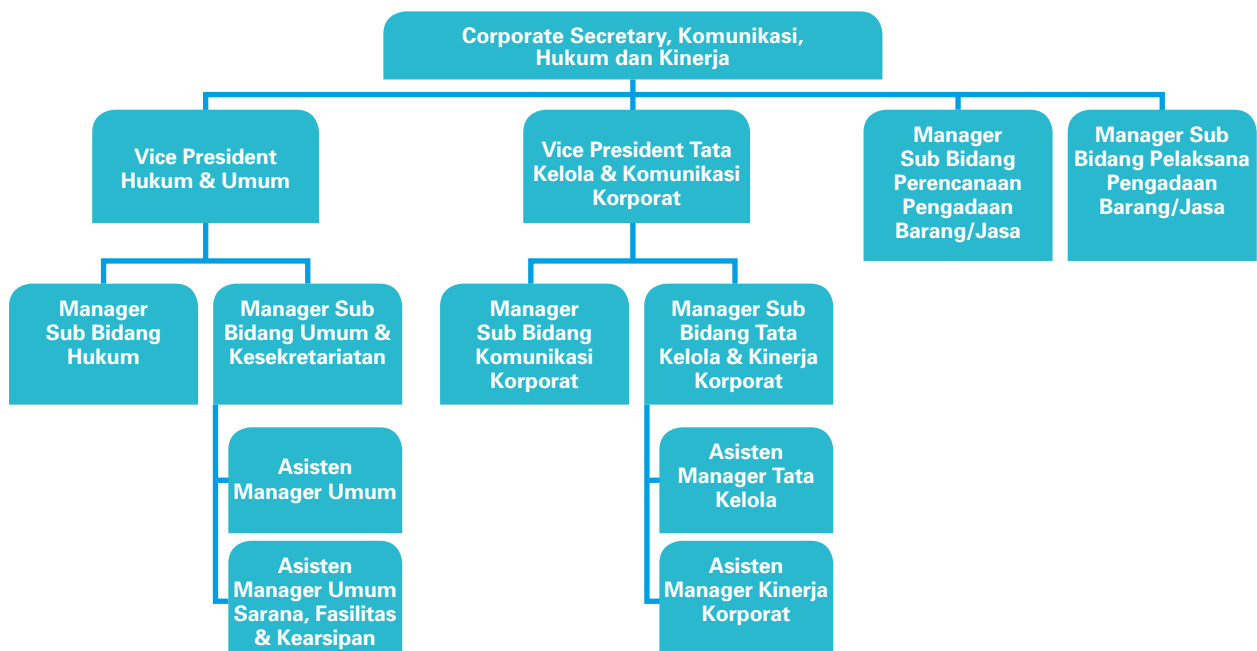
**Struktur Organisasi Corporate Secretary**

Struktur organisasi Corporate Secretary, Komunikasi, Hukum dan Kinerja mengacu pada Peraturan Direksi No. 0012.P/DIR-HP/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT Haleyora Power Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Corporate Secretary dibantu oleh Vice President (VP) Hukum & Umum dan VP Tata Kelola dan Komunikasi Korporat.

**Corporate Secretary Organizational Structure**

Corporate Secretary, Communication, Legal and Performance organizational structure is stipulated in Regulation of the Board of Directors No. 0012.P/DIR-HP/2018 dated August 1, 2018 concerning Organizational Structure and Position Formation of PT Haleyora Power Head Office. In carrying out its duties and responsibilities, Corporate Secretary is assisted by Vice President (VP) Legal & General Affair and VP Corporate Governance and Communication.

**Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan, Komunikasi, Hukum, dan Kinerja PT Haleyora Power**



## Corporate Secretary

Corporate Secretary

### Profil Corporate Secretary

### Profile of Corporate Secretary



Erwin Ardianto

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	43 tahun	43 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Airlangga (2000)	Bachelor of Economics in Accounting, Airlangga University (2000)
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	Keputusan Direksi No. 008.K/SDM.00.03/DIR-HP/2018 tentang Penempatan Pegawai Tugas Karya tanggal 9 Februari 2019	Decree of the Board of Directors No. 008.K/SDM.00.03/DIR-HP/2018 concerning the Placement of Seconded Employee dated February 9, 2019
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajer Administrasi PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) Cilegon (2017-2018)</li> <li>Manajer Akuntansi Kinerja dan Tata Kelola Keuangan PT Indonesia Power (2017)</li> <li>Manajer Akuntansi Manajemen PT Indonesia Power (2015-2017)</li> <li>Manajer Pengembangan Sistem Akuntansi PT Indonesia Power (2013-2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administration Manager at PT Indonesia Power - Generation Service Unit (UJP) of Cilegon (2017-2018)</li> <li>Performance Accounting and Financial Governance Manager at PT Indonesia Power (2017)</li> <li>Management Accounting Manager at PT Indonesia Power (2015-2017)</li> <li>Accounting System Development Manager at PT Indonesia Power (2013-2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap	Does not have concurrent positions
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	Pemateri Diklat Supervisory Education I Batch V – VI Tahun 2018 (28 Januari – 6 Februari 2019)	Speaker on Supervisory Education Training I Batch V - VI Year 2018 (28 January - 6 February 2019)

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi hubungan dengan pihak eksternal dan pemangku kepentingan;
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan GCG, memastikan Perusahaan memiliki perangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG;
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesekretariatan Perusahaan, termasuk di dalamnya integrasi kegiatan

### Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Corporate Secretary are as follows:

1. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies on relations with external parties and stakeholders;
2. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies on GCG management, ensuring that the Company has GCG tools and guidelines as well as monitoring and implementing GCG;
3. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies on secretariat management, including integration of activities of the Board of



## Fungsi Audit Internal (Satuan Pengawas Internal) Internal Audit Function

Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pemangku kepentingan lainnya;

4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, melalui, tetapi tidak terbatas pada, media cetak dan media digital.
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi dan laporan manajemen, laporan tahunan, statistik Perusahaan, dan laporan Perusahaan lainnya.

### Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary

Selama tahun 2019, Corporate Secretary telah melaksanakan tugas, antara lain:

1. Melaksanakan implementasi GCG termasuk melaksanakan kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) GCG;
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan RKAP tahun 2019 dan Pengesahan Kontrak Manajemen/KPI tahun 2018 tanggal 10 Januari 2019;
3. Melaksanakan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tanggal 13 Juli 2019;
4. Melaksanakan program-program CSR;
5. Menerbitkan produk hukum.

## FUNGSI AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)

Fungsi Audit Internal di Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan audit; serta mengevaluasi dan melakukan pembinaan fungsi SPI yang tidak terbatas pada fungsi audit internal, audit khusus dan kegiatan konsultasi, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan GCG.

SPI memegang peranan penting dalam membantu Perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola. SPI pun berperan dalam memastikan seluruh proses bisnis yang dijalankan Perusahaan dilakukan sesuai dengan kaidah, peraturan dan ketentuan yang berlaku guna mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha Perusahaan.

Directors, the Board of Commissioners, General Meeting of Shareholders (GMS) and other stakeholders;

4. Ensuring planning, implementation and evaluation of the Company's information availability that can be accessed by stakeholders, through, but not limited to, print and digital media.
5. Ensuring planning, implementation and evaluation of availability of management information and reports, annual reports, corporate statistics and other corporate reports.

### Implementation of Corporate Secretary's Duties

During 2019, Corporate Secretary performed the following duties:

1. Performed GCG implementation including performing GCG self-assessment;
2. Organized Annual GMS on RKAP 2019 and Ratification of Management Contract/KPI 2019 on January 10, 2019;
3. Organized Annual GMS on Approval for Annual Report and Ratification of Financial Statements for Financial Year 2018 on July 13, 2019;
4. Implementation of CSR activities;
5. Issuance of legal products.

## INTERNAL AUDIT FUNCTION

Internal Audit Function in the Company is carried out by Internal Audit Unit (SPI). SPI is responsible for leading, developing plans and conducting audit activities; as well as evaluating and developing SPI functions that are not limited to the functions of internal audit, special audit and consulting, but also in the context of GCG implementation.

SPI plays a key role in helping the Company achieves its goals through a systematic, orderly and structured approach to evaluate and increase effectiveness of risk management, internal control and governance processes. SPI also plays a role in ensuring that all business processes carried out by the Company are in accordance with the applicable rules and regulations and to support the Company's business growth and sustainability.

## Fungsi Audit Internal (Satuan Pengawas Internal)

### Internal Audit Function

SPI bersifat independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal (KSPI). KSPI diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan KSPI didasarkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Fungsi Audit Internal baik dari segi kualifikasi, kompetensi, keahlian dan pengalaman kerja.

SPI is independent and is led by Head of Internal Audit Unit (KSPI). KSPI was appointed and terminated directly by President Director upon approval of the Board of Commissioners. Appointment of KSPI is based on capability, competence and expertise according to the needs for performing duties of Internal Audit Function, in terms of qualification, competence, expertise and work experience.

### Profil Kepala SPI

### Head of SPI Profile



Gathut Rudi Warianto

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia</b> Age	54 tahun	54 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Surabaya (1991)</li> <li>Pemegang Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Mechanical Engineering from Surabaya Institute of Technology (1991)</li> <li>Holder of Qualified Internal Auditor (QIA) Certification</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	Keputusan Direksi No. 089.K/DIR-HP/2016 tentang Penempatan Pegawai Tugas Karya tanggal 19 Juli 2016	Decree of the Board of Directors No. 089.K/DIR-HP/2016 concerning the Placement of Seconded Employee dated July 19, 2016
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senior Specialist II Audit Distribusi pada Bidang Audit Regional VI SPI PT PLN (Persero) (2015)</li> <li>Senior Specialist II Audit Transmisi dan Distribusi pada Deputy Group Audit Regional 7A, Group Head Audit Regional 7, Inspektorat Audit Regional Jawa Bagian Barat, SPI PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</li> <li>Deputy Group Audit Regional 20A pada Group Head Audit Regional 20, Inspektorat Audit Regional, SPI PT PLN (Persero) (2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senior Specialist II of Distribution Audit at Regional Audit VI, Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) (2015)</li> <li>Senior Specialist II Transmission and Distribution Audit at Deputy Group Audit of Regional 7A, Group Head Audit of Regional 7, Regional Inspectorate Audit of Western Part Java, Internal Audit Unit PT PLN (Persero) (2016)</li> <li>Deputy Group Audit of Regional 20A at Audit Group Head of Regional, Regional Audit Inspectorate, Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) (2016)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak memiliki jabatan rangkap	Does not have concurrent positions
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop Asset Management Contract, 5-6 Maret 2019</li> <li>Leadership and Innovation, 25-26 Maret 2019</li> <li>Workshop Manajemen Risiko, 25-26 Maret 2019</li> <li>X-Men 4-Expert, 24-25 Juni 2019</li> <li>KPKU, 22-23 Agustus 2019</li> <li>Indonesia HR Summit, 18-19 September 2019</li> <li>Quality Risk Governance Profesional, 28-30 Oktober 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asset Management Contract Workshop, March 5-6, 2019</li> <li>Leadership and Innovation, March 25-26, 2019</li> <li>Risk Management Workshop, March 25-26, 2019</li> <li>X-Men 4-Expert, June 24-25, 2019</li> <li>KPKU, August 22-23, 2019</li> <li>Indonesia HR Summit, September 18-19, 2019</li> <li>Professional Quality Risk Governance, October 28-30, 2019</li> </ul>

## Fungsi Audit Internal (Satuan Pengawas Internal) Internal Audit Function

### Struktur Organisasi SPI

Struktur organisasi SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0013.K/DIR-HP/2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi 023.K/DIR-HP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Haleyora Power. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala SPI dibantu oleh 2 orang Auditor.

### SPI Organizational Structure

SPI organizational structure is stipulated in Decision of Board of Directors No. 0013.K/DIR-HP/2016 concerning Amendment to Decision of the Board of Directors No. 023.K/DIR-HP/2014 concerning Organization and Work Procedures of PT Haleyora Power Head Office. In performing its duties and responsibilities, Head of SPI is assisted by 2 Auditor.



### Piagam SPI

SPI memiliki Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya. Piagam SPI telah menjadi panduan tugas SPI sejak 2 Juni 2014. Saat ini Piagam SPI tersebut sedang dievaluasi bersama Komite Audit untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan proses bisnis Perusahaan saat ini.

### SPI Charter

SPI has Internal Audit Charter as a guide in performing its duties. SPI Charter has been SPI task guide since June 2, 2014. Currently, SPI Charter is being evaluated by Audit Committee to adjust to the development of the Company's organization and business processes.

Piagam SPI memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mencakup uraian visi, misi dan atribut; kedudukan SPI; fungsi, tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup tugas SPI, peran SPI atas manajemen risiko; standar auditor yang berisi persyaratan profesional auditor dan SPI, lingkup kerja audit, pelaksanaan dan pelaporan audit, pengelola SPI; serta Kode Etik.

SPI Charter stipulates aspects relating to tasks implementation which include description of vision, missions and attributes; SPI position; functions, responsibilities, authorities, scope of SPI's duties, SPI's role in risk management; auditor standards that include professional requirements for auditors and SPI, scope of audit work, audit conduct and reporting, SPI manager; and Code of Conduct.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SPI meliputi:

1. Menyusun rencana, strategi, kebijakan dan prosedur pengawasan;
2. Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan, serta melakukan kajian berkala;
3. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan efektif, termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan, dan melakukan asesmen terhadap sistem tersebut secara rutin;

### Duties and Responsibilities

SPI's duties and responsibilities include:

1. Preparing audit plans, strategies, policies and procedures;
2. Monitoring achievement of audit objectives and strategies, and conducting periodic reviews;
3. Ensuring that the Company's internal control system runs effectively, including performing activities that can prevent irregularities and conducting routine assessment of the system;



## Fungsi Audit Internal (Satuan Pengawas Internal)

### Internal Audit Function

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha, antara lain meliputi bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan operasional;</li> <li>5. Melakukan kegiatan audit untuk mendorong terciptanya kepatuhan seluruh insan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>6. Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (<i>fraud</i>);</li> <li>7. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi objektif kepada <i>auditee</i> mengenai objek yang diaudit;</li> <li>8. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja;</li> <li>9. Mendukung penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;</li> <li>10. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya kepada Direktur Utama.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Performing supervisory functions in all business activities, including, among others, in accounting, finance, human resources (HR) and operations;</li> <li>5. Conducting audit activities to encourage compliance of the Company's personnel with the applicable laws and regulations;</li> <li>6. Conducting special audits (investigations) to uncover cases that have indications of abuse of authority, embezzlement and fraud;</li> <li>7. Providing improvement recommendations and objective information to auditee regarding the audited object;</li> <li>8. Providing consultation to all levels of management regarding efforts to improve effectiveness of internal control and other activities related to performance improvement;</li> <li>9. Supporting GCG implementation in the Company;</li> <li>10. Reporting all audit results to President Director.</li> </ol> |
|--|---|

## Laporan Pelaksanaan Tugas

SPI menjalankan kegiatan audit berbasis risiko dan konsultasi sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah direncanakan dan disetujui oleh Direktur Utama di awal tahun. Sepanjang tahun 2019, SPI telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

## Duties Implementation Report

SPI conducts audit activities in accordance with Annual Audit Work Program (PKPT) that is planned and approved by President Director at the beginning of the year. During 2019, SPI performed the following duties:

No.	Kegiatan Activity	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Jumlah Auditor Number of Auditor	Hari Audit Audit Days		Hari Orang Man Days
				On Desk	On Site	
1	Konsultasi <i>project team</i> proses bisnis HP1 Consultation of HP1 business process project team	1 Januari–31 Maret January 1–March 31	3	60	–	180
2	Konsultasi informal: a. Perencanaan pengadaan barang/jasa b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Informal consultation: a. Planning for goods/services procurement b. Implementation of goods/services procurement	Sesuai kebutuhan <i>auditee</i> According to the auditee needs	1	5	–	5
3	Audit berbasis risiko Region 5 Risk based audit in Region 5	25–27 Maret/March	4	1	2	12
4	Audit berbasis risiko Region 3 Risk based audit in Region 3	10–12 April/April	3	1	2	12



No.	Kegiatan Activity	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Jumlah Auditor Number of Auditor	Hari Audit Audit Days		Hari Orang Man Days
				On Desk	On Site	
5	Audit berbasis risiko PT HPI Risk based audit in PT HPI	24–28 Juni/June	4	3	–	20
6	Konsultasi <i>project team</i> proses bisnis HP2 Consultation of HP2 business process project team	2 Mei–28 Januari May 2–January 28	3	40	–	120
7	Konsultasi Informal Informal Consultation	Sesuai kebutuhan <i>auditee</i> According to the auditee needs	1	15	–	15
8	Audit berbasis risiko divisi (2 divisi + 2 region) Risk based audit in divisions (2 divisions + 2 regions)	1 Juli–27 September July 1–September 27	4	1	4	20
9	Konsultasi Informal Informal Consultation	Sesuai kebutuhan <i>auditee</i> According to the auditee needs	2	15	–	30
10	Audit berbasis risiko region (2 region) Risk based audit in regions (2 regions)	11 Oktober–27 Desember October 11–December 27	4 x 3	2	3	60
11	Konsultasi Informal Informal Consultation	Sesuai kebutuhan <i>auditee</i> According to the auditee needs	2	15	–	30

## AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Juli 2019, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan RSM, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018. Jasa audit KAP seluruhnya menjadi beban induk Perusahaan (PLN).

Kegiatan audit yang dilakukan KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan pada tahun 2019 mencakup:

- Audit Laporan Keuangan Konsolidasian;
- Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal;
- Review* atas laporan evaluasi kinerja Perusahaan.

Informasi mengenai KAP dan akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir serta opini audit, disajikan dalam tabel berikut:

## PUBLIC ACCOUNTANT

Based on Resolution of Annual GMS on July 13, 2019, the Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, members of RSM network, to audit Consolidated Financial Statements for Financial Year 2018. Services provided by KAP are entirely at the expense of the holding company (PLN).

Audit services provided by KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan in 2019 included:

- Audit of Consolidated Financial Statements;
- Audit of compliance with the laws and regulations and internal control;
- Review of the Company's performance evaluation report.

Information on KAP and public accountants who have audited the Company's Financial Statements for the past 5 years and audit opinions are presented in the following table:

## Manajemen Risiko Risk Management

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Opini Audit Audit Opinion
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Dedy Sukrisnadi	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Haryanto Sahari	Wajar, dalam semua hal yang material Fairly, in all material respect

## MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internal dan eksternal yang membuat ketidakpastian yang menimbulkan risiko bagi keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan sistem pengelolaan risiko yang mengacu pada standar penerapan manajemen risiko yang baik sejalan dengan praktik GCG. Fungsi manajemen risiko di Perusahaan dilakukan oleh Manajer Pengembangan Bisnis dan menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam penyiapan kerangka kerja pengelolaan risiko, penerapan proses manajemen risiko, memantau dan mengkaji kerangka kerja manajemen risiko. Setiap pimpinan unit kerja sebagai pemilik risiko (*risk owner*) bertanggung jawab atas pelaksanaan komitmen manajemen di unit kerjanya masing-masing untuk mewujudkan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegritasi sehingga visi dan misi Perusahaan dapat tercapai.

## RISK MANAGEMENT

The Company's business is affected by internal and external influences that create uncertainty which may risk the Company's business sustainability. Therefore, the Company implements risk management system that refers to the standards for good risk management in line with GCG practices. Risk management function in the Company is carried out by Business Development Manager who submits periodic reports to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Risk Management function is responsible for preparing risk management framework, implementing risk management process, monitoring and reviewing risk management framework. Each head of work unit as a risk owner is responsible for implementing management commitment in their work units to realize a comprehensive and integrated risk management system so that the Company's vision and mission can be achieved.

## Kerangka Penerapan Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada standar ISO 31000:2009 (*International Standard of Risk Management*). Tetapi pada beberapa hal, misalnya aspek kepatuhan, lingkup penerapan dan beberapa istilahnya mengacu pada COSO-Enterprise Risk Management (ERM) 2014.

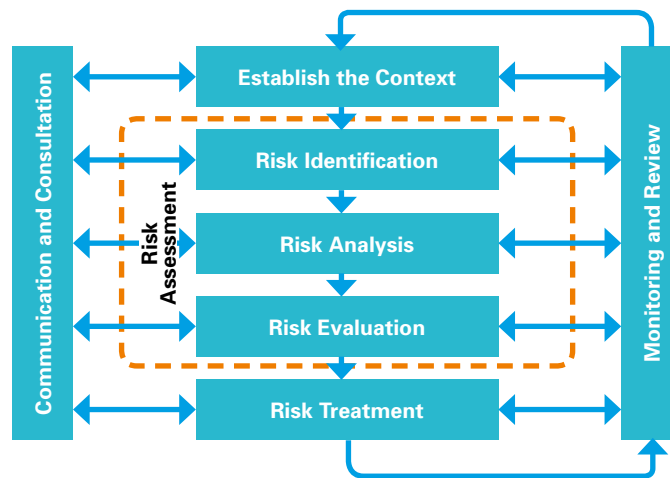
ERM merupakan proses penyusunan strategi yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasarannya serta mekanisme pengelolaan risiko-risiko tersebut agar berada dalam tingkat yang dapat diterima dan dapat memberikan kepastian bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan akan tercapai.

## Risk Management Framework

Risk management in the Company refers to ISO 31000:2009 (International Standard of Risk Management). However, in some cases, for example compliance aspect, scope of application and some of the terms refer to COSO-Enterprise Risk Management (ERM) 2014.

ERM is a process of developing a strategy designed to identify risks that can affect the Company's ability to achieve its goals and objectives as well as mechanisms for managing those tolerable risks and to providing assurance that the Company's goals and objectives will be achieved.

### Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000:2009 Risk Management Process based on ISO 31000:2009



## Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya

Perusahaan telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi dan merumuskan mitigasinya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

## The Company's Risks and Mitigations

The Company has identified the main types of risks faced by the Company and formulated mitigation as described in the following table:

**Manajemen Risiko**  
Risk Management

No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	<p><b>Disruptive condition: Perubahan kebijakan bisnis PLN.</b> Perubahan proses bisnis PLN dapat berdampak pada kontrak eksisting, seperti perubahan sistem operasi ketenagalistrikan seperti Gardu Induk tanpa Operator (GITO), perubahan operator APTK tersebar menjadi <i>command center</i>, pertimbangan efisiensi biaya dengan menghentikan pekerjaan REVASS dan <i>disruptive technology</i> lainnya seperti <i>two ways metering</i>. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang akan meningkatkan biaya pengakhiran tenaga kerja dan berkurangnya pendapatan.</p> <p><b>Disruptive condition: Changes to PLN's business policy.</b> Changes in PLN's business processes could have an impact on existing contracts, such as changes in electricity operating system including Substation Without Operator (GITO), changes in APTK operator to become <i>command center</i>, cost efficiency consideration by stopping REVASS work and other disruptive technologies, such as two-way metering. These could have an impact on reduced number of workers which would increase employment termination cost and reduce income.</p>	<p>Ekstrem</p> <p>Extreme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengambil alih <i>project multi years</i> dari <i>vendor</i> PLN non-HP dan memperluas layanan eksisting.</li> <li>Pengalihan tenaga kerja ke pengembangan bisnis baru seperti AMC dan ListriQu.</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan unit PLN untuk pengalihan tenaga kerja ke pekerjaan baru potensial untuk menghindari PHK tenaga kerja.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Took over multi-year projects from PLN's non-HP vendors and expanded the existing scope of services.</li> <li>Transferred workforce to new business developments, such as AMC and ListriQu.</li> <li>Improved coordination with PLN units for transfers of workers to potential new jobs to avoid layoffs of workers.</li> </ul>
2	<p><b>Program efisiensi belum efektif menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain karena kerusakan peralatan kerja (<i>alcker</i>) sebelum masa ekonomis, penyesuaian BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah, kenaikan harga BBM, harga barang dan jasa, pembayaran pesangon akibat tidak berlanjutnya kontrak/pekerjaan, adanya biaya-biaya di luar anggaran, dan efisiensi biaya tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya operasi dan mempengaruhi laba/rugi operasi sehingga KPI tidak tercapai.</p>	Tinggi	<p><b>Pengendalian BPP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengawasan mutu material melalui rekam jejak alker dari setiap <i>vendor</i>.</li> <li>Sosialisasi SOP penggunaan dan pemeliharaan alker yang benar secara masif.</li> <li>Menyusun Peraturan Direksi (Perdir) tentang hukuman bagi tenaga kerja yang lalai dalam poerasi dan pemeliharaan alker yang benar.</li> <li>Menindaklanjuti laporan pemeriksaan alat kerja.</li> </ul> <p><b>Optimalisasi manajemen rantai pasok (SCM) pengadaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menambah jumlah Daftar Pemasok Terpilih (DPT) agar proses pengadaan menjadi lebih kompetitif untuk mendapatkan alker dengan kualitas terbaik.</li> <li>Menerapkan <i>blacklist</i> untuk <i>vendor</i> yang memasok material di bawah spesifikasi yang disepakati.</li> </ul> <p><b>Pengendalian periode penagihan piutang (COP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kontrol secara harian.</li> <li>Menggunakan aplikasi HOME untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, <i>reporting</i> dan <i>monitoring</i> progres penagihan.</li> </ul>



No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	<p><b>Efficiency program was not effective in reducing Cost of Revenues (BPP).</b> The Company faced this risk, among others, due to damaged work equipment (alker) before the end of economic period, adjustment of BPJS health and employment according to government regulations, increases in fuel prices, prices of goods and services, severance pay due to discontinued contracts/works, non-budgetary costs and cost efficiency were not according to plan. These could have an impact on increasing operating costs and affect operating profit/loss so that KPI were not achieved.</p>	High	<p><b>BPP Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Improved material quality control through work equipment track record of each vendor.</li> <li>Massive socialization of SOP for proper use and maintenance of work equipment.</li> <li>Prepared the Board of Directors Regulation (Perdir) concerning penalties for workers who are negligent in proper use and maintenance of work equipment.</li> <li>Followed up on work equipment inspection reports.</li> </ul> <p><b>Optimization of procurement supply chain management (SCM):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Increased the number of Selected Supplier List (DPT) so that procurement process became more competitive to get the best quality work equipment.</li> <li>Created blacklist for vendors who supplied materials under the agreed upon specifications.</li> </ul> <p><b>Accounts receivable collection period (COP) controls</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Performed daily control.</li> <li>Used HOME application for implementation of work in the field, reported and monitored billing progress.</li> </ul>
3	<p><b>Cash flow Perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain karena periode penagihan piutang (COP) jauh di bawah target dan adanya <i>project</i> non-RKAP dengan kebutuhan biaya <i>set up</i> yang besar sehingga mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban modal kerja, biaya pegawai, pembayaran <i>vendor</i> alat kerja dan kendaraan, dan sebagainya.</p> <p><b>The Company's cash flow was not sufficient to meet working capital needs.</b> The Company faced this risk, among others, because accounts receivable collection period (COP) was far below target and the existence of non-RKAP project with high set-up costs, which affected the Company's ability to meet working capital requirement, employee costs, payments for vendors of work equipment and vehicle, etc.</p>	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelayakan pemenuhan modal kerja di setiap <i>project</i> harus dapat dilakukan lebih awal.</li> <li>Pemenuhan target COP.</li> <li>Mencari alternatif lain sebagai sumber pemenuhan modal kerja.</li> </ul>
	<p><b>Undang-Undang Persaingan Usaha (UU 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).</b> Perusahaan menghadapi risiko adanya komplain dari <i>vendor</i> PLN non-HP terkait penugasan PLN ke Perusahaan yang dapat dianggap melanggar UU 5/1999 oleh KPPU sehingga akan berdampak tidak terpenuhinya target pendapatan/pangsa pasar.</p> <p><b>Business Competition Law (Law 5/1999) regarding Prohibition against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.</b> The Company faced the risk of complaints from PLN's non-HP vendors regarding assignment of PLN to the Company that could be deemed to have violated Law 5/1999 by KPPU so that it would result in not fulfilling revenues/market share targets.</p>	High	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meminta pendapat hukum pada SHK PT PLN (Persero).</li> <li>Membatasi pangsa pasar di unit PLN tidak lebih dari 50%.</li> <li>Penambahan pangsa pasar di atas 50% dapat diterima dengan pertimbangan tertentu seperti <i>vendor existing</i> wanprestasi, terminasi dan gagal lelang.</li> <li>Melakukan diversifikasi pasar <i>non-captive</i> (di luar PLN Group).</li> <li>Asked for legal opinion from PT PLN (Persero)'s SHK.</li> <li>Limited market share in PLN units to no more than 50%.</li> <li>An increase in market share above 50% could be accepted with certain considerations, such as the existing vendor's default, termination and failed auction.</li> <li>Diversified non-captive markets (outside PLN Group).</li> </ul>



**Manajemen Risiko**  
Risk Management

No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
5	<p><b>Tingginya tingkat komplain pelanggan.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain karena komunikasi dengan pihak pemberi kerja kurang terbangun dengan baik, penyediaan alat kerja dan APD belum sepenuhnya terpenuhi, SLA tidak tercapai, dan pelanggaran integritas oleh tenaga kerja. Hal tersebut akan berdampak merusak citra perusahaan.</p>	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun komunikasi secara periodik dengan pemberi kerja.</li> <li>Implementasi SPS4.</li> <li>Mengakomodir biaya untuk SPS4 dan RAB.</li> <li>Sosialisasi dan <i>upskilling</i> tenaga kerja untuk SPS4.</li> <li>Melaksanakan program <i>Voice of Customer</i></li> <li>Mengadakan forum rutin untuk testimoni pelanggan.</li> <li>Memenuhi kekurangan alat kerja dan APD.</li> </ul>
	<p><b>High level of customer complaints.</b> The Company faced this risk, among others, because communication with the employers was not well developed, provision of work equipment and PPE was not fully fulfilled, SLA was not achieved and integrity violations by workforce. These would have an impact on the Company's image.</p>	High	<ul style="list-style-type: none"> <li>Established periodic communication with employers.</li> <li>SPS4 implementation.</li> <li>Accommodated costs for SPS4 and RAB.</li> <li>Workforce socialization and upskilling for SPS4.</li> <li>Conducted Voice of Customer program.</li> <li>Held regular forums for customer testimonials.</li> <li>Fulfilled the shortage of work equipment and PPE.</li> </ul>
6	<p><b>SLA di bawah ekspektasi pemberi kerja.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain disebabkan manajemen WO (<i>working order</i>) dan pembagian pekerjaan kepada tim yang belum optimal, antrian WO dalam aplikasi APKT Mobile kurang fleksibel, dan fungsi pengawasan dan pengendalian belum efektif. Hal tersebut dapat menyebabkan citra Perusahaan menjadi buruk karena kualitas pelayanan tidak memenuhi harapan pelanggan, dan meningkatkan beban denda SLA sehingga target pendapatan usaha tidak tercapai.</p>	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki sistem manajemen WO.</li> <li>Evaluasi harian/<i>daily activity report</i> melalui aplikasi HOME.</li> <li>Pelatihan <i>flat management</i> untuk pengaturan WO dan crew.</li> </ul>
	<p><b>SLA was below employer expectations.</b> The Company faced this risk due to, among others, the management of WO (<i>working order</i>) and work distribution to the teams that was not optimal, queue of WO in APKT Mobile application was less flexible, as well as supervision and control functions were not yet effective. These could harm the Company's image because the quality of services did not meet customer expectations and increased SLA penalty expense so that operating revenues target was not achieved.</p>	High	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improved WO management system.</li> <li>Daily activity report through HOME application.</li> <li>Flat management training for WO and crew arrangements.</li> </ul>
7	<p><b>Budaya HP Berintegritas belum menjadi budaya di tingkat tenaga kerja.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini yang dapat berdampak pada pelanggaran integritas pelayanan pelanggan oleh tenaga kerja dan tenaga kerja terlibat narkoba dan kriminal. Hal ini akan merusak citra Perusahaan dan PLN, menyebabkan <i>turnover</i> tenaga kerja tinggi dan SLA tidak tercapainya.</p>	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pembinaan dan internalisasi budaya perusahaan kepada seluruh tenaga kerja.</li> <li>Menyediakan cadangan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dengan bekerja sama dengan PUSDIKLAT, sekolah-sekolah tingkat SMK, dan sebagainya.</li> <li>Melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), rumah sakit dan dokter yang ditunjuk Perusahaan dalam rangka pelaksanaan MCU.</li> <li>Melakukan asesmen melalui psikotes.</li> <li>Menerapkan SPS4 dalam layanan kepada pelanggan.</li> <li>Melakukan <i>sampling</i> dan survei kepuasan pelanggan.</li> </ul>



No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	<p><b>HP Culture with Integrity did not become a culture at workforce level.</b> The Company faced this risk that could lead to violations of integrity of customer service by workforce and the workforce involved in drugs and crimes. These would harm the images of the Company and PLN, causing high workforce turnover and not achieving SLA.</p>	High	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encouraged guidance and internalization of corporate culture for all workforce.</li> <li>• Provided workforce reserve according to competence and needs by cooperating with PUSDIKLAT, vocational schools and so on.</li> <li>• Cooperated with National Narcotics Agency (BNN), hospitals and doctors appointed by the Company for MCU.</li> <li>• Conducted assessment through psychological test.</li> <li>• Implemented SPS4 in customer service.</li> <li>• Conducted customer satisfaction sampling and survey.</li> </ul>
8	<p><b>Implementasi AMC tidak terealisasi tepat waktu.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain karena belum ada kesepakatan pemangku kepentingan (Divisi Pembina Anak Perusahaan dan Divisi Regional), terkait revisi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 734, konsep dan sosialisasi AMC belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan konsep AMC belum sepenuhnya dipahami oleh unit-unit PLN, dasar hukum pelaksanaan bisnis baru/AMC belum tersedia, sehingga AMC belum dapat diimplementasikan.</p> <p><b>AMC implementation was not realized on time.</b> The Company faced this risk, among others, because there was no stakeholder agreement (Subsidiary Supervisory Division and Regional Division), regarding amendment to Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 734, AMC concept and socialization were not optimal. These caused AMC concept not to be fully understood by PLN units, legal basis for new business/AMC implementation was not available, so that AMC could not be implemented yet.</p>	Tinggi	<p>Melakukan sosialisasi bersama Divisi PFM PT PLN (Persero) tentang pemahaman AMC kepada Divisi Operasional Regional dan mempercepat proses revisi Perdir 734.</p>
	<p><b>GCG implementation was not improved according to the target.</b> The Company faced this risk, among others, due to the lack of understanding of business process owners (BPO) regarding GCG assessment, the lack of information disclosure and transparency aspects and the lack of consistency in fulfilling the evidence for each activity. These resulted in low GCG assessment score.</p>	High	<p>Conducted socialization with PFM Division of PT PLN (Persero) about understanding of AMC to Regional Operating Division and accelerated amendment process to Perdir 734.</p>
9	<p><b>Implementasi GCG tidak mengalami peningkatan sesuai target.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain disebabkan tingkat pemahaman <i>business process owner</i> (BPO) yang masih kurang terkait penilaian GCG, aspek pengungkapan informasi dan transparansi belum optimal dan pemenuhan eviden pada setiap aktivitas belum konsisten. Hal ini menyebabkan skor penilaian GCG rendah.</p> <p><b>GCG implementation was not improved according to the target.</b> The Company faced this risk, among others, due to the lack of understanding of business process owners (BPO) regarding GCG assessment, the lack of information disclosure and transparency aspects and the lack of consistency in fulfilling the evidence for each activity. These resulted in low GCG assessment score.</p>	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi/<i>workshop</i> di seluruh level.</li> <li>• Memperbaiki dan memelihara <i>website</i> korporat, mengikuti <i>award</i> GCG dan <i>Annual Report Award</i> (ARA).</li> <li>• Mengkaji kebijakan pendukung GCG (<i>Board manual</i> Direksi, Pedoman GCG, COC) dan perbaikan proses bisnis.</li> </ul>
	<p><b>GCG implementation was not improved according to the target.</b> The Company faced this risk, among others, due to the lack of understanding of business process owners (BPO) regarding GCG assessment, the lack of information disclosure and transparency aspects and the lack of consistency in fulfilling the evidence for each activity. These resulted in low GCG assessment score.</p>	High	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducted socializations/workshops at all levels.</li> <li>• Refined and maintained corporate website, participated in GCG award and Annual Report Award (ARA).</li> <li>• Reviewed supporting policies for GCG (Board of Directors manual, GCG Guidelines, COC) and business processes re-engineering.</li> </ul>

**Manajemen Risiko**  
Risk Management

No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
10	<p><b>Terjadi kecelakaan kerja fatal.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini karena masih terdapat kontrak yang belum mengakomodir Pengawas K3 serta ketidakdisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan SOP, <i>hygiene factor</i> dan pedoman <i>safety, integrity, quality</i>. Hal ini akan berdampak pada kegagalan memenuhi target nihil kecelakaan, citra Perusahaan memburuk, psikologi SDM, cacat/meninggal dunia, dan pengurangan nilai KPI.</p> <p><b>Fatal work accident.</b> The Company faced this risk because there were contracts that did not accommodate K3 Supervisor and the lack of discipline in the workforce in implementing SOP, hygiene factors and guidelines for safety, integrity, quality. These would have an impact on inability to meet zero accident target, deteriorated corporate image, human resource psychology, disability/death and lower KPI scores.</p>	<p>Ekstrem</p> <p>Extreme</p>	<p><b>Mitigasi eksternal (dengan PLN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>addendum</i> sesuai dengan regulasi K3 di setiap kontrak.</li> <li>Melakukan survei <i>Hygiene Factor</i> bersama Divisi K3LH dan unit PLN.</li> </ul> <p><b>Mitigasi internal HP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>setup</i> untuk sertifikasi SMK3.</li> <li>Meningkatkan kompetensi pengawas K3 melalui pelatihan TOT.</li> <li>Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</li> </ul> <p><b>External mitigations (with PLN)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conducted addendum in accordance with K3 regulation in each contract.</li> <li>Conducted Hygiene Factor survey with K3LH Division and PLN units.</li> </ul> <p><b>HP Internal Mitigations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setup for SMK3 certification.</li> <li>Enhanced the competence of K3 supervisors through TOT training.</li> <li>Application of reward and punishment.</li> </ul>
11	<p><b>Produk ListriQu belum dikenal/direspons pelanggan.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan produk baru terbatas, tidak efektif dan terlambat dilaksanakan sehingga kurang dikenal oleh pelanggan,</li> <li>Pasar cenderung masih merasa lebih nyaman dengan sistem eksisting,</li> <li>Penolakan petugas Yantek menggunakan aplikasi ListriQu,</li> </ol> <p>Hal tersebut akan berdampak target pendapatan tidak tercapai, pengembangan bisnis baru tidak memenuhi kriteria finansial dan operasional sesuai yang direncanakan</p> <p><b>ListriQu products were not recognized/ responded to by customers.</b> The Company faced this risk, among others, because:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Introduction of new products was limited, ineffective and late so that it was not well known by customers,</li> <li>Market was still comfortable with the existing system,</li> <li>Yantek officers refused to use ListriQu application.</li> </ol> <p>Theses would result in revenues achievement below target, new business development did not meet financial and operational criteria as planned.</p>	<p>Tinggi</p> <p>High</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi produk ListriQu secara masif kepada pelanggan melalui media sosial, brosur.</li> <li>Membina dan mengawasi <i>crew</i> dalam mengimplementasi ListriQu melalui aplikasi ListriQu.</li> <li>Membuat <i>daily activity report</i>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Massive socialization of ListriQu products to customers through social media and brochures.</li> <li>Advising and supervising the crew on ListriQu implementation through ListriQu application.</li> <li>Prepared daily activity report.</li> </ul>
12	<p><b>Penugasan ke anak perusahaan HPI terkendala karena kepemilikan saham HP di HPI &lt;99%.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini karena kepemilikan saham HP di HPI masih 95%. Hal ini akan menyebabkan anak perusahaan tidak dapat diberikan penugasan.</p>	<p>Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan penambahan anggaran investasi untuk pengambilalihan saham minoritas di HPI.</li> <li>Melaksanakan pengambilalihan saham minoritas YPK PLN di HPI.</li> </ul>



No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	<p><b>Assignments to HPI subsidiaries were constrained because HP's share ownership in HPI was &lt;99%.</b> The Company faced this risk because HP's share ownership in HPI was still 95%. This would prevent assignment to the subsidiary.</p>	High	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposed additional investment budget for taking over of minority shares in HPI.</li> <li>Took over YPK PLN's minority shares in HPI.</li> </ul>
13	<p><b>Keharusan mengakomodir tenaga kerja impasing yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi memadai.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini antara lain karena pihak pemberi kerja meminta Perusahaan untuk tetap menjaga kondusivitas dan kontinuitas layanan dan tidak semua kontrak penugasan antara Perusahaan dengan pemberi kerja dapat mengakomodir biaya pembinaan. Hal tersebut akan berdampak pada kebutuhan kualifikasi tenaga kerja tidak terpenuhi (kendala pendidikan minimum SLTA) sehingga upaya peningkatan pelayanan dengan dukungan SDM yang berkualitas tidak terlaksana, biaya pengembangan SDM meningkat, dan posisi jabatan tidak dapat diisi karena persyaratan spesifikasi tidak terpenuhi.</p> <p><b>The need to accommodate assigned (in-passing) workforce who did not possess adequate competence qualifications.</b> The Company faced this risk, among others, because employer asked the Company to maintain conductivity and continuity of service and not all assignment contracts between the Company and employer could accommodate coaching costs. This would have an impact on meeting workforce qualification needs of (minimum high school education was a constraint) so that services improvement could not be supported by quality human resources, increase in human resource development costs, and positions with specification requirements could not be filled.</p>	Ekstrem  Extreme	<p>Mengevaluasi tenaga kerja <i>in-passing</i> dalam kurun waktu minimal 6 bulan sebelum menjadi PKWTT dan menyelenggarakan pelatihan untuk sertifikasi kompetensi tenaga Kerja.</p> <p>Evaluated assigned (in-passing) workforce within a minimum period of 6 months before becoming PKWTT and organized training for workforce competence certification.</p>
14	<p><b>Terjadi mogok kerja/pengunduran diri tenaga kerja serentak.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini karena saat ini tenaga kerja HP Group lebih dari 20 ribu tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT. Bila terjadi mogok kerja sebagai bentuk protes atau menekan manajemen untuk merubah suatu kebijakan, akan menimbulkan kerugian yang besar karena Perusahaan melayani PLN yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang sangat luas. Namun demikian, mogok kerja merupakan hak setiap karyawan yang dilindungi undang-undang. Dampak yang dapat timbul antara lain citra Perusahaan memburuk, pelayanan kepada PLN terhenti, kerusakan alat dan aset jika terjadi tindakan anarki, dan SLA tidak tercapai sehingga berpotensi denda dan kerugian finansial perusahaan.</p>	Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan dan internalisasi budaya perusahaan kepada seluruh tenaga kerja melalui sosialisasi, <i>e-learning</i>, festival budaya, termasuk pelaksanaan <i>Couching</i>.</li> <li><i>Mentoring</i> dan <i>Counselling</i> (CMC), serta konsisten dalam menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</li> <li>Mengajukan <i>addendum</i> kontrak ke PLN terkait penggajian dan tunjangan ketenagakerjaan lainnya sesuai sistem yang berlaku dan UU ketenagakerjaan.</li> <li>Menyediakan tenaga kerja cadangan/pengganti atau menyediakan bank data tenaga kerja siap kontrak.</li> <li>Membentuk tim investigasi terkait kasus pemogokan untuk mendapatkan informasi penyebab pemogokan.</li> </ul>

## Manajemen Risiko Risk Management

No.	Jenis Risiko yang Dihadapi Type of Risks	Tingkat Pengendalian Risiko Level Control Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	<p><b>Mass strike/resignation of workforce.</b> The Company faced this risk because currently HP Group has more than 20 thousand workforce with PKWT and PKWTT status. If there was a strike to protest or to force management to change a policy, it would cause huge losses because the Company served PLN whose business activities serve the general public. However, strike is the right of every employee which is protected by the law. The impact that might arise included deteriorated image of the Company, stopped services to PLN, damaged equipment and assets in the event of anarchism and SLA not being achieved so that there was potential for fines and financial losses to the Company.</p>	Extreme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conducted guidance and internalization of corporate culture to workforce through socialization, e-learning, cultural festival, including Coaching.</li> <li>Conducted Mentoring and Counselling (CMC) and consistent implementation of reward and punishment.</li> <li>Submitted contract addendum to PLN regarding payroll and other employment benefits according to the applicable system and the labor law.</li> <li>Provided backup/replacement workforce or contract-ready workforce database.</li> <li>Formed investigation team related to strike cases to obtain information on the causes of the strike.</li> </ul>
15	<p><b>PLN tidak dapat menerima pasal terkait hak tenaga kerja sesuai regulasi seperti selisih uang pengakhiran, lebur, dan tunjangan cuti dimasukkan ke dalam kontrak.</b> Perusahaan menghadapi risiko ini karena acuan konsep pemborongan pekerjaan oleh PLN menyebabkan hal-hal terkait selisih uang pengakhiran, tunjangan cuti dan lembur tidak dapat dipenuhi oleh PLN. Hal ini menimbulkan tuntutan tenaga kerja atas tunjangan cuti dan lembur yang mengakibatkan kontrak tidak terlaksana. Selisih uang pengakhiran dapat menjadi beban keuangan Perusahaan.</p> <p><b>PLN could not accept clauses related to labor rights in accordance with regulations such as difference between termination fees, overtime and leave allowances included in the contract.</b> The Company faced this risk because PLN's reference to the concept of contracting work triggered matters related to difference between termination fees, overtime and leave allowances not being fulfilled by PLN. This resulted in workforce demanding for leave and overtime allowances; hence, the contract was not fulfilled. The difference between termination fees could burden the Company's financial condition.</p>	Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi dan koordinasi dengan divisi terkait di kantor pusat PLN antara lain Divisi PFM, Divisi Org, SHK dan lainnya.</li> <li>Memasukan kasus terkait tenaga kerja ke dalam revisi Perdir dan perjanjian kerja sama (PKS) penugasan.</li> <li>Menunda pelaksanaan kontrak sampai aspek ketenagakerjaan disepakati.</li> </ul>
	<p><b>PLN could not accept clauses related to labor rights in accordance with regulations such as difference between termination fees, overtime and leave allowances included in the contract.</b> The Company faced this risk because PLN's reference to the concept of contracting work triggered matters related to difference between termination fees, overtime and leave allowances not being fulfilled by PLN. This resulted in workforce demanding for leave and overtime allowances; hence, the contract was not fulfilled. The difference between termination fees could burden the Company's financial condition.</p>	Extreme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultation and coordination with related divisions at PLN's head office, including PFM Div, Org Div, SHK and others.</li> <li>Incorporated labor-related cases into revised Perdir and cooperation agreement (PKS) of assignments.</li> <li>Delayed contract implementation until the labor aspects are agreed upon.</li> </ul>

### Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko

Pada tahun 2019, Fungsi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Penyempurnaan aplikasi manajemen risiko.
2. Sosialisasi profil risiko di Kantor Pusat
3. Memfasilitasi kegiatan evaluasi manajemen risiko oleh SPI.
4. Memberikan supervisi penyusunan kajian risiko.
5. Mengkaji dan memantau profil risiko Perusahaan triwulanan tahun 2019.
6. Menyampaikan laporan manajemen risiko triwulanan tahun 2019 kepada PT PLN (Persero).
7. Melakukan asesmen mandiri kematangan risiko semester 1 dan 2 tahun 2019.

### Duties Implementation of Risk Management

In 2019, the Risk Management Function has carried out the following tasks:

1. Refined risk management application.
2. Socialized risk profile in Head Office.
3. Facilitated risk management evaluation by SPI.
4. Supervised risk review preparation.
5. Reviewed and monitored the Company's quarterly risk profile in 2019.
6. Submitted quarterly risk management reports in 2019 to PT PLN (Persero).
7. Risk maturity self-assessment for the first and second semesters in 2019.

## Hasil Kajian Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Kajian efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh Manajer Pengembangan Bisnis. Penilaian efektivitas penanganan risiko Perusahaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam pengelolaan risiko yang meliputi aspek-aspek kepemimpinan, kebijakan dan strategi, sumber daya manusia, pemangku kepentingan, dan proses, termasuk langkah-langkah mitigasi dan hasil dari mitigasi tersebut. Pada tahun 2019, penilaian risiko dari sasaran strategis difokuskan pada sasaran:

1. Peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya operasi;
2. Pemenuhan aspek K3LH untuk mencapai *zero accident*;
3. Pemenuhan undang-undang ketenagakerjaan;
4. Peningkatan kualitas layanan eksisting dengan layanan end-to-end berbasis teknologi informasi;
5. Penguatan *work services* manajemen (SDM, teknologi, dan alat kerja).

Penilaian risiko diukur melalui tingkat kematangan manajemen risiko (*risk management maturity level*) atau *risk maturity*. Penilaian *risk maturity* dilakukan setahun sekali melalui asesmen kontrak kinerja–*Enterprise Risk Management* (ERM). Pada tahun 2019, target KPI risk maturity implementasi manajemen risiko yang ditetapkan untuk anak perusahaan PLN sebesar 3,50 (skala 5) di mana Perusahaan mencapai nilai 3,57.

## Risk Management System Effectiveness Review Results

Risk management effectiveness review is carried out by Business Development Manager. Effectiveness assessment of the Company's risk management is carried out to improve the Company's capability in risk management which consists of the aspects of leadership, policies and strategies, human resources, stakeholders and processes, including mitigation measures and the results of such mitigations. In 2019, risk assessment of strategic objectives was focused on:

1. Increase in operating revenues and costs efficiency;
2. Fulfillment of K3LH aspects to achieve zero accident;
3. Compliance with the labor laws;
4. Improvement in the existing service quality with information technology-based end-to-end services;
5. Enhancement of management (HR, technology and work equipment) work services.

Risk assessment is measured with risk maturity level. Risk maturity assessment is conducted once a year through performance contract assessment–*Enterprise Risk Management* (ERM). In 2019, risk maturity KPI target for risk management implementation applied to PLN subsidiaries was 3.50 (scale of 5). The Company reached 3.57 score.

No.	Kriteria Criteria	Tingkat Kematangan Risiko Risk Maturity Level			Kriteria Criteria
		2017	2018	2019	
1	Kebijakan bisnis: strategi bisnis dan kebijakan risiko	4.60	4.64	4.64	Business policy: Business strategy and risk policy
2	Proses bisnis	3.30	3.33	4.17	Business process
3	People & organisasi	2.90	2.92	2.5	People & organization
4	Laporan Manajemen	3.75	3.75	3.75	Management Report
5	Metodologi	3.50	3.50	3.00	Methodologies
6	Sistem & data	3.33	3.33	3.33	System & data
<b>Tingkat Kematangan Risiko</b>		<b>3.46</b>	<b>3.58</b>	<b>3.57</b>	<b>Risk Maturity Level</b>



## Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

### SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di Perusahaan meliputi seluruh kebijakan dan prosedur di semua fungsi operasional dengan memperhatikan faktor-faktor jumlah aset, jenis produk dan jasa, kompleksitas operasional termasuk jaringan kantor, profil risiko dari setiap kegiatan usaha, metode yang digunakan untuk pengelolaan data dan teknologi informasi, serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan dan pembatasan risiko, serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan merancang sistem pengendalian internal dengan mengadopsi *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari implementasi sistem pengendalian internal Perusahaan yang di antaranya terkait efektivitas dan efisiensi operasi, pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh regulator maupun Perusahaan serta terkait kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur pengendalian internal meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Kegiatan monitoring.

#### Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perusahaan mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengendalian internal untuk mencapai kemajuan berkelanjutan pada semua proses bisnis. Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi risiko Perusahaan yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun peta risiko. Selain itu, evaluasi juga dilakukan oleh SPI melalui kegiatan audit untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal dalam menekan tingkat pelanggaran/ketidaksesuaian terhadap prosedur.

### INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's internal control system covers all policies and procedures for operational functions taking into account the factors of total assets, types of products and services, operational complexity including office networks, risk profile of each business activity, the method used in data and information technology management and the methodology which applied to measure, monitor and limit risks, as well as the applicable laws and regulations.

#### Internal Control System Framework

The Company designed an internal control system by adopting Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The objectives of internal control, according to COSO, include operational, reporting and compliance objectives. This is in accordance with the Company's objectives of internal control system implementation that include effectiveness and efficiency of operations; reliable, timely and transparent financial reporting; other requirements set by the regulators and the Company; as well as compliance with the laws and regulations.

Internal control elements consist of the following components:

1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activities;
4. Information and communication; and
5. Monitoring activities.

#### Internal Control System Evaluation

The Company periodically evaluates and refines its internal control system to achieve continuous progress in all business processes. The evaluation includes the Company's risk evaluation which will then become a reference in risk map preparation. In addition, the evaluation is also conducted by SPI through audits to determine internal control system effectiveness in reducing violations/non-conformities with procedures.



## Akses Informasi Dan Data Perusahaan Access to Corporate Information and Data

Setiap permasalahan yang menyangkut pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi untuk dibahas sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menelaah laporan Direksi bersama Komite Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam menjaga kelangsungan usaha.

### PERKARA PENTING

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan, entitas anak, Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perkara penting seperti permasalahan hukum di lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pajak, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sepanjang tahun 2019, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perusahaan menyediakan sarana dan fasilitas komunikasi untuk memudahkan para pemangku kepentingan memperoleh berbagai informasi terkait dengan Perusahaan yang tidak diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai implementasi prinsip keterbukaan informasi. Di lingkungan internal, Perusahaan menyediakan intranet, buletin internal, e-mail, dan media lainnya sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Media cetak yang digunakan antara lain surat edaran, brosur, spanduk, dan majalah 4 bulanan "Media Haleyora."

Perusahaan menyediakan akses informasi untuk masyarakat melalui situs [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id) yang berisi berbagai informasi seperti: profil perusahaan, produk dan layanan, dan komunikasi berkelanjutan (berita, dokumentasi, kegiatan CSR, *procurement*, majalah Media Haleyora) serta laman "Kontak" untuk permintaan informasi, penyampaian pendapat, kritik, keluhan maupun pertanyaan. Selain itu, Perusahaan juga memiliki akun media sosial seperti *facebook* dengan nama akun PT Haleyora Power, *twitter* dengan nama @pthaleyorapower serta *instagram* dengan nama akun @haleyorapower.

Internal control issues are reported to the Board of Directors to be discussed prior to submission to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners shall review the report with Committee of the Board of Commissioners to provide improvement recommendations in maintaining business sustainability.

### LEGAL ISSUES

At end of 2019, the Company, its subsidiaries, the Board of Directors and the Board of Commissioners were not involved in significant cases, such as legal issues in the judiciary, either District Court, High Court, Tax Court or Corruption Court.

During 2019, no administrative sanctions were imposed on the Company, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

### ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

The Company provides communication means and facilities to enable stakeholders in obtaining various unclassified information related to the Company. This is done as to implemented the principle of information disclosure. In its internal environment, the Company provides intranet, internal bulletin, e-mail and other media as a means of communication and information dissemination. Print media used include circular, brochure, banner and "Media Haleyora" magazine which is issued every 4 months.

The Company provides access to information for the public through its website: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id) which contains various information, such as: company profile, products and services, as well as ongoing communications (news, documentation, CSR activities, *procurement*, Media Haleyora magazine) and "Contact" to request for information, to express opinions, criticisms, complaints and questions. In addition, the Company also has social media accounts, such as Facebook: PT Haleyora Power, Twitter: @pthaleyorapower and Instagram: @haleyorapower.

## Pedoman Perilaku

### Code of Conduct

## PEDOMAN PERILAKU

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman bagi insan Perusahaan untuk berperilaku etis, profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan pelanggan, rekanan, maupun dengan sesama pegawai sesuai tata nilai Perusahaan. Selain Pedoman Perilaku yang ditetapkan pada bulan September 2016, Perusahaan juga memiliki tata nilai dan budaya Perusahaan yang disebut "Believe."

### Pokok-Pokok Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku terdiri dari tiga kelompok isi sebagai berikut:

#### A. Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; manfaat; serta tata nilai Perusahaan.

#### B. Pedoman Perilaku

Berisi uraian mengenai benturan kepentingan; pemberian hadiah, makanan, hiburan dan pemberian donasi; kepedulian terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH); kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi; integrasi laporan keuangan; perlindungan informasi Perusahaan dan *intangible asset*; perlindungan harta perusahaan; kegiatan sosial dan politik; serta etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan.

#### C. Penegakan Pedoman Perilaku

Berisi uraian mengenai sosialisasi; pelanggaran; mekanisme pelaporan pelanggaran; sanksi atas pelanggaran; serta penghargaan atas kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.

### Sosialisasi Pedoman Perilaku

Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi Pedoman Perilaku untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan insan Perusahaan mengenai arti penting Pedoman Perilaku bagi kelangsungan usaha Perusahaan serta membangun kesadaran bahwa Pedoman Perilaku merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja pegawai. Dengan demikian diharapkan tumbuh rasa memiliki dan komitmen untuk melaksanakan Pedoman Perilaku secara konsisten. Sosialisasi Pedoman Perilaku secara terus-menerus disampaikan kepada seluruh pegawai melalui portal internal maupun di situs *web*: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id).

## CODE OF CONDUCT

The Company has Code of Conduct as a guideline for the Company's personeel to behave ethically, professionally, responsibly, fairly and reliably in conducting business relationships with customers, partners and fellow employees according to the Company's values. In addition to the Code of Conduct which was ratified in September 2016, the Company also has corporate values and culture called "Believe."

### Contents of Code of Conduct

Code of Conduct consists of three groups of contents as follows:

#### A. Introduction

Description of background; purposes and objectives; benefits; and the Company's values.

#### B. Code of Conduct

Description of conflict of interest; giving and receiving gifts, entertainment and donation; occupational health and safety and environment; equal opportunity to get job and promotion; financial statements integrity; corporate information and intangible assets protection; assets safeguarding; politic and social activities; and ethics in relationship with stakeholders.

#### C. Code of Conduct Enforcement

Description of socialization; violation; whistleblowing mechanism; sanction on violation; and reward on compliance with Code of Conduct.

### Code of Conduct Socialization

Periodically, the Company holds Code of Conduct socialization to encourage understanding and insight of the Company's personnel regarding the importance of Code of Conduct for the Company's business sustainability and to build awareness of Code of Conduct as an integrated part of business practices and employee performance assessment. Hence, the sense of belonging and commitment to consistently implement Code of Conduct are expected to grow. The Code of Conduct is continually socialized to all employees through internal portal and on website: [www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id).



## Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistleblowing System

### Pemberlakuan, Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku ditetapkan untuk berlaku bagi seluruh level organisasi. Seluruh pegawai Perusahaan wajib membaca, memahami dan menandatangani Pakta Integritas setelah membaca dan memahami isi dari Pedoman Perilaku Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang terbukti, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham. Sedangkan jika pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau pemangku kepentingan lain, maka Perusahaan akan melaksanakan ketentuan sebagaimana telah tertuang dalam kontrak hingga pemutusan hubungan kerja. Jika terdapat unsur tindak pidana maka kasus dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Sepanjang tahun 2019 tidak ada pelanggaran Pedoman Perilaku.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) untuk mendukung implementasi GCG dan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. WBS merupakan kebijakan untuk mengelola pelaporan/pengungkapan mengenai kejadian yang diduga berhubungan dengan tindakan kecurangan, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran Pedoman Perilaku.

Pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti antara lain:

- Penyimpangan dari peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan;

### Code of Conduct Enactment, Enforcement and Sanction on Violation

Code of Conduct is set to apply to all levels of the organization. All of the Company's personnel must read, understand and sign Integrity Pact after reading and understanding contents of the Company's Code of Conduct. Any proven violation of Code of Conduct will be subject to sanction in accordance with the applicable laws and regulations in the Company.

Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving report from direct supervisor of the respective employee. The Board of Commissioners and the Board of Directors decide on education, disciplinary sanction and/or other actions as well as prevention that must be carried out by direct supervisors in the respective units.

Sanction for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who commit violations are decided by Shareholders. Whereas if the violation is committed by business partner or other stakeholders, the Company will implement the provisions as stated in the contract, including possible work contract termination. If there is an element of crime, the case shall be forwarded to the authorities.

During 2019, there was no violation of Code of Conduct.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

Since 2014, the Company has established whistleblowing system (WBS) to support GCG implementation as well as clean and responsible business practices. WBS is a policy to manage reporting/disclosure regarding certain events suspected to be related to fraud, criminal acts, violations of the Company's policies and Code of Conduct.

Violations to be followed up include:

- Deviations from the Company's applicable laws and regulations;
- Misuse of position for other interests than the Company's;

## Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

### Whistleblowing System

- Pemerasan;
- Korupsi;
- benturan kepentingan; dan
- Gratifikasi.

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

WBS dikelola oleh Komite Pelaporan Pelanggaran, yang bertugas mengadministrasikan pengaduan atau penyingkapan. Komite Pelaporan Pelanggaran diketuai oleh Kepala SPI sebagai ketua, Corporate Secretary sebagai sekretaris dan anggota, serta VP Hukum dan EVP HCM sebagai anggota.

### Penyampaian Laporan Pelanggaran

Penyampaian Pengaduan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memberikan informasi mengenai jumlah kerugian apabila dapat diidentifikasi, pihak yang terlibat, saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan, lokasi pelanggaran (divisi, region, unit dan sebagainya), waktu kejadian, dan bukti bukti pendukung.
2. Pelapor harus mempunyai alasan/bukti awal yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran.
3. Pelapor memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat, nomor telepon, dan *e-mail*.

Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran disampaikan kepada Unit Administrasi Pelaporan Pelanggaran (Komite Pelaporan) melalui sarana/media sebagai berikut:

- Telepon, pesan singkat (SMS) atau *whatsapp*: 081270000219
- *Website*: [haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower](http://haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower)
- *E-mail*: [wbs@haleyorapower.co.id](mailto:wbs@haleyorapower.co.id)
- Surat: Direktur Utama

### Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower)

Perusahaan melindungi kerahasiaan identitas pelapor, dan melindungi pelapor dari berbagai bentuk ancaman, intimidasi, pemecatan atau tindakan tidak menyenangkan lainnya, dari pihak manapun, selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan juga berlaku bagi para pihak yang melakukan investigasi, dan pihak yang memberikan informasi/saksi terkait pengaduan tersebut.

- Extortion;
- Corruption
- Conflict of interest;
- Gratification.

### Whistleblowing Manager

WBS is managed by WBS Committee, which is tasked with administering complaints or disclosures. WBS Committee consists of Head of SPI as the chairman, Corporate Secretary as secretary and member and Legal VP and HCM EVP as members.

### WBS Reporting Submission

Whistleblowing must consider the following matters:

1. Whistleblower is required to provide initial indications that can be accounted for, at least information on the amount of loss if identified, parties involved, witnesses and parties who benefit or are disadvantaged, location of violation (division, region, unit and so forth), time of incident and supporting evidence.
2. Whistleblower must have strong rationale/preliminary evidence to report whistleblowing or potential violation.
3. Whistleblower must provide personal information, at least address, phone number, facsimile and e-mail.

Complaint/disclosure of violation is submitted to Whistleblowing Administration Unit (Whistleblowing Committee) using the following means/media:

- Telephone, Short Message (SMS) or *whatsapp*: 081270000219
- *Website*: [haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower](http://haleyorapower.co.id/corporate/whistleblower)
- *Email*: [wbs@haleyorapower.co.id](mailto:wbs@haleyorapower.co.id)
- Letter: President Director

### Whistleblower Protection

The Company protects whistleblower's confidentiality from various threat, intimidation, dismissal or other unpleasant actions, from any party, as long as the whistleblower maintains confidentiality of the reported violation from any party. Protection also applies to investigators and witnesses providing information related to the complaint.

## Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistleblowing System

### Penanganan Pengaduan

Pengaduan pelanggaran ditangani dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Unit Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan pengaduan pelanggaran dan melakukan penelitian apakah terdapat indikasi awal atau sesuai kriteria laporan WBS yang dapat ditindaklanjuti. Bila "YA", laporan diteruskan ke Komite Pelaporan Pelanggaran. Jika "TIDAK", maka proses WBS selesai.
2. Komite Pelaporan Pelanggaran melakukan investigasi awal terhadap pengaduan. Jika pada investigasi awal ditemukan indikasi pelanggaran pada hasil investigasi awal tersebut, maka akan dilaporkan kepada Direksi. Sebaliknya, jika tidak ada indikasi pelanggaran, maka laporan dinyatakan selesai.
3. Direksi menerima laporan dari Komite Pelaporan Pelanggaran dan merekomendasikan apakah harus dilakukan investigasi lanjutan oleh Unit fungsi Investigasi (Kepala SPI atau penyidik eksternal), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
4. Unit fungsi Investigasi kemudian melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
5. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Unit Fungsi Investigasi, Direksi akan merekomendasikan tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan itu akan ditutup. Apabila hal tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut.
6. Seluruh proses investigasi atas laporan pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara sesuai format yang ditetapkan dalam pedoman WBS.
7. Prosedur pengelolaan pengaduan melalui WBS dilaksanakan sesuai bagan alur sebagaimana diatur dalam Pedoman WBS.
8. Seluruh proses WBS harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Jumlah Pengaduan Masuk pada Tahun 2019

Sampai akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran baik melalui telepon, SMS, *e-mail*, ataupun kotak surat.

### Complaint Handling

Complaints are handled with the following mechanism:

1. Whistleblowing Administration Unit receives whistleblowing and investigates early indication according to WBS report criteria. If "YES," the report is forwarded to Whistleblowing Committee. If "NO," the report is closed.
2. Whistleblowing Committee performs early investigation towards the report. If there is indication of violation, then it will be reported to the Board of Directors. On the other hand, if there is no indication of violation, then the report is closed.
3. The Board of Directors receives report from Whistleblowing Committee and recommends further investigation, if required, by Investigation Unit (Head of SPI or external investigator) and reports the recommendation to the Board of Commissioners.
4. Investigation Unit performs further investigation towards the complaint/disclosure and reports the results to the Board of Directors.
5. Based on further investigation reported by Investigation Unit, the Board of Directors will recommend further action. If it is not proven, the complaint/disclosure report will be closed. If it is proven or requires further action, then it will be sanctioned according to the applicable regulations or forwarded to investigators for further process.
6. The whole process of whistleblowing investigation shall be reported in minutes using a format stipulated in WBS guidelines.
7. WBS management procedure is carried out according to the flow chart described in WBS guidelines.
8. All WBS process shall be well documented and accountable.

### Number of Complaint Received in 2019

At end of 2019, the Company did not receive any whistleblowing report through phone, SMS, e-mail, or mail box.





menciptakan  
**lingkungan**  
yang





Penerimaan dan dukungan masyarakat atas keberadaan Perusahaan di lingkungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan dalam mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang.



# *harmonis*

## CREATING A HARMONIOUS ENVIRONMENT

Communities acceptance and support for the Company's existence in its environment is one of the Company's key success factors in achieving long-term business sustainability.



# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

## Corporate Social Responsibility



### KOMITMEN

Sebagai anak perusahaan PLN dengan bisnis inti melaksanakan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance/O&M*) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, HP memiliki aktivitas operasi yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera. Kegiatan usaha Perusahaan tentu berpotensi memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jika dampak tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap aktivitas operasional Perusahaan. Sebaliknya, penerimaan dan dukungan masyarakat atas keberadaan Perusahaan di lingkungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan dalam mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang.

Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa membina hubungan yang baik dan saling memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat.

### COMMITMENT

As a PLN's subsidiary with a core business of securing operation and maintenance (O&M) services for electricity transmission and distribution networks, HP's operations spread across various regions in Java and Sumatra. The Company's business activities inevitably have potential impact on the surrounding community and environment. If the impact is not managed properly, it can create a serious risk to the Company's operations. On the other hand, public acceptance and support for the Company's existence in its environment is one of the Company's key success factors in achieving long-term business sustainability.

Therefore, the Company always maintains good and beneficial relationships with the stakeholders by showing empathy and responsibility for the community's social conditions. Through the implementation of quality and



**Pada tahun 2019, HP berkolaborasi dengan PLN dan PT Icon+ melaksanakan kegiatan CSR Inspeksi Instalasi Pelanggan di 23 UP3 yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan instalasi listrik dan masyarakat pengguna.**

In 2019, HP collaborated with PLN and PT Icon+ to carry out CSR activities for Customer Installation Inspections in 23 UP3 in DKI Jakarta, Banten and parts of West Java as a form of concern for the safety of electrical installations and the users public.



**2,300**

**Jumlah pelanggan PLN yang menjadi target pemeriksaan instalasi kelistrikan.**

The number of PLN customers who are targeted for electrical installation inspection.

Melalui penerapan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkualitas dan berkelanjutan, Perusahaan berupaya berbagi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Perusahaan ikut mendorong peningkatan kualitas pendidikan terutama pendidikan vokasi, dengan cara meningkatkan kompetensi siswa calon tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.

### **Kebijakan CSR**

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan serta memberdayakan masyarakat, HP berupaya untuk turut serta dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Tujuan pelaksanaan program CSR Perusahaan adalah:

1. Meningkatkan Interaksi positif antara Perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait.
2. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan.
3. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

sustainable corporate social responsibility (CSR) programs, the Company seeks to share benefits in order to improve community welfare, especially the quality of the young generation. The Company also encourages improvement of the quality of education, particularly vocational education, by developing the competence of students as potential workforce to be aligned with the needs of the business industries.

### **CSR Policy**

In order to create a harmonious and synergistic relationship between the Company and stakeholders and to empower the community, HP strives to participate in CSR. The objectives of the Company's CSR programs include:

1. To increase positive interaction among the Company, the community, local government and related parties.
2. To empower the community so as to improve the welfare of the surrounding community in a sustainable manner.
3. To maintain environmental balance and sustainability.

**Komitmen**  
Commitment

**Metoda dan Lingkup Uji Tuntas terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan**

Dengan area operasional yang meliputi wilayah Sumatera dan Jawa, pegawai dan tenaga kerja Perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang luas mencakup pelanggan (PLN), mitra kerja dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasi Perusahaan lebih dari 31.000 orang yang tersebar di setiap region. Keberadaan tenaga kerja Perusahaan menciptakan interaksi sosial dan ekonomi dengan masyarakat setempat. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja membuka kesempatan kerja bagi lulusan sekolah kejuruan yang ada sekitar wilayah kerja Perusahaan.

Perusahaan belum pernah melakukan penelitian khusus atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang mungkin terjadi dari aktivitas Perusahaan. Namun Perusahaan berupaya agar kegiatan operasi Perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan setempat melalui standard *operation procedure* (SOP) kerja yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan tenaga kerja, masyarakat maupun lingkungan.

**Pemangku Kepentingan Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan**

Perusahaan memiliki wilayah kerja yang terbagi dalam 6 region. Setiap region berinteraksi dengan unit-unit PLN sebagai pemangku kepentingan utama Perusahaan yang terdiri dari 6 Unit Induk Distribusi (UID), 4 Unit Induk Wilayah (UIW), 1 Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengaturan Beban (UIP3B), dan 3 Unit Induk Transmisi (UIT) yang meliputi 57 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), 4 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), 13 Unit Pelaksana Transmisi (UPT), dan 297 Unit Layanan Pelanggan (ULP).

**Methods and Scope of Due Diligence on Social, Economic and Environmental Impacts of the Company's Activities**

With operational areas covering Sumatra and Java regions, the Company's employees and workforce interact with various stakeholders, including customers (PLN), business partners and the public. The number of workforce involved in the Company's operations is quite large, reaching more than 31,000 workforce in each region. The Company's workforce interacts socially and economically with the local community. In addition, the need for workforce opens job opportunities for graduates of vocational schools surrounding the Company's operational areas.

The Company has not conducted special and in-depth research on the social, economic and environmental impacts that may occur as a result of the Company's activities. However, the Company strives to ensure that the Company's operations do not have a negative impact on society and the environment by implementing standard operating procedures (SOP) that cover the aspects of occupational safety, the society and the environment.

**Key Stakeholders Affected or Impacted by the Company's Activities**

The Company's operational areas are divided into 6 regions. Each region interacts with PLN units as the main stakeholder of the Company which consist of 6 Parent Units of Distribution (UID), 4 Parent Units of Region (UIW), 1 Parent Unit of Transmission and Load Dispatching Center (UIP3B) and 3 Parent Units of Transmission (UIT) which include 57 Customer Service Provider Units (UP3), 4 Distribution Management Task Units (UP2D), 13 Transmission Task Units (UPT) and 297 Customer Service Units (ULP).

Region Region	Pemangku Kepentingan Stakeholder
Region 1 Jawa Barat Region 1 West Java	PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat PLN Parent Unit of Distribution of West Java
Region 2 Jawa Bagian Tengah Region 2 Central Part Java	PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta PLN Parent Unit of Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah PLN Parent Unit of Transmission of Central Part Java





Region Region	Pemangku Kepentingan Stakeholder
Region 3 Jawa Bagian Timur Region 3 Eastern Part Java	PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur PLN Parent Unit of Distribution of East Java PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali PLN Parent Unit of Transmission of Eastern Java and Bali PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali PLN Parent Unit of Load Dispatching Center (P2B) of Java Bali
Region 4 Sumatera Barat Region 4 West Sumatera	PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat PLN Parent Unit of Region of West Sumatra
Region 5 DKI Jakarta & Banten Region 5 DKI Jakarta & Banten	PLN Unit Induk Distribusi Banten PLN Parent Unit of Distribution of Banten PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya PLN Parent Unit of Distribution of Jakarta Raya PLN Unit Induk Distribusi Lampung PLN Parent Unit of Distribution of Lampung PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung PLN Parent Unit of Region of Bangka Belitung PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat PLN Parent Unit of Transmission of Western Part Java
Region 6 Riau dan Kepulauan Riau Region 6 Riau and Riau Islands	PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Parent Unit of Region of Riau and Riau Islands PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara PLN Parent Unit of Region of North Sumatra PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera PLN Parent Unit of Transmission and Load Dispatching Center of Sumatra (UIP3B) PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera PLN Parent Unit of Transmission and Load Dispatching Center of Sumatra (UIP3B)

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak penugasan dari PLN. Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan dialog dan menjalin komunikasi sesuai harapan yang melekat pada kedua belah pihak untuk mencapai target-target kinerja yang telah disepakati bersama. Salah satu parameter kinerja Perusahaan adalah pencapaian target *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati dengan PLN sebagai pemberi kerja. Tercapai atau tidak tercapainya target SLA akan berdampak pada kualitas layanan PLN yang diterima oleh pelanggannya/masyarakat.

The Company carries out its business activities based on an assignment contracts from PLN. Periodically, the Company conducts dialogues and establishes communication as expected by both parties to achieve mutually agreed performance targets. The impact of the Company's operations on PLN as the assignor is measured by achievement of the agreed Service Level Agreement (SLA) targets. Achievement of SLA targets will have an impact on the quality of PLN services delivered to its customers/public.

### Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 0013.K/DIR-HP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Haleyora Power, kegiatan CSR di HP dikelola oleh Divisi Corporate Secretary, Komunikasi, Hukum dan Kinerja. Sedangkan ketentuan mengenai CSR diatur dalam Peraturan Direksi No. 0004.P/DPR-HP/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

### Scope of Corporate Social Responsibility

Based on the Decision of Board of Directors No. 0013.K/DIR-HP/2016 dated October 27, 2016 concerning Organization and Work Procedure of PT Haleyora Power, CSR management in the Company is carried out by Corporate Secretary, Communication, Legal and Performance Division. While the provisions regarding CSR are regulated in Regulation of Board of Directors No. 0004.P/DPR-HP/2017



## Komitmen Commitment

Perusahaan (Perdir 0004.P/2017). Lingkup kegiatan CSR Perusahaan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

Saat ini, sebagian besar kegiatan CSR Perusahaan masih bersifat mendukung kegiatan CSR PLN (Program PLN Peduli) dan donasi atau bantuan insidental. Dengan berpedoman pada Perdir 0004.P/2017, program-program CSR Perusahaan akan difokuskan pada kegiatan yang menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan *corporate branding*.

### Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan Dengan Bisnis yang Dijalankan

Dalam rangkaian peringatan hari Kemerdekaan RI ke-74, HP berkolaborasi dengan PLN dan PT Icon+ melaksanakan kegiatan CSR Inspeksi Instalasi Pelanggan dan Pembentukan Komunitas Peduli Kelistrikan. Kegiatan ini dilaksanakan di 23 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Target pemeriksaan instalasi kelistrikan sebanyak 2.300 pelanggan.

Instalasi kelistrikan sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pelanggan karena kewajiban PLN hanya sampai dengan Kwh meter. Tetapi karena masih sering terjadi musibah kebakaran atau kecelakaan tersengat aliran listrik akibat instalasi rumah yang tidak sesuai standar, PLN, HP dan Icon+ berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan instalasi listrik dan masyarakat pengguna.

Kegiatan ini juga didukung oleh KONSUIL (Komite Keselamatan Nasional untuk Instalasi Listrik) dan AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia). KONSUIL melakukan pemeriksaan terkait standar instalasi, Jika instalasi listrik perlu diperbaiki maka AKLI akan melakukan perbaikan yang sifatnya perbaikan ringan.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Perusahaan juga menginisiasi terbentuknya Komunitas Peduli Kelistrikan. Komunitas tersebut didukung oleh pemerintah daerah setempat hingga ke struktur RT/RW. Tujuan pembentukan komunitas adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keselamatan komunitasnya terhadap bahaya listrik.

dated October 2, 2017 concerning Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation (Perdir 0004.P/2017). Scope of the Company's CSR activities covers the fields of education, health, social community and environment.

The existing CSR activities are still mostly donations and incidentals in nature, or participation in supporting PLN's CSR activities (PLN Cares Program). Going forward, based on Perdir 0004.P/2017, the Company's CSR programs are expected to focus on activities that produce measurable and sustainable impacts, as well as to be able to enhance corporate branding.

### Programs that Exceed Minimum Corporate Responsibility that are Relevant to Business

In a series of commemoration of the 74<sup>th</sup> Indonesian Independence Day, HP collaborated with PLN and PT Icon+ to carry out CSR activities for Customer Installation Inspections and the Establishment of Electricity Care Community. Those activities were carried out in 23 Customer Service Task Units (UP3) in DKI Jakarta, Banten and parts of West Java. The electrical installation inspection target was 2,300 customers.

Electrical installation is actually the responsibility of the customer since PLN's obligation is only up to Kwh meter. However, due to frequent fires or accidents of electric shock due to non-standard home installations, PLN, HP and Icon+ took the initiative to carry out this activity as a form of concern for the safety of electrical installations and the users/public.

This activity was also supported by KONSUIL (National Safety Committee for Electrical Installations) and AKLI (Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors). KONSUIL conducted inspection related to installation standards. If the electrical installation needs to be repaired, AKLI would make minor repairs.

Along with those activities, the Company also initiated the formation of Electricity Care Community. The community is supported by the local government up to RT/RW level. The purpose of forming this community is to increase community participation in maintaining the safety of their community against the dangers of electricity.



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Corporate Social Responsibility Programs Related to Human Rights

### Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Anggaran CSR disusun berdasarkan usulan dari setiap Unit Kerja ke Divisi Corporate Secretary, Komunikasi, Hukum dan Kinerja, yang kemudian diusulkan ke Bidang Keuangan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Program CSR disusun berdasarkan inisiatif perusahaan berdasarkan hasil pemetaan sosial masyarakat, permintaan masyarakat/komunitas, kesesuaian dengan program Pemerintah, atau kondisi tanggap darurat/bencana alam.

Anggaran CSR diperhitungkan sebagai biaya non-operasi Perusahaan. Pada tahun 2019, total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR (HP dan HPI) kurang lebih mencapai Rp76.380.000.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM)

#### Komitmen

Perusahaan memberi perhatian serius atas dampak aktivitas operasional Perusahaan terhadap potensi pelanggaran HAM. Perlindungan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Perusahaan dan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Aspek HAM diintegrasikan di dalam berbagai kebijakan yang meratifikasi kebijakan perusahaan induk (PLN), meliputi praktik anti diskriminasi, pemenuhan hak pegawai, penghormatan hak pemangku kepentingan termasuk privasi pelanggan, dan sebagainya. Kebijakan dasar pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perusahaan sejalan dengan prinsip dan standar praktik HAM terbaik yang diakui secara universal, antara lain:

- Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerja sama timbal balik.
- mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- Memberlakukan sistem pengupahan berbasis kinerja yang diterapkan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menjunjung tinggi hak pegawai untuk berserikat maupun tidak berserikat.

### Corporate Social Responsibility Financing and Budget

CSR budget is prepared based on proposals from each Work Unit that are submitted to Corporate Secretary, Communication, Legal and Performance Division. The proposals will be forwarded to Finance Department to be included in Corporate Work Plan and Budget (RKAP) to be ratified by General Meeting of Shareholders (GMS). CSR programs are structured based on the results of social community mapping, the community's requests, compliance with the Government's programs or the condition of emergency/natural disaster response.

CSR budget is calculated as part of the Company's non-operating expenses. In 2019, the total expenses incurred for CSR activities (HP and HPI) reached approximately Rp76,380,000.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO HUMAN RIGHTS

#### Commitment

The company pays serious attention to the impact of the Company's operations on potential human rights violations. Protection of human rights is an integral part of the Company's operations and in interacting with stakeholders, both internal and external.

Human rights aspects are integrated into various policies that ratify the parent company (PLN) policies, covering anti-discrimination practices, fulfilling employee rights, respecting the rights of stakeholders including customer privacy, and so on. The basic policies for the management of Human Resources (HR) in the Company are in line with the principles and standards of best human rights practices that are universally recognized, including:

- Fostering good relations with employees based on mutual cooperation.
- Complying with laws and regulations regarding manpower.
- Implementing a performance-based wage system that is applied fairly, transparently and can be accounted for.
- Upholding the rights of employees to associate and not to associate.

## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

### Corporate Social Responsibility Programs Related to Human Rights

- Menyiapkan program peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan pada akhirnya kinerja korporasi.
- Menerapkan kesetaraan jenjang karir.
- Menerapkan kesetaraan gender.

### Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait HAM

Dalam menjalin kerja sama dengan mitra kerja, Perusahaan mengharapkan mitra kerja menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sejalan dengan prinsip yang berlaku di HP. Perusahaan melarang adanya praktik diskriminasi, pengupahan yang tidak layak, pemaksaan waktu bekerja dan pekerja di bawah umur, serta berkomitmen untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat dan menghargai martabat individu.

Perusahaan menghormati standar HAM yang diakui secara internasional. Oleh karena itu Perusahaan fokus pada isu-isu penting seperti:

1. Menghormati HAM di tempat kerja bagi pegawai dan tenaga kerja Perusahaan.
2. Menangani potensi dampak dari operasi Perusahaan pada masyarakat setempat.
3. Memastikan bahwa keamanan pegawai/tenaga kerja dan aset Perusahaan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab.

Perusahaan memiliki beberapa isu dalam rangka tanggung jawab sosial di bidang HAM, di antaranya adalah menghindari situasi berisiko pelanggaran HAM di lingkungan kerja. Dalam sistem manajemen risiko Perusahaan, saat ini HP memiliki 15 risiko utama di mana satu di antaranya memiliki kaitan dengan aspek HAM yaitu risiko terjadi kecelakaan kerja kritis/fatal (hak untuk hidup, hak lingkungan kerja yang aman).

Risiko ini terkait dengan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum terimplementasi dengan baik di lapangan. Penyebab risiko karena masih ada beberapa kontrak yang belum mengakomodir pengawas K3 dan ketidakdisiplinan tenaga kerja dalam menjalankan SOP, *hygiene factor* dan Pedoman *Safety, Integrity, Quality*.

Perusahaan tidak membuat target atau rencana kegiatan khusus di bidang HAM. Pemenuhan hak pegawai dan tenaga kerja tercermin dari Rencana Kerja Divisi HCM. Sedangkan untuk memenuhi hak-hak pelanggan, Perusahaan menetapkan target peningkatan aspek kualitas layanan berdasarkan hasil *Service Level Agreement* (SLA).

- Preparing employee competency improvement programs to improve individual, group and ultimately corporate performance.
- Implementing equal career paths.
- Implementing gender equality.

### Formulation of Social Responsibility Related to Human Rights

In cooperating with business partners, the Company expects the partners to implement business principles that are in line with HP principles. The Company prohibits discriminatory practices, improper remuneration, forced work time and underage workers, and is committed to creating working conditions that are safe, healthy and respect for individual dignity.

The Company respects internationally recognized human rights standards. Therefore the Company focuses on crucial issues such as:

1. Respect human rights at work for employees and workforce of the Company.
2. Address potential impacts of the Company's operations on local communities.
3. Ensure that the security of the Company's employees/workforce and assets is managed in a responsible manner.

The Company has several issues in the context of social responsibility related to human rights, including avoiding situations of risk of human rights violations in the work environment. In the Company's risk management system, currently, HP has 15 key risks, one of which is related to human rights aspects, namely the risk of critical/fatal occupational accident (the right to live and the right for a safe work environment).

This risk is related to Occupational Health and Safety (K3) culture that has not been implemented properly in the field. The cause of this risk is because there are several contracts that have not accommodated K3 supervisors and the indiscipline of workers in implementing SOP, hygiene factors and Guidelines for Safety, Integrity, Quality.

The Company has not set targets or plans for specific activities in the field of human rights. Fulfillment of employee and workforce rights is reflected in HCM Division's Work Plan. Meanwhile, in order to fulfill customer rights, the Company has set a target for improving service quality based on Service Level Agreement (SLA) results.



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Programs Related to Fair Operations

### Kesempatan yang Adil untuk Pengembangan Karir

Setiap jabatan di Perusahaan memiliki *grade* atau level kompetensi sebagai dasar pemberian imbal jasa secara seimbang dan wajar sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Penempatan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pegawai.

### Equal Opportunities for Career Development

Each position in the Company has a grade or level of competence as the basis for a balanced and fair remuneration in accordance with its obligations and responsibilities. Employee placement is determined based on the needs of the Company in accordance with the established position and workforce formation by taking into account the suitability between job competency requirements and employee competencies.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan belum memiliki program CSR yang secara khusus terkait dengan aspek lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan masih bersifat sporadis bersinergi dengan PLN sebagai mitra kerja Perusahaan.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO ENVIRONMENT

To date, the Company does not have CSR program related to environment. The activities carried out are sporadic in synergy with PLN as the Company's business partner.

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT ASPEK OPERASI YANG ADIL

#### Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan operasi perusahaan yang adil. Upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam rangka menjalankan operasi yang adil di antaranya adalah:

1. Pencegahan korupsi.
2. Menghindari perilaku pelanggaran hukum di dalam menjalankan usaha dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari perilaku pelanggaran hukum.
3. Berkompetisi secara jujur dan adil, menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih. Kebijakan tersebut menjadi Pedoman bagi Direksi, pejabat, pegawai dan pemangku kepentingan di lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat, tangguh, dan bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO FAIR OPERATIONS

#### Commitment and Policy

The Company is committed to achieving fair management of the Company's operations. The efforts made by the Company in order to carry out fair operations include:

1. Prevent corruption.
2. Avoid illegal behavior in running business and comply with the laws and regulations so as to avoid violation of laws.
3. Compete objectively and fairly, create clean business practices and avoid all forms of fraud.

In order to apply GCG principles, the Company refers to Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0060.K/DIR/2014 concerning Guidelines for Clean PLN. This policy serves as a guideline for Board of Directors, officers, employees and stakeholders in the Company's environment to encourage a corporate culture that is healthy, resilient and free from all forms of irregularities and fraud including corruption, collusion and nepotism (KKN).

## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

### Uraian Mengenai Perencanaan CSR Bidang Operasi yang Adil

Pada tahun 2019 Perusahaan tidak memiliki program CSR bidang operasi yang adil.

### Description Regarding CSR Planning in Fair Operations

In 2019, the Company did not have CSR program related to fair operations.

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

### Aspek Ketenagakerjaan

### Employment

#### Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan mengelola *human capital* secara optimal untuk mencapai target-target usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai secara adil. Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Commitment and Policy

The Company seeks to optimize the management of human capital in order to achieve business targets while taking into account the interests of employees fairly. The Company is committed to building harmonious industrial relations in accordance with the applicable laws and regulations.

Perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan, kewajaran, kesetaraan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan gender dalam seluruh proses bisnis. Penerapan praktik anti-diskriminasi dalam pengelolaan SDM dimulai sejak proses rekrutmen pegawai, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan kompetensi dan jenjang karir.

The Company applies the principles of transparency, fairness and equality to all employees regardless of ethnicity, religion, race, class and gender in carrying out business processes within the Company. Anti-discrimination practices are applied in recruitment, performance appraisal, remuneration, competence development and career path.

Untuk mencapai pemahaman bersama terhadap tujuan Perusahaan dan ekspektasi pegawai, Perusahaan membentuk forum bipartit melalui Peraturan Direksi No. 0001.P/DIR-HP/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Forum Bipartit diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara manajemen dan pegawai dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.

To achieve a common understanding of the Company's objectives and employee expectations, the Company established a bipartite forum based on Regulation of Board of Directors No. 0001.P/DIR-HP/2018 dated April 17, 2018 concerning Establishment of Bipartite Cooperation Agency. The Bipartite Forum is expected to address the communication gap between management and employees in resolving manpower issues.

Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan non-diskriminasi. Setiap pegawai mempunyai peluang yang sama untuk mencapai jenjang karir tertinggi. Hal ini terbukti dari keberadaan satu Direktur perempuan pada komposisi Direksi HP. Ketiga Direktur tersebut merupakan pejabat karir di lingkungan PLN Group.

The Company applies the principle of gender equality as part of its non-discrimination policy. Every employee has the same opportunity to reach the highest career ladder. This is evident from the presence of one female Director in the composition of HP's Board of Directors. The three Directors are career officials within PLN Group.



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

### Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kompetensi pegawai, kesejahteraan, kompensasi dan benefit, serta hubungan industrial dan suasana kerja yang harmonis.

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kebijakan Perusahaan mengenai ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai Perusahaan.

Salah satu inisiatif Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan adalah mendukung aktivitas *employee relations* yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antar sesama pegawai dan dengan Perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas pegawai. Aktivitas *employee relations* yang telah berjalan rutin atau dilaksanakan pada tahun 2019 di antaranya adalah:

- Spiritual, Budaya dan Olah Raga (SBO)  
Spiritual, Budaya dan Olah Raga Haleyora Power (SBO HP) dibentuk pada tahun 2015. SBO adalah forum koordinasi yang mewadahi aktivitas pegawai di bidang spritual, budaya dan olah raga. Setiap pegawai boleh memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya di bidang olah raga dan budaya, ataupun kegiatan yang terkait keseimbangan rohani/keagamaan. Selain di kantor pusat, kegiatan SBO juga diterapkan di enam region HP dan anak perusahaan HPI. Perusahaan mendukung aktivitas SBO dengan menganggarkan biaya di RKAP setiap tahun.

Kegiatan SBO diselenggarakan secara rutin seminggu sekali. Aktivitas olah raga yang sudah berjalan rutin di antaranya adalah bulu tangkis, senam dan futsal. Setiap cabang olah raga membentuk komunitas masing-masing untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatannya. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan olah raga juga bertujuan untuk mempersiapkan tim yang akan mengikuti kompetisi tahunan antar anak perusahaan grup PLN pada rangkaian acara Hari Listrik Nasional (HLN) yang berlangsung setiap bulan Oktober. Sedangkan kegiatan seni budaya umumnya

### Scope and Formulation of Social Responsibility in Employment

Scope and formulation of social responsibility in employment is focused on increasing employee productivity and competence, welfare, compensation and benefits, as well as industrial relations and harmonious work atmosphere.

The Company is committed to building industrial relations that are harmonious, dynamic and just as mandated in the applicable laws and regulations. All the Company's policies regarding employment are basically aimed at creating conducive conditions and comfortable work environment for all employees.

One of the Company's initiatives in carrying out social responsibility in the field of employment is to support *employee relations* that aim to build harmonious relationships among fellow employees and with the Company which ultimately are expected to increase employee productivity and creativity. The existing routine *employee relations* activities in 2019 included:

- Spiritual, Culture and Sports (SBO)  
Spiritual, Culture and Sports Haleyora Power (SBO HP) was formed in 2015. SBO is a coordination forum that facilitates employee activities in spiritual, culture and sports. Each employee may choose activities that suit their interests and talents in sports and culture, or spiritual/religion. In addition to the head office, SBO activities are also conducted in six HP regions and HPI, a subsidiary. The Company supports SBO activities by annually providing sufficient budget in RKAP.

SBO activities are held routinely once a week. Regular sports activities that have been running include badminton, gymnastics and futsal. Each sport established its own community and determined schedule and location of their activities. Other than hobbies, sports activities also aim to prepare a team that will participate in annual competition among subsidiaries of PLN group in a series of National Electricity Day (HLN) in October



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

dipersiapkan untuk acara peringatan hari-hari besar, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Ibu, serta acara hari besar keagamaan.

Setelah berjalan empat tahun, keberadaan SBO telah memberikan dampak positif. Selain bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani pegawai, kegiatan SBO menumbuhkan sikap sportif serta meningkatkan semangat kerja, kekompakan dan kerja sama yang baik antar pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi lintas bagian. Komunikasi antar pegawai baik di kantor pusat, region, anak perusahaan maupun unit-unit PLN lainnya berkembang dengan baik melalui kegiatan latihan bersama atau pertandingan persahabatan.

Realisasi biaya kegiatan SBO pada tahun 2019 sebesar Rp709.432.092 yang meliputi kegiatan pengajian rutin, Porseni HLN dan Festival Budaya.

- **Lomba Karya Inovasi Haleyora Power**  
Sejak tahun 2018, Perusahaan mengadakan Lomba Karya Inovasi untuk menggali ide, gagasan, dan terobosan-terobosan dari pegawai di lapangan yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Inovasi yang diajukan tidak harus besar, rumit atau sesuatu yang baru. Kriteria penilaian adalah kemudahan untuk diimplementasikan, biaya yang dibutuhkan, dan signifikansi dampaknya terhadap proses bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2019, HP kembali mengadakan Lomba Karya Inovasi yang diikuti oleh tim dari 6 region. Region 1 berhasil meraih gelar Karya Inovasi Terbaik 2019 dengan karya berjudul C-GROUND. Region 5 berhasil menduduki peringkat kedua dengan karya berjudul SICAGAR, dan Region 3 berada di peringkat ketiga dengan karya berjudul Aplikasi *Navigator Key Point*.

- **Lomba Karya Inovasi PLN Group**  
Pada tahun 2019, Untuk pertama kalinya HP mengikuti lomba karya inovasi yang diselenggarakan oleh PLN. Dalam lomba tersebut, HP mengajukan inovasi bertema "Pelayanan Instalasi Milik Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi (ListriQu)" yang termasuk dalam kategori bidang *non-technical supporting*. Meskipun baru pertama kali, Tim Inovasi HP berhasil lolos ke final tingkat nasional seleksi penghargaan karya inovasi

every year. While culture activities are generally prepared for celebration of national days, such as Independence Day, Kartini Day, Mother's Day and religious holidays.

After four years, SBO has had a positive impact. In addition to being beneficial for the physical and spiritual health of employees, SBO activities also fosters sportsmanship and increases morale, cohesiveness and good cooperation among employees in completing tasks that require cross-section coordination. Communication among employees in headquarter, regions, subsidiaries and other PLN units is well developed through joint trainings or friendly matches.

The realized cost of SBO activities in 2019 amounted to Rp709,432,092 which included routine recitation activities, HLN Porseni and Cultural Festival.

- **Haleyora Power Innovation Competition**  
Since 2018, the Company has been organizing Innovation Competition to explore ideas, thoughts and breakthroughs from employees in the field that can be applied to improve effectiveness, efficiency and quality in completing their works. The proposed innovation does not have to be big, complicated or something new. The assessment criteria are ease of implementation, required cost and the significance of its impact on the Company's business processes.

In 2019, HP held Innovation Competition participated by teams from 6 regions. Region 1 won 2019 Best Innovation with a work entitled C-GROUND. Region 5 managed to rank second with a work entitled SICAGAR, and Region 3 was in third place with a work entitled Key Point Navigator Application.

- **PLN Group Innovation Competition**  
In 2019, for the first time, HP participated in innovation competition organized by PLN. In the competition, HP presented an innovation with a theme "Information Technology-Based Customer Owned Installation Services (ListriQu)" which was included in the category of non-technical supporting fields. Even though it was the first time, HP Innovation Team was successfully qualified for the final national level selection for innovation award in



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

tahun 2019. Pada saat proses seleksi dan penjurian, produk inovasi ListriQu dipresentasikan di hadapan penguji yang berpengalaman dari Indonesia Power, PJB dan lain-lain. Meskipun belum berhasil menjadi juara, Tim HP tetap yakin bahwa ListriQU merupakan sebuah inovasi yang akan memberikan solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan kelistrikan yang ada di pelanggan.

- **Employee Gathering**

Dalam rangka ulang tahun HP ke-8 yang mengambil tema "ExtraHoperdinary", seluruh insan HP berkumpul dalam acara *employee gathering* di Trans Studio Bandung untuk menjalin keakraban dan kedekatan antar pegawai, tanpa membedakan level dan jabatan.

Dalam kesempatan ini, Perusahaan memberikan apresiasi kepada para pegawai berupa *award* dengan berbagai kategori, seperti Pegawai Paling Rajin, Paling Berintegritas, Paling Ramah, dan *Leader* Terfavorit. Perusahaan juga membagikan *tumbler* korporat kepada seluruh pegawai sebagai tanda komitmen Perusahaan dan seluruh pegawai untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program diet plastik.

- **Perayaan HUT Kemerdekaan**

Untuk memeriahkan peringatan hari Kemerdekaan RI ke-74, HP menyelenggarakan kegiatan lomba dan permainan khas pesta rakyat 17 Agustusan seperti tarik tambang, makan kerupuk, lomba fotografi, lomba yel-yel, dan sebagainya. Setelah kegiatan lomba selesai, Direksi dan seluruh pegawai HP menikmati makan siang bersama.

### Remunerasi

Perusahaan memberlakukan sistem remunerasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan tingkat pengupahan pada industri sejenis, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan upah minimum provinsi (UMP) serta kemampuan keuangan Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa besaran upah minimum yang diberikan kepada semua pekerja berada di atas upah minimum provinsi. Tidak ada kebijakan remunerasi yang membedakan perlakuan terhadap pegawai laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan.

2019. During the selection and judging process, ListriQu innovation was presented in front of experienced judges from Indonesia Power, PJB and others. Even though they did not win, HP Team remains confident that ListriQU is an innovation that will solve electrical problems experienced by the customers.

- **Employee Gathering**

In commemorating HP's 8<sup>th</sup> anniversary with a theme "ExtraHoperdinary", all HP personnel gathered in an employee gathering event at Trans Studio Bandung to build intimacy and closeness among employees, regardless of level and position.

On this occasion, the Company gave appreciation to its employees in the form of awards for various categories, such as the Most Diligent Employee, Most Integrity Employee, Most Friendly Employee and Favorite Leader. The Company also distributed corporate tumblers to all employees as a sign of the Company's and all employees' commitment to protecting the environment through the plastic diet program.

- **Independence Day Celebration**

To celebrate the 74<sup>th</sup> Independence Day of the Republic of Indonesia, HP held competitions and games, such as tug of war, eating crackers, photography competition, slogan competition and so on. After the competitions were over, Board of Directors and all HP employees enjoyed lunch together.

### Remuneration

The Company applies a competitive remuneration system that takes into account wage rate in similar industries, labor laws, provincial minimum wage regulation (UMP) and the Company's financial capability. The Company ensures that minimum wage rate given to all workforce is above the provincial minimum wage. There is no remuneration policy that differentiates male and female employees at all position levels.

**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**  
Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

Remunerasi bagi pegawai organik Perusahaan terdiri dari kompensasi (P1, P2 dan P3) dan manfaat pegawai (tunjangan-tunjangan, asuransi, dan lainnya). Tabel berikut menyajikan rincian dari total biaya pegawai yang dikeluarkan pada tahun 2019.

Remuneration for the Company's organic employees consists of compensation (P1, P2 and P3) and employee benefits (allowances, insurance and others). The following table provides a breakdown of the total employee costs incurred in 2019.

No	Komponen Remunerasi	Total (Rp)	Component of Remuneration
1	Gaji Pokok	7,435,025,750	Pay for Person (P1)
2	Tunjangan Jabatan	4,551,352,020	Pay for Position (P2)
3	Tunjangan Kinerja	4,513,068,904	Pay for Performance (P3)
4	Bonus/Insentif	6,017,425,207	Bonus/Incentive
5	Tunjangan Hari Raya (THR)	1,139,724,764	Holiday Allowance
6	Tunjangan Cuti Tahunan	477,880,000	Annual Leave Allowance
7	Tunjangan Cuti Besar	111,516,000	Sabbatical Leave
8	Iuran Pemberi Kerja	482,281,481	Employer Contribution Premium
9	Penghargaan Kesetiaan Kerja (Winduan)	54,555,000	Work Loyalty Award (8 Years)
10	Pemeliharaan Kesehatan	85,143,477	Health Maintenance
11	Asuransi Pegawai	1,407,631,032	Employee Insurance
12	Pakaian Dinas	18,697,716	Work Uniform
13	Bantuan Fasilitas Perumahan	522,287,000	Housing Allowance
14	Perjalanan Dinas Mutasi Jabatan	61,307,113	Official Travel Allowance for Job Transfer
	<b>Jumlah</b>	<b>26,877,895,464</b>	<b>Total</b>



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

### Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

#### Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pegawai/tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK) yang dapat dialami oleh tenaga kerja, memastikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berintegritas serta pekerjaan yang dihasilkan mengedepankan kualitas terbaik.

Budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus ditanamkan kepada seluruh pegawai, terutama pekerja teknis di lapangan, karena jenis pekerjaan mereka memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Para pekerja teknis harus memiliki perilaku disiplin, taat melaksanakan prosedur kerja, serta mampu melakukan *job safety analysis* sehingga bisa menyadari potensi-potensi bahaya yang dihadapinya.

#### Roadmap K3

Untuk mencapai keunggulan operasi dan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja terbaik di industrinya, Perusahaan telah menyusun *roadmap* K3 2017-2021 sebagai berikut:

### Occupational Health and Safety (K3)

#### Commitment and Policy

The Company is committed to protecting employees from the risk of occupational accidents and diseases. The Company provides protection, prevention and resolution of work accidents, occupational diseases (PAK) that can be experienced by workers, ensures that all activities and works are carried out with integrity and that the work produced puts forward the best quality.

Occupational health and safety (K3) culture must be instilled in all employees, especially technical workers in the field, because their type of work has a high risk of occupational accidents. Technical workers must demonstrate disciplined behavior, be obedient in carrying out work procedures and be able to do *job safety analysis* so they can realize the potential hazards they encounter.

#### K3 Roadmap

To achieve operational excellence and the best level of occupational health and safety in the industry, the Company compiled 2017-2021 K3 roadmap as follows:

## DIMENSI PROSES Process Dimension

- Budaya SIQ dan 5S
- Siaga 1 K3
- Pengukuran *Maturity Level K3 dan 5S*
- Akademi Yantek
- *Online Training K3*
- *K3 Award*
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK
- SIQ and 5S Culture
- Standby 1 of OHS
- OHS and 5S Maturity Level Measurements
- O&M Academy
- OHS Online Training
- OHS Award
- OHSMS Certification
- Workforce Certification

- Budaya SIQ dan 5S
- Siaga 1 K3
- Pengukuran *Maturity Level K3 dan 5S*
- Akademi Yantek
- *Online Training K3*
- *K3 Award*
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK
- SIQ and 5S Culture
- Standby 1 of OHS
- OHS and 5S Maturity Level Measurements
- O&M Academy
- OHS Online Training
- OHS Award
- OHSMS Certification
- Workforce Certification

- Budaya SIQ dan 5S
- Siaga 1 K3
- Pengukuran *Maturity Level K3 dan 5S*
- Akademi Yantek
- Paspur Kompetensi
- *Online Training K3*
- *K3 Award*
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK
- *Safety Driving*
- SIQ and 5S Culture
- Standby 1 of OHS
- OHS and 5S Maturity Level Measurements
- O&M Academy
- Passport of Competence
- OHS Online Training
- OHS Award
- OHSMS Certification
- Workforce Certification
- Safety Driving

- Pemantapan SIQ dan 5S
- Siaga 1 K3
- Pengukuran *Maturity Level K3 dan 5S*
- Akademi Yantek dengan Pihak PLN
- Paspur Kompetensi
- *Online Training K3*
- Implementasi Aplikasi SI-Aset
- Unit Unggulan K3
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK
- Strengthening SIQ and 5S
- Standby 1 of OHS
- OHS and 5S Maturity Level Measurements
- O&M Academy with PLN
- Passport of Competence
- OHS Online Training
- Implementation of the SI-Asset Apps
- Excellent OHS Unit
- OHSMS Certification
- Workforce Certification

- Implementasi Perdir SIQ
- Standardisasi Kebijakan 5S
- Siaga 1 K3
- *Benchmark K3*
- Pengukuran *Maturity Level*
- Akademi Yantek
- Paspur Kompetensi
- *Online Training K3*
- Implementasi Aplikasi K3N01LA
- *SWP Online*
- Unit Unggulan K3
- Sertifikasi SMK3
- Sertifikasi TK
- Implementation of BOD Regulation on SIQ
- Standardization of 5S Policy
- Standby 1 of OHS
- Benchmark K3
- Maturity Level Measurement
- O&M Academy
- Passport of Competence
- OHS Online Training
- Implementation of K3N01LA Apps
- SWP Online
- Excellent OHS Unit
- OHSMS Certification
- Workforce Certification

2022

2021

2020

2019

2018



## DIMENSI HASIL Result Dimension

- Implementasi SIQ Seluruh Unit
- Zero Accident Seluruh Area
- SMK3 32 Area
- *Maturity Level* K3 dengan Nilai 100
- Paspur Kompetensi 100% Pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 100%
- Peserta *Online Training* 100%
- Akademi Yantek Seluruh Unit
- SIQ Implementation at All Units
- Zero Accident at All Units
- OHSMS at 32 Areas
- OHS Maturity Level Score of 100
- 100% Employee Competency Passport
- 100% Workforce Competency Certification
- 100% Online Training Participants
- O&M Academy at All Units

- Implementasi SIQ Seluruh Unit
- Zero Accident Seluruh Area
- SMK3 20 Area
- *Maturity Level* K3 dengan Nilai 95
- Paspur Kompetensi 100% Pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 100%
- Peserta *Online Training* 100%
- Akademi Yantek 48 Unit
- SIQ Implementation at All Units
- Zero Accident at All Units
- OHSMS at 20 Areas
- OHS Maturity Level Score of 95
- 100% Employee Competency Passport
- 100% Workforce Competency Certification
- 100% Online Training Participants
- O&M Academy at 48 Units

- Implementasi SIQ 30 Area
- Zero Accident 30 Area
- SMK3 8 Area
- *Maturity Level* K3 dengan Nilai 85
- Paspur Kompetensi 80% Pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 98%
- Peserta *Online Training* 100%
- Akademi Yantek 26 Unit
- Best K3 8 Unit
- SIQ Implementation at 30 Areas
- Zero Accident at 30 Areas
- OHSMS at 8 Areas
- OHS Maturity Level Score of 85
- 80% Employee Competency Passport
- 98% Workforce Competency Certification
- 100% Online Training Participants
- O&M Academy at 26 Units
- Best OHS at 8 Units

- Implementasi SIQ 20 Area
- Zero Accident 25/48 Area
- SMK3 3 Region/2 Area Khusus
- *Maturity Level* K3 dengan Nilai 75
- Implementasi SI-Aset 48/48 Area
- Sertifikasi Kompetensi TK 96,80%
- Akademi Yantek 12 Unit
- Best K3 3 Unit
- SIQ Implementation at 20 Areas
- Zero Accident at 25/48 Areas
- OHSMS at 3 Region/2 Special Areas
- OHS Maturity Level Score of 75
- SI-Aset Implementation at 48/48 Areas
- 96.80% Workforce Competency Certification
- O&M Academy at 12 Units
- Best OHS at 3 Units

- Implementasi SIQ 10 Area
- Zero Accident 10 Area
- SMK3 3 Region
- *Maturity Level* K3 Nilai 3
- Implementasi K3NO1LA 5 Area
- Paspur Kompetensi 10% Pegawai
- Sertifikasi Kompetensi TK 95%
- Peserta *Online Training* 50%
- Akademi Yantek 5 Unit
- Best K3 1 Unit
- SIQ Implementation at 10 Areas
- Zero Accident at 10 Area
- OHSMS at 3 Region
- OHS Maturity Level Score of 3
- K3NO1LA Implementation at 5 Areas
- 10% Employee Competency Passport
- 95% Workforce Competency Certification
- 50% Online Training Participants
- O&M Academy at 5 Units
- Best OHS at 1 Unit



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

*Roadmap* K3 menjabarkan elemen-elemen terukur yang harus dipenuhi Perusahaan dalam aspek K3 sehingga pada tahun 2021 Perusahaan telah memenuhi kriteria *operational excellence* sebagai *asset operator* mitra strategis PLN dan menjadi *trendsetter* di industri O&M jaringan ketenagalistrikan.

### Pedoman K3: Safety, Integrity, Quality

Untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen Perusahaan akan pentingnya K3 dan mengakselerasi tumbuhnya budaya K3 yang kuat di seluruh wilayah kerja grup HP, Direksi mengeluarkan Peraturan Direksi No. 014.P/DIR-HP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman K3: *Safety, Integrity, Quality* di Lingkungan PT Haleyora Power. Pedoman K3 merupakan acuan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Perusahaan, yaitu:

1. **Safety.** Perusahaan memastikan tercapainya nihil kecelakaan dalam seluruh lingkup pekerjaan.
2. **Integrity.** Perusahaan memastikan integritas setiap tenaga kerja dan organ perusahaan dengan melaksanakan kegiatan yang mengedepankan integritas perilaku, integritas penyampaian data dan proses bisnis yang senantiasa berdasarkan tata kelola terbaik.
3. **Quality.** Perusahaan memastikan pengelolaan proyek berbasis *work service resource* management dan menjamin tercapainya kualitas pekerjaan berdasarkan proses bisnis yang *excellent* berbasis teknologi informasi sehingga Perusahaan menjadi *trend setter* dan *quality setter*.

Dalam implementasinya, *Safety, Integrity, Quality* dijabarkan dalam 8 program K3, yaitu: 1) *Operation & compliance audit*, 2) *Technical risk management*, 3) *Work procedure management*, 4) *Equipment management*, 5) *Integrity management*, 6) *Communication management*, 7) *Staff management*, dan 8) *Emergency preparedness*.

K3 Roadmap outlines measurable K3 elements that must be fulfilled by the Company so that by 2021 the Company will achieve operational excellence criteria as an asset operator of PLN's strategic partners and become a trendsetter in the O&M industry for power network.

### K3 Guidelines: Safety, Integrity, Quality

To improve awareness of all elements of the Company of the importance of K3 and to accelerate encouragement of a strong K3 culture in all HP group work areas, Board of Directors issued Regulation of Board of Directors No. 014.P/DIR-HP/2017 dated August 29, 2017 concerning OHS Guidelines: Safety, Integrity, Quality in PT Haleyora Power Environment. K3 Guidelines are a reference to support the achievement of the Company's strategic objectives, as follows:

1. **Safety.** The Company ensures the achievement of zero accident in the entire scope of work.
2. **Integrity.** The Company ensures the integrity of its workforce and corporate organs by carrying out activities that prioritize integrity of behavior, data delivery and business processes that always refer to the best governance.
3. **Quality.** The Company ensures the project management based on work service resource management and guarantees the achievement of quality work based on excellent IT-based business processes so that the Company becomes a trend setter and quality setter.

In its implementation, Safety, Integrity, Quality are elaborated in 8 K3 programs, namely: 1) Operation & compliance audit, 2) Technical risk management, 3) Work procedure management, 4) Equipment management, 5) Integrity management, 6) Communication management, 7) Staff management, and 8) Emergency preparedness.



**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**  
Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)



**Program Kerja K3**

Untuk mencapai nihil kecelakaan dalam melaksanakan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi, Perusahaan harus memperkuat organisasi dalam rangka meningkatkan budaya K3 serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Program kerja untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:

- Melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen K3 (SMK3).
- Melaksanakan klausul *safety* sesuai Surat Edaran Kepala Divisi K3LH No. 0072/KLH.00.01/DIVK3L/2016 tanggal 7 Maret 2016.
- Melengkapi jumlah pegawai bersertifikat Ahli K3 Umum (AK3U), Pengawas Operasional, Sertifikasi Kompetensi, SOP, Alat Kerja (Alker) dan Alat Pelindung Diri (APD) di setiap proyek HP dan HPI.
- Mengimplementasikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
- Mengimplementasikan Peraturan Direksi No. 0141.P/DIR-HP/2017 Tentang Pedoman *Safety, Integrity, Quality*.
- Mengimplementasikan *monitoring* kinerja K3 melalui *Shifting* dan Aplikasi Aset (Si-Asset)

**K3 Work Plan**

To achieve zero accident in carrying out distribution operations and maintenance services, the Company must strengthen its organization in order to enhance K3 culture and compliance with manpower regulations. Work programs to achieve these goals include:

- Obtain ISO 9001 Quality Management System and K3 Management System (SMK3) certification.
- Implement safety clause in accordance with Circular Letter of Head of K3LH Division No. 0072/KLH.00.01/DIVK3L/2016 dated March 7, 2016.
- Complete the number of certified staff of General K3 Expert (AK3U), Operations Supervisor, Competency Certification, SOP, Work Tools (Alker) and Personal Protective Equipment (PPE) in each HP and HPI project.
- Implement environmental protection and management efforts in accordance with Law No. 32 of 2009.
- Implement Regulation of Board of Directors No. 0141.P/DIR-HP/2017 concerning Guidelines for Safety, Integrity, Quality.
- Implement OHS performance monitoring through Shifting and Asset Application (Si-Asset).

## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

### Kegiatan K3 Tahun 2019

#### 1. Morning Briefing

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan *Morning Briefing* atau *Morning Spirit* HP yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis. Sedangkan Jumat pagi diisi dengan kegiatan olah raga atau senam bersama. *Morning Briefing* dilakukan sebelum mulai bekerja baik di kantor pusat, region, area, maupun kelompok-kelompok kerja/shift. Topik *briefing* mencakup aspek-aspek terkait pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi bila ada, inspeksi alat kerja (Alker) dan alat pelindung diri (APK), kesiapan fisik dan mental pekerja dalam melaksanakan tugas hari itu, dan ditutup dengan doa bersama sebelum memulai tugas. *Morning Briefing* merupakan bagian dari budaya K3 yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja aman, meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan mencapai target nihil kecelakaan.

#### 2. Kampanye 5 Langkah Menuju Selamat (5LMS)

Salah satu kampanye K3 adalah pemahaman 5 Langkah Menuju Selamat (5LMS). 5LMS adalah prosedur standar yang harus dilaksanakan setiap individu terutama yang bekerja pada instalasi bertegangan (*online service*). Untuk menanamkan sikap disiplin terhadap prosedur, para Manager dan Supervisor harus melakukan pembinaan, praktik dan *upskilling* yang terus-menerus kepada tenaga kerja tim kerja Pelayanan Andal (Yandal) dan Inspeksi dan Pemeliharaan.

5LMS merupakan kontrol mandiri (*self assessment*) bagi pelaksana agar selamat. Di dalam 5LMS terdapat 5 pertanyaan pokok yang harus dipastikan jawabannya "Ya". Bila dari 5 pertanyaan tersebut ada pertanyaan yang dijawab "Tidak" (walaupun hanya satu pertanyaan), maka pekerjaan tidak boleh dilakukan. Pelanggar prosedur 5LMS akan mendapat sanksi disiplin pegawai dan hak-haknya untuk mendapat perlindungan asuransi atas risiko kecelakaan menjadi gugur.

### K3 Activities in 2019

#### 1. Morning Briefing

The Company organizes HP Morning Briefing or Morning Spirit which are routinely held every Monday to Thursday. Meanwhile, Friday morning is filled with sports or gym activities. Morning Briefing is held before starting work at the head office, regions, areas and working groups/shifts. The briefing topic covers work-related aspects and problems encountered if any, inspection of work tools (Alker) and personal protective equipment (APK), the physical and mental readiness of workers in carrying out the day's tasks and is closed with prayer before starting the day's tasks. Morning Briefing is part of K3 culture which is expected to create a safe work environment, to minimize the risk of occupational accidents and to achieve the target of zero accident.

#### 2. 5-Step to Safety (5LMS) Campaign

One of K3 campaigns carried out by the Company is 5-Step to Safety (5LMS) understanding campaign. 5LMS is a standard procedure that must be carried out by every individual, especially those working on online service. To instill a disciplined attitude towards procedures, Managers and Supervisors must provide guidance, practice and continuous upskilling of Reliable Service (Yandal) and Inspection and Maintenance team workforce.

5LMS is a safety self-assessment for executives. In 5LMS, there are 5 main questions that need "Yes" answer. If from the 5 questions have one or more "No" answers, then the work should not be done. 5LMS procedure offenders will be imposed disciplinary sanctioned and their rights to receive insurance protection on risk of accident will become void.



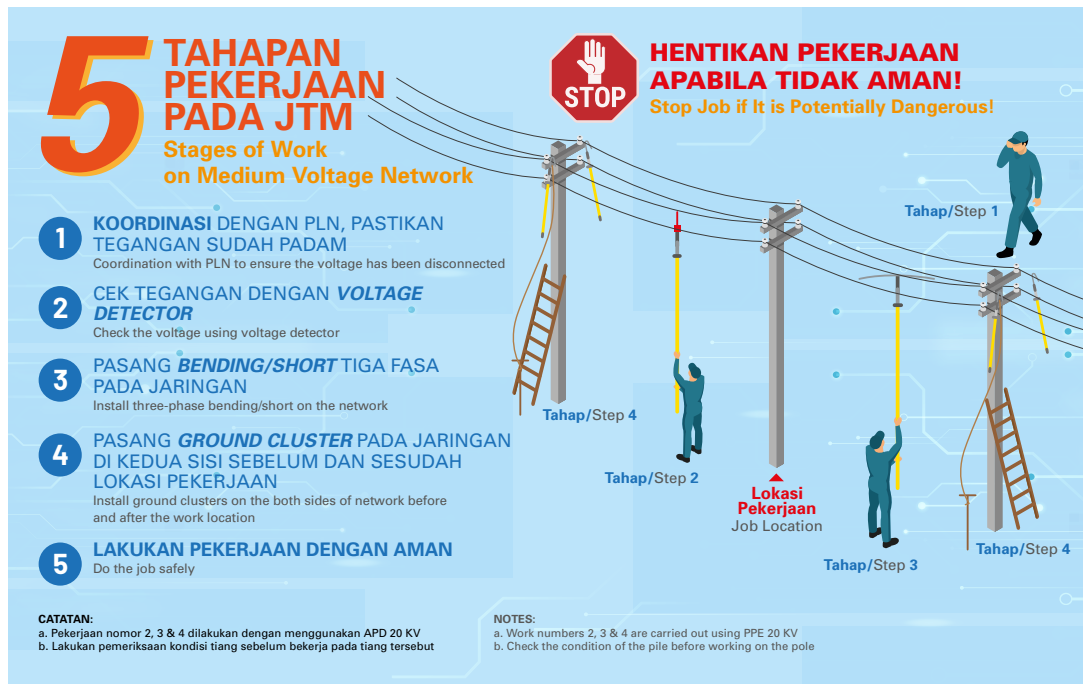
**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**  
Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)



1. Sosialisasi 5 Tahapan Pekerjaan pada Jaringan Tegangan Menengah (5TPJ)  
Pekerjaan pada jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pemahaman personel terhadap *Job Safety Analysis* (JSA) sangat penting terutama dalam mengamankan titik kerja dari bahaya listrik. Mengamankan titik kerja dari bahaya listrik adalah hal utama yang harus diperhatikan ketika bekerja pada instalasi tenaga listrik. Oleh karena itu, SOP yang berisi urutan kerja yang benar sangat dibutuhkan agar pelaksana terhindar dari kecelakaan kerja. Tahapan-tahapan dalam mengamankan titik kerja dari tegangan oleh pelaksana tidak boleh lepas dari pengawasan Pengawas K3 atau pengawas regu. Praktik dan uji coba adalah cara cepat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menaati SOP dan 5LMS untuk melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan kerja.

1. Socialization of 5 Stages of Work on Medium Voltage Network (5TPJ)  
Work on 20kV medium voltage network (JTM) has a high level of occupational accident risk. Personnel's understanding of Job Safety Analysis (JSA) is very important especially in securing work points from electrical hazards. Securing work points from electrical hazards is the priority that must be considered when working on power installations. Therefore, SOP containing proper work order is needed so that workforce can avoid work accidents. The stages in securing work points from voltage by workforce must not closely supervised by K3 supervisor or team supervisor. Practices and trials are a quick way to provide an understanding of the importance of complying with SOP and 5LMS to protect workforce from potential occupational accidents.

**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**  
Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)



2. Sosialisasi Budaya K3

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi dan *safety patrol* budaya K3 serta aspek-aspek terkait K3 lainnya sebagai berikut:

2. K3 Culture Socialization

Throughout 2019, the Company organized socialization and safety patrol on K3 culture and other aspects related to K3 as follows:

No.	Region	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Jumlah Peserta Number of Participant
1	Region 1 (8 Area)	18–31 Juli July 18–31	<p>Peluncuran aplikasi Si-Asset Launching of Si-Asset apps</p> <p>Pemahaman dan implementasi <i>safety</i> (5LMS, 5TPJ dan 5R) Understanding and implementing safety (5LMS, 5TPJ and 5S)</p> <p>Pemahaman kualitas kinerja (kontrak, SLA, respons, recovery) Understanding performance quality (contract, SLA, response, recovery)</p> <p>Pemahaman teknik sesuai SOP/SWP Technical understanding according to SIP/SWP</p>	176
2	Region 2 (6 Area)	12–13 Agustus August 12–13	<p>Peluncuran aplikasi Si-Asset Launching of Si-Asset apps</p>	149
		25–26 Juni June 25–26	<p>Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment</p>	70



**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**  
Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

No.	Region	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Jumlah Peserta Number of Participant
3	Region 3 (10 Area)	14–15 Agustus August 14–15	Peluncuran aplikasi Si-Asset Launching of Si-Asset apps	235
		22–23 April April 22–23	Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment	408
4	Region 4 (4 Area)	3 Januari January 3	<i>Safety Patrol K3</i> OHS Safety Patrol	30
		27–28 Februari February 27–28	<i>Safety Patrol K3</i> OHS Safety Patrol	93
		18–19 Agustus August 18–19	Peluncuran aplikasi Si-Asset Launching of Si-Asset apps	64
5	Region 5 (11 Area)	22–23 Mei May 22–23	Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment	450
		21–22 Agustus August 21–22	Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment	77
6	Region 6 (4 Area)	26–29 Agustus August 26–29	Peluncuran aplikasi Si-Asset dan sosialisai K3 Launching of Si-Asset apps and socializing of OHS	171
7	Region 7 (3 Area)	10 Januari January 10	Peluncuran aplikasi Si-Asset Launching of Si-Asset apps	750
		11–12 Maret March 11–12	Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment	
		27–28 Juni June 27–28	Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment	
		2–3 Oktober October 2–3	Induksi rekrutmen tenaga kerja Induction of labor recruitment	
8	Bangka Belitung (1 Area)	9 Februari February 9	Peluncuran aplikasi Si-Asset Launching of Si-Asset apps	71
9	Sumatera Utara North Sumatra (1 Area)	21 Maret March 21	Peluncuran aplikasi Si-Asset dan induksi rekrutmen tenaga kerja Launching of Si-Asset apps and induction of labor recruitment	34
<b>Total</b>				<b>2,778</b>

3. Sertifikasi K3

Perusahaan meningkatkan kualifikasi pegawai di bidang K3 dengan memberikan pelatihan sertifikasi mandatori untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Ahli K3 Umum (AK3U), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Diklat Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Diklat Pengawas Pekerjaan untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Sistem Manajemen K3 (SMK3).

Untuk meningkatkan kompetensi (*upskilling*) tenaga kerja teknik, Perusahaan, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PLN dan Divisi

3. K3 Certification

The Company improves K3 qualifications of employees by providing mandatory certification training to obtain competency certificates. Periodically, the Company organizes education and training (Diklat) for General K3 Experts (AK3U), First Aid for Accidents (P3K), Fire Fighting (Damkar) Training and Work Supervisory Training to meet the criteria required in K3 Management System (SMK3).

To improve competency (*upskilling*) of technical workforce, the Company, in collaboration with Center for Education and Training (Pusdiklat) of PLN and K3LH



**Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**  
Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

K3LH PLN, telah menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) K3 yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan dan dapat diaplikasikan untuk tenaga kerja Pelayanan Teknik (Yantek) lulusan SMK yang dimiliki Perusahaan. Materi pelatihan disusun berdasarkan pengalaman HP di lapangan, diarahkan oleh Divisi K3LH PLN serta disiapkan dan dilaksanakan oleh Pusdiklat.

Division of PLN, has compiled K3 education and training (Diklat) curriculum that is suitable for the Company's business and can be applied to workforce of Technical Services (Yantek) who are SMK graduates work for the Company. The training material was compiled based on HP's field experience, directed by PLN's K3LH Division and prepared and held by Training Center.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah pemegang sertifikasi K3 yang ditugaskan di organisasi K3 kantor pusat, region dan area adalah sebagai berikut:

At end of 2019, the number of K3 certification holders assigned to K3 organization in head office, regions and areas were as follows:

No.	Lokasi Tugas Location of Assignment	AK3U	Pemadam Kebakaran Fire Fighting	P3K First Aid	SIO Crane	SMK3	Location of Assignment
1	Kantor Pusat	3	2	3	0	0	Head Office
2	Region 1 Jawa Bagian Barat	15	3	2	8	3	Region 1 Western Part of Java
3	Region 2 Jawa Bagian Tengah	11	2	3	0	1	Region 2 Central Part of Java
4	Region 3 Jawa Bagian Timur	15	3	7	0	1	Region 3 Easter Part of Java
5	Region 4 Sumatera Barat	9	2	1	0	0	Region 4 West Sumatra
6	Region 5 DKI Jakarta dan Banten	14	2	2	18	0	Region 5 DKI Jakarta and Banten
7	Region 6 WRKR	10	2	1	0	0	Region 6 WRKR
8	Area Bangka	1	0	0	2	0	Bangka Area
9	Area Lampung	4	0	0	2	0	Lampung Area
10	Area Rantau Prapat	2	0	0	0	0	Rantau Prapat Area
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>

**Kecelakaan Kerja**

Pada tahun 2019 terjadi 3 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di Region 3 Jawa Timur Rayon Bangil Area Parusuran pada tanggal 4 Maret 2019 (kejadian terjadi selang 4 hari setelah kontrak PKWT ditandatangani), Region 3 Jawa Timur Rayon Gedangan Area Surabaya Selatan pada tanggal 29 April 2019, dan Region 1 Jawa Barat Rayon Banjaran Area Majalaya pada tanggal 20 November 2019.

**Occupational Accidents**

In 2019, there were 3 occupational accidents in Region 3 East Java Rayon Bangil Pasuruan Area on March 4, 2019 (4 days after the signing of PKWT contract), Region 3 East Java Rayon Gedangan South Surabaya Area on April 29, 2019 and Region 1 West Java Rayon Banjaran Majalaya Area on November 20, 2019.

Atas kejadian kecelakaan tersebut, Perusahaan telah menindaklanjuti dengan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terutama kepada tenaga kerja di area baru dan penyegaran kepada jajaran manajemen terkait pentingnya budaya K3.

The Company followed up on these occupational accidents by:

1. Providing assistance, especially for workforce in new areas, and refreshment for management related to the importance of K3 culture.



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Programs Related to Employment, Occupational Health and Safety (K3)

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengisian formasi tenaga kerja organisasi K3 di Pusat, region dan area.</li> <li>3. Audit Sertifikasi SMK3.</li> <li>4. Pelatihan Sertifikasi Profesi/Ahli K3.</li> <li>5. Sosialisasi dan <i>safety patrol</i> budaya K3.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Filling in the formation of workforce in K3 organization at head office, regions and areas.</li> <li>3. SMK3 Certification Audit.</li> <li>4. K3 Professional/Expert Certification Training.</li> <li>5. Socialization and safety patrol of K3 culture.</li> </ol> |
|---|--|

### Sistem Manajemen K3

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sesuai PP 50/2012 tersebut, HP yang bidang pekerjaannya memiliki potensi bahaya tinggi diwajibkan memenuhi 64 kriteria SMK3. Pemenuhan 64 kriteria tersebut diaudit oleh pihak eksternal, dalam hal ini PLN Jasa Sertifikasi (Pusertif). Hasil audit dan rekomendasinya menjadi dasar pertimbangan dalam proses sertifikasi SMK3.

Saat ini Perusahaan telah membentuk tim setup untuk finalisasi proses sertifikasi SMK3 di 6 region. Tugas tim *setup* adalah melakukan peninjauan awal sampai sejauh mana region bersangkutan telah menerapkan 64 kriteria sebagai tahap awal. Bila implementasi K3 di region tersebut sudah mencapai lebih dari 85%, maka audit internal dapat dilakukan. Sertifikasi SMK3 (untuk yang 64 kategori) akan mencantumkan kategori Memuaskan, Baik, dan Kurang. Nilai "Memuaskan" diberikan bila implementasinya telah mencapai lebih dari 85%. Nilai "Baik" untuk implementasi 65%-85%, dan nilai "Kurang" untuk implementasi di bawah 65%.

Hasil sertifikasi SMK3 dan kemajuan proses sertifikasi SMK3 hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### OHS Management System

The Company implements OHS management system (SMK3) referring to Government Regulation No. 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Health and Safety Management System (K3). In accordance with PP 50/2012, HP that runs business with high potential hazards are required to meet 64 SMK3 criteria. Fulfillment of these 64 criteria is audited by external party, in this case, PLN Certification Service (Pusertif). The results and recommendations of the audit become the basis for consideration in SMK3 certification process.

Currently, the Company has established setup team to finalize SMK3 certification process in 6 regions. The task of the setup team is to conduct initial review of the extent to which the region has implemented 64 criteria as an initial stage. If K3 implementation in the respective region reaches more than 85%, then internal audit will be conducted. SMK3 certification (for 64 categories) will mention the rating of Satisfactory, Good, or Poor. "Satisfactory" rating is given if the implementation reaches more than 85%. "Good" rating for implementations between 65% -85% and "Poor" rating for implementations below 65%.

The results of SMK3 certification and the progress of SMK3 certification process at end of 2019 were as follows:

No.	Region	Nilai Audit Audit Result	Sertifikasi Certification	Tanggal Audit Audit Date
1	Region 1	90.62	Gold	17-18 Januari
2	Region 2	90.62	Gold	January 17-18
3	Region 3	92.19	Gold	
4	Region 1 Area Bandung	90.62	Gold	27-28 Desember
5	Region 1 Area Majalaya	89.06	Gold	December 27-28

## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Tanggung Jawab kepada Konsumen Corporate Social Responsibility Programs Related to Consumer Protection

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

#### Komitmen

Kepuasan pelanggan adalah kunci keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan berusaha untuk menjaga standar kualitas layanan dihasilkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan *service level agreement* (SLA) yang telah disepakati.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengedepankan misinya yaitu mendukung PLN untuk merealisasikan pelayanan sistem distribusi yang andal dan berkualitas sesuai dengan standar layanan tertinggi, serta mendukung PLN dalam menerapkan sistem *revenue assurance* (REVASS) dan efisiensi jaringan distribusi tenaga listrik.

#### Kegiatan yang Dilakukan

- Inspeksi Instalasi Pelanggan dan Pembentukan Komunitas Peduli Kelistrikan  
Dalam rangkaian peringatan hari Kemerdekaan RI ke-74, HP berkolaborasi dengan PLN dan PT Icon+ melaksanakan kegiatan CSR Inspeksi Instalasi Pelanggan dan Pembentukan Komunitas Peduli Kelistrikan. Kegiatan ini dilaksanakan di 23 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Target pemeriksaan instalasi kelistrikan sebanyak 2.300 pelanggan.

Tim ListriQu HP melaksanakan Inspeksi Instalasi Pelanggan di wilayah Bandengan, Bintaro, Bulungan, Cempaka Putih, Cengkareng, Ciputat, Ciracas, Jatinegara, Kebon Jeruk, Kramat Jati, Lenteng Agung, Marunda, Menteng, Pondok Gede, Pondok Kopi, Tanjung Priuk, Banten Utara, Cikokol, Cikupa, Teluk Naga, Serpong, Banten Selatan, Bekasi, Bogor, Gunung Putri, dan Depok.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Perusahaan juga menginisiasi terbentuknya Komunitas Peduli Kelistrikan. Komunitas tersebut didukung oleh pemerintah daerah setempat hingga ke struktur RT/RW. Tujuan pembentukan komunitas adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keselamatan komunitasnya terhadap bahaya listrik.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO CONSUMER PROTECTION

#### Commitment

Consumer protection is the key to the Company's business sustainability. Therefore, the Company strives to maintain the service quality standards and to provide the best services to customers in accordance with the agreed service level agreement (SLA).

In carrying out its business, the Company always prioritizes its mission of supporting PLN to realize reliable and quality distribution system services in accordance with the highest service standards, as well as supporting PLN in implementing revenue assurance (REVASS) system and efficiency of power distribution networks.

#### Activities

- Customer Installation Inspection and Electricity Care Community Formation  
In a series of commemoration of 74<sup>th</sup> Indonesian Independence Day, HP collaborated with PLN and PT Icon+ to carry out CSR activities for Customer Installation Inspection and Formation of Electricity Care Community. Those activities were carried out in 23 Customer Service Implementation Units (UP3) in DKI Jakarta, Banten and parts of West Java. The electrical installation inspection target was 2,300 customers.

ListriQu HP team carried out Customer Installation Inspection in Bandengan, Bintaro, Bulungan, Cempaka Putih, Cengkareng, Ciputat, Ciracas, Jatinegara, Kebon Jeruk, Kramat Jati, Lenteng Agung, Marunda, Menteng, Pondok Gede, Pondok Kopi, Tanjung Priuk, North Banten, Cikokol, Cikupa, Teluk Naga, Serpong, South Banten, Bekasi, Bogor, Gunung Putri, and Depok.

Along with this activity, the Company also initiated the formation of Electricity Care Community. The community is supported by the local government up to RT/RW level. The purpose of forming this community is to increase community participation in maintaining the safety of their community against the dangers of electrical accident.



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Tanggung Jawab kepada Konsumen Corporate Social Responsibility Programs Related to Consumer Protection

- Peluncuran produk ListriQu untuk Kemudahan Pelanggan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh konsumen listrik, HP meluncurkan aplikasi Layanan Instalasi Listrik Pelanggan (ListriQu) pada tanggal 17 Februari 2019. Layanan ListriQu telah mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Surabaya. Di tahun 2020, ListriQu akan melayani UID Jawa Tengah dan DIY, UIW S2JB, UIW Sulsebar, UIW MMU, UIW NTT, dan UID Bali.

Kehadiran aplikasi ListriQu akan membantu membantu pelanggan saat terjadi gangguan instalasi di rumah. Penggunaan aplikasi ListriQu sangat mudah, pelanggan hanya perlu membuka aplikasi ListriQu dan menginput data yang diperlukan. Selanjutnya, petugas ListriQu akan datang untuk menangani gangguan pada instalasi pelanggan. Layanan ListriQu ini bergaransi mulai dari jasa hingga material yang digunakan.

Bagi Perusahaan, implementasi aplikasi ListriQu memberikan beberapa *benefit*, antara lain dapat mengalihkan petugas Yandal ke penugasan lain (mengantisipasi disrupsi atas pekerjaan-pekerjaan di PLN), mengurangi biaya operasional di pelayanan teknik, serta sebagai proses bisnis baru—dalam hal ini digitalisasi layanan. Selain memiliki pelayanan yang cepat, ListriQu juga memiliki kru bersertifikat, transparansi harga, kualitas terbaik, dan garansi pelayanan. Ke depan, aplikasi ListriQu akan terus disempurnakan dengan fitur-fitur seperti Home appliance, Q-meter, serta Q-premium.

- Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, Perusahaan secara berkala mengadakan Survei Kepuasan Pelanggan untuk mengukur dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan serta memperoleh umpan balik dari pelanggan. Tujuan akhir dari pelaksanaan survei adalah perbaikan kualitas layanan dan kinerja.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan survei yang dilaksanakan oleh tim asesor eksternal. Aspek yang diukur meliputi mutu layanan dan layanan secara umum, tingkat harga (*billing rate*), administrasi keuangan, ketepatan waktu layanan, dan penanganan keluhan yang diberikan oleh Perusahaan. Melalui analisis data dari

- ListriQu launch for Customer Ease

To improve services to all electricity consumers, HP launched Customer Electrical Installation Service (ListriQu) application on February 17, 2019. ListriQu services have covered the areas of DKI Jakarta, Banten and Surabaya. In 2020, ListriQu will serve UID Central Java and DIY, UIW S2JB, UIW Sulsebar, UIW MMU, UIW NTT and UID Bali.

ListriQu application will help customers when there is an installation disruption at home. Using ListriQu application is very easy, customers only need to open ListriQu application and input the required data. Furthermore, ListriQu officers will come to handle disruptions in the customer's installation. Services and materials provided by ListriQu are guaranteed.

For the Company, ListriQu application provides several benefits, including being able to transfer Yandal's officers to other assignments (anticipating disruption of jobs at PLN), reducing operational costs in technical services, as well as new business processes—in this case digitizing services. In addition to fast service, ListriQu also offers certified crews, price transparency, best quality and service guarantee. In the future, ListriQu application will continue to be enhanced with features, such as Home appliance, Q-meter and Q-premium.

- Customer Satisfaction Survey

To improve service quality for customers, the Company regularly holds Customer Satisfaction Survey to measure and evaluate services provided to customers and to obtain feedback from customers. The final objective of the survey is to improve service quality and performance.

In 2019, the Company performed a survey conducted by a team of external assessors. The aspects measured included quality of services and services in general, billing rate, financial administration, timeliness of services and complaint handling by the Company. Through data analysis of 77 respondents in the customer category, the

## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Pengembangan Sosial dan Masyarakat Corporate Social Responsibility Programs Related to Social and Community Development

77 responden kategori konsumen (pelanggan), indeks kepuasan pelanggan mencapai 73,51 atau tercapai 83,06% dari target sebesar 88,50. Hal ini menjadi bahan evaluasi manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

customer satisfaction index reached 73.51 or 83.06% of the target of 88.50. This became management evaluation material to improve future service quality.

No.	Aspek Pengukuran	Indeks Index	Measurement Aspect
1	Mutu layanan dan Layanan secara Umum	73.67	Service Quality and General Services
2	Harga, Biaya, dan Keuangan	73.65	Price, Cost, and Finance
3	Waktu	73.61	Time
4	Penanganan Keluhan	73.78	Complain Handling
<b>Indeks Rata-Rata Kepuasan Pelanggan</b>		<b>73.51</b>	<b>Average Customer Satisfaction Index</b>

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

#### Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk ikut berperan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja melalui program-program tanggung jawab sosial di bidang sosial dan masyarakat. Program-program yang tepat guna, tepat sasaran dan memenuhi harapan pemangku kepentingan akan menumbuhkan interaksi positif antara Perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan berharap masyarakat mempunyai rasa memiliki dan ikut menjaga keberadaan aset instalasi PLN yang berada atau berdekatan di wilayah permukiman masyarakat.

#### Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak atas Kegiatan Tersebut

- Berbagi Kebahagiaan  
Manyambut Hari Raya Idul Adha 1440 H, Perusahaan kembali melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing. Pada tahun 2019, HP bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) melaksanakan pemotongan hewan kurban di Kampung Babakan, Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Tangerang. Hewan kurban yang dipotong berjumlah 3 ekor sapi dan 13 kambing. Dalam kegiatan yang dihadiri Direktur Operasi Haleyora Power Sinung Triwulandari, Perusahaan membagikan 100 paket sembako bagi masyarakat sekitar.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

#### Commitment

The Company is committed to taking part in improving the standard of living of the community and in increasing employment rate through social responsibility programs in the social and community sector. Programs that are appropriate, right on target and meet stakeholder expectations will foster positive interactions between the Company and the community. The Company hopes that the community will have a sense of belonging and participate in maintaining PLN's installation assets that are located or adjacent to their residential areas.

#### Activities and the Impacts

- Sharing Happiness  
Welcoming Eid al Adha 1440H, the Company distributed sacrificed cows and goats. In 2019, HP collaborated with Al Falah Social Fund Foundation (YDSF) carrying out distribution of sacrificial animals in Babakan Hamlet, Pasir Village, Kronjo District, Tangerang. The sacrificial animals were 3 cows and 13 goats. On this occasion which was attended by Operation Director of Haleyora Power, Sinung Triwulandari, the Company also distributed 100 basic food packages to the surrounding community.



## Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Pengembangan Sosial dan Masyarakat Corporate Social Responsibility Programs Related to Social and Community Development

- Safari Ramadhan 2019

Perusahaan memiliki berbagai kegiatan tahunan dalam menyambut bulan Ramadhan. Salah satunya adalah kegiatan Safari Ramadhan, yaitu silaturahmi Direksi dan manajemen ke region-region untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan mendengarkan aspirasi pegawai HP. Kegiatan Safari Ramadhan juga diisi dengan acara berbuka puasa, mendengarkan tausiyah dari pemuka agama setempat, dan berbagi untuk anak-anak yatim.

Pada Safari Ramadhan 2019, Direksi didampingi manajemen bersilaturahmi dengan pegawai Perusahaan yang berada di region, area, dan rayon untuk berbagi ilmu dan sekaligus mendengarkan aspirasi dari seluruh pegawai. Safari Ramadhan juga diisi dengan acara berbuka puasa dan berbagi dengan anak yatim. Seluruh pegawai bersama dengan anak yatim mengisi kegiatan dengan mendengarkan tausiah dari ustad setempat, yang diundang untuk memberikan siraman rohani. Kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian HP terhadap lingkungan sosial perusahaan di seluruh wilayah kerja HP.

- GENSS *Care Charity* "Brightening Children Lives"

Pada tanggal 14 Desember 2019, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosial bersama anak yatim dari Yayasan Pelopor Kepedulian Rumah Cerdas Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kesempatan tersebut, Lazis dan SBO (spiritual, Budaya dan Olahraga) HP menyerahkan santunan dan keperluan sekolah kepada anak-anak yatim dan mengajak mereka bermain dan belajar bersama di Museum Listrik dan IPTEK.

- 2019 Ramadhan Safari

The Company conducts various annual activities in welcoming the Ramadan. One of them is Ramadhan Safari, which is a gathering of Board of Directors and management with regions to share information, knowledge and to listen to aspirations of HP employees. Ramadhan Safari is also filled with iftar, tausiyah from local religious leaders and donations for orphans.

In 2019 Ramadhan Safari, Board of Directors was accompanied by management to meet the Company's employees in regions, areas and rayons to share knowledge and at the same time to listen to aspirations of all employees. Ramadhan Safari was also filled with iftar and donations for orphans. All employees together with orphans filled listened to tausiah from the local religious leader. Ramadhan Safari is a form of HP's concern for the Company's social environment in all HP work areas.

- GENSS *Care Charity* "Brightening Children Lives"

On December 14, 2019, the Company organized social activity with orphans from Indonesian Smart Home Care Pioneer Foundation at Taman Mini Indonesia Indah. On this occasion, HP's Lazis and SBO (spiritual, cultural and sports) handed over donations and school supplies to the orphans and invited them to play and learn together at Museum of Electricity and Science and Technology.







# laporan keuangan *audit*

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS





**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018**

***PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY***

***Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018***

<b>Daftar Isi</b>	<b><u>Halaman/ Pages</u></b>	<b><i>Table of Contents</i></b>
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>		<b><i>Directors' Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditor's Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018</b>		<b><i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018</i></b>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)  
PT HALEYORA POWER dan ENTITAS ANAK/  
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018 (AUDITED)  
PT HALEYORA POWER and SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Nama/Name   | : | Achmad Taufik Haji   |
| Alamat kantor/Office Address                                 | : | Kindo Square Blok A15-16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101<br>Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan 12760 |
| Alamat domisili sesuai KTP/<br>Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Magetan No. 1 Antapani Kota Bandung Jawa Barat   |
| Nomor Telepon/Phone Number                                   | : | (021) 79192517   |
| Jabatan/Position   | : | Direktur Utama / <i>President Director</i>   |
| 2. Nama/ Name  | : | Sutrisno Samad   |
| Alamat kantor/Office Address                                 | : | Kindo Square Blok A15-16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101<br>Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan 12760 |
| Alamat domisili sesuai KTP/<br>Domicile as stated in ID Card | : | Pungkuran No. 369 Kauman Semarang Jawa Tengah  |
| Nomor Telepon/ Phone Number                                  | : | (021) 79192517   |
| Jabatan/Position   | : | Direktur Keuangan & SDM / <i>Finance &amp; HCM Director</i>  |

Menyatakan bahwa :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;   | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i>   |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  | 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i>              |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;   | 3. a. <i>All information in the financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;</i>                                    |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. <i>The financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan.  | 4. <i>We are responsible for internal control system within the Company.</i>   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 16 Maret 2020/ March 16, 2020

Direktur Utama /  
*President Director*

Direktur Keuangan & SDM /  
*Finance & HCM Director*

  
Achmad Taufik Haji



  
Sutrisno Samad



# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340  
F +62 215140 1350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

Nomor/Number : 00377/2.1030/AU.1/05/0645-1/1/III/2020

## Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/  
*The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors*

### PT Haleyora Power

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Haleyora Power ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Haleyora Power ("the Company") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### **Management's responsibility for the consolidated financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### **Auditor's responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Haleyora Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Haleyora Power and its subsidiary as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**



**Dedy Sukrisnadi**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0645/  
Public Accountant License Number: AP. 0645

Jakarta, 16 Maret / March 16, 2020



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2019 Rp	2018 Rp	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5	305,598	383,545	Cash and cash equivalents
Rekening bank				Restricted cash
yang dibatasi penggunaannya	6	59,039	55,569	in bank
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	7.25	400,621	218,482	Related parties
Pihak ketiga	7	335	20	Third parties
Piutang lain-lain	12	4,465	14,344	Other receivables
Pajak dibayar di muka	8	44,857	36,615	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	9	16,707	7,290	Prepaid expenses and advances
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>831,622</b>	<b>715,865</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap	11	42,732	30,421	Property and equipment
Aset tak berwujud		694	7	Intangible assets
Investasi pada entitas asosiasi	10	48,889	47,476	Investment in associate
Biaya yang ditangguhkan		1,604	581	Deferred Charges
Aset pajak tangguhan	18	41,442	30,556	Deferred tax assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>135,361</b>	<b>109,041</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>966,983</b>	<b>824,906</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(Continued)**

December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019 Rp</u>	<u>2018 Rp</u>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade accounts payable
Pihak berelasi	13.25	420	1,492	Related parties
Pihak ketiga	13	28,126	18,832	Third parties
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	15.25	1,604	13,343	Related parties
Pihak ketiga	15	1,381	8,686	Third parties
Utang pajak	16	10,785	6,167	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	14	55,347	44,694	Accrued expenses
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>97,663</b>	<b>93,214</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan pasca kerja	17	161,925	118,382	Employee benefits obligations
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>161,925</b>	<b>118,382</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>259,588</b>	<b>211,596</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value of
Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 100.000 saham				Authorized - 100,000 shares
Modal ditempatkan dan				Subscribed and fully paid-up
disetor penuh - masing-masing				100,000 shares as of
100.000 saham pada				December 31, 2019
31 Desember 2019 dan 2018	19	100,000	100,000	and 2018, respectively
Tambahan modal disetor		315	315	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain		50,759	56,836	Other comprehensive income
Saldo laba		539,919	431,908	Retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan				Equity attributable to
kepada pemilik Entitas Induk		690,993	589,059	owners of the Company
Kepentingan non-pengendali	20	16,402	24,251	Non-controlling interests
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>707,395</b>	<b>613,310</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>966,983</b>	<b>824,906</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
<b>PENDAPATAN</b>	21	2,513,910	2,073,318	<b>REVENUES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	22	2,225,980	1,821,999	<b>DIRECT EXPENSES</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>287,930</b>	<b>251,319</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Penghasilan keuangan		9,141	7,475	Financial income
Bagian laba bersih entitas asosiasi	10	6,717	7,071	Share of profit in associate
Beban umum dan administrasi	23	(58,753)	(51,305)	General and administration expenses
Beban keuangan		(76)	(63)	Financial costs
Beban lain-lain - bersih	24	(39)	(19,796)	Other expense - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>244,920</b>	<b>194,701</b>	<b>INCOME BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	18	(65,598)	(56,020)	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>179,322</b>	<b>138,681</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan</b>				<b>Other comprehensive income for the year</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	17	(8,103)	(7,236)	Remeasurement on defined benefit plans
Beban pajak terkait	18	2,026	1,809	Related income tax expenses
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		<b>(6,077)</b>	<b>(5,427)</b>	<b>Other comprehensive income for the year after tax</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	20	<b>173,245</b>	<b>133,254</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Income for the year attributable to:
Pemilik Entitas Induk		177,350	135,254	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		1,972	3,427	Non-controlling interests
<b>Jumlah</b>		<b>179,322</b>	<b>138,681</b>	<b>Total</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik Entitas Induk		171,273	129,827	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	20	1,972	3,427	Non-controlling interests
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>173,245</b>	<b>133,254</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
For the Years December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Subscribed and paid-up capital stock</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-In Capital</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ <i>Remeasurement on defined benefit plans</i>	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ <i>Equity attributable to owner of the parent</i>	Kepentingan non-pengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Saldo per 1 Januari 2018</b>	<b>100,000</b>	<b>315</b>	<b>355,227</b>	<b>62,263</b>	<b>517,805</b>	<b>20,824</b>	<b>538,629</b>
Dividen	--	--	(58,573)	--	(58,573)	--	(58,573)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	135,254	(5,427)	129,827	3,427	133,254
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>100,000</b>	<b>315</b>	<b>431,908</b>	<b>56,836</b>	<b>589,059</b>	<b>24,251</b>	<b>613,310</b>
Dividen	--	--	(69,339)	--	(69,339)	--	(69,339)
Dividen kepada kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	(994)	(994)
Penambahan penyertaan modal dari porsi kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	(8,827)	(8,827)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	177,350	(6,077)	171,273	1,972	173,245
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>100,000</b>	<b>315</b>	<b>539,919</b>	<b>50,759</b>	<b>690,993</b>	<b>16,402</b>	<b>707,395</b>

Balance as of January 1, 2018

Dividend  
Total comprehensive income

Balance as of December 31, 2018

Dividend  
Dividend to non-controlling interest  
Capital addition from non-controlling interest  
Total comprehensive income for the year

Balance as of December 31, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	2,341,358	2,089,974	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(408,589)	(340,352)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(1,847,778)	(1,520,044)	Cash paid to employees
Kas diperoleh dari operasi	84,991	229,578	Cash provided by operations
Penerimaan bunga	9,141	7,475	Interest received
Pembayaran bunga	(76)	(64)	Payment of interest
Penerimaan restitusi PPN	5,191	--	VAT refund received
Pembayaran pajak penghasilan	(68,179)	(63,857)	Payment of income taxes
Pembayaran imbalan pasca kerja	(6,669)	(10,976)	Payment of Employee Benefit
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>24,399</b>	<b>162,156</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	5,304	2,293	Dividend receipt from associate
Perolehan aset tetap	(24,275)	(24,159)	Acquisition of property and equipment
Perolehan aset tidak berwujud	(745)	--	Acquisition of intangible asset
Penarikan (penempatan) rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(3,470)	(4,922)	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(23,186)</b>	<b>(26,788)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran dividen	(69,339)	(58,573)	Dividend payment
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(994)	--	Dividend payment to non-controlling interest
Perolehan modal kepentingan non-pengendali	(8,827)	--	Proceeds from non-controlling interest for stocks subscription
<b>Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(79,160)</b>	<b>(58,573)</b>	<b>Net Cash Used in Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(77,947)</b>	<b>76,795</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>383,545</b>	<b>306,750</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>305,598</b>	<b>383,545</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Haleyora Power ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51226.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No.72182.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 43 tanggal 20 Desember 2019 dari Muhammad Hanafi S.H., mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-AH.01.02-0108923 tanggal 26 Desember 2019.

Berdasarkan Pasal 3, Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah menyelenggarakan dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan dan jasa serta melaksanakan penugasan dari pemegang saham mayoritas dalam rangka menunjang/mendukung kegiatan usaha pemegang saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatutan etika bisnis pada perseroan terbatas.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Kindo Square Blok A 15 - 16, Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.

**b. Susunan pengurus dan informasi lain**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Komisaris Utama	Fahmi El Amruzi D	Fahmi El Amruzi D
PLT Komisaris	Karyawan Aji	Karyawan Aji
PLT Komisaris	Purnama Tioria Sianturi	Purnama Tioria Sianturi
Direktur Utama	Achmad Taufik Haji	Achmad Taufik Haji
Direktur Keuangan & SDM	Sutrisno Samad	Sutrisno Samad
PLT Direktur Operasi	Sinung Triwulandari	Sinung Triwulandari

**1. General**

**a. Establishment and General Information**

PT Haleyora Power ("the Company") was established based on Deed No. 36 dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-51226.AH.01.01. Year 2011 dated October 21, 2011 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 93 dated November 20, 2012, Supplement No.72182.

The Company's articles of association have been amended several times, recently by notarial deed No. 43 dated December 20, 2019 of Muhammad Hanafi, S.H., related changed to article 3 of the Company's Articles of Association concerning the intention, purpose, and business activity and has been approved by Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No.. AHU-AH.01.02-0108923 dated December 26, 2019.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, business activity of the Company is to held in industrial sector, trading, development and services also to perform duty from majority shareholders in order to support shareholder's business activity by applying the right principals of Good Corporate Governance and business ethic's obedience in private company.

The Company is domiciled in Jakarta and located at Kindo Square Blok A 15 – 16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Pancoran, Jakarta.

**b. Management and other information**

As of December 31, 2019 and 2018, the Company's management consists of the following:

President Commissioner
Acting as Commissioner
Acting as Commissioner
President Director
Director of Finance & Human Resources
Acting as Director of Operation

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the composition of Audit Committee are as follows:

	2019	2018	
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Fahmi El Amruzi D	Fahmi El Amruzi D	Chairman
Anggota	Purnama Tioria Sianturi	Purnama Tioria Sianturi	Member
Anggota	Kurniawan Andriyanto	Kurniawan Andriyanto	Member
Anggota	Didik S. Yuwono	Zulhendri	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Haleyora Power No. 01.SK/DK/HP/2019, tanggal 26 Februari 2019, memberhentikan dengan hormat Zulhendri sebagai Anggota Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Haleyora Power No. 01.SK/DK/HP/2019, dated 26 February 2019, Zulhendri was honorably discharged as Member of the Audit Committee.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Haleyora Power Nomor 02.SK/DK/HP/2019, tanggal 26 Februari 2019 Didik S Yuwono diangkat sebagai Anggota Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Haleyora Power Number 02.SK/DK/HP/2019, dated February 26, 2019 concerning the appointment of Didik S Yuwono as Member of the Audit Committee.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak termasuk karyawan yang diperbantukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The total number of employees of the Company and its subsidiary including the employees who are assigned by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") are as follows (unaudited):

	2019	2018	
	<u>Orang/Employees</u>	<u>Orang/Employees</u>	
Karyawan non-proyek	248	246	Non-project employees
Karyawan proyek	21,909	11,637	Project employees
Karyawan tugas karya dari entitas anak	8,576	13,872	Employees seconded from subsidiaries
Karyawan tugas karya PLN	28	19	Employees seconded from PLN
	<u>30,761</u>	<u>25,774</u>	

**c. Entitas Anak**

**c. Subsidiary**

Entitas anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2019	2018		2019	2018
PT Haleyora Powerindo ("HPI")	Bandung	Layanan teknik dan pemeliharaan/ Technical and maintenance service	95%	90%	2002	447,386	408,639

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 April 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Haleyora Powerindo dan Akta Nomor 44 tanggal 24 April 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., perihal Jual Beli Saham

Based on Notarial deed No. 43 dated April 24, 2019 of Muhammad Hanafi, S.H., about Statement decision shareholders PT Haleyora Powerindo and the Notarial deed No. 44 dated April 24, 2019 of Muhammad Hanafi, S.H., about Buy and Sell Shares of PT Haleyora Powerindo, the

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Haleyora Powerindo, Perusahaan telah melakukan pembelian saham minoritas sebesar 5% dengan nilai Rp8.827.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Company has a purchased 5% minority share with a value of Rp8,827.

**2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)**

**a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019**

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dan seterusnya**

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

**2. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)**

**a. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2019**

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on January 1, 2019, are as follows:

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination;
- SFAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement;
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost;
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Taxes;
- SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement;
- ISFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;
- ISFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

**b. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2020 and onwards**

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted are:

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- PSAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amandemen 2019): Kombinasi bisnis tentang definisi bisnis.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- SFAS 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;
- SFAS 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts;
- SFAS 71: Financial Instruments;
- SFAS 71 (Amendment 2018): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers;
- SFAS 73: Lease;
- SFAS 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;
- SFAS 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;
- SFAS 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;
- RSFAS 13: Revocation of SFAS 45: Nonprofit Entity Financial Reporting;
- SFAS 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
- SFAS 102 (Amendment 2019): Accounting for Murabahah;
- SFAS 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;
- ISFAS 102: Impairment of Murabahah Receivable.

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted are:

- SFAS 112: Wakaf Accounting;
- SFAS 22 (Amendment 2019): Business combinations regarding definition of business.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiary are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atas standar serta pengaruhnya pada  
laporan keuangan konsolidasian  
Perusahaan dan entitas anak.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*interpretations of standards to the  
Company and subsidiary consolidated  
financial statements.*

**3. Kebijakan Akuntansi Penting**

**a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK – IAI.

**b. Dasar Penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (“Rp”), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**c. Dasar Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

**3. Significant Accounting Policies**

**a. Compliance with the Financial Accounting Standards (“FAS”)**

*The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by DSAK – IAI.*

**b. Basis of Preparation**

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (“Rp”), which is also the functional currency of the Company and its subsidiary. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.*

**c. Basis of Consolidation**

*The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiary (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiary. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.*

*The results of subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.*



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiary to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.*

*All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.*

*Changes in the Company and its subsidiary interests in subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiary' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.*

*If the Company loses control over the subsidiary, the Company:*

- a. *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;*
- b. *Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;*
- d. *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value on the date of loss control;*
- e. *Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**d. Kombinasi Bisnis**

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

**d. Business Combinations**

*Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiary, liabilities incurred by the Company and its subsidiary to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiary in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.*

*At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.*

*Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.*

*When the consideration transferred by the Company and its subsidiary in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.*

*The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.*

*When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiary' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.*

*If the initial accounting for a business combination is incompleting by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiary report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleting. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that,*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

**e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*if known, would have affected the amount recognized as of that date.*

**e. Transactions with Related Parties**

*A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiary (the reporting entity):*

- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
  - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
  - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
  - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*
  - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
  - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
  - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
  - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
  - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
  - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**f. Aset Keuangan  
Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

**f. Financial Assets  
Initial Recognition and Measurement**

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

### **Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan**

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a. pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- c. pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

### **Subsequent Measurement of Financial Assets**

The Company and its subsidiary' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- a. those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- b. those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- c. those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur nilai wajar AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrument ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

**Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrument keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.*

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

*On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.*

*The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company and subsidiary records such AFS instruments at cost less impairment.*

*Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiary' rights to receive the dividends are established.*

**Effective Interest Method**

*The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrument keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*shorter period to the net carrying amount on initial recognition.*

*Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.*

**Impairment of Financial Assets**

*Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.*

*For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.*

*For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:*

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

*For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*could include the Company and its subsidiary' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.*

*For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.*

*The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.*

*When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.*

*With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.*

*In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

**Penghentian Pengakuan Aset  
Keuangan**

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.*

**Derecognition of Financial Assets**

*The Company and its subsidiary derecognize a financial asset and only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiary neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiary recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiary retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiary continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.*

*On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiary retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiary allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar kedua bagian tersebut.

**Reklasifikasi**

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrument derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.*

**Reclassification**

*The Company and its subsidiary shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiary as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiary may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiary shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.*

*If, as a result of a change in the Company and its subsidiary' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

**g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas  
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Fair Value Measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.*

*The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.*

*Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:*

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

*When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiary use observable market data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiary use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.*

*Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiary at the end of the reporting period during of which the change occurred.*

**g. Financial Liabilities and Equity Instruments**

Classification as liabilities or equity  
*Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiary are classified accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.*



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**h. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**i. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiary after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are initially recognized at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective interest rate.

Derecognition of financial liabilities

The Company and its subsidiary derecognize financial liabilities if, and only if, the Company and its subsidiary obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

**h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Company and its subsidiary only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the consolidated statement of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

**i. Cash and Cash Equivalents**

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3f.

**j. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**k. Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivable. Refer to Note 3f for the accounting policy on loans and receivables.*

**j. Prepaid Expenses**

*Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.*

**k. Investment in Associate**

*Associates are all entities over which the Company and its subsidiary have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiary investment in associates includes goodwill identified on acquisition.*

*The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiary' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These postacquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiary' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiary net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiary have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. jika investasi menjadi entitas anak.
- b. jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- c. ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiary and associate are eliminated to the extent of the Company and its subsidiary interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associate have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiary.*

*The Company and its subsidiary determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiary' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 (Revised 2014) to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.*

*The Company and its subsidiary discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:*

- a. *if the investment becomes a subsidiary.*
- b. *If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiary measure the retained interest at fair value.*
- c. *When the Company and its subsidiary discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiary account for all amounts previously recognized in other*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

*comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

*When the Company and its subsidiary transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.*

**I. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

**I. Property and Equipment**

*Property and equipment held for use in the supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.*

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap berikut:

*Depreciation is recognized as a write off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:*

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	20	<i>Buildings</i>
Kendaraan bermotor	8	<i>Motor vehicles</i>
Perlengkapan umum	4	<i>General equipment</i>

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

*The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.*

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

*Land is stated at cost and is not depreciated.*

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

*The costs of maintenance and repairs are charged to consolidated profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or to service an item of property, plant and equipment are recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.*

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap.

*When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

**m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

**n. Sewa Operasi**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan dan entitas anak tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

**m. Impairment of Non-Financial Assets**

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

**n. Operating Leases**

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

Lessee where the Company and its subsidiary does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset ownership are classified as operating leases.

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sebagai lessee

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

**o. Aset dalam Penyelesaian**

Pekerjaan dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari penyediaan jasa diakui pada saat jasa diberikan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

As lessee

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received when entering into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

**o. Construction in Progress**

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

**p. Revenue and Expense Recognition**

Revenue from services are recognized when the services are delivered.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**q. Imbalan Kerja**

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan and entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**q. Employee Benefits**

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiary established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiary also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiary's policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the *Projected Unit Credit* method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiary recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

**r. Provisi**

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Bila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**r. Pajak Penghasilan**

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the period in which they occur.*

*The long-term employee benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.*

**q. Provisions**

*Provisions are recognized when the Company and its subsidiary have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiary will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.*

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.*

**r. Income Tax**

*Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.*

*Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.*

*For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.*

*Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.*

*Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.*

*A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:*

- a. *the initial recognition of goodwill; or*
- b. *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.*

*The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiary expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.*

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiary intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**s. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan dan entitas anak telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP;
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

**4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan.

**s. Tax Amnesty Assets and Liabilities**

*Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.*

*Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.*

*Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.*

*The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.*

*After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant FAS according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.*

*With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company and its subsidiary have disclosed the following in its financial statements:*

- a. *The date of TAAL;*
- b. *Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL; and*
- c. *Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

**4. Critical Accounting Judgments and Significant Accounting Estimates**

*In the application of the Company and its subsidiaries accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

**Imbalan Pascakerja**

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 17.

**Pajak penghasilan**

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dan entitas anak,

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

**Post-employment Benefits**

The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiary' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiary' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiary' post-employment benefit liabilities.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 17.

**Income tax**

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company and its subsidiary, through



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

melalui negoisasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income to provision in the year in which this determination is made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

**5. Kas dan Setara Kas**

**5. Cash and Cash Equivalents**

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas	1,096	958	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
Bank Negara Indonesia	130,707	233,348	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	377	2,273	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	2,311	1,125	Bank Rakyat Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin	1,592	3,325	Bank Bukopin
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	15	16	Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat
Subjumlah kas dan bank	<u>136,098</u>	<u>241,045</u>	Subtotal cash on hand and in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
Bank Mandiri	10,000	135,000	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	42,500	7,500	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	65,000	--	Bank Negara Indonesia
Bank BNI Syariah	50,000	--	Bank BNI Syariah
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin	2,000	--	Bank Bukopin
Subjumlah deposito berjangka	<u>169,500</u>	<u>142,500</u>	Subtotal time deposits
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b><u>305,598</u></b>	<b><u>383,545</u></b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	4.75% - 7.25%	7.25%	Interest rate per annum on time deposits
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ months	1 - 3 bulan/ months	Maturity

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya**      **6. Restricted Cash in Banks**

	2019 Rp	2018 Rp	
<b>Jaminan garansi</b>			<b>Collateral of guarantess</b>
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
Bank Negara Indonesia	2,790	2,813	Bank Negara Indonesia
Subjumlah	2,790	2,813	Subtotal
<b>Rekening tabungan bisnis</b>			<b>Business account</b>
Bank Mandiri (Catatan 25)	55,457	52,388	Bank Mandiri (Note 25)
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin	792	368	Bank Bukopin
<b>Jumlah</b>	<b>59,039</b>	<b>55,569</b>	<b>Total</b>

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo rekening bank yang dijadikan sebagai jaminan (*cash collateral*) atas bank garansi yang diterbitkan oleh pihak Bank untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan pelanggan. Rekening tabungan bisnis merupakan rekening penyimpanan atas dana untuk pembelian saham pada entitas asosiasi.

Restricted cash in banks represents bank account balances pledged as collateral (*cash collateral*) for bank guarantees issued by the Bank to guarantee the implementation of specific work with customers. Business account represents the savings account for share purchase in associate.

**7. Piutang Usaha**

**7. Trade Receivables**

**a. Berdasarkan langganan**

**a. By debtor**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	336,000	177,567	PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")
PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")	19,268	15,247	PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan")	14,436	--	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan")
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")	13,529	13,091	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")
PT Indonesia Power ("IP")	7,338	6,788	PT Indonesia Power ("IP")
PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB")	4,647	4,188	PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB")
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	2,630	517	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")
PT PLN Batubara ("PLN Batubara")	2,185	829	PT PLN Batubara ("PLN Batubara")
PT Pelayanan Bahtera Adhiguna ("BAG")	444	--	PT Pelayanan Bahtera Adhiguna ("BAG")
PT PLN Gas dan Geothermal ("PLNGG")	144	--	PT PLN Gas dan Geothermal ("PLNGG")
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	--	134	PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	--	121	PT Jambi Prima Coal ("JPC")
Pihak ketiga	335	20	Third parties
<b>Jumlah</b>	<b>400,956</b>	<b>218,502</b>	<b>Total</b>

**b. Berdasarkan umur piutang usaha**

**b. By age category of receivables**

	2019 Rp	2018 Rp	
Belum jatuh tempo	294,857	186,200	Not yet due
Lewat jatuh tempo			Past due
1 - 90 hari	105,734	25,680	1 - 90 days
91 - 360 hari	58	5,248	91 - 360 days
Lebih dari 360 hari	307	1,374	More than 360 days
<b>Jumlah</b>	<b>400,956</b>	<b>218,502</b>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Company and its subsidiary do not provide allowance for impairment losses due to management believes that all receivables are collectible.

**8. Pajak Dibayar di Muka**

**8. Prepaid Taxes**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak pertambahan nilai	41,728	34,275	Value added tax
Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21	54	--	Income Tax Article 21
Pajak penghasilan badan lebih bayar			Overpayment of corporate income tax
Entitas anak			Subsidiary
2019	735	--	2019
2017	2,340	2,340	2017
<b>Jumlah</b>	<b>44,857</b>	<b>36,615</b>	<b>Total</b>

**9. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka**

**9. Prepaid Expenses and Advance**

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya dibayar dimuka			Prepaid expenses
Sewa kantor	14,527	5,623	Rent office
Premi asuransi	1,187	885	Insurance
Lain-lain	481	--	Others
Subjumlah	16,195	6,508	Subtotal
Uang muka	512	782	Advances
Subjumlah	512	782	Advances
<b>Jumlah</b>	<b>16,707</b>	<b>7,290</b>	<b>Total</b>

**10. Investasi pada Entitas Asosiasi**

**10. Investment in Associate**

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investment in associate is as follows:

Asosiasi/ Associate	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ commercial operations year	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership	
				2019	2018
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyediaan dan Pendistribusian Tenaga Listrik Wilayah Pelabuhan/ Supply and Distribution of Electric Power Port Region	2013	45.00%	45.00%

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Changes in investment in associate is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal tahun	47,476	42,698	Beginning balance
Pembagian dividen	(5,305)	(2,293)	Payment of dividend
Bagian laba bersih	6,717	7,071	Equity in net income
<b>Jumlah</b>	<b>48,888</b>	<b>47,476</b>	<b>Total</b>

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi sebagai berikut:

Summarized financial information in associate is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Jumlah aset	145,323	164,453	Total assets
Jumlah liabilitas	(36,680)	(58,950)	Total liabilities
<b>Aset bersih</b>	<b>108,643</b>	<b>105,503</b>	<b>Net assets</b>
<b>Jumlah pendapatan bersih</b>	<b>157,531</b>	<b>152,979</b>	<b>Total net income</b>

EPI didirikan untuk penyediaan pasokan listrik dengan layanan yang prima bagi konsumen di wilayah pelabuhan dan/atau kawasan lainnya di Indonesia.

EPI was established to supply electricity with the best services for consumers in the area of the port and/or other areas in Indonesia.

**11. Aset Tetap**

**11. Property and Equipment**

	2019				
	1 Januari/ January 1 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	31 Desember/ December 31 Rp	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Tanah	3,116	--	--	3,116	Land
Bangunan	2,175	165	--	2,340	Buildings
Kendaraan bermotor	1,602	--	--	1,602	Motor vehicles
Perlengkapan umum	39,237	23,685	--	62,922	General equipment
Aset dalam penyelesaian	--	425	--	425	Construction in progress
<b>Subjumlah</b>	<b>46,128</b>	<b>24,275</b>	<b>--</b>	<b>70,405</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	454	117	--	571	Buildings
Kendaraan bermotor	158	200	--	358	Motor vehicles
Perlengkapan umum	15,096	11,648	--	26,744	General equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>15,707</b>	<b>11,965</b>	<b>--</b>	<b>27,673</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>30,421</b>			<b>42,732</b>	<b>Net Carrying Value</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Tanah	1,785	1,331	--	3,116	Land
Bangunan	1,190	985	--	2,175	Buildings
Kendaraan bermotor	131	1,470	--	1,602	Motor vehicles
Perlengkapan umum	18,864	20,372	--	39,237	General equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>21,970</b>	<b>24,158</b>	<b>--</b>	<b>46,128</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	357	97	--	454	Buildings
Kendaraan bermotor	43	114	--	158	Motor vehicles
Perlengkapan umum	7,511	7,584	--	15,096	General equipment
<b>Subjumlah</b>	<b>7,911</b>	<b>7,796</b>	<b>--</b>	<b>15,707</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>14,059</b>			<b>30,421</b>	<b>Net Carrying Value</b>

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan lainnya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

The Company and its subsidiary do not insure their assets against losses due to fire and other risks.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment of property and equipment at the reporting date.

**12. Piutang Lain-lain**

**12. Other Receivables**

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
EPI	--	34	EPI
Lain-lain	126	166	Others
Pihak ketiga			Third parties
PT Asuransi Jiwa Bumiputera	3,973	3,973	PT Asuransi Jiwa Bumiputera
Karyawan	314	--	Employees
KJK HPI	--	81	KJK HPI
Lain-lain	52	10,090	Others
<b>Jumlah</b>	<b>4,465</b>	<b>14,344</b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian tidak lancar	--	--	Less non-current portion
<b>Bagian lancar</b>	<b>4,465</b>	<b>14,344</b>	<b>Current portion</b>

Piutang lain – lain pihak ketiga sebesar Rp3.973 merupakan piutang asuransi kepada Asuransi Jiwa Bumiputera.

Other receivables at third parties amounting to Rp3,973 is receivables of insurance for Asuransi Jiwa Bumi Putera.

**13. Utang Usaha**

**13. Trade Payables**

Akun ini merupakan utang usaha sehubungan dengan pembelian barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

This accounts represents payables in relation to purchase of goods and services to support the operations of the Company and its subsidiary as follows:

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
<b>Pihak berelasi (Catatan 25)</b>			<b>Related parties (Note 25)</b>
Pemeliharaan Jaringan Distribusi dan Perlengkapan	420	1,418	Maintenance of Distribution Networks and Equipment
Pembelian barang dan Jasa	--	74	Purchase of goods and services
Sub Jumlah	<u>420</u>	<u>1,492</u>	Sub Jumlah
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Pembelian barang dan Jasa	28,126	18,832	Purchase of goods and services
Sub Jumlah	<u>28,126</u>	<u>18,832</u>	Sub Jumlah
<b>Jumlah</b>	<u><u>28,546</u></u>	<u><u>20,324</u></u>	<b>Total</b>

**14. Biaya Masih Harus Dibayar**

**14. Accrued Expenses**

	2019 Rp	2018 Rp	
Bonus dan insentif kerja	46,871	39,009	Bonus and incentive
Gaji dan tunjangan	4,279	4,601	Salaries and allowances
Pelatihan	1,721	--	Training
Lainnya	2,476	1,084	Others
<b>Jumlah</b>	<u><u>55,347</u></u>	<u><u>44,694</u></u>	<b>Total</b>

**15. Utang Lain-lain**

**15. Other Payables**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 25)			Related parties (Note 25)
PT PLN (Persero)	1,246	7	PT PLN (Persero)
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	211	--	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
PT Indonesia Comnet Plus	60	--	PT Indonesia Comnet Plus
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	33	15	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PT Indonesia Power	2	--	PT Indonesia Power
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - PT Bank Negara Indonesia	--	12,884	Dana Pensiun Lembaga Keuangan - PT Bank Negara Indonesia
Dana Pensiun PT PLN (Persero)	--	22	Dana Pensiun PT PLN (Persero)
Lain-lain	52	415	Others
Pihak ketiga	1,381	8,686	Third parties
<b>Jumlah</b>	<u><u>2,985</u></u>	<u><u>22,029</u></u>	<b>Total</b>

**16. Utang Pajak**

**16. Taxes Payable**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak kini			Current tax of
Perusahaan (Catatan 18)	7,068	3,700	The Company (Note 18)
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 21	946	474	Article 21
Pasal 23	285	299	Article 23
Pasal 4 (2)	307	59	Article 4 (2)
Pasal 25	2,179	1,635	Article 25
<b>Jumlah</b>	<u><u>10,785</u></u>	<u><u>6,167</u></u>	<b>Total</b>



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. Liabilitas Imbalan Kerja**

**17. Employee Benefits Liabilities**

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pascakerja tanpa pendanaan berupa uang pesangon kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

The Company and its subsidiary provide unfunded post-employment benefit to their employees in accordance with the Company's regulation which is based on Labour Law No. 13/2003.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan dan entitas anak mencatat penyisihan imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan masing-masing oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah dan PT Quatro Asia Consulting dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

On December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiary recorded a provision for post-employment benefits based on an independent actuarial calculation performed by PT Binaputera Jaga Hikmah and PT Quattro Asia Consulting, respectively, using the *Projected Unit Credit* method with the following assumptions:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Tabel mortalita	CSO 58	CSO 58	Mortality table
Usia pensiun normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal retirement age
Tingkat diskonto per tahun			Discount rate per annum
Pegawai non-proyek HP	7.82%	8.76%	Non-project employee-HP
Pegawai non-proyek HPI	7.73%	8.49%	Non-project employee-HPI
Pegawai proyek-NKSO	7.74%	8.54%	Project employee-NKSO
Pegawai KSO	7.65%	8.40%	Project employee-KSO
Tingkat kenaikan gaji per tahun			Salary increase rate per annum
Pegawai non-proyek HP	7.20%	7.20%	Non-project employee-HP
Pegawai non-proyek HPI	7.20%	7.20%	Non-project employee-HPI
Pegawai proyek-NKSO	9.76%	9.76%	Project employee-NKSO
Pegawai KSO	9.76%	9.76%	Project employee-KSO

Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit obligations recognized in the statement of financial position are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	Rp	Rp	
Nilai kini dari kewajiban yang tidak didanai	<u>161,925</u>	<u>118,382</u>	Present value of unfunded obligation

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	Rp	Rp	
Pada awal tahun	118,382	90,667	At beginning of year
Biaya jasa kini	32,235	25,107	Current service cost
Biaya bunga	9,874	6,348	Interest expense
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuari	8,103	7,236	Gain from changes in actuarial assumptions
Pembayaran imbalan	(6,027)	(8,195)	Benefit and contributions paid
Pembayaran iuran	(642)	(2,781)	Paid contribution
<b>Pada akhir tahun</b>	<b><u>161,925</u></b>	<b><u>118,382</u></b>	<b>At the end of year</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019 %	2018 %	
Tingkat diskonto per tahun			Discount rate per annum
Pegawai non-proyek HP	7.82%	8.76%	Non-project employee-HP
Pegawai non-proyek HPI	7.73%	8.49%	Non-project employee-HPI
Pegawai proyek-NKSO	7.74%	8.54%	Project employee-NKSO
Pegawai KSO	7.65%	8.40%	Project employee-KSO
Tingkat kenaikan gaji per tahun			Salary increase rate per annum
Pegawai non-proyek HP	7.20%	7.20%	Non-project employee-HP
Pegawai non-proyek HPI	7.20%	7.20%	Non-project employee-HPI
Pegawai proyek-NKSO	9.76%	9.76%	Project employee-NKSO
Pegawai KSO	9.76%	9.76%	Project employee-KSO

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal assumption is as follows:

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 10.58%	Kenaikan sebesar/ Increase by 14.18%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 13.77%	Penurunan sebesar/ Decrease by 10.51%	Salary increase rate

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang dihitung menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan.

The above sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and the changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculation with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and post-employment medical benefits is as follow:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year Rp	1 sampai 2 tahun/ Between 1- 2 years Rp	2 sampai 5 tahun/ Between 2- 5 years Rp	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years Rp	Jumlah/ Total Rp	
Imbalan pensiun	31,829	19,414	94,014	2,452,119	2,597,376	Pension benefits
<b>Jumlah</b>	<b>31,829</b>	<b>19,414</b>	<b>94,014</b>	<b>2,452,119</b>	<b>2,597,376</b>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. Pajak Penghasilan**

Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

	2019 Rp	2018 Rp
Beban pajak kini	74,458	61,141
Manfaat pajak tangguhan	(8,860)	(5,121)
<b>Jumlah manfaat pajak</b>	<b>65,598</b>	<b>56,020</b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	244,920	194,701
Laba sebelum pajak entitas anak	52,252	52,685
Laba sebelum pajak Perusahaan	192,668	142,016
Koreksi fiskal:		
Imbalan kerja	102	50
Beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan	54,412	40,577
Bantuan dan sumbangan	36	20
Beban penyusutan	10	15
Pembayaran manfaat pesangon	--	(1,772)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(6,717)	(7,071)
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(5,612)	(5,565)
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	552	4,114
<b>Jumlah</b>	<b>235,451</b>	<b>172,384</b>

Perhitungan beban dan pajak penghasilan lebih bayar adalah sebagai berikut:

	Rp	Rp
Beban pajak kini		
Perusahaan	58,863	43,096
Entitas anak	15,595	18,045
Subjumlah	74,458	61,141
Pembayaran pajak di muka		
Perusahaan		
Pajak penghasilan pasal 23	29,712	22,578
Pajak penghasilan pasal 25	22,082	17,086
Entitas anak	16,331	17,777
Subjumlah	68,125	57,441
Pajak penghasilan kurang bayar	6,333	3,700
Terdiri dari:		
Utang Pajak Kini		
Perusahaan	7,068	3,433
Entitas anak	--	267
Jumlah utang pajak kini	7,068	3,700
Pajak penghasilan lebih bayar		
Perusahaan	--	--
Entitas anak	735	--
<b>Jumlah pajak penghasilan lebih bayar</b>	<b>735</b>	<b>--</b>

**18. Income Tax**

*Tax benefit (expense) of the Company and its subsidiary consists of the following:*

*Current tax expenses  
Deferred tax income  
Total tax benefit*

*A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:*

*Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income  
Income before tax attributable to subsidiary*

*Profit before tax - The Company*

*Fiscal correction:  
Employee benefits  
Non-deductible expense/  
(non-taxable income):  
Employees' welfare and tax allowance  
Assistance and donation  
Depreciation expense  
Payment of severance benefits  
Equity in net income of associate  
Interest income subjected to final tax  
Other non deductible expense  
Total*

*Current tax expense and income tax overpayment are as follows:*

*Current tax expenses  
The Company  
Subsidiary  
Subtotal*

*Prepayment of taxes  
The Company  
Income tax article 23  
Income tax article 25  
Subsidiary  
Subtotal  
Income tax under payment*

*Consist of:  
Current tax payable  
The Company  
Subsidiary  
Total current tax payables*

*Income tax overpayment  
The Company  
Subsidiary  
Total income tax overpayment*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Pajak tangguhan**

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

**Deferred tax**

The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 January/ January 1, 2019 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to income for the period Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax asset</b>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	29,596	8,860	2,026	40,482	Employment benefits obligations
Penyusutan Aset Tetap	960	--	--	960	Depreciation of fixed assets
<b>Jumlah</b>	<b>30,556</b>	<b>8,860</b>	<b>2,026</b>	<b>41,442</b>	<b>Total</b>

	1 January/ January 1, 2018 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to income for the period Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax asset</b>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	22,666	5,121	1,809	29,596	Employment benefits obligations
Penyusutan Aset Tetap	960	--	--	960	Depreciation of fixed assets
<b>Jumlah</b>	<b>23,626</b>	<b>5,121</b>	<b>1,809</b>	<b>30,556</b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	244,920	194,701	Income before tax per consolidated statements of comprehensive income
Beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku	61,230	48,675	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect on Non-deductible expense/ (non-taxable income):
Kesejahteraan dan tunjangan pajak karyawan	15,281	11,046	Employees' welfare and tax allowance
Beban pajak	24	--	Tax Expense
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(1,679)	--	Equity in net income of associate
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(2,286)	(1,869)	Interest income subject to final tax
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	(6,971)	(1,832)	Other non deductible expense
<b>Jumlah</b>	<b>65,598</b>	<b>56,020</b>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Surat Ketetapan Pajak**

Selama tahun 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPh dan PPN sebesar Rp15.085, dan Surat Tagihan Pajak ("STP") PPh dan PPN sebesar Rp6.801.

Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2017 sebesar Rp 247 dan restitusi PPN periode Desember 2016 sebesar Rp5.191.

**Tax Assessments**

In 2019, the Company has received Tax Assessment Letter Less Payment ("SKPKB") in relation to VAT and income tax amounted to Rp15,085 and Tax Collection Letter ("STP") to income tax and VAT amounted to Rp6,801.

The Company also received several Tax Assessment Letter over Payment (SKPLB) to Corporate income tax for 2017 fiscal year amounting to Rp247 and VAT Restitution December 2016 amounted to Rp5,191.

**19. Modal Saham**

**19. Capital Stock**

Nama pemegang saham/ Name of stockholders	2019 dan/ and 2018		
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital Rp
PLN	99,999	99.99%	99,999
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	1	0.01%	1
<b>Jumlah/Total</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,000</b>

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.

The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder to carry one vote per share and to participate in dividends.

Berdasarkan keputusan rapat pemegang saham secara sirkular sebagaimana tercantum dalam akta No. 27 tanggal 30 Agustus 2013 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp75.000. Seluruh penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut dilakukan oleh PLN.

Based on Deed of Circular Decision of shareholder No. 27 dated August 30, 2013 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, the shareholders are agreed to increase issued and fully paid in capital amounting to Rp75,000. All of the paid-in capital was paid by PLN.

Berdasarkan akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2011 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp100.000 terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 per saham dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25.000 yang terbagi atas 25.000 saham.

Based on Deed No. 36 dated October 18, 2011 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, the Company's authorised capital stock amounted to Rp100,000 consisting of 100,000 shares with par value of Rp1 per share and the subscribed and paid-up capital amounted to Rp25,000 which consists of 25,000 shares.

Berdasarkan pada Akta No. 2 tanggal 13 Juni 2019 dari Notaris Muhammad Hanafi, notaris di Jakarta dan surat dari PT PLN (Persero) Nomor 0903/MNJ.00.01/DIRUT/2019-R tanggal 1 Juli 2019, pembagian dividen untuk tahun buku 2018 ditetapkan sebesar 50% dari saldo laba atau sebesar Rp69.339.

Based on Notarial deed No. 2 dated June 13, 2019 of Muhammad Hanafi, notary in Jakarta and a letter from PT PLN (Persero) Number 0903/ MNJ.00.01/DIRUT/2019-R dated July 1, 2019 the distribution of dividends for the year 2018 was decided at 50% of net income or amounted to Rp69,339.

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas kepada PLN dan YPK PLN masing-masing sebesar Rp69.332 dan Rp7.

On December 2019, the Company paid a cash dividend to PLN and YPK PLN amounted to Rp69,332 and Rp7, respectively.

**20. Kepentingan Non-pengendali**

**20. Non-Controlling Interests**

	2019 Rp	2018 Rp	
<b>a. Kepentingan Non-pengendali atas</b>			<b>a. Non-controlling Interest for</b>
Aset bersih HPI	16,402	24,251	Net assets from HPI
<b>b. Kepentingan non pengendali atas</b>			<b>b. Income before tax</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	1,972	3,427	Total comprehensive income for the year

Pada April tahun 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham minoritas HPI seharga Rp8.827 atau 5% kepemilikan saham minoritas yang menyebabkan turunnya nilai kepentingan non pengendali sebesar Rp8.827.

In April 2019, the Company purchased minority shares. HPI for Rp8,827 or 5% ownership of minority shares which caused a decrease in the value of minority interest of Rp8,827.

**21. Pendapatan**

**21. Revenues**

<b>a. Berdasarkan jenis pekerjaan</b>		<b>a. By type of works</b>		
	2019 Rp	2018 Rp		
Operasi dan pemeliharaan			Operation and maintenance	
Pelayanan jasa teknik	1,538,022	1,321,188	Technical services	
Pelayanan jasa non-teknik	500,280	463,358	Non-technical services	
Lainnya	475,608	288,772	Others	
<b>Jumlah</b>	<b>2,513,910</b>	<b>2,073,318</b>	<b>Total</b>	
<b>b. Berdasarkan pelanggan</b>		<b>b. By customers</b>		
	2019 Rp	2018 Rp		
Pihak berelasi (Catatan 25)	2,513,848	2,073,318	Related parties (Note 25)	
Pihak ketiga	62	--	Third parties	
<b>Jumlah</b>	<b>2,513,910</b>	<b>2,073,318</b>	<b>Total</b>	

Pelayanan jasa teknik meliputi penertiban penggunaan tenaga listrik, operator dan teknisi pemeliharaan pembangkit, dan layanan teknik lainnya. Pelayanan jasa non-teknik meliputi tenaga administrasi, pengemudi, satpam, layanan kebersihan dan layanan non-teknik lainnya.

Technical services include monitoring the use of electric power, plant operators and maintenance technicians, and other technical services. Non-technical services include administrative personnel driver, security, janitorial services and other non technical services.

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. Beban Pokok Pendapatan**

**22. Cost of Revenue**

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa tenaga kerja langsung	1,815,101	1,498,983	Direct labour
Kendaraan operasional	153,249	114,474	Operational vehicles
Pemakaian alat kerja dan material	71,875	57,775	Labour and material usage tool
Imbalan kerja (Catatan 17)	42,109	31,455	Employee benefits (Note 17)
Denda operasional	27,899	24,494	Operational penalty
Subkontraktor	12,079	19,256	Subcontractor
Pemeliharaan dan penunjang operasional	6,933	3,082	Maintenance and overhead
Lainnya	96,735	72,480	Others
<b>Jumlah</b>	<b>2,225,980</b>	<b>1,821,999</b>	<b>Total</b>

**23. Beban Umum dan Administrasi**

**23. General and Administration Expenses**

	2019 Rp	2018 Rp	
Kepegawaian	33,063	21,142	Personnel
Honorarium	11,082	16,358	Honorarium
Pemeliharaan	4,143	5,151	Maintenance
Lainnya	10,465	8,654	Others
<b>Jumlah</b>	<b>58,753</b>	<b>51,305</b>	<b>Total</b>

**24. Beban Lain-lain – Bersih**

**24. Other Expenses – Net**

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan sewa	360	--	Rent Income
Pendapatan <i>reward</i>	--	132	Reward income
Denda dan biaya terkait	--	162	Penalty and related expenses
Pendapatan klaim asuransi	--	1	Insurance claim income
Beban pajak	--	(11,291)	STP expenses
Sumbangan pengembangan masyarakat	(76)	(20)	Community development donation
Beban STP	--	(18)	STP Expenses
Lainnya	(323)	(8,762)	Others
<b>Jumlah</b>	<b>(39)</b>	<b>(19,796)</b>	<b>Total</b>

**25. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi**

**25. Nature of Relationship and Transactions  
with Related Parties**

**Sifat Hubungan Berelasi**

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN merupakan pemegang saham Perusahaan.
- EPI merupakan entitas asosiasi Perusahaan.

**Nature of Related Parties**

- Government of the Republic of Indonesia, the stockholder of PLN and State-Owned Enterprises ("SOE").
- PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN are the stockholders of the Company.
- EPI is the Company's associate.



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. IP, PJB, PLN Batam, ICON, PLNE, PLN Batubara, PLN Tarakan, PLN Gas dan Geothermal dan BAG merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- e. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

**Transaksi Pihak Berelasi**

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

<b>Pihak-pihak Berelasi/ Related parties</b>	<b>Sifat hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Sifat Transaksi/ Nature of transaction</b>
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Pemegang saham Perusahaan/ Ultimate shareholders	Piutang usaha, utang usaha, piutang dan utang lain-lain dan pendapatan/ Trade receivable, trade payable, other receivable and payable and revenue
Bank Negara Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE Owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya/ Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank
Bank Mandiri	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE Owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in bank and time deposit
Bank Rakyat Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ SOE Owned by Minister of Finance	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya/ Placement of cash in bank and time deposit and Placement of restricted cash in bank
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha dan Utang lain-lain/ Trade receivable and others payable
PT Pelayanan Listrik Batam ("PLN Batam")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha dan Utang lain-lain/ Trade receivable and others payable
PT Indonesia Power ("IP")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT Pembangkit Jawa Bali ("PJB")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT PLN Batubara ("PLNBB")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT PLN Tarakan ("PLNT")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT PLN Gas dan Geothermal ("PLNGG")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT Pelayaran Bahtera Adiguna ("BAG")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha / Trade receivable
PT Cogindo Daya Bersama ("CDB")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan/ Revenue
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Perusahaan Sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha dan Pendapatan / Trade receivable and revenue
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang usaha dan Piutang lain-lain / Trade receivable and other receivable

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- d. IP, PJB, PLN Batam, ICON, PLNE, PLN Batubara, PLN Tarakan, PLN Gas dan Geothermal. And BAG are companies which have the same principal stockholder and or management as the Company.
- e. Board of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company and its subsidiary.

**Transactions with Related Parties**

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Transaksi-transaksi pihak berelasi**

**Transactions with related parties**

	Catatan/ Note	2019		2018		
		Rp	%)	Rp	%)	
Kas dan setara kas	5					Cash and cash equivalents
Bank dan deposito berjangka						Bank and time deposits
Bank Negara Indonesia		195,707	20.24	283,348	34.35	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		10,377	1.07	87,273	10.58	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia		44,811	4.63	8,625	1.05	Bank Rakyat Indonesia
Bank BNI Syariah		50,000	5.17	--	--	Bank BNI Syariah
Subjumlah		<b>300,895</b>	<b>31.12</b>	<b>379,246</b>	<b>45.98</b>	Subtotal
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	6					Restricted cash in bank
Bank Mandiri		55,457	5.74	52,388	6.35	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia		2,790	0.29	2,813	0.34	Bank Negara Indonesia
Jumlah		<b>58,247</b>	<b>6.02</b>	<b>55,201</b>	<b>6.69</b>	Total
Piutang usaha	7					Trade receivables
PLN		336,000	34.75	177,567	21.53	PLN
ICON		19,268	1.99	15,247	1.85	ICON
PLN Batam		13,529	1.40	13,091	1.59	PLN Batam
PLNT		14,436	1.49	--	--	PLNT
IP		7,338	0.76	6,788	0.82	IP
PJB		4,647	0.48	4,188	0.51	PJB
PLNE		2,630	0.27	829	0.10	PLNE
PLNBB		2,185	0.23	517	0.06	PLNBB
BAG		444	0.05	--	--	BAG
PLNGG		144	0.01	--	--	PLNGG
EPI		--	--	134	0.02	EPI
JPC		--	--	121	0.01	JPC
Subjumlah		<b>400,621</b>	<b>41.42</b>	<b>218,482</b>	<b>26.49</b>	Subtotal
Piutang lain-lain	12					Other receivables
EPI		--	--	34	0.00	EPI
Lain-lain		126	0.01	166	0.02	Others
Subjumlah		<b>126</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>	<b>0.02</b>	Subtotal
Utang usaha	13					Trade payables
PLN		375	0.14	1,355	0.64	PLN
PLNBB		45	0.02	--	--	PLNBB
DPLK BRI		--	--	74	0.03	DPLK BRI
ICON		--	--	63	0.03	ICON
Subjumlah		<b>420</b>	<b>0.16</b>	<b>1,492</b>	<b>0.69</b>	Subtotal
Utang lain-lain	15					Other payables
PLN		1,246	0.48	15	0.01	PLN
YPK PLN		211	0.08	--	--	YPK PLN
ICON		60	0.02	--	--	ICON
PLN Batam		33	0.01	--	--	PLN Batam
IP		2	0.00	--	--	IP
BPJS Ketenagakerjaan		--	--	22	0.01	BPJS Ketenagakerjaan
DPLK BNI		--	--	12,884	6.09	DPLK BNI
Dana Pensiun PLN		--	--	7	0.00	Dana Pensiun PLN
Lain-lain		52	0.01	415	0.20	Lain-lain
Subjumlah		<b>1,604</b>	<b>0.60</b>	<b>13,343</b>	<b>6.30</b>	Subtotal
Pendapatan	21					Revenue
PLN		2,274,054	90.46	1,867,261	90.06	PLN
ICON		75,851	3.02	68,891	3.32	ICON
PLN Batam		75,468	3.00	67,324	3.25	PLN Batam
IP		34,990	1.39	31,613	1.52	IP
PJB		18,704	0.74	17,663	0.85	PJB
PLNT		14,436	0.57	2,145	0.10	PLNT
PLNBB		12,042	0.48	8,781	0.42	PLNBB
PLNE		5,966	0.24	5,755	0.28	PLNE
PLNGG		1,894	0.08	--	--	PLNGG
BAG		443	0.02	--	--	BAG
CDB		--	--	3,475	0.17	CDB
JPC		--	--	410	0.02	JPC
Subjumlah		<b>2,513,848</b>	<b>100.00</b>	<b>2,073,318</b>	<b>99.99</b>	Subtotal

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan, dan tantiem masing-masing sebesar Rp12.824 dan Rp9.654.

On December 31, 2019 and 2018, the Company provided compensation to its Commissioners and Directors, which includes salaries, facilities, allowances, and bonus amounting to Rp12,824 and Rp9,654.

**26. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal**

**26. Financial Instruments, Financial Risk and Capital Risk Management**

**a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan**

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

**a. Categories and classes of financial instruments**

The following table discloses the details of the Company and its subsidiary's financial instruments based on financial instruments classification:

2019				
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ <i>Total financial asset and liabilities</i>	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
<b>Aset keuangan lancar</b>				<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	305,598	--	305,598	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	59,039	--	59,039	Restricted cash in banks
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	400,621	--	400,621	Related parties
Pihak ketiga	335	--	335	Third parties
Piutang lain-lain	4,465	--	4,465	Other receivables
<b>Jumlah aset keuangan lancar</b>	<b>770,057</b>	--	<b>770,056</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>770,057</b>	--	<b>770,056</b>	<b>Total Financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>				<b>Current financial liabilities</b>
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	--	420	420	Related parties
Pihak ketiga	--	28,126	28,126	Third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak berelasi	--	1,604	1,604	Related parties
Pihak ketiga	--	1,381	1,381	Third parties
Biaya masih harus dibayar	--	55,347	55,347	Accrued expenses
<b>Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek</b>	--	<b>86,879</b>	<b>86,879</b>	<b>Total current financial liabilities</b>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	--	<b>86,879</b>	<b>86,879</b>	<b>Total financial liabilities</b>
2018				
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ <i>Total financial asset and liabilities</i>	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
<b>Aset keuangan lancar</b>				<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	383,545	--	383,545	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	55,569	--	55,569	Restricted cash in banks
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	218,482	--	218,482	Related parties
Pihak ketiga	20	--	20	Third parties
Piutang lain-lain	14,344	--	14,344	Other receivables
<b>Jumlah aset keuangan lancar</b>	<b>671,960</b>	--	<b>671,960</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>Aset keuangan tidak lancar</b>				<b>Non-current assets</b>
Piutang lain-lain	--	--	--	Other receivables
<b>Jumlah aset keuangan tidak lancar</b>	--	--	--	<b>Total non-current assets</b>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>671,960</b>	--	<b>671,960</b>	<b>Total Financial assets</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2018			
Klasifikasi instrumen keuangan/ <i>Financial instruments classification</i>			
	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total <i>financial asset and liabilities</i>	
Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>			
Liabilitas keuangan			<i>Financial liabilities</i>
Liabilitas keuangan jangka pendek			<i>Current financial liabilities</i>
Utang usaha			<i>Trade payables</i>
Pihak berelasi	--	1,492	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	--	18,832	<i>Third parties</i>
Utang lain-lain			<i>Other payables</i>
Pihak berelasi	--	13,343	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	--	8,686	<i>Third parties</i>
Biaya masih harus dibayar	--	44,694	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	--	<u>87,047</u>	<i>Total current financial liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang			<i>Non-current liabilities</i>
Utang lain-lain	--	--	<i>Other payables</i>
Jumlah liabilitas keuangan	--	<u>87,047</u>	<i>Total financial liabilities</i>

**b. Manajemen risiko modal**

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 19), tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

**b. Capital risk management**

*The Company and its subsidiary manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consist of equity shareholders that consist of capital stock (Note 19), additional paid-in capital and retained earnings.*

*Directors of the Company and its subsidiary periodically review the Company capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.*

*The Company and its subsidiaries seeks to minimize the cost of capital, in order to maximize their value. Therefore, the Company and its subsidiary policy to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.*

**c. Financial risk management objectives and policies**

*The Company and its subsidiary overall financial risk management and policies is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to financial risk, which are market risk (including interest rate risk), credit risk and liquidity risks. The Company and its subsidiary operate within the defined policy that are approved by the Directors.*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Perusahaan dan entitas anak telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Operasional Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

Risiko keuangan utama Perusahaan dan entitas anak adalah pada risiko pasar (termasuk risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan dan entitas anak menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

**i. Manajemen risiko tingkat suku bunga**

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko arus kas tingkat suku bunga. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap dan yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar melalui laba rugi atau dimiliki untuk dijual, sehingga eksposur atas risiko tingkat suku bunga tidak timbul untuk instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap dan yang tidak dikenakan bunga karena perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki dampak terhadap laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

**Profil suku bunga**

Profil tingkat suku bunga Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga atas aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

*In performing the risk management, the Company and its subsidiary have established a guidance in the form of Risk Management Operational Manual. This manual provides guidance to managed harmonization between business operational function and financial risk management.*

*The main financial risks of the Company and its subsidiary are market risk (including interest rate risk) credit risk and liquidity risk. The management evaluate and established policies for managing each of these risks. The Company and its subsidiary applies the financial risk management policies to minimize the impact of the unpredictability of financial risk on the Company and its subsidiary financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:*

**i. Interest rate risk management**

*The Company and its subsidiary have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rate are exposed to interest rate risk. The Company and its subsidiary manage the risk by maintaining the appropriate fixed and floating rate financial instruments.*

*The Company and its subsidiary do not classify any fixed rate and non-interest bearing financial instruments as at fair value through profit or loss or available-for-sale, as such exposure to interest rate risk does not arise for fixed rate and non-interest bearing financial instruments since a change in interest rate would not affect profit or loss and other comprehensive income.*

**Interest rate profile**

*The interest rate profile of the Company and its subsidiary's financial assets and liabilities is as follows:*

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2019					
	Tingkat bunga <i>Mengambang/ Floating rate</i>	Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Aset keuangan lancar</b>					
Kas dan setara kas	304,502	--	1,096	305,598	<b>Current financial assets</b> Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	59,039	--	--	59,039	Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	--	--	400,621	400,621	Related parties
Pihak ketiga	--	--	335	335	Third parties
Piutang lain-lain	--	--	4,465	4,465	Other receivables
<b>Jumlah</b>	<b>363,541</b>	<b>--</b>	<b>406,517</b>	<b>770,056</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan lancar</b>					
Utang usaha					<b>Current financial liabilities</b> Trade payables
Pihak berelasi	--	--	420	420	Related parties
Pihak ketiga	--	--	28,126	28,126	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	--	--	1,604	1,604	Related parties
Pihak ketiga	--	--	1,381	1,381	Third parties
Biaya masih harus dibayar	--	--	55,347	55,347	Accrued expense
<b>Jumlah</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>86,878</b>	<b>86,878</b>	<b>Total</b>
2018					
	Tingkat bunga <i>Mengambang/ Floating rate</i>	Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Aset keuangan lancar</b>					
Kas dan setara kas	382,587	--	958	383,545	<b>Current financial assets</b> Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	55,569	--	--	55,569	Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	--	--	218,482	218,482	Related parties
Pihak ketiga	--	--	20	20	Third parties
Piutang lain-lain	--	--	14,344	14,344	Other receivables
<b>Jumlah</b>	<b>438,156</b>	<b>--</b>	<b>233,804</b>	<b>671,960</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas keuangan lancar</b>					
Utang usaha					<b>Current financial liabilities</b> Trade payables
Pihak berelasi	--	--	1,492	1,492	Related parties
Pihak ketiga	--	--	18,832	18,832	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	--	--	13,343	13,343	Related parties
Pihak ketiga	--	--	8,686	8,686	Third parties
Biaya masih harus dibayar	--	--	44,694	44,694	Accrued expense
<b>Jumlah</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87,047</b>	<b>87,047</b>	<b>Total</b>

**Sensitivitas tingkat suku bunga**

Analisis sensitivitas berikut telah Ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan seluruh variabel lain Dianggap konstan. Kenaikan dan

**Interest rate sensitivity**

The sensitivity analysis below have been determined based on the Company and its subsidiary's exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis point increase or decrease represents the

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika tingkat suku bunga pada tanggal tersebut mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan akan lebih tinggi Rp37. Sebaliknya jika tingkat suku bunga mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan akan lebih rendah Rp37.

**ii. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai Perusahaan yang melayani infrastruktur publik, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kolektibilitas piutang, misalnya penerapan kebijakan kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap satu atau kelompok pelanggan tertentu yang mempunyai karakteristik yang sama.

*management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.*

*As of December 31, 2019, if the interest rate at that time had increased by 50 basis points, with all other variables constant, the income for the year increase by Rp37. Otherwise if the interest rate decreased by 50 basis points, with all other variables constant, the income for the year would decrease by Rp37.*

**ii. Credit risk management**

*Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations, resulting in a loss to the Company and its subsidiary. As a public infrastructure company, the Company and its subsidiary are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimising the risk of uncollectible receivables, the Company and its subsidiary will mitigated by the management through a series of actions to improve receivables collection, such as implementing a credit policy. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiary maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.*

*The carrying amounts of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for impairment losses represents the Company and its subsidiary's exposure to credit risk.*

*The Company and its subsidiary do not have significant credit risk exposure to any single or group of customers that having similar characteristics.*



**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**iii. Manajemen risiko likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan dan entitas anak.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Tanggal jatuh tempo kontraktual didasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar.

**iii. Liquidity risk management**

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiary will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiary's funding and liquidity management requirements.

The following table details the Company and its subsidiary's remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2019 and 2018. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiary are required to pay. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company and its subsidiary may be required to pay.

	2019					Jumlah/ Total Rp	
	Dalam satu tahun/ <i>Within</i> one year Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ <i>Over one</i> <i>year but not</i> <i>longer than</i> <i>three years</i> Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over three</i> <i>year but not</i> <i>longer than</i> <i>five years</i> Rp	Lebih dari lima tahun/ <i>Over</i> five years Rp	Lebih dari lima tahun/ <i>Over</i> five years Rp		
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang usaha							Trade payables
Pihak berelasi	420	--	--	--	--	420	Related parties
Pihak ketiga	28,126	--	--	--	--	28,126	Third parties
Utang lain-lain							Other payables
Pihak berelasi	1,604	--	--	--	--	1,604	Related parties
Pihak ketiga	1,381	--	--	--	--	1,381	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	55,347	--	--	--	--	55,347	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>86,879</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>86,879</b>	<b>Total</b>

**PT HALEYORA POWER  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT HALEYORA POWER  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2019 and 2018  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				Jumlah/ Total Rp	
	Dalam satu tahun/ <i>Within</i> one year Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ <i>Over one year but not longer than three years</i> Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over three year but not longer than five years</i> Rp	Lebih dari lima tahun/ <i>Over</i> five years Rp		
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	1,492	--	--	--	1,492	Related parties
Pihak ketiga	18,832	--	--	--	18,832	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	13,343			--	13,343	Related parties
Pihak ketiga	8,686			--	8,686	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	44,694	--	--	--	44,694	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>87,048</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87,048</b>	<b>Total</b>

**d. Nilai wajar instrumen keuangan**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar.

**d. Fair value of financial instruments**

The management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market interest rate.

**27. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 56 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020.

**27. Managements Responsibility and Approval of Consolidated Financial Statements**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 56 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issuance on March 16, 2020.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

This page is intentionally left blank



# 2019

Laporan Tahunan  
Annual Report

## Transformasi Haleyora Power 2.0 dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0

Haleyora Power Transformation 2.0  
in Embracing Industrial Revolution 4.0



### PT HALEYORA POWER

**Kantor Pusat**/Head Office

Kindo Square, Blok A15-A16

Jl. Duren Tiga Raya No. 101

Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan

Tel. : (021) 7919 2517

Fax. : (021) 7919 2516

E-mail : [kontak@haleyorapower.co.id](mailto:kontak@haleyorapower.co.id)

[www.haleyorapower.co.id](http://www.haleyorapower.co.id)